Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy

POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik

Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy

POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik

Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy

POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik

PENJURU
ILMU

Buku karya Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy ini tentang Politik Islam di Indonesia. Hadir di waktu yang sangat tepat. Di era demokratisasi—dalam situasi *low trust politic* dan *low trust society*—masyarakat terbelah karena pemahaman yang kurang tentang preferensi politik yang menggunakan identitas Islam. Dalam penyelenggaraan negara yang sarat dengan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya, maka identitas agama, dalam hal ini agama Islam, menjadi tak terelakkan sebagai saluran perjuangan mencari keadilan bagi warga negara. Dalam *Islamic teaching* tidak memisahkan antara negara dan agama, atau konsep pemisahan *state* and *church* seperti dalam pemikiran politik barat. Buku ini hadir membedah situasi tersebut secara kritis untuk memberikan konstribusi pada kontestasi terhadap dominasi pemikiran Islamofobia dewasa ini. Dengan demikian buku ini memberikan perspektif alternatif yang memperkaya diskursus politik demokrasi dewasa ini. Buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca sebagai referensi di Indonesia—yang penduduknya mayoritas Muslim—untuk pembelajaran seluruh anak bangsa di masa mendatang.

Chusnul Mar'iyah, Ph.D.

Dosen Ilmu Politik UI, 1982– sekarang; anggota Komisi Pemilihan Umum (2002–2007)

Buku ini sangat penting dibaca oleh akademisi, politisi, dan juga msyarakat umum. Sebagai hasil refleksi dan perenungan yang mendalam terhadap realitas agama, sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Penulis secara konsisten menyoal hubungan Islam dan Politik di masa pemerintahan Jokowi. Ada kesan bahwa Islam tidak begitu mendapat tempat di pentas politik nasional. Terbuka ruang diskusi yang sangat luas untuk menjustifikasi atau menolak fenomena tersebut.

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A.

Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI

Politik Islam Era Jokowi, Judul buku yang ditulis oleh Saudara Ma'mun Murod Al-Barbasy sudah bisa ditarik alur benang merahnya. Ada dua sisi yang berbeda, keduanya tidak akan bertemu. (Politik) Islam secara ideal ingin mewarnai semua proses politik dengan nilai etika moral agama. Sebaliknya, Jokowi menginginkan politik harus terpisah dari agama.

Kebijakan politik sekularis Jokowi tidak hanya memperlemah potensi kekuatan politik (Islam), tetapi juga masyarakat yang kritis terhadap kebijakannya. Islam dan umat Muslim yang seharusnya dirangkul dalam pembangunan bangsa dan negara dijadikan momok yang ditakuti, karenanya harus dilemahkan. Berbagai ragam *stereotyping* dimanfaatkan untuk memperlemah potensi kekuatan umat. Politik belah bambu dijalankan, satu diangkat yang lain diinjak.

Dalam alur narasi di atas itulah buku Ma'mun ini berbicara. Terurai dalam topik yang beragam, semuanya menggambarkan konteks waktu peristiwa itu terjadi. Subyektifitas bahasa dalam mengungkap setiap peristiwa adalah berdasarkan fakta yang ia rasakan. Ma'mun sendiri tidak ingin dikelompokkan ke dalam *silent majority* yang tidak menunjukkan reaksi terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat banyak akibat yang timbul dari kebijakan pemerintah. Ma'mun telah menunjukkan kecendekiawanannya dalam melihat persoalan yang harus diatasinya, meskipun hanya melalui tulisan. Karena memang ia tidak memiliki kekuasaan.

Prof. Dr. Achmad Jainuri, M.A.
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Buku yang ditulis Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy ini cukup kritis memotret realitas politik Islam di era Jokowi. Penulisnya mampu menyelami perasaan politik umat Islam yang di era rezim ini terasa disudutkan

dengan tuduhan yang tak semestinya, seperti radikal, intoleran, antikebhinnekaan dll.

Saya mengalami hidup di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Memang terasa umat Islam selalu menjadi sasaran kezaliman dan fitnah. Tapi rasanya di era Reformasi saat ini yang paling parah.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.
Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Dewan Penasihat PP IPIM

Keluar dari sebuah kelaziman. Inilah yang digunakan oleh Jokowi dalam membangun Indonesia. Politik kekuasaan semestinya dipakai oleh pemimpin karena niat baik tapi dengan strategi politik yang lemah, akan hancur dengan niat jelek tetapi strategi politiknya kuat. Buku yang ditulis Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy ini memaparkan tentang politik Islam di negeri ini. Tahniah.

Yusnar Yusuf, MS. Ph.D.
Wakil Ketua MUI Pusat dan Ketua Umum PB Al-Washliyah

Ada agenda tersembunyi yang merupakan "pesanan oligarki" yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh dalam rezim Jokowi, yakni memisahkan Islam dengan politik. Dalam perjalanannya di era Jokowi sangat terlihat secara kasat mata politik Islam diisolir bahkan diamputasi. Jika ingin memisahkan politik dengan Islam, maka sama halnya memisahkan gula dengan manisnya, demikian Buya Muhammad Natsir menegaskan. Ketidakharmonisan umat Islam dengan Pemerintah Jokowi disebabkan karena Jokowi tak dapat membaca anatomi dan senyawa aspirasi dari umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Buku bertajuk Politik Islam Era Jokowi karya monumental Adinda

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy sangat layak untuk dibaca sebagai penambah wawasan politik kita di Indonesia dengan panduan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin.

Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si.
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Pengantar Penerbit

Diskusi mengenai hubungan agama Islam dengan negara (politik) masih akan terus menarik untuk diperbincangkan. Salah satunya adalah fase ketika terjadi perubahan paradigma dikotomis antara Islam dan politik modern di kalangan para sarjana Barat. Saat itu mereka mulai menyadari keberadaan negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas masyarakatnya Muslim dapat menerapkan sistem politik modern. Indonesia khususnya, fenomena reformasi sistem politik pada 1998 sampai awal 2000-an yang lebih condong pada asas-asas demokrasi Barat menjadi magnet khazanah penelitian baru tentang hubungan Islam dan politik.

Ruang terbuka legal yang dijanjikan sistem pemerintahan demokrasi era Reformasi telah memungkinkan banyak pihak dapat "menjual" ideologi-ideologi politik mereka, termasuk politik Islam dengan berbagai latar aliran. Kontestasi politik semacam ini merupakan hal lumrah, bahkan menjadi ajang untuk proses mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Namun, apabila tensi kontestasi ini secara praktik malah dimanfaatkan elite-elite politik untuk mencapai kekuasaan

dengan mengkomodifikasi agama, maka yang terjadi adalah pembodohan masyarakat.

Kondisi di atas adalah satu masalah mengenai posisi agama dalam berpolitik yang diangkat oleh Ma'mun Murod Al-Barbasy dalam buku ini. Ia melihat bahwa Indonesia hari ini tengah diliputi nuansa ketegangan ideologi yang disikapi pemerintah secara tidak berimbang. Joko Widodo sebagai presiden, baginya, tampak lebih garang dalam menindak kelompok-kelompok berideologi salafisme ketimbang paham liberalisme ekonomi yang memicu eksploitasi sumber daya besar-besar negeri ini. Buku *Politik Islam Era Jokowi* ini, selain dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, juga dapat menjadi salah satu representasi pemikiran tentang hubungan Islam dan negara.

Alhamdulillah, kini buku ini telah terbit dan siap memperluas cakrawala pengetahuan kita soal dinamika politik Tanah Air. Atas terbitnya buku ini, kami perlu mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. *Pertama*, kepada Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, selaku penulis, yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami dan senantiasa mendampingi proses penerbitannya. *Kedua*, kepada Chusnul Mar'iyah, Ph.D.; Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A.; Prof. Dr. Achmad Jainuri, M.A.; dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A. yang telah menyumbang endorsement dalam buku ini. *Ketiga*, kami ingin berterima kasih kepada Anda sekalian, para pembaca yang budiman, yang tengah bersiap menerima pencerahan dari buku ini.

Harapan kami, buku ini dapat memberikan wawasan yang baik dan menjadi sarana berkaca diri bagi kita semua. Dan semogalah penerbitan ini dapat terhitung sebagai amal saleh yang membaca kebaikan di dunia mauoun akhirat. Selamat membaca! •

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat!

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, buku berjudul *Politik Islam Era Jokowi: Himpitan Islamophobia dan Oligarki Politik* akhirnya berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan dari banyak tulisan dalam lima tahun terakhir yang telah disortir atau dipilah dan dipandang masih relevan sesuai dengan judul besar buku ini.

Dalam buku ini digunakan istilah *politik Islam*. Penggunaan *politik Islam* dan bukan *Islam politik* tentu karena keduanya memang mempunyai makna yang berbeda, meskipun tidak mudah untuk membedakannya. Ketidakmudahan ini kalau merujuk pada realitas politik Islam periode awal, periode Rasulullah Muhammad SAW. memang sangat bisa dipahami. Sejak awal posisi Muhammad SAW. memegang kendali dua peran, di mana di samping sebagai pembawa risalah Allah (Rasulullah) yang memimpin dan mengarahkan umat, juga sebagai pemimpin politik (negara).

Dua jabatan yang disandang Muhammad SAW. ini menyebabkan kita tidak cukup mudah untuk membedakan antara *politik Islam* dengan *Islam politik*. Sebagai pemimpin umat dan sekaligus pemimpin negara Madinah—berangkat

dari teori negara, Madinah saat itu memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara. Jadi tidak usah memperdebatkan apakah Muhammad SAW. menggunakan term negara atau tidak untuk menyebut Madinah—Muhammad SAW. sebenarnya menjalankan dua peran sekaligus: politik Islam dan Islam politik.

Meskipun tidak mudah dibedakan, setidaknya masih dapat dipilah mana yang masuk kategori sebagai *politik Islam* dan *Islam politik*. Hal yang disebut pertama lebih dimaknai bagaimana nilai-nilai Islam, yang semestinya ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam politik Islam, seperti keadilan, *(al-'adalah)*, kebebasan *(al-huriyah)*, persamaan *(al-musawah)*, permusyawaratan *(al-syura)*. Ini artinya perjuangan politik Islam tidak selalu harus bersifat formalistik dan berbentuk partai politik. Kalau pun harus mendirikan partai politik, kehadirannya harus dipastikan hanya dimaksudnya untuk mengawal hadirnya nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara yang disebut kedua lebih menggambarkan entitas politik tertentu, yang cenderung berwajah formalistik dengan mengusung simbol-simbol Islam untuk menggapai kekuasaan politik, dan dalam batas tertentu—dapat pula ditambahkan—yang mencoba melakukan formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara.

Dalam bahasa sedikit berbeda, Bassam Tibi dalam *Islamism and Islam*, membedakan antara Islam dan Islamisme. Di mana yang disebut pertama disebutnya sebagai agama, sebuah keyakinan religius. Sementara Islamisme adalah tafsir politis keagamaan yang diturunkan dari konstruksi ideologi Islam. Dalam karyanya ini, Tibi secara tegas membedakan antara Islam dan Islamisme.

Islam dalam pengertian *politik Islam*, niscaya memperjuangkan dan melakukan pembelaaan kepada siapapun yang tertindas, baik secara politik, ekonomi, hukum atau bentuk penindasan lainnya. Sementara *Islam politik*—dalam kenyataannya—mempunyai kecenderungan untuk menggunakan simbol-simbol Islam demi kepentingan kekuasaan semata. Dan seringkali aksi-aksi Islam politik bersifat sangat pragmatis dan cenderung terkesan sekadar memuaskan hasrat dan ambisi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kenyataan ini setidaknya sangat dirasakan sejak berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Poin ini merupakan kritik yang sangat serius terhadap sepak terjang Islam politik di Indonesia.

Dalam banyak hal, keberadaan Islam politik baru sebatas hasrat dan ambisi untuk meraih kekuasaan. Namun selepas kekuasaan diraih tak juga terlihat ada keseriusan untuk menghadirkan nilai-nilai politik Islam, sehingga kesan atau kritik keseluruhan atas Islam politik yang cenderung hanya menjadikan Islam sebagai komoditas politik tak terlalu berlebihan.

Dalam kasus RUU Minerba—yang belum lama ditetapkan menjadi UU—yang jelas dan tegas bertentangan dengan nilai-nilai dan spirit Islam, bisa disetujui dengan mudah oleh semua Fraksi di DPR, tentu termasuk di dalamnya fraksi yang mengusung simbol Islam. Belum lagi terlihat betapa sulitnya DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja—yang diyakini di antaranya akan menzalimi dan merugikan kaum buruh—semakin menegaskan ketakutuhan dan ketakseriusan partai-partai Islam dan berbasis massa Islam dalam menghadirkan produk-produk perundang-undangan yang senafas dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks politik praktis, tampak sekali nilai-nilai Islam dipahami secara parsial. Ketika membahas RUU

Haluan Ideologi Pancasila (HIP), wajah keberpihakan mereka terhadap kepentingan politik umat Islam terlihat jelas, namun ketika membahas RUU yang sejatinya banyak menabrak dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja, mereka justru bersekongkol dengan partai-partai lain yang tak mengusung simbol-simbol Islam untuk menggolkannya.

Sebaliknya yang berjuang menolak RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja justru mereka yang tak ada sangkutpautnya dengan Islam politik. Muhammadiyah dan banyak kelompok Islam dan *civil society* lainnya secara tegas menolak dua RUU yang pro dan diyakini akan semakin memperkuat rongrongan dari para oligark-oligark politik dan ekonomi di Indonesia. Dan pembahasan UU Minerba dan RUU Cipta Kerja ini hanya mempertegas perbedaan antara perjuangan politik Islam dengan Islam politik.

Mengkritisi posisi politik Islam di era Joko Widodo (Jokowi), kita mendapati kecenderungan yang berbeda terkait relasi Islam dan negara. Kecenderungan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, hanya saja di era Jokowi tensinya semakin menguat dan polanya juga sedikit berbeda bila dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya.

Kecenderungan tersebut berkenaan dengan jargonisasi Pancasila. Di era Orde Lama, selepas Pancasila disepakati sebagai falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara, jargonisasi atas Pancasila tidak menonjol, bahkan bisa dikatakan tidak terjadi. Orde Lama hanya menekankan pentingnya masing-masing organisasi masyarakat dan partai politik untuk mau menerima dan mempertahankan Pancasila dan bukan dijadikan sebagai slogan atau jargon, apalagi menjadikannya sebagai asas tunggal yang mesti dituangkan secara tekstual

pula di dalam setiap Anggaran Dasar ormas atau parpol. Sehingga, ormas dan parpol yang ada pada masa Orde Lama asasnya tetap sebagaimana ketika ormas atau parpol itu berdiri. Partai Katolik misalnya berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa pada umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut asas-asas Katolik. Begitu juga Parkindo berasaskan faham kekristenan. Ormas Islam dan partai Islam lainnya berasaskan Islam dan PNI tetap berasaskan pada Marhaenisme.

Sementara di era Orde Baru selain terjadi jargonisasi juga terjadi ideologisasi Pancasila. Sikap Orde Baru ini merupakan *impact* panjang dari relasi Islam dan negara yang cenderung menampakkan wajahnya yang antagonistik. Pancasila dipaksakan menjadi asas tunggal dalam kehidupan bernegara. Keputusan ini ditandai dengan keluarnya "paket undang-undang politik" yang dua di antaranya adalah UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU Nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang isinya di antaranya menegaskan keharusan parpol maupun semua jenis ormas untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasar organisasinya.

Di era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, isu-isu terkait dengan Pancasila tak muncul secara berlebihan dan apalagi sampai dijadikan sebagai alat negara untuk menindak kelompok-kelompok yang kritis kepada negara (baca: pemerintah).

Sejak era Soekarno sampai SBY juga tak ada upaya serius dan demonstratif dari negara untuk membenturkan *society* versus *society* dengan dalih Pancasila. Memang terjadi ketegangan ideologis di era Soekarno terkait DI/TII dan PRRI/Permesta dan ketegangan politik di saat penerapan Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Terjadi ketegangan ideologis di era

Orde Baru antara kelompok Islam dengan negara di awal 1970-an hingga paruh 1980-an seiring keluarnya beberapa kebijakan politik yang sulit dilepaskan dari dugaan adanya depolitisasi umat Islam yang ditandai dengan misalnya keluarnya kebijakan politik berupa penyederhanaan partai politik dan deideologisasi partai Islam, kebijakan P4, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Aliran Kepercayaan, dan kebijakan asas tunggal Pancasila. Namun ketegangan-ketegangan politik dan ideologis tersebut, *scope*-nya lebih banyak hanya bersifat vertikal antara *state* versus *society*.

Sebaliknya, di era Jokowi sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini selalu muncul ketegangan ideologis. Bukan hanya bersifat vertikal antara *state* versus *society*, tapi juga—dan ini lebih sering terjadi—antara *society* vesus *society*. Pancasila dijadikan sebagai instrumen pecah-belah masyarakat dan umat Islam, menghadapkan kelompok sekuler dengan kelompok Islam, bahkan menghadapkan kelompok Islam satu dengan lainnya.

Terkait keberadaan organisasi dan ideologi transnasional juga selalu disematkan kepada Islam, sebut saja misalnya HTI dan Salafi serta dalam beberapa hal FPI yang kerap disebutnya sebagai radikal. Isu yang sama tak pernah disematkan secara serius kepada ideologi transnasional lainnya seperti liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang nyata-nyata hadir secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya soal penyematan, penyikapan negara dan sebagian kelompok masyarakat atas organisasi dan ideologi transnasional seperti HTI dan Salafi juga terlalu berlebihan dan dibesar-besarkan. HTI misalnya bukan muncul di era Jokowi, tapi di era sebelumnya, tepatnya pasca Orde Baru. Dan gerakan Salafi bahkan sudah lebih dulu hadir.

Isu khilafah dan syariat Islam disikapi secara berlebihan.

Dalam salah satu tulisan terkait dengan HTI yang juga dibuat dalam buku ini, saya katakan bahwa meski HTI bercita-cita mendirikan negara khilafah, namun kalau melihatnya dengan nalar yang jernih, sejatinya tak ada satu pun celah atau pintu dalam sistem politik Indonesia yang bisa menjadi pintu masuk bagi HTI untuk mendirikan negara khilafah.

Bagaimana mungkin HTI akan mengubah Indonesia menjadi negara khilafah ketika Indonesia sudah tegas bersepakat menjadikan demokrasi sebagai *rule of game*. Sementara HTI justru tegas menyatakan demokrasi sebagai sistem *kufur*, termasuk menolak keberadaan partai politik sebagai produknya, seperti tergambar dalam karya Amir Hizbut Tahrir (1977–2003) Abdul Qadim Zallum, *ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr: Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Dakwatu Ilaiha*. Pandangan ini kontras dengan demokrasi yang tegas menjadikan partai politik dan pemilu sebagai instrumen politik paling penting yang digunakan dalam proses pergantian kepemimpinan.

Artinya, untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, HTI harus beradaptasi dengan sistem politik Indonesia. Caranya, HTI harus mau menerima demokrasi sebagai sistem politik, tak bisa lagi dianggap sebagai sistem kufur, meski di dalamnya terdapat banyak titik kelemahan. Selain itu, "kelamin politik" HTI juga harus jelas, dengan bersedia mengubah diri menjadi partai politik. Bukan sekadar namanya Hizbut Tahrir yang kalau diartikan bisa berarti "Partai Pembebasan". Lebih dari itu, HTI juga harus mau menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi HTI harus mau menjadi partai, dan menerima demokrasi dan Pancasila. Sementara tiga hal ini pula yang selama ini menjadi prinsip dasar perjuangan HTI. Dan untuk mengubah tiga hal prinsip ini tentu bukan

perkara mudah bagi HTI. Kalau HTI tidak mau mengubahnya, maka sulit bagi HTI untuk memulai mewujudkan impiannya mendirikan negara khilafah.

Sampai di sini saja sudah terbayang betapa sulitnya mencari pintu masuk bagi HTI untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Dengan prinsip dasar politiknya, hampir-hampir sulit bagi HTI untuk berputar haluan dengan menerima demokrasi dan mendirikan partai politik. Bahkan andaikan HTI mau "menggadaikan" diri dengan ber-*taqiyah* dan bersepakat beradaptasi dengan sistem yang ada pun belum tentu juga niat mengubah Indonesia menjadi negara khilafah akan terwujud.

Begitupun terkait dengan syariat Islam. Seolah negeri ini tak pernah menerapkan syariat Islam. Padahal dalam kurun waktu yang cukup lama, Indonesia tempo doeloe (namanya tentu belum Indonesia), tepatnya di era kerajaan Islam pernah diterapkan syariat Islam secara formal di lingkup kerajaan-kerajaan Islam.

Saat menjelang kemerdekaan, terjadi perdebatan terkait relasi Islam dan politik. Kelompok Islam menghendaki Indonesia merdeka menjadi negara Islam. Sementara kelompok nasionalis menghendaki negara sekuler. Perdebatan panjang dan melelahkan ini membawa pada kesepakatan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang menegaskan. Kemudian *gentleman agreement* ini mengalami "amandemen" pada 18 Agustus 1945. Perubahan *gentleman agreement* ini menegaskan sikap kelompok Islam yang akomodatif, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam bermusyawarah dan bernegara.

Bahkan ketika persidangan di Konstituante, kelompok Islam juga mengalami kekecewaan lantaran pembahasan UUD 1945 yang hanya tinggal 10 persen "dibubarkan" seiring dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Umat Islam sedikit

terhibur karena isi Dekret ini di dalamnya masih menyebutkan: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut". Sejak itu posisi UUD 1945, termasuk di dalamnya yang berisikan pasal-pasal yang berkenaan dengan agama tak mengalami perubahan, meski sempat terjadi amandemen pada awal-awal Reformasi.

Bagi kelompok yang tak menghendaki formalisasi Islam (dalam perkembangannya kelompok ini juga dihuni kelompok Islam yang leluhurnya dulu serius memperjuangan negara Islam) berargumen bahwa formalisasi Islam itu sama halnya mengangkangi kemajemukan Indonesia. Argumen lainnya, dalam Islam juga tak dikenal konsep tentang negara. Islam hanya menawarkan nilai-nilainya saja, seperti keadilan, kesamaan, kebebasan, dan semua yang termasuk ke dalam rumusan *maqasyid al-syariah*. Nilai-nilai Islam inilah yang harus diperjuangkan secara serius dalam konteks bernegara. Itulah kira-kira argumentasinya.

Tentu saja saya sangat bersepakat dengan argumentasi ini. Hanya saja argumen tersebut menjadi *absurd*, ketika semangat mereka untuk menolak formalisasi Islam itu tidak sebanding dengan upayanya untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang menjadi argumentasi mereka.

Hingga kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, nilai-nilai Islam bukan tambah menguat tapi sebaliknya semakin kabur. Mentalitas kebanyakan para penyelenggara negara seperti orang yang tak beragama. Agama sebatas formalitas di Kartu Penduduk. Agama diposisikan *bak* candu yang meninabobokan. Impact mentalitas yang seperti ini telah mengakibatkan lahirnya banyak produk perundang-undangan dan kebijakan negara lainnya terlalu sering

mengabaikan nilai-nilai Islam. Argumen yang menggebu-gebu untuk menolak negara Islam dan lebih memilih menghadirkan nilai-nilai Islam hanya tinggal argumentasi. Tak terlihat ada keseriusan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam. Yang terjadi bukan hanya formalisasi Islam yang ditolak, tapi nilai-nilai Islam pun bahkan sedikit demi sedikit mulai ditolaknya.

Negara Pancasila yang kerap disebut sebagai "negara agamis" (bukan negara agama), "jalan tengah" *(wasathiyah)* hanya tinggal status. Pancasila hanya tinggal sila-silanya. Pancasila sebatas menjadi jargon yang *absurd*. Bahkan di era Jokowi Pancasila menjadi jargon untuk memecah belah sesama antar-anak bangsa.

Percayalah, kalau bentuk "negara ideal" ini dikelola dengan cara-cara yang bukan saja bertabrakan dengan nilai-nilai Islam, tapi juga bertentangan dengan Pancasila dan bahkan dikelola dengan sangat ugal-ugalan, maka dengan berkaca pada kehancuran negara-negara besar, tak mustahil Indonesia pun akan mengalami nasib serupa. Pancasila sebagai "negara konsensus dan persaksian" *(dar al-'ahd wa al-shahadah)* atau "negara perjanjian" *(dar al-mitsaq)* akan berakhir dan akan lahir *dar al-'ahd wa al-shahadah* atau *dar al-mitsaq* lainnya, yang bisa mengarah kepada dua kemungkinan ekstrem, yaitu kembali ke era kerajaan Islam, namun juga bisa sebaliknya, mengarahnya pada terbentuknya negara sekuler. Dan menilik kecenderungan yang terjadi belakangan, sangat mungkin pilihan kedua yang akan menjadi kenyataan.

Tanda-tandanya cukup jelas, yang tergambar dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila nyaris tak hadir. Yang hadir dan bahkan sangat menonjol justru kehidupan yang semakin sekuler, politik dan ekonomi yang sangat liberal, hukum yang semakin jauh dari semangatnya

untuk menghadirkan keadilan di masyarakat. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Paparan di atas setidaknya menegaskan bahwa ada yang berbeda terkait dengan posisi dan keberadaan politik Islam di era Jokowi. Dan buku yang ada di tangan pembaca ini menyoroti secara kritis kehidupan politik kebangsaan, kenegaraan, tentu saja termasuk mengkritisi posisi politik Islam di era Jokowi. Sebagai buku yang berisikan kumpulan tulisan, tentu saja jangan mengharapkan isinya sebagaimana buku-buku ilmiah yang diproduk dari hasil penulisan tesis atau disertasi. Meskipun demikian, agar isinya "terkesan" ilmiah, maka sistematika penulisan buku ini dipilah dalam beberapa bagian yang masing-masing bagian berisi tulisan-tulisan yang mempunyai kesamaan tema dan pesan tulisan.

Buku ini berisikan lima bagian. Bagian pertama berjudul "Bangkitnya kesadaran politik umat", yang berisikan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan kebangkitan politik umat Islam, politisasi agama, aksi damai umat Islam, dan gugatan terhadap negara dalam penanganan tindak kejahatan terorisme yang dinilai sarat dengan upaya membangun stigma negatif terhadap umat Islam. Umat Islam seolah identik dengan terorisme. Sementara identitas terorisme tak pernah disematkan kepada kelompok agama lain meskipun terang-terangan melakukan tindakan teror.

Bagian kedua berjudul "Musuh Pancasila, Demokrasi, dan Sekularisme." Bagian ini berisi tulisan-tulisan yang mengkritisi praktik demokrasi di Indonesia, jargonisasi Pancasila dan NKRI yang sangat *absurd*. Juga mengkritisi sekularisasi dan liberalisasi politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Bagian ketiga berjudul "Muhammadiyah, NU, dan Politik Islam Indonesia." Bagian ini berisi "gugatan" terhadap peran politik kebangsaan Muhammadiyah dan NU. Dua ormas besar

ini selalu diposisikan sebagai representasi Islam wasathiyah, namun peran politik kebangsaannya belakangan dinilai gagal dalam membendung kelompok yang dinilai sebagai ekstrem *(tatharruf)*. Bagian ini juga mengkritisi relasi dan ukhuwah Muhammadiyah dan NU.

Bagian keempat berjudul "Amien Rais dan Dinamika Politik PAN." Bagian ini secara khusus membahas seputar Amien Rais dan PAN. Pertimbangannya sederhana. Di antara partai-partai, terlebih yang lahir di era Reformasi, hanya PAN yang belum mampu dipecahbelah dan "diacak-acak" penguasa. Namun di era Jokowi, PAN berhasil dipecahbelah. Kongres PAN 2020 pun berlangsung kisruh. Bagi yang *mafhum* politik Indonesia era Jokowi, kisruhnya pelaksanaan Kongres PAN 2020 itu tidak berdiri sendiri. Ada *invisible hand* yang berkeliaran sebelum dan saat berlangsung Kongres PAN.

Sebelumnya, saat Pemilu 2019, 8 kursi DPR RI PAN dari seluruh Dapil di Jawa Tengah hasil Pemilu 2014 berhasil "dihabisi." PAN tak satu pun memperoleh kursi. Kalau hilang 2 sampai 4 kursi mungkin masih bisa dipahami, tapi ketika "dinolkan" sulit rasanya untuk tidak menyebut adanya intervensi atas hilangnya keseluruhan kursi PAN untuk DPR RI dari Dapil Jawa Tengah.

Bukan hanya PAN, pribadi Amien Rais pun menjadi sasaran tembak rezim yang berkuasa. Info yang saya terima, "pengosongan" kursi PAN dari Jawa Tengah sasaran tembaknya adalah Amien Rais. Selanjutnya, masih ingat kasus Ratna Sarumpaet? Di antara tokoh-tokoh nasional yang "keseleo lidah" karena empati terhadap pernyataan Ratna, hanya Amien Rais yang "dipermainkan" oleh penguasa. Hanya Amien Rais dintergogasi oleh kepolisian.

Bagian kelima berjudul "Pilpres 2019 dan Benang Kusut

Politik Indonesia." Bagian ini menyoroti secara mendalam terkait Pilpres 2019 yang sulit untuk tidak menyebut sebagai pilpres paling curang. Kecurangan yang disebutnya sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Menyoroti juga soal tuduhan makar terhadap siapapun yang bersikap kritis kepada negara. Juga membahas tentang "partai ternak" yang terbukti membahayakan bangunan demokrasi di Indonesia.

Selesainya penulisan buku ini, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak. *Pertama*, tentu kepada Prof. M. Din Syamsuddin, M.A., Ph.D.; Prof. Dr. Achmad Jainuri, M.A.; Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.; Prof. Achmad Jainuri, M.A., Ph.D.; Chusnul Mar'iyah, Ph.D.; Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A.; Yusnar Yusuf, MS. Ph.D.; dan Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si. yang berkenan memberikan endorsement untuk buku ini. *Kedua*, ucapan terima kasih kepada media-media, baik media cetak maupun media online, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang berkenan memuat tulisan-tulisan saya di kolom opininya. *Ketiga*, terima kasih kepada Penerbit Penjuru Ilmu yang berkenan menerbitkan buku ini. Juga terima kasih kepada Mas Adit dan Mas Rofie.

Akhirnya dengan selalu mengharap ridha Allah SWT., saya persembahkan karya yang sederhana ini, semoga ada guna dan manfaat bagi yang membacanya. Sebagai insan yang *dhaif*, tentu saya selalu bersedia menerima segala masukan dan kritik terkait dengan karya ini. Terima kasih. *Fastabiqu al-Khairat, Wallahu al-Musta'an.*

Depok, September 2020
MMA

Daftar Isi

Bagian II
Musuh Pancasila, Demokrasi, dan Sekularisme —67

Bagian III
Muhammadiyah, NU, dan Politik Islam Indonesia —123

Bagian I

Bangkitnya Kesadaran Politik Umat

Politisasi Agama, Apanya yang Salah?

Setelah hampir dua dasawarsa pasca-Serangan 11 September 2011, radikalisme menjadi tema sentral kampanye untuk menyudutkan (umat) Islam, dalam beberapa tahun belakangan kita disuguhkan bentuk kampanye serupa, kampanye "politisasi agama". Oleh karena ini terjadi di Indonesia, maka kata "agama" sudah pasti dinisbatkan kepada Islam. Politisasi agama mulai menjadi tema sentral kampanye stigmatisasi terhadap Islam.

Kampanye ini berlangsung rapi dan sistematis. Semua lini, mulai dari media sosial, media massa, atau sampai pada pelibatan oknum-oknum pejabat yang terjangkit *Islamofobia* bekerja kompak mengampanyekan politisasi agama. Mereka memberikan label negatif kepada umat Islam dan menuduhnya telah melakukan politisasi agama dengan "melacurkan" dan memperalat agama untuk kepentingan politik tertentu, memecah belah umat, dan stigma negatif lainnya.

Politisasi Agama dalam Teks dan Sejarah

Kalau mengkaji teks dan sejarah politik Islam, politisasi agama sebenarnya lazim dilakukan, bukan sesuatu yang aneh dan perlu dipersalahkan. Islam itu "agama politik". Kelahirannya sarat dan bahkan dominan dengan peristiwa-peristiwa politik yang melingkupinya. Tergambar dalam Al-Qur'an, di mana terdapat banyak "ayat politik", baik dalam konteks Makiyah maupun Madaniyah. Begitu pun dalam Hadis, banyak yang merupakan respons Rasul terhadap kondisi politik yang terjadi saat itu.

Maka dari itu, tidak berlebihan kalau Islam menjadi agama yang berwajah politis. Baik Rasul Muhammad SAW., keempat khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan generasi sesudahnya menempatkan Islam sebagai agama politik. Awal menerima risalah sekaligus "kuasa politik" dari Allah SWT., Rasul Muhammad SAW. mengirim beberapa utusan menemui beberapa raja, seperti Kaisar Heraclius (Romawi), Raja Negus (Etiopia), dan Khusrau (penguasa Persia) untuk menyeru dan menyuruh raja-raja tersebut masuk Islam, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi pada saat ini.

Dengan "jabatan" sebagai Rasul, Muhammad SAW. menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Namun mendapat tentangan dari Suhail bin Amru yang memintanya agar Muhammad tidak menuliskan jabatannya sebagai Rasulullah di depan namanya pada naskah perjanjian tersebut. Suhail meminta agar cukup ditulis "Muhammad bin Abdullah". Saat peristiwa Pembebasan Mekkah (*Fathu Makkah*), Rasul menegaskan bahwa siapapun yang masuk Mekkah dan rumah Abu Sofyan aman.

Tiga fakta sejarah di atas adalah contoh nyata dari politisasi

agama yang dilakukan Rasul. Salahkah Rasul? Tentu tidak. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Najm ayat 3-4, Rasul melakukan apapun bukan atas dasar hawa nafsunya, tapi semua dalam bimbingan Al-Qur'an.

Politisasi Islam Model Indonesia

Konteks Indonesia, politisasi agama juga lazim dilakukan. Berdirinya Sarekat Islam (1912) yang kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (1921), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926) adalah contoh nyata dari bentuk politisasi agama. Kalau sekarang beberapa orang latah menggugat pekikan takbir: Allahu Akbar dengan alasan bernuansa politis, dulu saat perjuangan merebut kemerdekaan, pekikan Allahu Akbar justru jauh lebih bernuansa politis. Pembentukan pasukan Hizbullah dan Sabilillah—yang dalam perkembangannya menjadi cikal bakal bagi pendirian Tentara Nasional Indonesia—dari namanya saja sudah menggambarkan terjadinya politisasi agama. Kata resolusi dalam politik adalah hal biasa, tapi ketika sudah diikuti kata jihad, seperti Resolusi Jihad, maka menjadi lekat dengan politisasi agama.

Ketakutan Bangkitnya Islam Politik

Paparan di atas menegaskan bahwa politisasi agama adalah sesuatu yang biasa dan tak asing *(gharib)* dilakukan oleh umat Islam. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat distorsi yang luar biasa atas politisasi agama. Maknanya menjadi sangat buruk. Politisasi agama selalu disematkan kepada kelompok Islam.

Dalam banyak hal, kelompok Aksi Bela Islam 411 dan 212 selalu menjadi tertuduh. Padahal kelompok ini hanya mencoba mengekspresikan pilihan dan dukungan politiknya

pada kandidat tertentu yang dinilai lebih tepat mewakili umat Islam. Politisasi agama selalu dituduhkan kepada kelompok Islam yang memilih kandidat politik dengan menggunakan pembenaran-pembenaran agama.

Praktis tak pernah atau setidaknya jarang sekali politisasi agama disematkan kepada umat agama lain. Padahal tak sedikit di lingkup agama lain pun melakukan hal yang sama. Agama dijadikan sebagai instrumen "transaksi" (*bargaining*) politik guna memperoleh kuasa politik. Politisasi agama juga tak pernah disematkan kepada misalnya tokoh politik yang bertandang ke pesantren-pesantren dengan menggunakan simbol-simbol agama. Jarang sekali politisasi agama dialamatkan kepada para kandidat politik yang sebelumnya jauh dan bahkan cenderung anti dan memusuhi Islam, tapi tiba-tiba tampak begitu "bersahabat" dengan umat Islam dan gemar pula menggunakan simbol-simbol atau idiom-idiom Islam.

Terjadi bias pemaknaan dan salah sasaran dalam menyematkan stigma politisasi agama. Seharusnya stigma politisasi agama (dalam pengertian negatif) itu disematkan kepada kelompok yang menjadikan Islam sebagai alat untuk menggapai kekuasaan dalam artian sempit, bukan kepada umat Islam yang tengah memperjuangkan, mendukung, dan memilih pemimpin politik dengan mempertimbangkan dan merujuk pada prinsip-prinsip politik yang fundamental dalam Islam. Selagi politisasi agama lebih berdimensi politik keumatan tak semestinya dimaknai secara negatif. Sebaliknya, yang harus diwaspadai dan pantas diberi stigma adalah politisasi agama yang sarat dengan kepentingan pribadi dan apalagi dilakukan oleh mereka yang selama ini tak ramah dan bahkan fobia terhadap Islam.

Kampanye dan bias pemaknaan politisasi agama sebenarnya lebih merupakan gambaran ketakutan terhadap bangkitnya Islam politik. Politisasi agama bukanlah hal baru yang dilakukan oleh umat Islam. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan hingga memasuki awal dekade kedua era Reformasi politisasi agama niscaya dilakukan oleh kelompok Islam. Namun ketika dilihat bahwa kekuatan politik Islam tidak signifikan dan tidak cukup membahayakan bagi kekuatan politik anti-Islam, maka politisasi agama pun tidak pernah disoal atau digugat.

Ketika kekuatan politik Islam dengan menggunakan basis massa *grassroot* dinilai mulai dan bahkan membahayakan, maka langkah-langkah politik umat Islam mulai disoal. Stigma politisasi agama pun disematkan secara negatif kepada umat Islam.

Percayalah, seperti halnya stigma radikal dan kampanye radikalisme yang mulai menuai kegagalan, kampanye politisasi agama pun diyakini akan menuai kegagalan. Manusia boleh saja merencanakan dan melakukan tipudaya, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan membalas tipu dayanya, *wamakarû wamakarallâh, wallâhu khairul mâkirîn*. •

Aksi 411 dan Aksi 212: "Perlawanan" Damai Umat Islam

Aksi Damai pada 4 November 2016 (Aksi Damai 411) dan 2 Desember 2016 (Aksi Damai 212) berjalan cukup damai dan sejuk, meskipun hadangan untuk menggagalkan kedua aksi ini berlangsung cukup sistematis dan terencana. Penghadangan tidak saja datang dari mereka yang berwatak komprador, tapi juga datang dari elite penguasa negeri ini yang mengidap penyakit *Islamofobia*.

Suksesnya dua aksi ini berhasil menjawab kekhawatiran banyak pihak, terutama yang selama ini memandang negatif dan sinis terhadap aksi apapun yang dilakukan umat Islam yang berwajah politik-keagamaan.

Aksi 411 dan Aksi 212 harus dibaca sebagai bentuk "perlawanan" atas keterpasungan aspirasi politik umat Islam yang telah berlangsung cukup lama. Bagi siapapun yang memaahami dengan baik tentang sejarah relasi Islam dan politik di Indonesia, tentu akan bersepakat bahwa secara politik,

umat Islam (baca: Islam politik) selalu berada dalam posisi yang ter(di)marjinalkan oleh kekuatan politik yang berkuasa yang secara *mainstream* dikuasai kelompok nasionalis, islamofobia, dan kaum *oligarch*.

Meskipun selalu dipinggirkan, umat Islam tetap teguh dengan komitmen kebangsaannya. Ketika para pendiri bangsa ini merumuskan dasar negara yang kemudian berhasil menyepakati Piagam Jakarta *(Jakarta Charter)* pada 22 Juni 1945, yang di dalamnya berisikan tujuh kata: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", lalu atas usulan yang konon mengatasnamakan Indonesia Timur dan mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia bila isi Piagam Jakarta yang terkait Syariat Islam tidak dihapus, pun umat Islam yang saat itu di antaranya diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimejo (keduanya tokoh Muhammadiyah) dalam pertemuan terbatas tanggal 18 Agustus 1945, menyetujui penghapusan Syariat Islam, sehingga bunyi Sila Pertama, Pembukaan *(Preambule)*, alinea keempat, dan Pasal 29 ayat 1 pun berubah menjadi hanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Padahal ditilik dari sisi apapun, sebenarnya sah saja penerapan syariat Islam di Indonesia. Dari sisi historis, penerapan syariat Islam bukanlah hal baru bagi Indonesia (Nusantara). Sejak zaman kerajaan Islam, semua kerajaan Islam di Nusantara telah menerapkan syariat Islam. Dari sisi demokrasi, yang dalam praktiknya selalu merujuk pada aspek "keterbanyakkan", Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim dan kemerdekaannya pun diraih karena jasa terbesar dari umat Islam, tentu sah saja kalau menerapkan syariat Islam. Apalagi penerapan syariat Islam tetap dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Namun untuk kemaslahatan

yang lebih bagi bangsa Indonesia, umat Islam merelakan penghapusan Piagam Jakarta.

Ketika dalam perjalanan bangsa ini umat Islam terlalu kerap mendapat fitnah dan menjadi korban atas kebijakan yang secara sistematis berusaha memarjinalkan posisi politik umat Islam, pun umat Islam tetap taat dan setia kepada negara. Bahkan umat Islam tak bosan menyebut diri sebagai penjaga Pancasila dan NKRI, sesuatu yang sebenarnya wajar saja, karena umat Islam merasa terikat dengan *gentleman agreement* (meminjam istilah Sukiman Wirdjosandjojo) yang telah diputuskan para pendiri bangsa pada 22 Juni 1945, yang bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara plus tambahan penerapan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Propaganda keji juga terlalu sering dilakukan oleh mereka yang mengidap penyakit akut *Islamofobia*. Pada awalnya *Islamofobia* dihuni oleh mereka yang non-Islam dan kalangan sekularis-abangan. Namun dalam perkembangannya, setidaknya yang terbaca dalam beberapa tahun terakhir, *Islamofobia* juga dihuni oleh sebagian dari mereka yang oleh Clifford Geertz disebutnya sebagai Santri. Muslim di Indonesia misalnya terlalu sering mendapat tuduhan sebagai pihak yang paling intoleran. Bahkan seiring dan pasca Aksi 411 dan Aksi 212, bahasa-bahasa yang berbau tuduhan dan umpatan yang menyebut Indonesia sebagai negara yang semakin intoleran terlalu sering didengar.

Saya meyakini bahwa tuduhan dan umpatan tersebut hampir dipastikan keluar dari mulut mereka yang memang anti-Islam politik, yang terbiasa melihat Islam di Indonesia jauh dari asas kepatutan (tidak proporsional). Padahal siapapun yang berpikir proporsional, sulit untuk tidak menyebut Indonesia sebagai negara yang sangat toleran. Bandingkan

dengan negara-negara lainnya yang memiliki tingkat heterogenitas sepadan dengan Indonesia. Rasanya tak ada satu pun negara yang tingkat toleransinya seperti dan bahkan melebihi Indonesia.

Umat Islam juga dituduh sebagai anti-Bhinneka Tunggal Ika, anti-Pancasila, dan anti-NKRI. Tuduhan ini tentu sulit dinalar dengan akal sehat. Bagaimana mungkin umat Islam yang dalam teologinya diajarkan bahwa kebhinnekaan adalah sebuah keniscayaan (QS. Al-Hujurat: 13) lalu dicap sebagai anti-Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin umat Islam yang berjasa besar mengantarkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara Pancasila dan NKRI dituduh sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI. Tuduhan yang tentu sangat absurd.

Terhadap semua tuduhan itu, praktis selama ini umat Islam tidak bereaksi secara berlebihan. Namun ketika hal prinsip yang terkait dengan akidah diganggu, maka umat pun bereaksi dengan tegas. Aksi 411 dan Aksi 212 hanyalah bentuk reaksi tegas, bukan aksi. Dalam konteks hukum kausalitas, kedua aksi tersebut hanyalah "akibat" dari "sebab" tidak tampaknya keseriusan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang proporsional terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menista Al-Qur'an. Andai saja aparat penegak hukum bertindak cepat menangani kasus Ahok, diyakini tak akan terjadi aksi masal seperti Aksi 411 dan Aksi 212.

Akan bagus, kalau Aksi 411 dan Aksi 212 sering dilakukan guna merespons setiap kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak *(lalim)* kepada umat mayoritas atau masyarakat secara umum. Model Aksi 411 dan Aksi 212 jangan hanya sekadar dilakukan untuk merespons kasus yang sejenis

dengan penistaan Al-Qur'an, tapi perlu juga dilakukan untuk menyikapi misalnya permasalahan agraria di Indonesia yang jauh dari prinsip keadilan dan juga rendahnya *political will* dan *political action* dalam membela kaum petani.

Sangat tidak proporsional ketika ada seorang Cina di Indonesia bisa menguasai ribuan bahkan jutaan hektar tanah, sementara ada banyak masyarakat pribumi yang sejengkal tanah pun tak dimilikinya. Umat juga bisa "memaksa" negara untuk mengubah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi keumatan atau kerakyatan. Bila selama ini 90% kepemilihan sumber daya ekonomi dikuasai hanya oleh maksimal 20% orang Indonesia, maka negara harus dipaksa mengubah kebijakan tersebut secara proporsional pula, di mana umat atau rakyat mayoritas yang berjumlah 80% selayaknya juga mempunyai akses kepemilihakan sumber daya ekonomi secara mayoritas. Semoga. •

Daya Rusak dan Pecah Belah Ahok

Sejak menjadi Gubernur Jakarta hingga saat ini, kurang lebih seminggu menjelang pencoblosan Putaran II Pilkada Jakarta, 19/4/2017, entah sudah berapa kali Ahok dan timnya melakukan tindakan pelecehan dan penistaan terhadap Islam dan umat Islam. Entah sudah berapa sering Ahok dan timnya melakukan pelecehan terhadap mereka yang tidak mendukung Ahok sebagai ekstremis, radikalis, dan sebutan sinis lainnya. Entah sudah berapa kali Ahok dan timnya membuat pernyataan-pernyataan yang bernada adu domba sesama anak bangsa dan sesama umat Islam.

Terkini, tim Ahok membuat iklan kampanye sangat murahan, rasis, dan fasis dengan nada kebencian terhadap umat Islam yang luar biasa. Video iklan ini sudah beredar ke mana-mana. Umat Islam digambarkan dalam iklan murahan tersebut sebagai ekstremis, perusak, dan garis keras. Di sisi lain digambarkan dua orang etnis Cina (sepertinya anak dan ibunya) yang dalam posisi ketakutan yang terjebak di tengah kerusuhan. Pada bagian lain, seorang Cina digambarkan begitu

nasionalis membela tim sepak bola Indonesia. Iklan ini begitu provokatif dan sarat adu domba.

Saya berani mengatakan bahwa pembuat iklan ini, termasuk yang menyuruh dan membiayai pembuatannya mempunyai mental yang sama: sakit, bermental provokator, dan pengadu domba. Iklan seperti ini seharusnya disikapi secara serius oleh pihak kepolisian. Pembuat iklan murahan ini sebenarnya lebih sadis dari mereka yang diduga sebagai teroris dan begitu mudah untuk dibunuh oleh pihak kepolisian.

Ahok dan timnya mungkin tidak sadar atau sedang "tidak disadarkan" bahwa dengan iklan murahan tersebut, sebenarnya sedang menabuh genderang kekalahan, sedang menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Sekarang Ahok dan timnya tentu tidak usah berpikir untuk menarik video konyol tersebut, sesuatu yang tidak mungkin. Namun berpikirlah atau setidaknya merenunglah, kenapa begitu bodohnya, hanya kurang hitungan hari pemungutan suara *kok* bisa membuat iklan seperti itu.

Dari rentetan penistaan, pelecehan, dan adu domba yang telah dilakukan oleh Ahok dan timnya, sulit rasanya untuk menyebut Ahok sebagai orang yang toleran. Sulit rasanya untuk menyebut Ahok sebagai orang yang paham Pancasila dan Indonesia. Bahkan, sulit juga untuk tidak mengatakan bahwa Ahok adalah pengidap fasisme dan rasisme.

Pastinya, sejak ketiban untung menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI, karena pernyataannya, ujaran kebencian yang berbau SARA, termasuk juga kebijakan yang dibuatnya selama menjadi Gubernur Jakarta begitu bias dan lekat dengan SARA, daya rusaknya terhadap kohesivitas masyarakat dan harmoni kehidupan beragama di Jakarta dan Indonesia pada umumnya sangat luar

biasa. Ujaran kebencian atas dasar SARA terjadi sangat luar biasa, baik secara kualitas maupun kualitas.

Bayangkan, sekarang masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia umumnya, tidak saja di kalangan akar rumput, di kalangan akademisi, peneliti, dan kelompok masyarakat lainnya yang seharusnya sudah selesai persoalan SARA pun terpancing dan terbawa dalam keterbelahan. Benar-benar luar biasa daya rusak manusia bernama Ahok.

Bayangkan, sekarang mereka yang mendukung atau setidaknya bersimpatik pada Ahok menyebut pendukung Anies sebagai radikalis, ekstremis, salafi, dan Wahabi. Ini sebutan yang sangat kasar dan sulit dinalar dengan baik, sekalipun dengan nalar akademik. Mereka yang terlibat Aksi 411 atau Aksi 212 dituduh sebagai radikalis dan garis keras. Padahal mayoritas peserta aksi adalah *jamaah* Muhammadiyah dan NU. Sementara dua organisasi ini kerap disebut sebagai representasi Muslim moderat *(tawasuth).*

Sebaliknya, seakan pendukung Ahok itu kelompok manusia moderat, tidak ada yang ekstrem, dan penganut garis keras. Padahal sejatinya pendukung Ahok itulah yang radikal, sekularis garis keras, atau sekuler fundamentalis.

Jauh sebelum Ahok menjadi Gubernur Jakarta, ketegangan masyarakat, utamanya terkait "pertarungan" wacana antara kelompok Islam garis keras vs kelompok sekularis garis keras plus abangan, dan dibumbui oleh mereka yang kerap mengklaim sebagai kelompok moderat *(tawasuth)* memang sudah terjadi, namun tidak setegang dan sepanas seperti saat ini. Faktor Ahok menjadi penyumbang terbesar bagi memanasnya suhu politik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

Kenapa faktor Ahok? *Pertama*, Pilkada Jakarta bukan kali

ini saja berlangsung. Bahkan saat Pilkada 2012, ketika Ahok masih sebatas menjadi calon Wakil Gubernur sempat terjadi pula ketegangan, namun ketegangan yang terjadi tidak seperti saat ini. Jokowi yang saat itu menjadi calon gubernur, dengan "kesantunan" dan gaya "*ndeso*"-nya relatif mampu meredam ketegangan yang terjadi saat itu.

Kedua, andai saja Ahok hanya sekadar menyandang predikat sebagai non-Muslim, saya yakin suasana politik juga tak akan sepanas saat ini. Dalam pandangan saya, dalam batas tertentu, umat Islam di Indonesia sudah selesai dengan persoalan yang terkait pemimpin non-Islam. Kalaulah ada kelompok yang merasa belum selesai itu pun tidak cukup signifikan dan dalam negara Pancasila itu sah-sah saja dan dilindungi undang-undang. Seseorang yang memilih pemimpin dengan pertimbangan agama, termasuk pertimbangan suku, bahkan mungkin warna kulit sekalipun itu sah saja dan dilindungi undang-undang.

Di lingkup pemilihan anggota DPR RI, caleg dari partai nasionalis dan non-Islam terpilih di daerah pemilihan yang dihuni mayoritas Islam sering terjadi dan bahkan sangat biasa. Di lingkup pilkada, di luar Pilkada Jakarta saat ini, partai Islam mendukung calon non-Islam juga sering dilakukan dan biasa saja. Hal ini setidaknya menjadi bukti bahwa soal keindonesiaan di sebagian besar umat Islam sudah selesai, dan sekaligus menjadi bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat toleran.

Persoalannya, selain sebagai non-Muslim, Ahok juga mengidap kelakuan yang tidak lazim dengan kebanyakan masyarakat Indonesia. Seperti disebutkan di atas, Ahok itu gambaran manusia yang sangat intoleran, kasar, dan bengis. Coba perhatikan wajahnya ketika marah-marah. Ahok juga sangat fasis dan rasis. Sikap fasis dan rasisnya tergambar sekali

dalam kebijakan-kebijakannya yang sangat pro Cina. Sekadar contoh, mau memakai dalil pembelaan apapun untuk Ahok, faktanya Ahok lebih punya keberanian menggusur Kalijodo daripada tempat pelacuran yang dikelola Cina, seperti Alexis.

Sikap yang dipertontonkan Ahok inilah yang membikin amarah warga Jakarta dan bahkan warga di luar Jakarta. Faktor agama mungkin akan memengaruhi seseorang untuk memilih atau tidaknya, tapi percayalah bahwa bukan faktor agama yang dianut Ahok yang menyebabkan Muslim tidak memilih Ahok, tapi semata karena faktor kelakuan Ahok yang membikin muak warga Jakarta dan insya Allah akhirnya tidak akan memilihnya pada 19 April 2017 mendatang.

Makanya, kalau nanti pada 19 April 2017 Ahok benar-benar mengalami kekalahan, yang setidaknya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan, jangan salahkan agama Ahok, tapi salahkan kelakuan, keintoleran, kefasisan, dan kerasisannya. Kalau merujuk pada hasil survey LSI (Denny JA), sepertinya hanya kecurangan yang akan bisa memenangkan Ahok. Kenapa LSI yang saya sebut? Jawabnya sederhana, fakta bahwa lembaga survei lainnya, terlebih lembaga survei Ahoker, tidak punya keberanian untuk mengumumkan hasil surveinya.

Saya tidak ber-KTP Jakarta, maka melalui tulisan ini saya berpartisipasi untuk menghentikan Ahok kembali menjadi Gubernur Jakarta. Ahok sangat tidak patut menjadi Gubernur Jakarta, bahkan di provinsi manapun di Indonesia. Hanya orang yang mengerti Pancasila dan Indonesia yang pantas menjadi Gubernur Jakarta. Sekian. (Senayan, 10/04/2017). •

Kepanikan Elite Pendukung Ahok dan Teori Layang-Layang Putus

Hasil survei lembaga survei yang dilakukan menjelang putaran kedua Pilkada Jakarta semua memenangkan Anies Baswedan, kecuali Charta Politica. Bahkan Saiful Mujani Reseach Center (SMRC) yang notabene Ahoker pun "terpaksa" memenangkan Anies Baswedan, meskipun hanya selisih 1%. "Kemenangan" Anies Baswedan yang sulit dibendung ini sepertinya membuat para perekayasa hasil survei pun sulit untuk melakukan rekayasa survei guna memenangkan Ahok.

Merujuk pada hasil-hasil survei tersebut, saya menduga bahwa sebagian besar elite politik pendukung Ahok saat ini sedang mengalami kepanikan. Dan ciri orang yang panik biasanya cenderung akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan diri. Apalagi paniknya karena kalah dalam pertarungan politik yang sudah sedemikian rupa direkayasa.

Maka bukan hanya ban yang dibakar, jalan tol diblokir, atau pagar DPR yang dirobohkan, tapi bisa lebih sadis lagi, ratusan nyawa dengan gampang pun bisa melayang. Logika ini saya gunakan sekadar meniru logika yang digunakan para pembela video kampanye Ahok yang rasis, yang melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa "ibu dan anak yang terjebak dalam kerusuhan, tulisan ganyang Cina itu juga pernah terjadi, fakta".

Soal kepanikan elite politik yang kalah kemudian berlaku sadis juga pernah terjadi di negeri ini. Tentu sebagian besar memori publik masih mengingat ketika rezim Orde Baru kalah secara politik berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri, muncul Tragedi Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Puluhan nyawa melayang. Mereka yang jadi korban adalah para pendukung dan simpatisan Megawati Soekarnoputri dan para pegiat demokrasi yang sebelumnya cukup lama berorasi di depan Kantor DPP PDI Jl. Diponegoro, Jakarta. Saya sempat dua hari berada di Kantor PDI dan sesekali ikut orasi hingga dua hari sebelum tragedi tersebut terjadi. Puluhan orang berambut cepak berkaos merah (sepertinya saat itu diskenariokan sebagai pendukung Suryadi) menyerbu Kantor PDI. Semoga Ibu Megawati yang waktu itu masih jadi elite politik pinggiran ingat dengan Tragedi Kudatuli. Sekadar mengingatkan, agar Ibu Megawati tidak melupakan peristiwa yang berhasil melambungkan namanya, menjadikan PDIP berhasil memenangkan Pemilu 1999, dan mengantarkan Ibu Megawati menjadi Wakil Presiden untuk kemudian menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sekali lagi, semoga Ibu Megawati dan elite PDI-P yang mengelilinginya saat ini juga selalu ingat akan Tragedi Kudatuli.

Tragedi Mei 1998, termasuk tragedi kemanusiaan lainnya yang terjadi Pasca 1998, seperti Tragedi Ambon (Muslim dan

Kristen dibenturkan), Tragedi Sampit, Tragedi Poso, dan peristiwa berdarah lainnya, semuanya diyakini dilakukan oleh elite politik yang kalah. Banyak sekali kejadian yang janggal dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Sekadar contoh, bagaimana mungkin Muslim dan Kristen di Ambon bisa terlibat konflik, sementara ratusan tahun mereka hidup rukun berdampingan. Dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang Muslim dan Kristen biasa dan bahkan sangat biasa. Mereka diikat oleh budaya "*pela gandong*".

Pela gandong ini kerap menjadi kebanggaan masyarakat Maluku sejak dulu hingga sekarang. *Pela* diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama yang berbeda, sedangkan *gandong* sendiri bermakna adik. Perjanjian ini kemudian diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah berlangsung, campuran *soppi* (tuak) dan darah yang diambil dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pihak yang bersangkutan setelah senjata dan alat-alat tajam lain dicelupkan ke dalamnya. Namun ketika elite Jakarta yang kalah dalam pertarungan politik kemudian masuk ke Ambon, ratusan bahkan ada yang menyebut ribuan nyawa melayang dan dampaknya hingga sekarang ini masih dirasakan oleh masyarakat Ambon.

Sekali lagi, semua peristiwa yang saya sebutkan di atas terjadi karena elite politik yang mengalami kekalahan politik. Bukan karena Muslim yang galak, ekstrem, atau anarkis seperti yang digambarkan oleh video kampanye murahan yang dibuat oleh Tim Kampanye Ahok.

Berangkat dari semua peristiwa berdarah tersebut, maka penting untuk mewaspadai kondisi setelah 19 April 2017.

Kalau berangkat dan hasil-hasil survei jelang Putaran II, rasanya—seperti saya utarakan pada tulisan sebelumnya—hanya kecurangan yang akan mampu memenangkan Ahok. Itu artinya, kekalahan Ahok sebenarnya sudah di depan mata. Oleh karena itu, harus diwaspadai pada dua hal. *Pertama*, waspadai kalau Ahok kalah. Pilkada Jakarta kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada berlangsung di tengah masyarakat yang terbelah secara ekstrem. Bagi partai-partai besar pendukung Ahok, Pilkada Jakarta juga akan menjadi pertaruhan politik secara nasional.

Kalau berangkat dari berbagai peristiwa yang terjadi pasca-1998, maka potensi elite politik yang kalah akan membikin *chaos* Jakarta perlu diwaspadai. "Teori layang-layang putus" pun bisa saja akan dipakainya. Tentu kita pernah mengetahui ketika sekumpulan anak-anak berebut mengejar layang-layang yang putus. Biasanya anak yang tak mungkin bisa merebut layang-layang tersebut, apalagi kalau anak yang bersangkutan merasa paling besar dan kuat, maka dia bisa saja akan merebut layang-layang yang sudah didapat oleh anak lainnya dan merusaknya, menyobek-nyobeknya. Prinsipnya, tidak boleh ada satu anak pun yang mendapatkan layang-layang tersebut. Berlaku rumus "*tiji tibeh*": *mati siji, mati kabeh* (artinya: mati satu, mati semua).

Kedua, waspadai juga kalau Ahok menang dengan segala bentuk kecurangan yang dilakukannya, sementara aparat berwenang melakukan pembiaran. *Chaos* sebagai pantulan (akibat) dari pembiaran atas segala kecurangan Pilkada sangat mungkin akan terjadi. Peringatan ini perlu disampaikan agar menjadi perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilkada.

Akhirnya, semoga Pilkada 19 April berjalan lancar. Semoga

yang berniat curang, mengurungkan niatnya. Semoga yang berniat membikin kacau membatalkan niatnya. Semoga aparat kepolisian dan militer yang dilibatkan dalam BKO juga bisa bersikap adil. KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara Pilkada juga mampu menjaga netralitasnya. •

Hotel Crown Jakarta, 17/4/2017

Anomali Pendukung Ahok

Majelis Hakim telah memutus bersalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan vonis dua tahun penjara. Apakah adil keputusan Majelis Hakim tersebut? Tentu akan bergantung siapa yang melihatnya. Bagi pendukung Ahok, vonis dua tahun tentu dirasa tidak adil, yang tergambar dari demonstrasi-demonstrasi yang mereka gelar yang berlangsung sampai saat ini. Keinginan pendukung Ahok, terutama mereka yang sampai "kesurupan" di depan Lapas Cipinang, tentu seharusnya Ahok diputus bebas murni.

Sebaliknya, bagi yang kontra dengan Ahok dan menuduh Ahok telah menista Islam, tentu akan menganggap bahwa vonis dua tahun oleh Majelis Hakim dinilai jauh dari rasa adil, di luar kelaziman atas vonis yang telah dijatuhkan kepada para pelaku penista agama pada kasus-kasus penistaan agama sebelumnya, yang rata-rata divonis maksimal lima tahun.

Terlepas soal adil atau tidaknya vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, vonis dua tahun bisa disebut sebagai "vonis

tengahan" yang semestinya diterima oleh semua pihak. Bagi yang berpikir jernih, sulit rasanya untuk tidak menyebut bahwa Ahok telah nyata-nyata menista Islam, bukan hanya sekali ketika di Kepulauan Seribu, tapi telah berkali-kali. Andai hanya sekali menista Islam, mungkin protes Ahoker masih dianggap wajar. Sementara penistaan sudah dilakukan berkali-kali.

Vonis dua tahun bisa juga disebut sebagai vonis "berani" dari Majelis Hakim. Di tengah intervensi dan sokongan politik elite penguasa, kapital, dan logistik yang luar biasa berlimpah selama proses persidangan Ahok, ternyata Majelis Hakim mempunyai keberanian untuk memvonis lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan bahkan memerintahkan agar Ahok langsung ditahan. Salut dan terima kasih buat Majelis Hakim.

Tulisan ini mencoba menyoroti beberapa anomali pendukung Ahok (Ahoker) sejak proses Pilkada hingga pascavonis Majelis Hakim. *Pertama*, Ahoker selalu mencoba membuat tandingan atas apa yang dilakukan kelompok Islam. Namun semua tandingan yang dibuatnya selalu kalah pamor, terpatahkan, dan tak laku jual. Coba tengok Aksi 411 dibikin tandingan, Aksi 212 dibikin tandingan, bahkan Aksi 55 konon mau dibikin tandingan dengan "difasilitasi"(?) oleh Kapolri. Namun semua tandingan yang dibuatnya kalah pamor.

Kedua, biar dianggap paling Pancasilais, paling NKRI, paling Indonesia, dan paling Bhinneka, empat hal ini dijadikan sebagai alat propaganda dan stigmatisasi para Ahoker untuk menuduh siapa saja, apakah pribadi atau kelompok yang tidak mendukung atau anti-Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-Bhinneka, dan bahkan tak mempunyai rasa nasionalisme. Namun, "jualan" empat hal ini pun ternyata tak laku dijual di masyarakat. Ahoker tidak sadar bahwa stigmatisasi anti-

Pancasila, anti-Bhinneka, dan anti-NKRI yang justru semakin membikin solid kelompok anti-Ahok. Bahkan mereka yang sebelumnya masih belum memiliki pilihan politik pada Pilkada Putaran II setelah melihat stigmatisasi politik luar biasa yang dilakukan Ahoker, termasuk menyerang jantung agama mereka, maka mereka pun menjadi *emoh* untuk memilih Ahok. Hasilnya bisa dilihat, dari kekalahan Ahok di Pilkada Putaran II.

Dengan stigmatisasi ini orang juga akhirnya membandingkan Ahok dengan Anies dalam konteks kepancasilaan dan ke-NKRI-an. Ahok itu siapa? Apa saja yang telah diperbuat leluhurnya untuk kemerdekaan Indonesia, NKRI, dan Pancasila? Kalau hal ini yang dijadikan sebagai alat pembanding, maka Ahok kalah pamor. Kelamin Anies dalam konteks keindonesiaan jauh lebih jelas. Anies adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan atau biasa dipanggil AR. Baswedan, anggota BPUPK(I), keturunan Arab yang posisinya sangat jelas dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Sementara Ahok hanya anak dari seseorang yang status kewarganegaraanya pun dipertanyakan. Bahkan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa Ahok bukan anak seorang warga negara Indonesia.

Ketiga, seakan ingin pamer logistik yang tak terbatas, Ahoker membagi-bagikan uang dan sembako politik secara luar biasa dan masif. Uang tunai ratusan hingga jutaan rupiah, sembako, dan tak lupa tentu plus baju kotak-kotak dibagikan secara gratis dan masif. Namun sekali lagi, ternyata tak terhingganya logistik pun tak mampu memenangkan Ahok. Terbukti perolehan suara Ahok kalah jauh dibanding suara Anies yang logistiknya cekak.

Ahoker terlalu merendahkan masyarakat Jakarta, menganggap semua masyarakat Jakarta mau dihina dan dibeli dengan uang, sembako, dan baju kotak. Meskipun tetap salah

dalam konteks membangun Pemilu yang bermartabat, tidak sedikit warga Jakarta yang ambil uang, sembako plus baju kotak-kotak, tapi memilih untuk tidak memilih Ahok. Anomali bukan?

Keempat, pasca putusan vonis atas Ahok, pendukung Ahok lebih anomali lagi. Sebelum putusan vonis, dengan lantang Ahoker meminta agar apapun putusan majelis hakim dapat diterima dengan arif. Mungkin para Ahoker ini berpikiran bahwa majelis hakim pasti akan memenangkan Ahok. Pasti semua elite penguasa akan menekan majelis hakim melalui Mahkamah Agung agar Ahok diputus bebas. Faktanya, Ahok divonis selama dua tahun. Anomali Ahoker pun terjadi di mana-mana, dari semula "kesurupan" di LP Cipinang, demo tanpa aturan main, sampai bakar-bakar lilin. Berbagai pernyataan di kalangan Ahoker dari mulai yang tak berpendidikan sampai yang bergelar doktor sekalipun semakin menunjukkan anomalinya. Permintaan para pengacara agar Ahok ditangguhkan menahanannya semakin menunjukkan anomalinya.

Lalu sampai kapan anomali Ahoker akan berakhir? Jawabnya sederhana, sampai mereka sadar dari "kesurupan" bahwa Ahok sudah kalah di Pilkada. Ahok sudah diputus bersalah dua tahun oleh Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, bukan seperti tuntutan JPU yang menuntut Ahok satu tahun kurungan dan dua tahun percobaan alias bebas. Selama Ahoker tidak menyadari dua kenyataan ini, maka anomali-anomali yang cenderung di luar nalar sehat akan terus terjadi (Cirendeu, 12/5/2017). •

Masjid Dhirar Versi Ahok

Hari ini, Sabtu 15 April 2017 akhirnya "masjid kontroversi" KH. Hasyim Asy'ári diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan dan peresmiannya mengundang polemik. Sulit dipungkiri bahwa pembangunan masjid ini memang dominan muatan politiknya. Bayangkan, sekadar untuk waktu peresmian, banyak pihak meminta agar peresmiannya dilakukan selepas 19 April 2017 pun tidak digubris. Seakan menjadi keharusan bahwa masjid ini memang harus diresmikan sebelum 19 April 2017, mungkin dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih Muslim. Siapa tahu dengan diresmikannya masjid kontroversi ini akan memengaruhi perolehan suara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berdasarkan hasil survei dari banyak lembaga survei mengalami kekalahan.

Membangun masjid bagi banyak pemda rasanya sudah wajar dan biasa. Namun, rasanya baru kali ini ada pembangunan "masjid pemda" dibuat penuh polemik. Lebih disayangkan lagi, masjid yang dipolemikkan itu menggunakan nama ulama besar KH. Hasyim Asy'ari. Masjid yang notabene adalah rumah Allah dan "tempat bersujud" *kok* bisa dibuat kontroversi dan

mengundang polemik. Dan ini hanya terjadi di era Ahok. Luar biasa bukan?

Melihat sisi kontroversinya, saya jadi teringat kejadian yang bisa disebut serupa dengan yang termaktub di dalam Surat Al-Taubah ayat 107, yaitu terkait dengan polemik pembangunan masjid yang di masa Rasulullah Muhammad SAW. disebutnya sebagai masjid *dhirar*: "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran, dan memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah,'kami tidak menghendaki selain kebaikan.' Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)".

Disebut masjid *dhirar*, karena terkait sekelompok orang munafik yang membangun masjid di Madinah yang sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan agenda-agenda keji mereka dalam upaya melawan Islam dan kaum Muslimin. Dengan menjadikan masjid sebagai sentral pergerakan, mereka ingin melawan Rasul dan kaum Muslimin.

Terkait *asbabun-nuzul* ayat di atas, dijelaskan bahwa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri menyebutkan dari Ibnu Akimah al-Laitsi dari anak saudara Abi Rahmi al-Ghifari. Dia mendengar Abi Rahmi al-Ghifâri—ikut baiat kepada Rasul pada hari Hudaibiyah—berkata, "Telah datang orang-orang yang membangun masjid *dhirâr* kepada Rasul, pada saat beliau bersiap-siap akan berangkat ke Tabuk." Mereka berkata, "Wahai Rasul, kami telah membangun masjid buat orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan

hujan. Kami senang jika engkau mendatangi kami dan salat di masjid tersebut." Kemudian Rasul menjawab, "Aku sekarang mau berangkat bepergian, insya Allah setelah kembali nanti aku akan mengunjungi kalian dan salat di masjid kalian." Kemudian dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Rasulullah beristirahat di Dzu Awan (jaraknya ke Madinah sekitar setengah hari perjalanan). Pada waktu itulah Allah SWT. memberi kabar kepada Rasul tentang masjid tersebut (dan larangan salat di dalamnya) dengan menurunkan ayat ini.

Mereka yang mendirikan masjid *dhirar* adalah sekawanan orang (munafik) dari penduduk Madinah yang jumlahnya dua belas orang. Mereka mendirikan masjid dengan tujuan menimbulkan kemadharatan pada orang-orang Mukmin dan masjid mereka, dan untuk menguatkan kekafiran orang-orang munafik, serta memecah belah jamaah kaum Mukminin. Awalnya mereka semua shalat berjamaah di satu masjid (Masjid Quba), kemudian terpecah menjadi dua masjid (di Masjid Quba dan masjid *dhirar*). Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan *syubhat*, menghasut, menfitnah, dan memecah belah *shaf* (barisan) kaum Mukminin. Mereka sesungguhnya bersumpah dengan mengatakan: "Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan yaitu menunaikan salat dan berzikir di dalamnya serta memberi kemudahan bagi para jama'ah." Dan Allah SWT. menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Larangan Allah SWT. tersebut telah disebutkan dalam Surat Al-Taubah ayat 108: "Janganlah kamu shalat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah SWT. menyukai orang-orang yang bersih".

Larangan Allah SWT. ini tidaklah khusus bagi Rasul saja, tetapi kaum Muslimin juga termasuk dalam larangan tersebut. Dalam Tafsir Ibnu Katsîr dijelaskan: "Ayat (di atas) merupakan larangan dari Allah SWT. kepada Rasullullah agar tidak salat di masjid tersebut selamalamanya, dan umatnya mengikutinya dalam hal ini".

Kemudian Allah SWT. memerintahkan Rasul untuk melaksanakan salat di Masjid Quba yang telah didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Maksudnya atas dasar ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasulullah dan juga untuk mempersatukan ukhuwah kaum Muslimin serta sebagai markas mereka.

Surat Al-Taubah ayat 109, Allah berfirman: "Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke neraka Jahannam? Dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Pertanyaan ayat di atas adalah untuk *taqrir* (menetapkan), maksudnya menetapkan bahwa mereka kaum Mukminin itu lebih baik daripada orang-orang munafik). Maka tidak sama antara orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah SWT. dan mengharap ridha-Nya dengan orang yang mendirikan masjid atas dasar kemadharatan, kekafiran, dan memecah belah kaum Mukminin. Pada hakikatnya mereka mendirikan masjid di tepi jurang yang akan runtuh, lalu tepi jurang itu menyebabkan bangunannya runtuh bersama-sama mereka ke neraka Jahannam. Seperti halnya mereka membangunnya di tepi neraka Jahannam, sehingga bangunan itu runtuh bersama mereka ke dalamnya. Dan Allah tidak

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim sehingga mereka merugi di dunia maupun di akhirat. Dalam Surat Al-Taubah ayat 110, kemudian Allah SWT. berfirman: “Bangunan-bangunan mereka itu senantiasa menjadi keraguan dalam hati mereka, kecuali jika hati mereka telah hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kemudian Rasul mengutus Malik bin Dukhsyum saudara Bani Salim dan Ma’an bin Adi seraya berkata kepada mereka berdua: “Pergilah kalian ke masjid yang didirikan oleh orang-orang zalim (masjid *dhirar*), kemudian hancurkan dan bakarlah.” Maka keduanya pun berangkat. Sesampainya di perkampungan Bani Sâlim, Malik berkata kepada Maan, “Tunggu sebentar, aku akan mengambil api dari rumah keluargaku.” Sesaat kemudian dia keluar dengan membawa pelepah kurma yang dibakar dan berjalan dengan Ma’an menuju masjid itu; lalu membakar dan menghancurkannya, sehingga orang yang berada di dalamnya (berlarian) keluar.

Subhanallah, setiap kali Ahok melecehkan Islam, selalu saja Allah memberikan jawabnya dalam Al-Qur’an. Sampai terkait pelecehan Islam dalam pendirian masjid pun Allah juga langsung memberikan jawabnya.

Penting menjadi catatan bagi Muhammadiyah, kalau rencana Ahok membangun masjid serupa yang direncanakan akan dibangun di Jakarta Timur dengan memakai nama KH. Ahmad Dahlan, sebaiknya ditolak saja. Terlalu menista KH. Ahmad Dahlan kalau sampai namanya disematkan untuk sebuah “masjid *dhirar*”. •

Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam: Sebuah Imajiner

Menjelang putusan majelis hakim atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basoka Nurul Komar (Hoak) tanggal 9 Mei 2017, Istana Kerajaan Kayangan dibikin pusing. Sang Raja juga dibikin gelisah. Gelisah, karena si pelaku penistaan adalah kawan baik Sang Raja. Sang Raja pun berinisitif mengadakan Rapat Kabinet Terbatas (RKT) Bidang Polhukam. Maka diundanglah seluruh menteri yang berada di bawah koordinator Menkopolhukam, yaitu Menkopolhukam Wirmanto sendiri, Menteri Dalam Negeri Tjahaya Kumbara (TK), Menteri Hukum dan HAM Yosapat Laondre (YL), Menteri Luar Negeri Ratna Maksudi (RM), Menteri Pertahanan Rahmat Rahmatullah (RR), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudihartana, Menteri PAN dan RB Asma Annur (AA), termasuk Panglima Perang Gagah Nurussalam (GN), dan Kepala Kepolisian Toto Carnaval (TC). Luhur Budi Pekerti (LBP) yang notabene menjabat Menko Kemaritiman pun ternyata diundang

dalam RKT. Ini menunjukkan betapa hebat dan kuatnya LBP dalam Kerajaan Kayangan.

Agenda utama RKT ini adalah menyikapi kondisi politik dan hukum jelang putusan Majelis Hakim terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Hoak. Ikut masuk agenda juga terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir (HT) dan organisasi lainnya yang selama ini dipahami oleh sebagian elite Kerajaan Kayangan sebagai radikal seperti Front Pembela Islam (FPI).

Tibalah waktu RKT yang dijadwalkan pada Senin, 8 Mei 2017. Meski RKT, tapi karena pembahasanya terkait persoalan yang telah membikin gelisah dan pusing Sang Raja, maka RKT pun berlangsung lama dan agak tegang. Rapat dibuka oleh Sang Raja yang membuka dengan satu rangkaian kalimat yang membikin suasana RKT langsung tegang. "Besok Selasa vonis Majelis Hakim atas saudara Hoak terkait kasus penistaan Islam akan diputuskan. Hoak sudah kalah pada di Pilgub Batavia, saya tidak mau tahu, besok Selasa putusan terhadap Hoak harus memperkuat dakwaan JPU," tegas Sang Raja. Sang Raja melanjutkan, "Tolong lakukan dengan cermat, dan jangan sekali-kali bawa-bawa nama saya terkait perintah ini," tegas Sang Raja. Rupanya ini karakter dasar Sang Raja yang selalu bermain aman dengan mengorbankan bawahannya. Mendengar pernyataan Sang Raja, para menteri saling memandang. Tampak terlihat wajah LBP dan TC terlihat paling tegang. Sesekali LBP dan TC meminum air putih yang ada di depannya, mungkin dengan maksud mengurangi rasa tegang. Maklum dua orang ini memang sejak proses awal Pilgub Batavia tampil paling norak dalam upaya memenangkan Hoak. Terlihat sekali keduanya pasang badan untuk Hoak.

Selepas menyatakan demikian, Sang Raja mempersilahkan kepada menteri-menterinya untuk memberikan pandangannya.

Mula pertama yang bicara justru bukan Wirmanto, tapi LBP. “Paduka, saya sudah maksimal membantu memenangkan Hoak dengan segala propaganda, tipu-tipu, dan sebagainya, namun hasilnya Hoak tetap kalah. Kesalahan fatal kita, upaya pendiskreditan terhadap pemilih Muslim justru jadi boomerang. Upaya pemojokan pemilih Muslim sebagai pemilih radikal, anti-NKRI, dan anti-Pancasila justru membuat mereka semakin solid. Ini benar-benar senjata makan tuan,” tegas LBP. “Terkait perintah Paduka untuk ‘mengamankan’ vonis Majelis Hakim, saya semaksimal mungkin akan melakukannya. Saya coba komunikasi dengan jajaran Mahkamah Adil,” tambah LBP.

Pandangan senada disampaikan Kepala Kepolisian TC. TC menyampaikan bahwa dirinya sudah berjuang maksimal agar Hoak tidak jadi tersangka. Namun faktanya sulit untuk tidak menjadikan Hoak tersangka. Memang beberapa hari menjelang Hoak tersangka, TC terlihat sibuk melobi menemui beberapa tokoh agama, termasuk tokoh dari Sang Surya, dengan maksud meyakinkan agar Hoak tidak tersangka. Namun kebanyakan tokoh yang ditemui justru minta agar Hoak tersangka, karena sejatinya Hoak memang layak jadi tersangka.

Sementara Menkumham YL hanya menyampaikan pendapatnya singkat. “Paduka, saya juga sudah membantu Hoak sesuai kapasitas saya. Sekedar contoh, itu Partai Piaraan Pemerintah (PPP) saya pecah belah dan kedua kubu terbukti mendukung Ahok”.

Selanjutnya giliran Menteri Pertahanan RR berpendapat. RR berbeda pendapat dengan para menteri sebelumnya. RR yang semasa menjadi tentara dikenal sebagai tentara nasionalis-hijau ini tegas menyatakan, “Maaf Paduka, rasanya cukup Paduka membela si Hoak sampai Pilgub Batavia kemarin saja. Soal penistaan agama, serahkan sepenuhnya kepada

pengadilan, tegas RR. RR melanjutkan, "Saudara LBP, anda juga sebaiknya jangan banyak bersikap atau bertindak yang cenderung melecehkan umat Islam. Sebagai non-Muslim, anda jangan tunjukkan lagi ketaksukaan dan perlawanannya kepada umat Islam. Sebagai Muslim, saya juga tersiggung." Mendapat omongan begitu, terlihat muka LBP merah padam, sementara Sang Raja terlihat geleng-geleng kepala saja sambil sesekali garuk-garuk pada belahan sisiran rambutnya. RR melanjutkan lagi, "Jadi, sekali lagi, sebaiknya Paduka tidak usah melakukan tindakan apapun untuk membela Hoak lagi. Sudah cukup pembelaan Paduka. Maaf, Hoak memang pantas dihukum, karena sudah berkali-kali lecehkan Islam."

Tampak terlihat Panglima Perang GN seperti mau menyampaikan pandangannya, namun melihat Sang Raja sering garuk-garuk kepala dan dua menteri berlatar belakang tentara tengah saling berbeda pendapat, GN pun menunda berpendapat.

Setelah mendengar pendapat RR, Sang Raja kemudian mempersilahkan Menkopolhukam Wirmanto untuk berpendapat. "Silahkan Pak Wirmanto untuk menyampaikan pendapatnya," ujar Sang Raja. Maka Wirmanto pun berpendapat, "Maaf Paduka, saya sepemikiran dengan Menteri Pertahanan RR. Sebaiknya Paduka tidak usah intervensi lebih jauh terkait kasus penistaan Islam. Cukup sudah bantuan Paduka selama Pilgub Batavia. Saya pun merasa cukup. Partai yang saya pimpin (HAMURABI) kan juga mendukung Hoak. Namun terkait penistaan Islam, saya tidak akan melakukan apapun untuk membela Hoak." Wirmanto yang selama jadi tentara dikenal dekat dengan kelompok Islam menambahkan, "Maaf Paduka, dengan segala hormat, saya khawatir saja, kalau Paduka terlampau jauh intervensi dan sampai Hoak divonis bebas, dikhawatirkan kemarahan umat

Islam tak terbendung. Cukup lama lho, umat Islam menahan diri untuk tidak marah. Paduka harus membuka mata dan hati. Sudah berapa kali umat Islam menggelar demo, namun selalu berlangsung teduh dan damai, meski kita, terutama Pak TC (Tampak Pak Wirmanto sambil melirik ke Kepala Kepolisian TC) sudah berusaha menghalangi aksi. Ini harus disikapi serius oleh Paduka. Jangan disepelekan, sekali lagi jangan diremehkan. Saya takut kalau putusan pengadilan mencampakkan rasa keadilan, maka amuk umat Islam tak akan bisa dibendung. Yang dikhawatirkan dampaknya bukan sekadar menuntut Hoak dihukum, tapi juga akan menuntut Paduka dimakzulkan. Kalau ini tuntutannya, maka akan sangat berbahaya, Paduka. Jadi sekali lagi, mohon Paduka tidak usah intervensi persidangan Hoak. Kalau Paduka bersikeras membebaskan Hoak, saya tidak bisa berbuat banyak. Sebagai Muslim, saya juga tidak mau berhadap-hadapan, apalagi sampai bentrok fisik dengan umat Islam," tegas Wirmanto.

Mendengar pendapat Wirmanto ini, tampak Sang Raja lebih banyak menunduk sambil berpura-pura menulis, sambil sesekali menatap wajah Wirmanto. Sementara terlihat muka LBP dan TC tampak merah dan gelisah. Wajah Panglima Perang GN yang duduk di sebelah Mendagri TK tampak begitu gembira. TK sendiri tampak biasa saja, gelisah tidak, namun menunjukkan wajah gembira juga tidak. Sekadar diketahui, sempat mencuat kabar bahwa selepas tidak terpilih sebagai Gubernur Batavia, Hoak akan diangkat jadi Mendagri untuk gantikan TK. Tentu dalam batin TK akan senang kalau Hoak divonis bersalah.

Seperti belum yakin dengan pandangan Wirmanto, Sang Raja mempersilahkan Panglima Perang GN untuk berpendapat. "Silahkan Pak GN, apa pendapat saudara", tanya Sang Raja.

"Baik Paduka. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, ijinkan saya untuk mengingatkan Kepala Kepolisian TC agar jangan terlalu telanjang dalam melakukan pembelaan terhadap Hoka. Kasihan institusi kepolisian. Jangan pula pernyataan-pernyataan Bapak bernada provokatif dan mengadu domba. Jangan pula diteruskan upaya stigmatisasi kepada kelompok yang anti-Hoak sebagai anti-NKRI dan anti-Pancasila. Tidak bagus sebagai Kepala Kepolisian bertindak demikian. Saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan apa yang saya nyatakan dalam acara di KempesTV yang dipandu oleh saudari Rosa. Saya sadar betul, pernyataan saya tersebut akan dipahami oleh publik bahwa antara tentara dan polisi ada beda pandangan dalam menyikapi perkembangan akhir-akhir ini. Tapi karena saya melihat bahwa Bapak tidak atau belum mau menyadari kesalahannya, terpaksa saya menyampaikan begitu di KempesTV." GN melanjutkan, "Paduka, sikap tentara tegas seperti saya nyatakan di Kempes TV. Tentara berasal dari rakyat dan umat Islam. Tidak mungkin saya berhadapan dengan umat Islam. Demikian Paduka, sikap dan posisi saya".

"Baik, terima kasih Panglima. Masih ada menteri lain yang mau berpendapat?" Mendapat pertanyaan dari Sang Raja, tampak tak satu pun ada menteri yang kembali mau berpendapat. Akhirnya Sang Raja melanjutkan pembicaraannya, "Baik, setelah mendengar banyak masukan, saya memutuskan untuk tidak melakukan intervensi apapun terkait persidangan Hoak. Biar hakim memutuskan secara mandiri dan adil." Sang Raja melanjutkan, "Pak LBP dan Pak TC, pernyataan saya di awal RKT tadi saya cabut ya. Biarkan persidangan Hoak berlangsung alamiah saja. Jadi putusan RKT ini tidak akan melakukan intevensi hukum apapun terkait kasus Hoak," tegas Sang Raja.

"Sebelum mengakhiri RKT ini, saya mau minta masukan khusus kepada Pak Wirmanto dan Pak Mendagri TK terkait HT," ujar Sang Raja. Pak Wirmanto pun berpendapat. "Perlu saya sampaikan Paduka, gagasan HT memang mencoba menghadirkan Khilafah dan ini tentu tidak sejalan dengan Pancasila. Tapi saya kok sangsi bahwa cita-cita politik pendirian Khilafah tersebut akan terealisasi. Maaf Paduka, saya berpandangan gagasan khilafah akan tinggal menjadi gagasan, tak akan pernah terwujud. Buktinya, setelah puluhan tahun HT hadir, tidak ada satu tanda-tanda kehidupan bakal hadirnya khilafah. Karenanya, menurut saya kok berlebihan dalam menyikapi HT. Meskipun begitu, kalau Paduka menghendaki pembubaran HT, saya dan menteri terkait akan menyiapkan konsep pembubarannya. Sebaiknya Paduka jangan mau dihasut oleh kelompok Islam lainnya yang mencoba mengadu domba sesama umat Islam. Paduka perlu hati-hati menyikapi HT. Paduka harus ingat bahwa sebagian besar umat Islam selalu mengaitkan dan menuduh Paduka sebagai keturunan PKI. Kalau Paduka mau menindak tegas HT, maka Paduka juga harus mengambil sikap yang sama terhadap komunis (PKI). Saya tidak melihat Paduka bersikap proporsional dalam menyikapi PKI dan HT serta organisasi Islam lainnya yang dituduh radikal. Paduka terlalu lembek dalam menyikapi PKI yang mulai bangkit. Saya bekas tentara dan saya tahu ada pergerakan PKI yang begitu massif, dan paduka cenderung diam. Demikian pandangan saya, Paduka."

"Baik, terima kasih Pak Wirmanto, selanjutnya bagaimana pandangan Pak Mendagri TK?" tanya Sang Raja pada TK. "Baik Paduka. Pandangan saya terkait HT sama persis dengan Pak Wirmanto. Saya menyerahkan sepenuhnya putusannya pada Paduka. Namun sebaiknya mempetimbangkan banyak hal sebelum membubarkan HT. Maaf Paduka, organisasi

transnasional bukan hanya HT, ada Ahmadiyah, Syiah, termasuk Jamaah Tabligh. Mereka, terutama Syiah juga mempunyai orientasi politik dan keagamaan sendiri yang kalau dilihat secara sederhana juga bertentangan dengan Pancasila. Demikian pandangan saya," ujar TK.

Selepas TK berbicara, tampak LBP, TC, dan GN juga sepertinya mau menyampaikan pandangannya, namun Sang Raja tidak memberikan kesempatan. Dalam benak Sang Raja mungkin ada pikiran, kalau mereka bertiga berbicara pasti RKT akan gaduh lagi. Lagi pula sudah bisa ditebak pendapanya. Kalau LBP dan TC pasti akan mendukung pembubaran HT. Sementara GN hampir pasti akan cenderung menolak pembubaran HT. "Baik, setelah mendengar masukan dari Pak Wirmanto dan Pak TK, saya belum mau memutuskan apapun tentang HT. Demikian RKT hari ini, selamat siang," ujar Sang raja menutup RKT.

RKT ini menggambarkan bahwa Kabinet Sang Raja mulai terbelah. Terlihat posisi Sang Raja tidak cukup kuat. Nyatanya menyikapi dua persoalan penting, Sang Raja tidak mampu bersikap apapun. Sang Raja lebih memilih ambil jalan aman, sekadar memperlama kekuasaannya.

Demikian laporan Kantor Berita Resmi Kerajaan Kayangan. Kalau pun dalam beberapa hal ada kemiripan dengan—mungkin—kasus yang terjadi di negara lain itu hanya kebetulan. Saya memang mendengar kasus serupa yang juga tengah terjadi di Indonesia. Namun saya melihat itu hanya kebetulan saja. Meski kata Quraisy Shihab tidak ada yang namanya kebetulan. Demikian. •

Menyoal Nalar Pemberantasan Teroris

Akhir-akhir ini ada perspektif publik yang berubah dalam menyikapi terorisme. Bila sebelumnya publik selalu mengamini *(sami'na wa atha'na)* setiap nalar yang mencoba dibangun *state* terkait dengan pemberantasan teroris, maka akhir-akhir ini mulai muncul perspektif yang berubah dan mencoba menggugat nalar tersebut.

Gugatan publik sangat rasional. *Pertama*, anggaran pemberantasan teroris termasuk cukup besar. Tahun 2014 saja sebesar 44 triliun. Pada APBN-P 2016, Densus 88 mendapat tambahan dana 1,9 triliun. *Kedua*, terlalu kerapnya kepolisian (Densus 88) melanggar hak asasi manusia atas mereka yang diduga teroris. Main tembak dan bunuh tanpa melalui proses mengadilan seakan menjadi kelaziman dalam penanganan kasus atas terduga teroris. Dari data yang sempat beredar di media, sedikitnya ada 121 terduga teroris meninggal tanpa melalui proses hukum.

Ketiga, setiap kasus "bom teroris" hampir selalu menyisakan

kejanggalan-kejanggalan yang berulang dan mengundang kritik atau setidaknya tanda tanya publik. Misalnya, terlalu kerapnya ditemukan kartu identitas (KTP atau paspor). Anehnya, selalu saja dalam KTP atau paspor tersebut tertulis beragama Islam. Seolah ingin membangun nalar bahwa teroris selalu dan bahkan pasti identik dengan Muslim.

Modus ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dalam pemberantasan terorisme global. Saat terjadi "bom Paris" misalnya, ditemukan paspor yang masih dalam kondisi utuh, tanpa rusak sedikit pun, padahal semua benda di sekelilingnya hancur dan hangus berantakan. Secara nalar, *rasanya tak mungkin ada teroris jihadis yang mau identitasnya diketahui.* Dalam kasus "bom *ricecooker*" di Bekasi juga ditemukan KTP. Janggalnya, dalam KTP tersebut terlihat foto pelaku perempuan tak mengenakan jilbab. Kalau pelakunya teroris jihadis, rasanya tak mungkin mau membiarkan auratnya terbuka meski hanya di KTP.

Gugatan publik ini sebenarnya sudah mulai terasa saat mencuat kasus Siyono yang meninggal secara tidak wajar di tangan Densus 88. Kasus Siyono mendapat perhatian dan gugatan banyak pihak. Muhammadiyah misalnya sampai harus menurunkan Tim Forensik untuk mengusut kematian Siyono. Hasilnya, kematian Siyono diyakini tidak wajar, ditemukan banyak tanda kekerasan pada tubuhnya dari kepala hingga kaki. Tim Forensik tidak menemukan adanya perlawanan dari Siyono seperti hasil pemeriksaan Densus 88. Pada tubuh Siyono dipastikan tidak ditemukan adanya luka akibat tindakan defensif atau pemberontakan.

Kasus "bom *ricecooker*" juga mendapat gugatan masyarakat, bahkan sampai ada yang menyebutnya sebagai rekayasa. Seperti pada kasus-kasus "bom teroris" sebelumnya, selalu

saja menyisakan kejanggalan yang memancing nalar publik untuk menggugatnya. Dalam kasus "bom *ricecooker*" misalnya, konon bom ini dibawa langsung dari Solo sudah dalam keadaan rakitan dan mampir dulu di Bekasi. Ini saja sudah merupakan kejanggalan tersendiri. Jarak tempuh Solo-Bekasi itu cukup jauh. Kalau dibawa melalui pesawat tentu tak mungkin, karena pasti akan ketahuan. Sementara kalau lewat jalan darat harus menembuh sedikitnya 12 jam. Apakah tidak akan membahayakan kondisi bom yang sudah dalam posisi rakitan. Belum lagi melihat tampilan orang yang diduga akan meledakan Istana Negara yang tak cukup meyakinkan, tentu semakin menambah kejanggalan bahwa "bom *ricecooker*" murni kerjaan teroris yang tanpa rekayasa.

Disebut juga oleh Densus 88 bahwa daya ledak "bom *ricecooker*" melebihi TNT. Ini semakin menambah kejanggalan lagi, karena di Indonesia yang memproduksi peledak jenis TNT hanya Pindad. Apakah kepolisian berani menuduh Pindad berada di belakang "bom *ricecooker*"? Pasti akan menolaknya sebagaimana ketika menolak pandangan banyak pihak dalam kasus "bom Bali" yang berkeyakinan, tentu dengan berbagai alat bukti dan data-data pendukung lainnya, bahwa ada "kekuatan asing" yang terlibat dalam kasus "bom Bali"—dengan "mengorbankan" Amrozi dan kawan-kawan—sebagai bagian dari skenario kontra-terorisme.

Sebaliknya, kepolisian tetap kekeh dengan kronologi yang dibuatnya bahwa "bom Bali" dibuat dan dirakit secara "tradisional" oleh Amrozi dan kawan-kawan dengan bahan baku bom yang dibeli dari Pasar Turi Surabaya, sebuah kronologi yang sulit dinalar. Bagaimana mungkin bom yang meledak cukup dahsyat—bahkan banyak pihak menduga sebagai jenis bom C4 atau SDAM yang hanya bisa dibuat di

negara-negara yang sangat terbatas, seperti Amerika, Inggris, Israel, dan Prancis—hanya dibuat dengan memakai cara-cara tradisional, dengan meramu dan merakitnya sendiri.

Selain kejanggalan-kejanggalan yang kerap terjadi, juga patut dipertanyakan adalah nalar *state* dalam pemberantasan terorisme. Ada dua nalar yang tak logis yang terus dikampanyekan ke masyarakat. Pertama, pelaku teroris adalah penganut radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme. Mereka hendak mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau *khilafah*, memandang demokrasi sebagai sistem *kufur*. Mereka juga menyebut pemerintah sebagai *thaghut*.

Kalau nalar yang dibangun demikian, mestinya sasaran teroris adalah simbol-simbol *state* dan perlawanannya bersifat vertikal, bukan horizontal. Namun coba kita tengok, korban-korban "bom teroris" selama ini sama sekali tidak menggambarkan perlawanan vertikal. Tak menggambarkan cara kerja teroris yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam dan menganggap pemimpin negara sebagai *thaghut*. Sebab yang menjadi sasaran adalah orang yang tengah rekreasi di Bali. Masjid, mushola, gereja, hotel, dan mall menjadi sasaran. Bahkan belum lama anak-anak di Samarinda juga menjadi korban. Kalaupun ada instansi kepolisian yang menjadi sasaran, kebanyakan yang menjadi sasaran adalah pos-pos polisi atau paling paling tinggi Mapolres. Belum menyentuh tingkat Mapolda dan apalagi Mabes Polri.

Kerja pelaku "bom teroris" ini tentu tak nyambung dengan nalar *state* dan ini patut dipertanyakan, apakah benar kerja teroris jihadis itu menghendaki berdirinya negara Islam, menerapkan *khilafah*, menganggap pemerintah sebagai *thaghut* atau hanya sekadar propaganda murahan berkedok terorisme dengan target menyudutkan (umat) Islam, sebagaimana kerap

dilakukan oleh kalangan *Islamofobia* yang bertebaran di mana-mana, termasuk di Istana, jajaran kepolisian, dan militer.

Kerja-kerja teroris model ini sebenarnya masih menggunakan cara-cara lama (Orde Baru). Ada setidaknya dua cara lama yang masih digunakan. *Pertama*, dari sisi pelaku selalu disematkan kepada orang Islam atau kelompok yang identik dengan Islam. *Kedua*, sasaran korban peledakan bom selalu ruang publik, bukan institusi-institusi vital milik negara.

Publik tentu masih ingat kasus pembajakan Pesawat Garuda di Don Muang, Thailand pada 1981. Sekadar diketahui, yang dituduh membajak adalah apa yang oleh pihak militer saat itu disebut sebagai Komando Jihad. Hebat benar teroris Muslim Indonesia di tahun 1981 sudah bisa membajak pesawat. Ini yang saya sebut cara murahan untuk menyematkan baju teroris pada (umat) Islam.

Contoh lainnya kasus peledakan BCA di Pecenongan Jakarta Pusat, 1984, yang menjadi tertuduh adalah AM. Fatwa, mantan Menteri Perindustrian M. Sanusi, dan HR. Dharsono. Menurut pengakuan pelaku peledakan, peledakan BCA disebutnya sebagai pelampiasan atas tragedi Tanjung Priok tahun 1983 yang menewaskan ratusan dan bahkan ada yang menyebut ribuan umat Islam. Masih ingat pula peledakan Candi Borobudur, 1985? Pelaku peledakan dituduhkan kepada, selain Komando Jihad, juga Husein Ali al-Habsyi, ulama tua yang [mohon maaf] matanya sudah tidak bisa melihat. Husein divonis seumur hidup. Nalar sehat mana yang bisa mempercayai bahwa ulama buta dituduh terlibat dalam peledakan Candi Borobudur. Modusnya nyaris tak berbeda jauh dengan "bom teroris" yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kedua, nalar *state* yang menyebut bahwa teroris adalah alumni Afganistan, alumni Poso, alumni Moro, alumni al-

Qaeda, alumni Hamas, dan anggota ISIS. Dengan nalar ini, seakan *state* ingin membangun perspektif bahwa teroris yang ada di Indonesia itu jihadis, sadis, dan berkemampuan merakit bom dari yang *low* sampai *high explosive*.

Nalar ini juga tidak logis. Kalau teroris yang menyeramkan dan berasal dari alumni dengan beragam medan pertempuran ini benar adanya di Indonesia, maka tak perlu ada Aksi 411 dan Aksi 212. Bukannya dua aksi tersebut merupakan bentuk lunak dari "kemarahan" umat Islam terhadap Ahok dan juga aparat hukum yang lembek dan lelet dalam memproses kasus penistaan Al-Qur'an yang dilakukan Ahok? Kalau wujud teroris jihadis itu ada, maka Ahok, termasuk pejabat-pejabat yang diduga "melindungi" Ahok sudah lama "dilenyapkan". Tentu—sebagaimana nalar *state*—bukan hal sulit bagi teroris jihadis untuk melakukannya. Ahok juga tak akan mungkin punya keberanian kampanye ke mana-mana. Pasti alumni-alumni itu akan menjadikan Ahok sebagai "target".

Percayalah, sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara paling toleran dan damai dibanding negara lainnya yang memiliki tingkat heterogenitas yang sama. Karenanya, tidak perlu dikembangkan dan "dikampanyekan" Indonesia sebagai negara intoleran, yang tak menghargai kemajemukan. Apalagi kalau kampanye ini dilakukan sekadar untuk mendapatkan "proyek terorisme" atau pun menebar kebencian terhadap Islam. Kalau niatnya hanya sebatas ini, percayalah, meskipun digelontorkan dana dengan jumlah tak terhingga, pasti akan mengalami kegagalan. *Wamakaru wamakarallah, Wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam.* •

Terorisme dan Kemanusian yang Ambigu

Status pendek saya di media sosial di-*bully* banyak orang, tentu tidak sedikit juga yang mengapresiasi. Kemarin tulisan saya berjudul: "Pelaku bom bunuh diri adalah korban" juga menuai kritik dari banyak orang. Ada kritik yang wajar dan sehat. Namun tidak sedikit kritik yang sangat kampungan. Kritik yang kampungan misalnya yang menuduh saya tidak bersimpati dan berempati pada korban, yang menuduh saya pro teroris.

Apa yang salah kalau saya menyebut bahwa pelaku bom bunuh diri adalah korban. Mereka ini adalah korban dari indoktrinasi dan agitasi yang dilakukan bisa jadi dari kelompok ekstremis (saya sama sekali tidak tertarik menggunakan istilah radikalis atau fundamentalis) yang memahami agama secara sempit, namun bisa juga—berangkat dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, terlebih di era Orde Baru—dari oknum aktor negara yang masih terobsesi meniru gaya-gaya lama dalam menciptakan dan memelihara keresahan di masyarakat

dan sekaligus memojokkan umat Islam.

Bahkan ada komentar yang lebih *ndeso* lagi yang menyebut saya bersikap dan menulis seperti itu karena pelaku bom dalam rangkaian peristiwa “bom teroris” mempunyai keterkaitan dengan Muhammadiyah. Terlihat orang yang berkomentar seperti ini tak pernah membaca tulisan saya. Orang yang berkomentar seperti ini biasanya masih dihinggapi oleh watak busuk jahiliah pra-Islam yang bangga dengan *ashshabiyah*-nya, dengan menafikan ukhuwah Islamiyah yang harusnya dikedepankan.

Meskipun begitu, tidak sedikit pula yang mengapresiasi tulisan saya. Bentuk apresiasi itu setidaknya tergambar di media online. Tulisan saya dimuat setidaknya di enam media online. Bukan saya yang mengirim tulisan tersebut, tapi media online tersebut yang meminta ijin ke saya untuk memuatnya. Mungkin media-media ini melihat bahwa dalam tulisan saya ada perspektif lain, perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang dalam menyikapi kasus bom teroris.

Kritik, hujatan, makian, dan komentar negatif dalam menyikapi sebuah tulisan itu hal biasa. Saya bukan orang yang alergi terhadap itu semua. Hal yang disayangkan dari kebanyakan komentar atas tulisan saya, selalu “hanya” menempatkan korban sebagai orang yang perlu dibela. Seakan hanya perlu berempati dan bersimpati kepada korban. Sebaliknya, kebanyakan mereka menempatkan pelaku, tersangka, atau bahkan yang baru terduga sebagai pelaku teror sebagai pesakitan, orang yang pantas dikutuk, dimaki, dihujat, dan sebagainya.

Cara berpikir seperti ini tentu tidak sepenuhnya salah karena selama ini di masyarakat sudah terbangun narasi yang menempatkan para pelaku, tersangka, dan terduga pelaku pada

posisi serba negatif. Bukan hanya dalam konteks kejahatan terorisme, tapi juga kejahatan lainnya, seperti korupsi dan narkoba.

Ketika ada orang disangka korupsi, langsung beragam cap negatif disematkan padanya. Tidak pernah berpikir apakah dia tersangka sebenarnya atau karena ditersangkakan. Ketika ratusan kepala daerah menjadi tersangka korupsi, anggota DPRD menjadi tersangka dalam kasus korupsi berjamaah, langsung segala predikat negatif juga disematkan kepada para kepala daerah atau anggota DPRD tersebut. Publik tidak pernah bertanya, kenapa bisa ratusan kepala daerah menjadi tersangka? Publik tidak pernah bertanya kenapa puluhan anggota DPRD bisa melakukan korupsi berjamaah.

Nyaris sedikit sekali yang mencoba berpikir bijak, yang selain menyalahkan para pelaku korupsi juga menyalahkan sistem yang ada. Menyalahkan sistem yang memproduk para koruptor. Padahal kalau yang pernah belajar teori sistem, maka rumusnya sederhana, bahwa sistem yang baik akan menghasilkan *output* baik pula. Sebaliknya kalau ada sistem *kok output*-nya buruk, jorok, dan korup, maka dipastikan sistemnya juga bobrok.

Coba bayangkan, kalau ada 500-an bupati/wali kota dan gubernur, lalu yang masuk penjara berjumlah lebih dari 200 orang, apa pantas kita menyalahkan sepenuhnya kepada mereka yang menjadi tersangka (koruptor)? Kalau ada 100 anggota DPRD di sebuah provinsi lalu semuanya (berjamaah) ditetapkan sebagai tersangka korupsi, apa patut kita menyalahkan sepenuhnya para anggota DPRD tersebut tanpa mencoba menyalahkan sedikit pun sistem yang ada? Narasi berpikir seperti ini menurut saya sangat tidak sehat.

Dalam kasus narkoba pun sama. Kalau ada beberapa

orang berpesta narkoba lalu tertangkap pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka, kebanyakan kita langsung menilai negatif tanpa mencoba iba dan berempati sambil melakukan "gugatan" kepada negara yang melakukan pembiaran(?) atas peredaran narkoba yang begitu massif di masyarakat. Termasuk menggugat tentang siapa sesungguhnya yang menjadi *backing* para bandar narkoba, mempertanyakan aliran dana para bandar narkoba. Gugatan kepada negara ini selayaknya disampaikan secara demonstratif, karena faktanya peredaran narkoba terbesar justru terjadi di antaranya di lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan negara, seperti lembaga pemasyarakatan.

Terkait kasus bom teroris pun sama. Ketika terjadi bom teroris, empati dan simpati mengalir begitu cepat dan deras kepada si korban—sesuatu yang tentunya baik dan seharusnya. Meskipun derasnya empati dan simpati ini juga perlu dipertanyakan bila menilik kasus teror lainnya yang menimpa kiai, ustaz, atau yang teridentifikasi Muslim, yang cenderung sepi empati dan simpati dari masyarakat. Bahkan media massa pun, terlebih yang *mainstream,* tampak enggan dan bahkan alergi untuk memberitakan sebagaimana pemberitaan dalam kasus bom Surabaya yang begitu massif. Sekali lagi, poin ini jangan dipahami dan disimpulkan saya tidak berempati dan bersimpati pada korban bom teroris. Terlalu *stupid* kalau menyimpulkan demikian. Poinnya, saya menggugat ketakproporsionalan masyarakat dan aparat negara dalam menyikapi keseluruhan aksi teror.

Sebaliknya, hujatan, makian, dan sumpah serapah langsung diberikan kepada si pelaku. Tak ada secuil pun rasa iba terhadap si pelaku, sambil bertanya: kenapa si pelaku ini mau menjadi pelaku peledakan bom bunuh diri? Apakah betul

karena sebatas pandangan keagamaan yang sempit mereka bersedia bunuh diri? Siapa yang mencuci otak si pelaku, sambil juga "menggugat" negara dengan cara menengok ke belakang terkait dengan penanganan beberapa tindak kejahatan terorisme.

Dalam kasus bom Bali misalnya, apa betul Amrozi dkk adalah pelaku tunggal atau sengaja "dikorbankan" sebagai bagian dari skenario kontra-terorisme. Dalam kasus bom Bali, pihak kepolisian kekeh dengan kronologi yang dibuatnya bahwa "bom Bali" dibuat dan dirakit secara "tradisional" oleh Amrozi dkk, dengan bahan baku bom yang dibeli dari Pasar Turi Surabaya. Bagaimana mungkin bom yang meledak cukup dahsyat—bahkan banyak pihak menduga sejenis bom C4 atau SDAM yang hanya bisa dibuat di negara-negara yang sangat terbatas, seperti Amerika, Inggris, Israel, dan Prancis—dibuat dengan memakai cara-cara tradisional, dengan meramu dan merakitnya sendiri. Saya juga masih ingat dengan "senyum merekah sambil sedikit tertawa" Kapolri saat itu Da'i Bachtiar di hadapan para tersangka bom Bali, Amrozi cs, yang sempat menuai kecaman banyak pihak, termasuk pihak keluarga korban dari luar negeri.

Apa benar dalam kasus "Teroris Temanggung" yang sempat tayang *live* sehari semalam di beberapa televisi di mana ratusan aparat kepolisian dan Densus diterjunkan untuk mengepung rumah reot di tengah sawah itu betul di dalamnya ada seorang teroris? Lalu kalau hanya seorang teroris, kenapa secara demonstratif negara menerjunkan pasukan begitu banyak? Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam penggerebegan rumah reot tersebut? Sebagai penyumbang pajak atas negara ini, saya berhak untuk bertanya terkait hal ini.

Dalam menyikapi kasus teroris, saya juga melihat ada

semacam "kemanusiaan yang ambigu" di masyarakat, terutama di kalangan para aktivis HAM, atau mereka yang sering berceloteh sebagai seorang humanis, pluralis, toleran, dan paling Pancasilais. Mereka sering menyatakan bahwa dalam menyikapi aksi bom teroris jangan melihat, terlebih karena faktor agamanya. Tapi lihatlah dari sisi kemanusiaan. Lihatlah korban sebagai manusia dengan nilai-nilai kemanusian universal. Kalau ada persenan sampai 1.000, saya ingin mengatakan: sepakat 1.000% dengan pernyataan demikian.

Kenyataannya tidak demikian. Kalau terhadap korban bom kita bisa begitu berempati dan bersimpati dengan dalih kemanusian, tapi kenapa terhadap puluhan nyawa yang meninggal hanya karena baru diduga teroris, mereka ini diam membisu. Nyaris "teriakan kemanusiaan" mereka tak terdengar sebagaimana ketika mereka berempati dan bersimpati pada korban bom teroris. Padahal dari sisi kemanusian, apa beda korban bom teroris dengan mereka yang baru diduga sebagai teroris lalu dibunuh. Apakah karena yang meninggal itu adalah terduga teroris dan pasti Muslim, sehingga tak perlu berempati dan simpati? Inilah kemanusian yang ambigu!

Kalau bersepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, siapapun orangnya atau institusinya tak boleh bertindak melawan atau bertentangan dengan hukum, membunuh manusia seenak sendiri, harusnya "teriakan kemanusian" mereka sama lantangnya ketika ada orang-orang yang "dimeninggalkan" untuk kasus yang belum terbukti bersalah secara hukum.

Ada dua poin dari status maupun tulisan saya. *Pertama*, "gugatan" terhadap negara. Jangan ada kesan bahwa negara mempermainkan emosi masyarakat dalam pemberantasan tindak kejahatan teroris, dengan bertindak diskriminatif dalam

melihat aksi teror. Ini yang dirasakan ketika melihat kasus seperti bom Surabaya di satu sisi dengan kasus penganiayaan kiai atau ustaz di sisi lain.

Kedua, jangan ada "kemanusiaan yang ambigu". Cepat berempati dan bersimpati terhadap korban bom teroris itu bagus dan sangat mulia, tapi diam membisu terhadap pembunuhan yang menimpa puluhan orang yang baru sebatas diduga teroris itu sama sekali tidak bagus, tidak beradab, dan antikemanusian. Kasus Siyono harus menjadi pembelajaran kita, termasuk aparat negara. Sekian. •

Pelaku Bom Bunuh Diri adalah Korban

Ketika kemarin saya membuat status pendek di media sosial (Facebook) bahwa pelaku bom bunuh diri adalah korban, mereka yang tewas karena bom bunuh diri juga korban, banyak yang mengamuk dan tidak terima. Bahkan ada dan banyak yang menuduh saya mendukung tindak teroris. Aneh dan terlalu "pintar" mereka yang berkesimpulan demikian.

Meskipun tidak mahir sepenuhnya, namun saya sedikitnya paham tentang Islam, dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka

bumi," (QS. al-Mâidah: 32). Ayat ini sering saya sebut sebagai "ayat terorisme" dan kerap saya sampaikan di banyak tempat, bahwa Islam tidak mentolerir apapun bentuk pembunuhan, termasuk tindakan teror yang tanpa sebab.

Saya tentu bersedih dan mengutuk keras atas kejadian bom gereja di Surabaya. Namun saya tidak mau ikut-ikutan latah mengutuk si pelaku bom bunuh. Saya tetap berkeyakinan bom Surabaya tidak berdiri sendiri. Ada dalang atau bahasanya Din Syamsuddin disebutnya aktor intelektual, di belakangnya dan pelaku bom bunuh diri hanyalah "korban" dari aktor intelektual atau dalang tersebut. Siapa dalangnya? Bisa beragam. Namun dalam kajian teori tentang terorisme, utamanya dalam hal yang terkait dengan bahasan *state terrorism*, disebutkan bahwa negaralah sesungguhnya pelaku tindak terorisme yang paling besar dan sadis.

Coba tengok dalam catatan sejarah, dengan dan atas nama negara, berapa juta manusia yang telah menjadi korban teror yang dilakukan oleh Adolf Hitler, Benetto Mussolini, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Tse Tsung, Asoka, George Bush (senior maupun junior), Pol Pot (Khmer Merah), Slobodan Milosevic, dan Junta Militer Myanmar, penguasa kulit putih Afrika Selatan era pra-Nelson Mandela, Soeharto, dan banyak lagi.

Dalam kajian hubungan internasional, terutama terkait dengan Teori Aktor, juga disebutkan bahwa negara mempunyai peran penting dalam relasi-relasi internasional, termasuk relasi yang berujung pada rangkaian pembunuhan, atau lebih tepatnya pembantaian, dan bahkan genosida.

Berangkat dari paparan teoretis di atas, maka ketika membincang terorisme dalam konteks global, misalnya ISIS, jelas dalangnya adalah si pembuat ISIS itu sendiri, yaitu Amerika, Inggris, dan Israel. Data terkait dengan keterlibatan

ketiga negara ini dalam pendirian ISIS berserakan di mana-mana. Jangan pura-pura bodoh dan tidak tahu. Ketika berbicara ISIS dengan terus menerus melakukan penyudutan terhadap (kelompok) Islam tanpa secuilpun mencoba menyeret ketiga nama negara tersebut, itu adalah cermin pola pikir penuh dengan kebodohan.

Konteks terorisme yang terjadi di Indonesia bisa saja karena dampak dari terorisme global, artinya tak berdiri sendiri. Ada keterlibatan pihak lain, termasuk aktor negara maupun aktor non-negara lain, namun bisa juga berdiri sendiri. Pertarungan pengaruh dan antarelite negara bisa juga menjadi pemicu tindakan terorisme, selain tentunya penyebab klasik terjadinya terorisme yang sudah kerap disebut banyak orang, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan sebagainya.

Konteks Indonesia, terorisme negara bukan barang asing dan paling sering dilakukan oleh rezim Orde Baru. Kasus Komando Jihad, Tanjung Priok, Warsidi Lampung, Petrus, dan banyak lagi adalah contoh bahwa terorisme negara bukan tidak pernah terjadi di Indonesia.

Dalam beberapa kasus penanganan tindak terorisme juga patut diduga negara terlibat dalam tindak terorisme itu sendiri. Puluhan nyawa terduga teroris yang melayang tanpa diproses melalui pengadilan adalah cermin nyata di mana negara telah menjadi bagian dari pelaku teror. Kasus paling mengenaskan adalah kasus Siyono, yang juga meninggal karena dituduh teroris. Dalam kasus Siyono, sebagai bentuk pengakuan atas kesalahannya, pihak Densus bahkan sampai mencoba memberikan semacam "uang belasungkawa" yang konon ditolak oleh pihak keluarga korban.

Kalau mengkritisi beberapa kejadian teror bom yang terjadi

belakangan di Indonesia, sebenarnya korbannya bukan hanya mereka yang meninggal atau terluka di lokasi pengeboman, tapi pelaku bom sendiri adalah itu korban. Para pelaku bom bunuh diri ini sering disebut sebagai "pengantin bom", mereka telah dicuci otaknya sampai kemudian bersedia untuk melakukan bom bunuh diri. Tengok pelaku bom Surabaya konon adalah seorang ibu dengan kedua anaknya yang masih kecil. Menyedihkan sekali bukan? Mereka sejatinya korban juga, korban dari si pencuci otak ini. Siapa si pencuci otak? Berangkat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, aktor yang bernama negara sangat mungkin dan bahkan patut diduga menjadi bagian dari pencuci otak. Bagi yang pernah menjadi aktivis era 1970–1980, coba ditanya, pasti tidak sedikit yang pernah dicuci otaknya oleh negara dan kemudian menjadi intel atau mata-mata bagi negara untuk memata-matai sesama warga negara.

Kita tentu membayangkan betapa sedihnya keluarga dari korban teror bom yang meninggal dunia maupun cidera. Tapi coba renungkan dengan hati pula, bayangkan, betapa sedihnya juga keluarga dari pelaku bom bunuh diri. Coba kalau pelaku bom bunuh diri itu bagian dari keluarga anda, apa anda akan rela dicaci maki, disumpah serapah sebagai biadab, kejam, dan sebagainya?

Tidak cukup dengan beramai-ramai mengecam pelaku teror bom. Memangnya si pelaku bom bunuh diri yang juga meninggal itu secara kasat mata mendengar kecaman kita. Justru jauh lebih penting untuk dilakukan adalah mendesak secara serius kepada negara untuk mengungkap siapa aktor intelektual dan termasuk tidak menutup kemungkinan ada agenda apa di balik setiap teror bom yang terjadi. Ini yang tak pernah dituntut untuk diungkap secara serius: Aktor intelektual

dan agenda di balik teror bom.

Kenapa saya mempunyai perspektif seperti ini dalam setiap muncul kasus terorisme di Indonesia, karena saya percaya bahwa teori konspirasi itu ada dan bekerja dengan baik dan efektif di Indonesia. Sekian. •

Islam dan Masalah Pemakzulan Pemimpin

Membincang pemakzulan berarti membincang soal kepemimpinan. Dan membincang soal kepemimpinan berarti membincang tujuan kepemimpinan. Dalam Islam, tujuan kepemimpinan adalah terwujudnya kebaikan bersama *(maslahat al-ammah)*. Ditegaskan dalam salah satu *qaidah ushul*, *tasharraful imam alâ al-raiyyati manûtun bi al-maslahah*, bahwa kebijakan pemimpin disebut sukses kalau dalam kepemimpinannya berhasil menyejahterakan atau memaslahatkan rakyatnya.

Maslahat al-ammah hakikatnya berkenaan dengan *maqâshid al-syariah*, yang oleh Al-Ghazali dalam *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl* atau Al-Syatibi menyebutnya *kulliyat al-khamsah* membaginya dalam lima hal: perlindungan terhadap agama *(hifdz al-dîn),* jiwa *(hifdz al-nafs),* akal *(hifdz al-aql),* keturunan *(hifdz al-nasl),* serta harta *(hifdz al-mâl).* Din Syamsuddin menambahkan *hifdz al-dawlah,* perlindungan terhadap negara dari kemungkinan siapapun yang akan menjarah kekayaan negara dan memecah belah dan *hifdz al-bi'ah*, perlindungan

terhadap lingkungan. *Maqashid al-syariah* yang ditawarkan Al-Ghazali dan Al-Syatibi plus Din Syamsuddin tentu bersumber dari *syara'*. *Maslahat* dalam konteks ini hanya sebagai metode, bukan dalil atau sumber hukum. *Maslahat* masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti Al-Qur'an dan Sunah. Jika *maslahat* bertentangan dengan *nas*, maka tertolak dengan sendirinya.

Untuk mewujudkan *maslahat al-ammah* bukan perkara mudah bagi seorang pemimpin. Prinsip-prinsip politik Islam yang tentu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, seperti keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), musyawarah (*al-syura*), dan kebebasan (*al-hurriyah*), harus menjadi pijakan dasar dalam kepemimpinan.

Tidak mudahnya muwujudkan kemasalahatan, maka dalam Islam menjadi pemimpin itu persyaratannya sangat ketat. Merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 30, seorang pemimpin harus siap memposisikan diri sebagai "wakil Tuhan" (*khalifatu-Allah*) di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan, dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin dituntut untuk senafas dan sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah yang dipastikan senafas juga dengan *maslahati al-ammah*, sehingga kita sering mendengar ungkapan "suara rakyat adalah suara Tuhan". Bukan sebaliknya, posisi sebagai wakil Tuhan justru dijadikan sebagai pembenar dan alat untuk menindas dan menciptakan kerusakan (*mafsadat,* lawan dari *maslahat)* dengan mengatasnamakan Tuhan.

Tidak mudahnya menjadi pemimpin, maka sebagaimana ditegaskan dalam An-Nisa' ayat 59, Islam mengharusan orang yang beriman untuk taat selain kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada pemimpin *(minkum,* di antara orang-orang beriman). Bedanya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

bersifat mutlak, sementara ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan: *fa in tanâza'tum fî syai'in fa ruddụhu ilallâhi war-rasûli*, pemimpin yang patut ditaati adalah yang jika terjadi perbedaan pendapat dalam mencapai *maslahat al-ammah* mengembalikannya kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (al-Sunah). Dalam konteks negara bukan Islam, seperti Indonesia, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunah tidak harus dipahami secara legal formal sesuai syariat Islam, tapi lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi kesepakatan bersama, seperti Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Maka pemimpin yang patut ditaati (dalam konteks Indonesia) adalah pemimpin yang ketika mendapati perbedaan pendapat dalam upaya mewujudkan *maslahati al-ammah* dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bukan justru sebaliknya, menyengaja *vis a vis* dengan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip fundamental dalam berbangsa dan bernegara dilanggarnya secara ugal-ugalan.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 58 disebutkan: *Innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ hakamtum bainan-nâsi an tahkumụ bil-'adl*, yang mengharuskan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia juga menetapkannya dengan adil. Islam tidak mengajarkan untuk memberikan sebuah kepemimpinan kepada orang yang tidak amanah, zalim, fasad, dan fasik. Ditegaskan pula dalam QS. Al-Maidah ayat 32, *man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasâdin fii al-ardhi faka-annamâ qatala alnnâsa jamî'an waman ahyâhâ faka-annamâ ahyâ alnnâsa jamî'an,* barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat

kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Prinsip-prinsip fundamental ini menjadi bagian dari hasanah pemikiran politik Islam yang kerap disebut sebagai *fiqh siyasah*. Di dalamnya di antaranya berbicara masalah kepemimpinan, termasuk tentang persyaratan menjadi pemimpin dan bagaimana pula memberhentikan *(memakzulkan)* seorang pemimpin.

Persyaratan Pemimpin

Islam tak menawarkan konsep baku dalam masalah kepemimpinan politik. Hal ini sudah jamak di kalangan pemikir politik Islam klasik, pertengahan maupun kontemporer. Tak adanya konsep baku ini dilandasi oleh kenyataan historis terkait suksesi kepemimpinan dalam tradisi kepemimpinan Islam. Di era *khulafâ' al-rasyidîn* misalnya, dari empat suksesi kepemimpinan tak ada (digunakan) konsep baku.

Suksesi dari Rasul Muhammad SAW. ke Abu Bakar dilakukan lewat mekanisme "*bay'ah* terbatas" (sebagaian menyebutnya *ahl al-halli wa al-aqd*). Dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab memakai mekanisme *penunjukkan langsung* oleh Abu Bakar. Dari Umar bin Khattab ke Usman bin Affan memakai mekanisme *ahl al-halli wa al-aqd*. Dari Usman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib dilangsungkan dengan mekanisme *bay'ah umum*. Selebihnya, suksesi kepemimpinan yang digunakan di era khilafah-khilafah sesudahnya menganut sistem *mamlakah* (kerajaan) dengan model turun temurun.

Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dasar kepemimpinan saja. Dalam konteks ini nyaris tak ada perbedaan berarti

di antara para pemikir politik Islam. Terkait persyaratan pemimpin misalnya, hampir kebanyakan pemikir politik Islam bersepakat bahwa syarat menjadi pemimpin harus berilmu pengetahuan luas (Al-Baqilani, Al-Baghdadi, Al-Mawardi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun). Kebanyakan pemikir juga bersepakat bahwa pemimpin harus mampu bersikap adil, mempunyai kemampuan leadership, sanggup mengelola dan bersedia bermusyawarah sehingga terhindar untuk memimpin dengan sewenang-wenang atau Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun menyebutnya dengan *al-kifâyat*. Pemimpin juga harus berintegritas (*amanah*) dan berbudi pekerti luhur (*wara'*). Berbadan sehat, dengan penekanan pada sehat penglihatan, pendengaran, dan lisan.

Secara prinsip, dalam hal-hal yang bersifat fundamental terkait masalah kepemimpinan, para pemikir Islam bersepakat. Mereka hanya berbeda pada pernik-perniknya saja, seperti keharusan pemimpin dari suku Quraisy, ahlul bait atau cukup orang Arab, pemimpin harus kaya secara materi, dan laki-laki. Belakangan, banyak pemikir politik Islam kontemporer yang mentolerir perempuan menjadi pemimpin. Dalam *al-Sunah al-Nabawiyyah: Baina al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, Muhammad al-Ghazali, mantan aktivis Ikhwanul Muslimin misalnya menolak kalau persyaratan menjadi pemimpin ditentukan oleh jenis kelamin. Terpenting menurutnya adalah yang paling memiliki kemampuan di antara umat. Al-Ghazali mencontohkan pengangkatan *asy-syafa* (perempuan) sebagai pengawas keuangan di pasar Kota Madinah oleh Umar bin Khattab.

Pemakzulan Pemimpin

Mengkaji pemikiran politik Islam, sejatinya sulit menemukan pemikiran yang berbicara tentang mekanisme pemberhentian

(pemakzulan) pemimpin. Yang banyak dikaji justru berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pemimpin dapat dimakzulkan. Ini menunjukkan adanya konsistensi pemikiran politik Islam bahwa Islam tak mempuyai konsep politik yang baku, termasuk dalam hal pemakzulan pemimpin.

Sebab pemimpin dimakzulkan ada yang bersifat standar dan generik, seperti lemah fisik dan mental, kehilangan organ-organ tubuh lainnya terlebih panca indra, sebab ditawan oleh musuh. Namun ada sebab yang bersifat *syar'i* yang menyebabkan pemipin pantas dimakzulkan. Misalnya karena sebab menyimpang dari ketentuan syariat, tak mampu berbuat adil, fasik, dan fâjir. Pemimpin yang melakukan ini semua, pemakzulannya menjadi dimungkinkan.

Sebaliknya, kalau mendapati pemimpin yang mampu menjadikan kekuasaan yang dipegangnya untuk menegakkan keadilan, kebijakan yang dibuatnya pro syariat, mampu melaksanakan dan menjamin hak-hak Allah, karena sejatinya fungsi kepemimpinan dalam Islam adalah menghimpun hak-hak umum yang bersifat integral antara hak Allah dan hak rakyat untuk mewujudkan *maslahat al-ammah*, maka tak ada alasan untuk memakzulkannya. Sebaliknya, harus didukung dan ditaatinya.

Bagaimana jika terdapat pemimpin yang sebelumnya terlah berbuat fasik, mengingkari syariat, berlaku tak adil kemudian mencoba untuk berbuat adil? Menurut Al-Mawardi dalam *al-ahkam al-shuthaniyyah*, pemimpin tersebut tetap tidak boleh menjalankan kepemimpinannya kecuali dengan kontrak sosial yang baru.

Bagaimana Indonesia?

Setiap negara dalam konstitusinya dipastikan didapati ketentuan yang mengatur pemakzulan pemimpin. Tak terkecuali konstitusi kita, UUD 1945. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B Ayat 1–6 mengatur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal-pasal dan ayat-ayat ini menyebutkan bahwa untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus ada bukti pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kalau didapati ada bukti pelanggaran hukum, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) –dengan dukungan 2/3 anggota DPR– untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum.

Disebutkan pula, bila MK memutuskan presiden dan/atau wakil presiden terbukti melanggar hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ayat ini mensyaratkan MK harus memutuskan bahwa pendapat DPR membuktikan presiden dan/atau wakil presiden bersalah. Kalau tidak terbukti, maka proses pemakzulan tidak bakal berlanjut ke MPR.

Disebutkan juga bahwa MPR wajib melaksanakan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil

presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna.

Kalau membaca keseluruhan isi pasal-pasal dan ayat-ayat di atas, memakzulkan presiden itu bukan perkara mudah, untuk tidak mengatakan mustahil dilakukan konteks saat ini. Bahwa kalau mengkritisi kebijakan-kebijakan presiden, tentu dengan mengacu para aturan perundang-undangan yang ada, secara politik bisa saja presiden dinilai melanggar hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, namun untuk proses politik selanjutnya di DPR dan MPR, belum lagi proses hukumnya di MK, nyaris mustahil pemakzulan dapat dilakukan. Konstelasi politik di DPR dan tentunya juga di MPR, di mana kekuatan fraksi pendukung presiden tampil sangat dominan, maka hampir mustahil dapat menyeret presiden ke meja pemakzulan.

Dengan realitas politik ini, rezim yang berkuasa dan pendukungnya tidak usah alergi atau sensitif, apalagi intimidatif dan ngamuk-ngamuk atas perbincangan atau wacana pemakzulan yang dilontarkan beberapa pihak. Hal yang wajar membincang atau mewacanakan pemakzulan presiden. Selain konstitusional karena memang tertera di dalam konstitusi, secara politik masyarakat pun berhak menilai presidennya, termasuk menilai pantas atau tidaknya untuk dimakzulkan. •

Bagian II

Musuh Pancasila, Demokrasi, dan Sekularisme

Musuh Pancasila

Musuh Pancasila bukan kerumunan jutaan umat itu
Musuh Pancasila bukan mereka yang berdzikir atas nama Allah
Musuh Pancasila bukan mereka yang bersalawat kepada Paduka Rasulullah
Musuh Pancasila bukan mereka yang menyeru Salat Subuh berjamaah.

Tapi...
Musuh Pancasila adalah gerombolan orang yang sok Pancasilais, tapi ada reuni pasukan putih blingsatan seperti cacing kepanasan.
Musuh Pancasila adalah gerombolan orang yang lantang teriak Pancasila, tapi melacurkan Pancasila.
Musuh Pancasila adalah gerombolan orang yang pandai menuduh orang lain anti-Pancasila, tapi kelakuannya anti-Pancasila.
Musuh Pancasila adalah gerombolan orang yang mulutnya teriak bhinneka, teriak pluralisme, tapi tidak siap menerima perbedaan sebagai keniscayaan.
Musuh Pancasila bukan mereka yang membawa bendera hitam

bertuliskan "*Laa ilaha illa-Allah Muhammad Rasulullah*".
Musuh Pancasila bukan mereka yang membawa bendera putih bertuliskan laa ilaha illa-Allah Muhammad Rasulullah.
Musuh Pancasila bukan mereka yang berbaju putih yang teriak kalimat takbir, tahlil, dan tahmid.
Musuh Pancasila bukan mereka yang baru sebatas teriak ingin mendirikan "Negara Islam".

Tapi...
Musuh Pancasila adalah gerombolan pengeruk kekayaan negeri dan memarkir kekayaannya di luar negeri.
Musuh Pancasila adalah gerombolan bandit-bandit politik yang pat gulipat mengkorup uang negara.
Musuh Pancasila adalah gerombolan elite politik yang fasih bicara Pancasila tapi korupsi hebat uang rakyat.
Musuh Pancasila adalah gerombolan pejabat-pejabat negeri ini yang menjadikan jabatannya untuk berburu rente dan mengenyangkan perut sendiri, saudara dan para kroninya.

Musuh Pancasila bukan jutaan orang berbaju putih yang tulus-tulus datang ke Istiqlal dan Monas.
Musuh Pancasila bukan Habib-Habib, Kiai-Kiai, Ustadz-Ustadz yang bermunajat kepada Allah di tanah lapang Monas.
Musuh Pancasila bukan wajah-wajah umat yang mustadzafin secara politik dan ekonomi yang terepresentasikan hadir di Istiqlal dan Monas.
Musuh Pancasila bukan wajah-wajah polos yang rela dengan biaya sendiri datang tengah malam hingga siang hari ada di Istiqlal dan Monas.

Tapi...

Musuh Pancasila adalah mereka yang mengaku elite umat, tapi kerjaannya "jualan" umat hanya untuk peroleh kekuasaan yang semu.
Musuh Pancasila adalah mereka yang mengaku elite ormas Islam, tapi kerjaanya melacurkan ormas yang dipimpinnya untuk peroleh pundi-pundi ekonomi pribadi.
Musuh Pancasila adalah mereka yang mengaku elite Islam dengan simbol-simbol keagamaan yang melekat di tubuhnya yang bangga bertandang ke Istana, tapi abai terhadap jeritan umat.
Musuh Pancasila adalah elite agamawan yang bangga menjadi *political broker* bagi gerombolan orang yang haus kuasa daripada menjadi *cultural broker* bagi umatnya yang miskin dan lapar.

Musuh Pancasila bukan mereka yang tulus datang ke Monas dengan biaya sendiri, bukan dari uang partai dan para cukong.
Musuh Pancasila bukan mereka yang memprotes kebijakan negara dengan cara *pépé* (berjemur diri) di Monas tanpa kekerasan dan merusak.
Musuh Pancasila bukan mereka yang tak punya kuasa politik untuk melawan kekuasaan yang pongah dan korup, kecuali hanya dengan tunduk bertakarub ila-Allah.
Musuh Pancasila bukan mereka yang tak punya kuasa ekonomi untuk melawan perampok-perampok kekayaan negara kecuali hanya dengan mengadu langsung ke Allah Rabbul-Izzati. •

Politik Tanpa Nilai

Bicara soal nilai *(value)* dalam politik biasanya merujuk pada pemikiran-pemikiran politik klasik era Yunani Kuno yang direpresentasikan oleh setidaknya Plato dan muridnya Aristoteles. Politik dalam pengertian klasik dimengerti bahwa politik hadir tak lain adalah untuk mewujudkan "kebaikan bersama" *(public good, al-maslahah al-ammah)*.

Dalam pemikiran politik Islam klasik, pemikir seperti al-Farabi sering diposisikan sebagai representasi "pemikir nilai", disamping tentu ada nama-nama lainnya, seperti Abi Rabi, al-Ghazali, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Al-Farabi bahkan menulis buku berjudul *Madinah al-Fadhilah* yang kerap "dituduh" sebagai *copy paste* dari karya Plato: *Republic*. Al-Farabi hidup di era Daulah Abbasiyyah yang saat itu tengah mengalami kekacauan. Maka pemikiran-pemikiran yang ditawarkan adalah bagaimana mewujudkan negara atau *khilafah* (Daulah Abbasiyyah) yang ideal.

Konteks Indonesia, pemikiran-pemikiran yang berkembang di seputar jelang kemerdekaan (persidangan BPUPKI), yang kemudian menghasilkan rumusan Pancasila adalah produk

dari politik nilai. Sila-sila dalam Pancasila sarat dengan nilai-nilai agung dan mulia, sebagaimana ditawarkan Plato maupun al-Farabi.

Saat ini, terlebih di era politik liberal, politik dalam pengertian klasik (nilai) nyaris menjadi hal yang sangat asing *(gharib)*. Politik saat ini telah benar-benar dipahami hanya dalam pengertian yang pragmatis, di mana politik hanya dimengerti sebagai perebutan kekuasaan dan kepentingan. Saya tentu sangat paham bahwa politik itu memang (di antaranya) berbicara soal bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan. Tak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Ini ungkapan yang kerap kita dengar, yang menggambarkan bahwa politik semata dimengerti sebagai kepentingan tanpa berusaha melibatkan politik dalam pengertian nilai meskipun hanya secuil. Tentu boleh dan sah memahami politik sebagai kekuasaan dan kepentingan, tapi sertakanlah atau selipkanlah politik sebagai nilai meski hanya sedikit saja.

Coba tengok saja, praktik politik di Indonesia, terlebih pasca Orde Baru, praktis yang tampil dan menjadi *mainstream* adalah politik tanpa nilai. Saya lebih suka menyebutya sebagai "politik comberan", politik yang semata bicara soal kekuasaan dan kepentingan, sementara politik dalam pengertian sebagai nilai dimarjimalkan. Produk dari praktik politik yang seperti ini, sekarang kita menyaksikan betapa bobroknya kehidupan politik saat ini. Politik nyaris berlangsung tanpa nilai. Nyaris tak ada komitmen, tak ada kepercayaan, dan tak ada integritas. Melanggar komitmen, melanggar kepercayaan, tipu-tipu, berkhianat, mengorbankan atau menikam kawan sendiri dan apalagi lawan, seakan menjadi sebuah keniscayaan dalam praktik politik saat ini.

Sekadar contoh dan mengingatkan memori publik, saat

Pilpres 2009, Megawati memutuskan untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saat itu nyaris tak ada gugatan dari kubu Megawati, termasuk pengikut-pengikutnya kepada Prabowo, terutama yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang pernah dilakukannya di akhir kekuasaan Orde Baru, 1998. Namun ketika Pilpres 2014, di mana Prabowo kembali maju, menjadi capres berpasangan dengan Hatta Radjasa, Prabowo mendapat hujatan luar biasa dari para pendukung Joko Widodo (Megawati) yang maju berpasangan dengan Jusuf Kalla. Seakan lupa peristiwa hampir lima tahun yang lalu di mana Megawati dan Prabowo berpasangan mesrah. Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo dikuliti habis. Mereka seakan lupa dengan fakta-fakta bahwa di sekeliling Megawati dan Joko Widodo juga terlalu banyak jenderal-jenderal yang tangannya berlumuran darah rakyat dan umat Islam yang tak berdosa.

Bukan hanya soal pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo, ada satu hal mendasar yang menjadi ciri khas dari "politik comberan", yaitu melanggar komitmen (janji) seakan menjadi hal biasa dan tanpa dosa. Saat menjelang Pilpres 2009 Megawati dan Prabowo menandatangani (di atas materai) apa yang disebut "Perjanjian Batu Tulis", yang ditandatangani tanggal 16 Mei 2009. Isi perjanjian ini beredar luas di masyarakat. Salah satu isi perjanjian ini (poin 7) disebutkan: "7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014."

Ketika tiba waktunya (jelang Pilpres 2014), di mana komitmen terebut seharusnya dijalankan, dengan entengnya Megawati mengkhianati sebuah komitmen bersama. Megawati justru mendukung calon presiden yang jauh dari layak bernama Joko Widodo, yang dengan berbagai polesan, termasuk dugaan

kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2014, akhirnya terpilih menjadi Presiden. Inilah gambaran nyata dari "politik comberan" yang tanpa nilai. Melanggar komitmen dianggap hal biasa dan bahkan mungkin suatu keharusan. Kalau mendasarkan pada politik nilai, pengingkaran atas komitmen yang dibuat bersama adalah hal yang sangat prinsip.

Begitu pun yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi "pembantu" Presiden Megawati yang diberi kewenangan sebagai Menkopolkam. Dengan gayanya yang *sok* santun, juga melakukan "pengkhianatan" terhadap Megawati. Memanfaatkan kelebihan fisiknya, tutur katanya yang bagus, dan ditambah tampilannya yang terkesan didhalimi seiring dengan pernyataan Taufiq Kiemas yang menyebut dirinya sebagai "jenderal kekanak-kanakkan", SBY memanfaatkan pernyataan Taufiq Kiemas tersebut dan juga pengunduran dirinya dari Kabinet Gotong Royong untuk membangun citra diri sebagai orang yang dizalimi Megawati. Cara-cara politik seperti ini juga gambaran nyata dari cara berpolitik yang culas dan miskin nilai.

Akibat peristiwa itu, hingga saat ini hubungan Megawati dengan SBY berlangsung tidak mesrah. Megawati masih merasa tersakiti oleh "pengkhianatan" yang dilakukan SBY. Saya tidak tahu, apakah pengkhiatan yang dilakukan SBY ini juga mengingatkan Megawati atas "pengkhianatan" yang pernah dilakukannya terhadap Prabowo.

Saat Pilkada Jakarta 2012, di mana Partai Demokrat mengusung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, gunjingan yang saya dengar di internal Partai Demokrat (saat itu saya masih menjadi Pengurus Harian Partai Demokrat), SBY sejatinya tidak mendukung secara serius mencalonan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Sebaliknya justru

mendukung pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kalau gunjingan ini benar adanya, hal ini juga pencerminan nyata dari politik tanpa nilai.

Gunjingan bahwa SBY lebih mendukung Jokowi dan Ahok bisa jadi benar kalau kita mengikuti dengan seksama atas langkah-langkah politik yang selama ini dilakukan SBY. Misalnya, kasus yang tentu saja saya sangat paham adalah penghancuran secara sistematis dan terencana terhadap karir politik Anas Urbaningrum. Saya tentu paham betul dengan kasus Anas. Penghancuran atas karir politik Anas dimulai sejak menjelang Kongres Bandung 2010. Sebagaimana tertuang dalam buku yang saya tulis: *"Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas"*, terang benderang bahwa SBY memang tidak merestui Anas maju sebagai calon Ketua Umum pada Kongres Bandung. Namun citra yang dibangun, seolah SBY merestui semua calon ketua umum: Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, dan Andi Alfian Mallarangeng.

Dengan rekayasa sedemikian rupa, tentu dengan memanfaatkan kuasa yang ada di tangannya, SBY akhirnya berhasil "mengandangkan" Anas dari hiruk pikuk politik dengan memenjarakannya sebagai koruptor. Kejam banget bukan? Inilah contoh dari politik comberan yang tanpa nilai.

Sebelum kasus Anas, SBY juga telah tega "membiarkan" besannya Aulia Pohan masuk penjara 2009. Mungkin SBY terilhami oleh Hadis, "demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya." Sayangnya, Hadis tersebut justru hanya sebatas pencitraan. SBY hanya mencoba membangun citra bahwa dirinya mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum. Buktinya, besannya pun bisa masuk penjara. Kalau memang komitmen menegakakan hukum, kenapa sikapnya

terhadap Aulia Pohan ini tidak diberlakukan kepada misalnya putranya Edhy Baskoro Yudhoyono (Mas Ibas) yang namanya terlalu kerap disebut dalam beberapa persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk banyak kasus?

Saat Pilpres 2014, terlihat dengan nyata bahwa SBY yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden mencoba memposisikan diri sebagai *King Maker*, namun peran ini gagal dimainkan dengan baik. Karena gagal, SBY akhirnya memilih untuk bersikap “netral”. SBY mencoba mengambil posisi untuk tidak mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla maupun Prabowo-Hatta Radjasa. Sikap SBY ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa yang ada dalam pikirannya itu hanya yang terkait dengan kepentingan diri dan keluarganya. Padahal tengok saja, pada Pilpres 2014 itu, besannya Hatta Radjasa menjadi kontestan cawapres dari Prabowo. Dengan budaya Timur dan dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki Hatta Radjasa, sepatutnya SBY mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. Namun hal ini tidak (bisa) dilakukan oleh SBY.

Belakangan, dari informasi terbatas yang saya terima, tidak didukungnya pasangan Prabowo-Hatta Radjasa karena SBY memang lebih merasa nyaman dengan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Bahkan dari informasi terbatas yang saya terima tersebut, SBY sebenarnya yang menjadi “penentu” kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Kemudian sikap SBY pada saat Pilkada Jakarta 2017. SBY mempunyai calon bernama Agus Harimurti Yudhoyono (Sang Putra Mahkota). Wajar kalau SBY mendukungnya. SBY tentu saja juga menikmati pertarungan “politik identitas” yang berbau SARA selama berlangsungnya Pilkada, sesuatu yang sah saja dalam politik. Tak ada yang salah dari politik identitas.

SBY ikut memainkan sentimen-sentimen keagamaan umat Islam yang anti kepada Ahok. Beberapa kali SBY membuat pernyataan yang menyudutkan Ahok. Ketika Sang Putra Mahkota dinyatakan kalah di putaran pertama, sekali lagi, info terbatas yang saya terima, SBY sebenarnya lebih mendukung pasangan Ahok-Djarot. Konon SBY tidak yakin kalau Anies-Sandi akan berhasil mengalahkan Ahok-Djarot yang modal pendanaannya nyaris tak terhingga. Pilihan dukungan SBY kepada Ahok-Djarot rasanya sulit menyebut sebagai pilihan penuh nilai.

Dengan rentetan sikap SBY yang demikian, menjelang akhir-akhir masa penetapan pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, saya dibikin kaget (tentu dengan pendekatan politik nilai) ketika SBY mendekat ke Prabowo. Apa SBY tidak ingat hampir lima tahun lalu ketika dirinya lebih memilih bersikap netral meski pada akhirnya justru menjadi "penentu" kemenangan Jokowi–Jusuf Kalla daripada mendukung Prabowo yang berpasangan dengan besannya Hatta Radjasa? Kalau konsisten dengan sikapnya, mestinya SBY mengambil sikap netral lagi pada Pilpres 2019. Capresnya hampir pasti tidak berubah, yaitu Jokowi dan Prabowo (masih memungkinkan Prabowo mendorong Gatot Nurmantyo).

Saya menggunakan sebutan "mendekat", karena sejatinya SBY yang lebih membutuhkan Prabowo ketimbang Prabowo membutuhkan SBY. Untuk mendekat ke kubu Jokowi (Megawati) hampir mustahil akan terwujud. Penyebabnya lebih karena belum membaiknya komunikasi SBY dengan Megawati akibat "pengkhiatanan" yang pernah dilakukannya. Sementara mengambil posisi netral jelas secara politik (kekuasaan) tidak menguntungkan SBY. Maka pilihannya—meski harus menabrak nilai-nilai yang selama ini sudah dinafikan SBY—

adalah mendekat ke kubu Prabowo.

Politik tanpa nilai bukan hanya dilakukan para "tetua" bangsa ini, di kalangan politisi muda pun tak jauh berbeda. Kalangan politisi muda saat ini lebih sibuk menawarkan (menjual) dirinya untuk sebatas menjadi wakil presiden. Wajah sebagai negarawan yang semestinya sibuk dan prihatin memikirkan nasib bangsa dan negaranya, sama sekali tak terlihat pada diri wajah-wajah politisi muda yang menonjol saat ini. Tak terlihat ada nilai-nilai politik yang ditawarkan, kecuali hanya sebatas perebutan kekuasaan dan kepentingan itu. Sekian. •

Budak Demokrasi

Ketika salah satu pendiri Hizbut Tahrir Abdul Qadir Zallum menulis buku "Demokrasi Sistem Kufur" pada 1990, saya termasuk yang mencibirnya. Cibiran saya tentu argumentatif. *Pertama*, demokrasi memang bukan sistem yang baik, di dalamnya juga terdapat sisi-sisi kelemahan. Namun dibanding dengan sistem politik lainnya, demokrasi masih merupakan yang terbaik. *Kedua*, menulis buku dengan judul seperti itu tentu sama halnya menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Padahal pada saat buku ini terbit, kampanye tentang demokrasi termasuk HAM sedang marak-maraknya.

Ratusan juta dolar uang digelontorkan ke negara-negara berkembang, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim untuk suksesnya "proyek" demokrasi. Di Indonesia cukup banyak hadir lembaga-lembaga baru yang dimaksudkan untuk melakukan penguatan terhadap demokrasi, baik lembaga asing yang berdiri sendiri maupun lembaga Indonesia yang berkolaborasi dengan lembaga luar negeri. Awal tahun 1990-an bahkan bisa disebut sebagai tahun kemenangan demokrasi seiring dengan ambruknya Uni Soviet.

Namun belakangan, apa yang terjadi di Indonesia seakan sejalan dengan jalan pikiran Zallum. Meski tidak harus menyebutnya sebagai "sistem kufur", praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia menggambarkan ketaknyambungan antara demokrasi dalam pengertian yang seharusnya *(das sollen)* dengan demokrasi yang pengertian senyatanya *(das sein)*.

Das Sollen Demokrasi

Secara harfiyah, demokrasi dapat dimengerti sebagai sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elite yang memerintah. Demokrasi juga bisa dipahami sebagai *polity* di mana semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya (Ulf Sundhaussen, 1992)

Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi dimengerti sebagai *government of the people, by the people, and for the people*. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan tersalurnya aspirasi dan partisipasi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam ikut membuat keputusan atau kebijaksanaan. Demokrasi juga berarti mentolerir adanya perbedaan pendapat atau dalam pengertian tertentu disebut dengan konflik. Konflik yang dimaksud di sini tentunya bukan konflik yang dapat merusak sistem politik yang sedang berlangsung.

Samuel Huntington menyoroti demokrasi dari satu sisi, yaitu pelaksanaan pemilu. Suatu sistem dikatakan demokratis

bila para elite pemerintahan diseleksi secara periodik melalui pemilu yang jujur, adil, di mana para kandidat bersaing secara bebas untuk mendapatkan suara (Ramlan Surbakti, 1996).

Nurcholish Madjid (1999) menawarkan prinsip-prinsip demokrasi. *Pertama*, keselarasan kemajemukan. Masyarakat yang dengan teguh berpegang pada pandangan hidup yang demokratis, harus memelihara dan melindungi ikatan-ikatan kemajemukan yang sudah tumbuh, dan sekaligus mengembangkannya untuk tujuan kebersamaan yang lebih tinggi. *Kedua*, perlunya pendidikan demokrasi. demokrasi bukan sesuatu yang akan terwujud bagai jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha, dan eksperimentasi kita sehari-hari. *Ketiga*, permusyawaratan, yang menuntut adanya kedewasaan dalam mengemukakan pendapat, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. *Keempat*, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Prinsip ini mengemukakan dasar bahwa suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan dengan kebaikkan cara yang ditempuh untuk meraihnya. *Kelima*, permufakatan yang jujur, yang menolak jenis-jenis permufakatan yang curang, culas, dan bahkan mengkhianati nilai dan semangat demokrasi, yang menuntut adanya ketulusan dalam permufakatan. Dan *keenam*, adanya prinsip kebebasan hati nurani *(freedom of conscience).* Prinsip ini meneguhkan pandangan mengenai manusia yang positif, dan optimis yang akan mendorong kerjasama antarwarga masyarakat dan saling mempercayai iktikad baik masing-masing.

Fahmi Huwaydi (1996) berpandangan bahwa demokrasi menghendaki masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka serta mengatur urusannya, dan tidak menghendaki memilih pemimpin atau sistem yang tidak

disukai. Dalam demokrasi masyarakat juga harus memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban penguasa, adanya pemilu yang bebas, adanya prinsip mayoritas, sistem multi-partai, serta adanya kebebasan pers, dan independensi lembaga peradilan.

Praksis Demokrasi

Pengertian demokrasi yang indah tersebut dalam tataran praksis nyaris justru terjadi paradoks secara sempurna. Kalau paradoks yang terjadi dipilah secara tegas, di mana praktik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi akan dinilai sebagai kompatibel dan praktik yang tak sejalan akan dinilai sebagai paradoks, tentu ini hal yang seharusnya. Namun yang terjadi justru tidak selalu demikian. Dalam praktiknya, setidaknya kalau diamati sejak pasca Orde Baru, proses dan produk politik akan dinilai demokratis sangat bergantung di tangan para pemuji dan pemuja demokrasi atau dalam tulisan ini saya menyebutnya juga sebagai "budak" demokrasi.

Ambil contoh misalnya pilkada langsung yang sering dibanggakan sebagai berwujudan dari praktik demokrasi dan berhasil mendongkrak peringkat demokrasi Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga. Pilkada langsung telah membawa banyak dampak negatif. Terjadi konflik vertikal maupun horizontal, pembakaran atau perusakan kantor KPU, perusakan fasilitas umum terjadi di banyak daerah, karena merasa tidak puas dengan hasil pilkada langsung sebagai bagian dari proses demokrasi.

Anehnya, meski telah membawa banyak *madharat*, pilkada langsung tetap saja dipertahankan, tentu dengan alasan-alasan demokrasi, meski hasilnya bopeng di sana sini. Para pegiat dan "budak" demokrasi pun bahu membahu mempertahankan mekanisme Pilkada langsung, tentu dengan alasan sama:

menegakan prinsip demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi rakyat dan suara terbanyak. Mereka inilah yang berhasil "memaksa" Presiden SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, untuk melanggengkan mekanisme pilkada langsung.

Di saat yang sama, sebagai buah dari proses politik demokrasi, ketika marak kehendak untuk membuat Perda Syariat yang terjadi di banyak daerah justru mendapat tentangan begitu rupa dari kelompok-kelompok pro demokrasi. Ironisnya, alasan yang digunakan untuk menentang Perda Syariat juga sama, yaitu demokrasi, di mana Perda Syariat dianggap bertentangan dengan demokrasi dan mengangkangi HAM.

Kalau demokrasi menjadi acuan, hasil studi di banyak daerah tidak ditemukan adanya prosedur politik yang dilanggar. Lazimnya pembuatan peraturan perundangan-undangan ada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka pembuatan Perda Syariat di banyak daerah juga didahului dengan kajian atas ketiga hal tersebut.

Jadi dalam perspektif demokrasi, yang mengagungkan suara terbanyak, keteraturan, dan prosedural, tidak ada yang salah dalam proses pembuatan Perda Syariat. Dan usulan penerapan Perda Syariat juga selalu hadir dalam masyarakat yang dianut oleh mayoritas agama tertentu, katakanlah Islam. Nyaris tidak pernah ada usulan pembuatan Perda Syariat yang muncul dalam komunitas masyarakat yang berada dalam posisi minoritas. Kalau aspek mayoritas dijadikan ukuran, sekali lagi, tak ada yang salah dalam pembuatan Perda Syariat.

Bila mayoritas menjadi asas proporsional dalam penerapan Perda Syariat, maka daerah lain yang dihuni oleh mayoritas agama tertentu, tidak ada salahnya dan tidak bisa dipersalahkan

juga membuat Perda Syariat sesuai dengan syariat agama yang dianut dan diyakininya oleh mayoritas masyarakat di daerah tersebut. Misalnya di Manokwari, Fakfak, atau daerah lainnya yang mayoritas penduduknya beragama Katolik atau Kristen, yang hendak menerapkan Syariat Katolik atau Syariat Kristen tidak ada yang berhak untuk melarangnya, bahkan semestinya didukung sepenuhnya, karena yang akan diterapkan adalah "syariat agama" yang berwajah illahiyah, yang kalau dijalankan dengan benar diyakini akan lebih banyak membawa *maslahat* bagi siapapun. Begitu juga kalau di beberapa kabupaten di Provinsi Bali hendak menerapkan Perda Syariat Hindu, maka tidak ada juga yang boleh menghalangi atau merasa keberatan atas upaya tersebut.

Dengan kata lain, tidak perlu dipersoalkan selagi Perda Syariat Islam, Perda Syariat Katolik, Peda Syariat Kristen, Perda Syariat Hindu atau agama lainnya tersebut tetap dibuat dalam bingkai NKRI yang berideologikan Pancasila, menghargai nilai-nilai kemajemukan agama atau adat istiadat lain yang ada di daerah yang bersangkutan, serta seminimal mungkin menghindari adanya warga masyarakat yang merasa dirugikan. Bahwa andai pun ada yang merasa dirugikan dari terbitnya Perda Syariat, juga merupakan konsekuensi dari proses demokrasi, yang berlaku juga dalam pembuatan produk peraturan lainnya yang di luar Perda Syariat. Seperti produk pilkada langsung, banyak juga masyarakat yang dirugikan dalam proses politik tersebut, namun itu harus dipandang sebagai konsekuensi logis dari praktik demokrasi. Lazim dalam demokrasi, tentu akan ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada juga pihak yang merasa dirugikan.

Contoh lainnya adalah hiruk pikuk terkait dengan Pilkada DKI Jakarta yang ditandai dengan terjadinya ketegangan

umat Islam dengan Ahok dan kelompoknya. Ketegangan ini sebenarnya lebih banyak dipicu oleh sikap yang dipertontonkan Ahok, termasuk tim suksesnya yang dalam perspektif normatif demokrasi tentu sangat tidak demokratis.

Entah sudah berapa kali sikap Ahok dan kelompok pendukungnya yang sudah menciderai demokrasi. Dari mulai penistaan terhadap Surat al-Maidah ayat 51 yang kemudian melahirkan gelombang aksi damai yang berlangsung secara besar-besaran: Aksi Damai 411 dan Aksi Damai 212 sampai pada pernyataannya yang menyatakan bahwa Pancasila belum memiliki atap kalau minoritas belum jadi Presiden.

Namun sikap Ahok tersebut, di mata "budak-budak" demokrasi dinilai sebagai demokratis. Kalau mendasarkan pada prinsip demokrasi yang misalnya menjunjung tinggi prinsip mayoritas, maka ucapan Ahok itu justru tidak menggambarkan orang yang paham demokrasi. Sama ketika umat Islam di Amerika berkeinginan atau menuntut menjadi presiden di negeri Paman Sam tersebut. Itu juga keinginan yang tidak demokratis. Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menista Surat al-Maidah ayat 51, jelas secara normatif paradoks dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Namun pernyataan-pernyataan-pernyataan Ahok yang demikian didiamkan dam bahkan diamini dan didukung oleh "budak-budak" demokrasi yang selama ini bekerja dan mengkampanyekan demokrasi untuk kepentingan "tuannya" demokrasi.

Sebaliknya, ketika umat Islam tersinggung atas ucapan Ahok lalu mengadakan aksi-aksi damai yang tentu secara normatif sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, justru dinilai sebagai tidak demokratis, dan bahkan membahayakan demokrasi. Menurut para "budak" demokrasi, Aksi 411 dan

Aksi 212 menunjukan bahwa ke depan demokrasi Indonesia akan semakin berbahaya karena dominasi kelompok Islam radikal semakin menguat; Kesempatan kelompok minoritas seperti Cina, Kristen, dan lain-lain di Indonesia ke depan semakin sempit dan tidak mempunyai harapan; Aksi 411 dan Aksi 212 membuat demokrasi Indonesia mundur; Sesudah Aksi 411 dan Aksi 212 di mata internasioanal level demokrasi Indonesia merosot (meskipun tidak seburuk Pakistan, tapi setidaknya seperti Malaysia); jumlah peserta Aksi 221 menurutnya hanya sekitar 700 ribu orang.

Luar biasa bukan? Dengan dalih demokrasi para "budak" demokrasi ini menyerang kelompok lain yang tengah mengekspresikan nilai-nilai demokrasi dan sama sekali tak merasa bahwa tindakan para "budak" demokrasi ini sejadinya justru paradoks dengan demokrasi. Sekian. •

Jokoi dan Nestapa Ideologi Negara

Dulu, ketika umat Islam berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit melalui akulturasi budaya dan penetrasi politik yang *soft*, lahirlah kerajaan Islam pertama di tanah Jawi. Disusul kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Ketika penjajah Belanda masuk yang selain membawa misi ekonomi juga membawa misi agama. Baca berturut-turut disertasi Deliar Noer (1987), Alfian (2016), dan Alwi Shihab (2001), mulailah Kerajaan Islam diacak-acak sedemikian rupa. Hasilnya bisa kita tengok, sekarang kerajaan Islam hanya menjadi situs sejarah.

Memasuki era perjuangan merebut kemerdekaan, umat Islam berjuang habis-habisan. Agama (Islam) menjadi spirit perjuangan. Pekikan takbir, merdeka atau mati tak lepas karena spirit Islam. Putusan-putusan politik ormas-ormas Islam dalam perjuangannya melawan penjajah juga dilandasi oleh spirit Islam. Sehingga lahirlah misalnya Resolusi Jihad I dan II (bayangkan kalau putusan sejenis Resolusi Jihad dikeluarkan di era saat ini untuk melawan neo-kolonialisme dan perampok-

perampok kekayaan negara, yang secara substantif sejatinya tak berbeda jauh dengan penjajah, pasti akan dicap sebagai radikal, ekstremis, dan sebagainya).

Jelang kemerdekaan, ketika sidang-sidang BPUPK (sesuai dengan bahasa Jepangnya: *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*, yang benar sejatinya tanpa I), terutama saat pembahasan ideologi negara terjadi perdebatan panjang dan alot antara kubu Islam (Olivier Roy menyebutnya Islamis) yang menghendaki negara Islam dengan kubu nasionalis yang menghendaki dasar negara Pancasila.

Akhirnya dengan kearifan para pendiri bangsa yang tulus-tulus dan demi masa depan Indonesia disepakati pada 22 Juni 1945 (maaf bukan tanggal 1 Juni 1945 *lho*) bahwa ideologi negara adalah "Pancasila plus Syariat Islam" yang penerapannya diperuntukkan hanya untuk umat Islam, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Sukiman Wirjosandjojo menyebutnya sebagai *gentleman agreement*.

Bagi yang nalar pikirnya sehat, putusan Piagam Jakarta adalah kesepakatan yang demokratis dan adil. Demokratis, sebagai umat mayoritas, wajar diberi "hadiah" berupa Piagam Jakarta. Bukankah dalam rumus demokrasi memang mensyaratkan suara mayoritas? Coba tengok hasil-hasil pilpres, pilgub, dan pilbup/pilwakot ditentukan oleh suara terbanyak. Perkara untuk mencapai suara mayoritas dilakukan dengan cara-cara tak jujur dan adil dipersoalkan. Adil, sebagai umat mayoritas tentu sumbangsihnya terhadap kemerdekaan Indonesia juga dominan, sehingga wajar mendapat "hadiah" Piagam Jakarta.

Harus dipahami, bahwa kehendak untuk menegakkan syariat Islam (tidak mesti dalam sebuah negara Islam) karena dilandasi oleh keyakinan bahwa ajaran Islam bersifat holistik

dan terbukti selama penjajahan hukum sekuler yang diterapkan oleh penjajah Belanda tak mampu menjadi jawaban untuk tegaknya hukum yang adil. Bukan "negara Islam" tapi "negara Pancasila plus Syariat Islam", itu sudah merupakan keputusan dan "mengalahnya" sikap politik umat Islam demi kepentingan dan keutuhan bangsa Indonesia yang baru mau merdeka.

Belum genap dua bulan, rumusan *apik* Piagam Jakarta mendapat "gugatan" yang diyakini "penuh kebohongan" oleh mereka yang menyebut dari Indonesia Timur yang mengancam akan merdeka kalau isi Piagam Jakarta yang memuat "syariat Islam" tidak dihapus. Saya sebut "penuh kebohongan" karena sampai saat ini tak ada sejarahwan manapun yang berani memastikan siapa sesungguhnya tentara Jepang yang menemui Mohammad Hatta. Bagaimana mungkin peristiwa yang sangat penting tidak ada satu pun bukti fisik pun. Aneh bukan?

Meskipun kebenaran soal tentara Jepang yang menemui Hatta disangsikan, namun sekali lagi, umat Islam dengan legowo dan "mengalah" menerima "pencabutan" syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus Hadikusumo (saat itu menjadi Ketua PB Muhammadiyah) dengan linangan air mata (kalau tidak salah baca di buku: *Hidup Itu Berjuang: 75 Tahun Kasman Singodimedjo*) akhirnya menyepakati perubahan isi Piagam Jakarta.

Ki Bagus mengusulkan Sila Pertama Pancasila diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Begitu juga isi dari Pasal 29 UUD 1945 diubah menyesuaikan isi Sila Pertama Pancasila. Sambil berurai air mata, Ki Bagus menegaskan bahwa "Yang Maha Esa" itu maksudnya tidak lain adalah kalimat *tauhid, laa ilaaha illa-Allah*. Untuk diketahui, bahwa hanya Kasman yang berhasil membujuk Ki Bagus untuk menyetujui perubahan Piagam Jakarta. Soekarno sekalipun tak mampu membujuk Ki

Bagus. Akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta pun hilang dari peredaran.

Ketika persidangan di Konstituante gagal menyepakati soal ideologi negara dan kemudian Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959, maka sebelum keluarnya Dekret, tokoh-tokoh NU, termasuk KH. Saifuddin Zuhri mantan Menteri Agama era Soekarno, mengusulkan agar dalam isi Dekret Presiden disebut juga Piagam Jakarta.

Akhirnya dalam Dekret Presiden disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Baca buku KH. Saifuddin Zuhri, *Kembali ke Pesantren*. Buku ini, termasuk buku *Hidup Itu Berjuang: 75 Tahun Kasman Singodimedjo*, dan buku lainnya wajib dibaca oleh tokoh-tokoh Islam, termasuk politisi-politisi Muslim, terlebih dari partai Islam dan berbasis massa Islam, agar paham sejarah politik Islam.

Sampai dengan terbitnya Dekret Presiden hingga saat ini, maka betapa jelas relasi Islam dan politik di Indonesia. Indonesia itu "bukan negara agama" (tentu yang dimaksud agama adalah Islam), tapi juga bukan negara sekuler sebagaimana di Barat. Indonesia adalah negara Pancasila yang menempatkan agama pada posisi penting.

Posisi Indonesia yang seperti ini yang semestinya dipahami oleh siapapun, terlebih Presiden Jokowi. Berwacana atau berpolemik *nyeleneh* dengan mengatakan bahwa agama dan politik itu harus dipisah, maka sama halnya merongrong dan melecehkan Pancasila. Dan mereka yang merongrong dan melecehkan Pancasila, bisa jadi karena memang tidak paham Pancasila. Namun bisa juga paham tapi sengaja bermaksud untuk melecehkan Pancasila.

Percayalah, kalau ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler

atau juga sebaliknya, menjadi negara agama, dan berhasil, maka kehancuran Indonesia tinggal menunggu waktu. Dan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, negara ateis, atau negara agama adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap para pendiri bangsa. •

"NKRI Harga Mati": Jargon Absurd

Saya mengalami dua masa ketika ungkapan atau jargon "NKRI harga mati" begitu diucapkan. *Pertama*, ketika masa pra hingga pasca penetapan asas tunggal Pancasila, antara tahun 1982 sampai 1987. Saat itu saya masih bersekolah SD dan SMP dan tinggal nun jauh di kampung, Brebes. Saat itu negara memaksakan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan UU Nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 1985, semua ormas Islam dipaksa menerima asas tunggal Pancasial. Di saat bersamaan, saat itu pula tengah ramai apa yang disebut sebagai gerakan usrah, gerakan yang tidak mau menghormat bendera maupun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat itu jargon "NKRI harga mati" lantang dan begitu sering saya dengar. Begitu pun posisi Pancasila sebagai bentuk final ideologi bangsa Indonesia juga dikampanyekan secara masif.

Kedua, saat ini, yaitu ketika umat Islam disudutkan secara terus menerus oleh kalangan sekularis-radikal dan

kelompok *Islamofobia* sebagai pihak yang patut dipertanyakan nasionalismenya, patut dipertanyakan ke-NKRI-annya. Dan jargon "NKRI harga mati" ini semakin menguat berkumandang menjelang dan pasca Pilkada Jakarta. Jargon "NKRI harga mati" benar-benar dijadikan dan dimanfaatkan sebagai alat kampanye untuk menyudutkan kelompok Islam yang dipersepsi secara konyol oleh mereka sebagai anti-NKRI dan anti-Pancasila, suatu persepsi yang tentu sangat ahistoris. Bagaimana mungkin umat Islam dituduh atau disudutkan sebagai anti-NKRI dan anti-Pancasila, sementara faktanya yang berperang merebut kemerdekaan Indonesia dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi Negara adalah—mayoritas—umat Islam.

Bagi saya, jargon "NKRI harga mati" itu jargon yang absurd alias konyol. Majapahit yang kekuasaannya menusantara hancur berantakan, Sriwijaya sekarang tinggal puing-puing sejarah, Persia yang gagah perkasa hancur tak terkira, Imperium Romawi tinggal kenangan, Daulah Usmaniyah Turki juga tinggal kenangan sejarah, Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara setelah sekitar 70 tahun lebih menjadi negara besar, Yugoslavia hancur berantakan. Kalau Tuhan memang mau sebuah bangsa harus hancur berantakan, lalu kita mau apa? Mau melawan sunatullah? Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menghancurkan sebuah Negara.

Namun kalau merujuk pada Surat al-Isra ayat 16, maka Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan menghancurkan sebuah negara tanpa sebab. Jadi penghancuran negara oleh Allah tetap berlangsung dalam koridor hukum kausalitas, sebab dan akibat, bukan ujug-ujug (tiba-tiba):

> *"Waidza aradna annuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihal qawlu fadammarnaha tadmira (tadmiiran),*
> Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri,

> maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Ayat ini semestinya harus dicamkan baik-baik oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama elite politik negeri ini. Ayat ini menegaskan bahwa jika Allah menghendaki sebuah bangsa atau negara hancur, maka Allah akan membiarkan bangsa ini, terutama para elitenya untuk berbuat sesukanya. Lalu Allah mengingatkannya melalui mereka yang "diutus" membawa kebenaran, tetapi mereka (para elite) ini mengabaikan peringatannya. Mereka tetap saja korup, tetap saja menjual bangsanya dengan harga yang begitu murah, tetap saja menjarah kekayaan negara, tetap saja mempetontonkan nafsu serakahnya, dan bahkan bangga dengan "kemaksiatan horizontal" yang diperbuatnya, maka kehancuran bangsa atau negara Indonesia hanya soal waktu saja.

Bisa dipastikan, ketika elite negeri ini berperilaku seperti digambarkan oleh Surat al-Isra ayat 16, maka kehancuran NKRI hanya tinggal soal waktu saja. Karenanya tidak penting teriak-teriak "NKRI harga mati" kalau itu hanya sekadar menjadi jargon murahan. Tak akan berarti apapun teriak-teriak sampai berbusa-busa bahwa "NKRI harga mati", sementara di saat bersamaan justru perilaku bangsa ini, terutama elitenya yang ditopang dan mendapat pembenaran dari ahli-ahli agama justru secara nyata mencabik-cabik NKRI dan Pancasila dengan perilaku korup dan amoralnya.

Kalau menilik praktik dan cara pengelolaan negara saat ini yang korup, saya menduga kuat bahwa masifnya kampaye

jargon "NKRI harga mati" ini tidak murni dilandasi oleh niatan tulus untuk memperbaiki negeri ini, tidak murni pula dilandasi oleh realitas adanya ancaman terhadap NKRI dan Pancasila. Namun sebaliknya, sengaja dihembuskan untuk menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang selama ini sejatinya telah secara terang-terangan merongrong dan merusak NKRI dan Pancasila. Persis seperti maling teriak maling.

Supaya kedok dan kebejadannya dalam melakukan pengrusakan terhadap NKRI dan Pancasila ini berlangsung sempurna dan tanpa gangguan, maka jargon "NKRI harga mati" dijadikan sebagai alat politik yang berwajah ideologis untuk menghantam lawan-lawan politik yang akan mengganggu perusakan sistematis yang tengah mereka lakukan di negeri ini.

Sekali lagi, sangat tidak mutu menjadikan "NKRI harga mati" sebagai jargon di kala dalam realitas praksisnya justru banyak elite negeri ini yang justru melacurkan NKRI dan Pancasila hanya untuk memenuhi nafsu serakahnya. "NKRI harga mati" itu jargon absurd alias konyol! •

Cirendeu, 4/5/2017

Iklan Bernama Pancasila

Dalam lima tahun terakhir, posisi Pancasila sebagai ideologi negara bak sebuah iklan. Lazimnya iklan, rasanya terlalu banyak bintang iklan yang hanya pandai mengiklankan produk yang dibintanginnya tanpa berusaha untuk memakai produknya. Kalau pun terpaksa memakai produknya, biasanya hanya sebatas kepatutan selama masa kontrak sebagai bintang iklan produk tersebut. Selebihnya bintang iklan akan mencampakkan produk yang diiklankannya. Alasannya bisa karena merasa tidak cocok dengan produk yang diiklankannya atau ada tawaran menjadi bintang iklan dari produk lain yang lebih menjanjikan, dan beragam alasan lainnya.

Pancasila hanya sebatas jargon dan dikampanyekan ke publik sebagai ideologi yang hebat, ideologi yang disebutnya sebagai antitesis dan bersifat *wasathiyah* atas dua kutub ekstrem ideologi: kapitalisme dan komunisme atau teokratik dan sekularistik. Pancasila sangat *islami*, sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam: tauhid, kemanusiaan dan keadaban, kecintaan pada tanah air *(hubbul wathan),* permusyawaratan *(syura),* dan keadilan serta sanjungan lainnya yang menegaskan

kehebatan Pancasila sebagai ideologi negara layaknya mengiklankan sebuah produk.

Lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibuat dengan kerja-kerja yang tak jelas. Keberadaannya terkesan sebatas memperkuat negara dalam ber-Pancasila dengan tafsir dan praktiknya yang lebih sering bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila yang (dulu) dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Lebih sadis lagi, bukan hanya sekadar dijadikan iklan, Pancasila juga dijadikan sebagai alat "pecah belah", dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan polarisasi ideologis di masyarakat antara kelompok yang merasa paling NKRI dan Pancasilais dengan kelompok yang menjadi "tertuduh" sebagai pihak yang dinilai anti-NKRI dan tidak Pancasilais. Menuduh kelompok lain tidak Pancasilais, radikal, dan intoleran. Sebaliknya menganggap kelompoknya paling Pancasilais, moderat, dan toleran secara serampangan. Semuanya dilakukan dengan dalih Pancasila. Terjadi ketegangan ideologis. Inilah realitas Pancasila dalam lima tahun terakhir.

Kondisi ini mengingatkan pada suasana politik awal hingga paruh 1980-an, saat negara dengan segala kekuatan politik yang dimilikinya memaksakan menjadikan Pancasila menjadi asas tunggal. Upaya ini dimulai sejak pidato Presiden Soeharto tanggal 27 Maret 1980 dan diulanginya kembali di depan pasukan Kopasanda (Kopassus), tanggal 16 April 1980. Dengan nada keras Soeharto menyatakan perang terhadap ideologi-ideologi selain Pancasila. Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1982 di DPR, Soeharto menegaskan kembali bahwa Pancasila satu-satunya azas ormas. Terlepas ada motif apa di balik pidato kenegaraan Presiden Soeharto, jelasnya upaya ideologisasi Pancasila menjadi asas tunggal telah memancing

ketegangan di masyarakat, ketegangan antara negara di satu pihak dengan (terutama) kelompok-kelompok Islam di pihak lain.

Lazimnya dalam polarisasi ideologis, maka *positioning* negara tentu berada dan berpihak atau bahkan "menunggangi" kelompok yang mengklaim diri sebagai paling NKRI dan Pancasilais. Sebab bisa jadi negaralah yang sejatinya berada di balik polarisasi ideologis ini. Negaralah yang sebenarnya menciptakan ketegangan ideologis, dengan harapan negara akan memperoleh keuntungan-keuntungan politik dari polarisasi dan ketegangan ideologis yang terjadi di masyarakat.

Suasana ideologis di era Orde Baru ini terulang kembali pada saat ini. Bahkan kondisinya jauh lebih buruk. Bila ketegangan di era Orde Baru yang mengedepan adalah murni ketegangan ideologis yang melibatkan kekuatan *state vis a vis* kekuatan *civil society*, yang setidaknya tergambar dari lahirnya kelompok-kelompok *civil society* yang sangat kritis kepada negara, seperti Forum Demokrasi dan Petisi 50. Sementara ketegangan yang terjadi saat ini sengaja "diciptakan" atau ada semacam *ideological engineering*, seolah-olah terjadi ketegangan ideologis di masyarakat antara kelompok yang mengklaim sebagai mendukung Pancasila dengan kelompok yang dituduh anti Pancasila.

Padahal sejatinya ketegangan ideologis yang terjadi saat ini sejatinya motifnya bukan (semata) ideologis sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, tapi ada motif-motif ekonomi, di mana ada kekuatan ekonomi raksasa yang selama ini sudah menguasai perekonomian kita yang mencoba melakukan cengkeraman lebih dalam lagi dengan cara memanfaatkan isu-isu ideologis yang memang paling seksi dan mudah diciptakan di masyarakat.

Pancasila yang sejatinya sudah final bagi *mainstream* masyarakat dan kekuatan politik di Indonesia direkayasa sedemikian rupa seolah-olah ada dan jumlahnya besar yang menolak Pancasila. Riset-riset soal Pancasila yang temanya selalu membenturkan Pancasila dengan Islam yang dalam lima tahun terakhir cukup marak, tampaknya juga terlihat direkayasa begitu rupa. Survei-survei ini hasilnya selalu mengekspos secara berlebihan persentase yang sangat kecil yang disebutnya menolak Pancasila dibandingkan dengan mengekspose persentase yang begitu besar (selalu masih di atas 80%) di kalangan umat Islam yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Seakan berjamaah, kesimpulan survei-survei ini selalu menyudutkan umat Islam sebagai intoleran, radikal, dan anti-Pancasila.

Ketegangan-ketegangan ini senantiasa akan terjadi ketika Pancasila hanya diposisikan sebatas "iklan" tanpa sedikit pun upaya untuk membumikan nilai-nilai fundamental Pancasila. Mengaku negara Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi alergi dengan hal-hal yang berbau Ketuhanan (versi agama resmi apapun di Indonesia) hadir di ranah publik. Padahal konsekuensi ideologis ketika negara mendeklarasikan diri sebagai "negara berketuhanan", maka menjadi kewajiban bagi negara untuk berkomitmen menghadirkan nilai-nilai ketuhanan tersebut di ranah publik, bukan malah sebaliknya, berusaha menghadangnya. Nilai-nilai ketuhanan dalam konteks negara Pancasila bukan lagi bersifat khusus (khas) dan urusan privat, sebagaimana kerap dikampanyekan oleh kalangan sekularis, tapi bersifat umum *('am)* atau publik yang mengharuskan negara menghadirkan nilai-nilai ketuhanan tersebut.

Mengakunya negara Pancasila tapi melakukan pembiaran

praktik-praktik ekonomi yang sangat kapitalistik. Rumus kapitalisme baik dalam pengertian klasik maupun neoklasik tetap saja tak beda jauh: menindas, monopolistik, menciptakan kesenjangan ekonomi yang ekstrem, dan menyengsarakan. Model ekonomi seperti inilah yang saat ini dipraktikan secara telanjang di negara yang konstitusinya tegas menyebut bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945).

Mengaku negara Pancasila yang sila keempatnya berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" tapi dalam praktik politiknya sangat liberal. Bukankah sejatinya sila keempat menghendaki agar praktik politik Indonesia mengusung spirit yang oleh Abu al-A'la al-Maududi disebutnya sebagai *teo-demokrasi*, sistem yang di dalamnya menggabungkan prinsip ketuhanan dalam wujud *syura* (permusyawaratan) dan demokrasi melalui perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung. Mekanisme pemilihan serba langsung jelas sangat anti-Pancasila.

Ketika elite negeri ini tak berusaha serius menghadirkan Pancasila sebagaimana spirit ketika disepakati sebagai ideologi negara, tanggal 18 Agustus 1945, tentu sambil mengabaikan *gentleman agreement* tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta, maka selamanya Pancasila tak akan pernah berarti apapun bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila selamanya hanya akan sebatas menjadi iklan dan menjadi alat negara untuk melakukan adu domba dan polarisasi ideologis di masyarakat. Sekian. •

Periode Kedua Jokowi: Lakukan Radikalisasi Pancasila!

Periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang gagal dalam membumikan Pancasila. Pancasila tak lebih hanya diposisikan sebagai jargon politik. Pancasila tak lebih sekadar alat *labeling* oleh kelompok tertentu yang disokong secara penuh oleh negara untuk memojokkan kelompok lain (baca *Islamic*, meminjam istilah Olivier Roy) sebagai anti-Pancasila, anti-NKRI, ekstrem, dan intoleran, tentu sambil menyebut diri kelompoknya sebagai paling Pancasilais, paling NKRI, moderat, dan toleran.

Labeling ini termasuk cukup berhasil. Masyarakat terpolarisasi secara ekstrem. Sejak sebelum kemerdekaan hingga awal 2010-an, sejarah politik Indonesia memang diwarnai "pertarungan" kelompok Islami versus kelompok nasionalis, namun dalam sejarah pertarungan ideologis tersebut, rasanya baru kali ini terjadi pertarungan yang berhasil menciptakan polarisasi secara tajam, ekstrem.

Bukan hanya itu, simbol-simbol dan idiom-idiom politik yang berwajah dan berbau Islam, sesuatu yang biasa dan sah dalam alam demokrasi dan tentu dalam pandangan Pancasila sekalipun, berhasil diacak-acak. Bendera tauhid dipersoalkan, disepadankan dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tokoh-tokoh Islam yang secara politik berseberangan dengan negara dikriminalisasi, ditangkap, dan ditersangkakan. Aksi damai umat Islam yang tergabung dalam Aksi 212 disoal dan digugat secara berlebihan. Negara benar-benar berhasil melakukan deradikalisasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diradikalisasi di tengah-tengah masyarakat justru terderadikalisasi.

Pada periode kedua ini, kalau Presiden Jokowi berkeinginan untuk mempunyai *legacy* dan *happy ending* di akhir jabatannya, maka penting bagi Jokowi untuk melakukan radikalisasi Pancasila pada dua hal. *Pertama*, jangan lagi menjadikan Pancasila sebagai jargon yang memecah belah di antara anak bangsa. Jadikanlah Pancasila sebagai instrumen ideologis yang menyatukan—kembali—masyarakat dan umat beragama di Indonesia sebagaimana amanat Sila Ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia.

Kedua, radikalisasi nilai-nilai Pancasila. Rasanya sudah bosan sekali mendengar sila-sila Pancasila dibacakan dalam setiap upacara bendera dan dipidatokan oleh para pejabat dari pusat sampai daerah, namun nilai-nilai fundamentalnya nyaris tak hadir di masyarakat, terlebih di lingkup masyarakat politik kita. Pancasila hanya sebatas dihafal, tapi nilai-nilainya nyaris tak terimplementasikan dengan baik. Antara *das sollen* dan *das sein* dari Pancasila tak ada ketersambungan yang harmonis bak sebuah orkestra. Yang terjadi *das sollen* jalan ke timur, sementara *das sein*-nya jalan ke barat. Saling berlawanan arah

Pancasilanya menegaskan bahwa Indonesia negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun nyaris nilai-nilai Ketuhanan tak hadir di ruang-ruang publik. *Abuse of power*, korupsi, dan kejahatan hukum, politik, dan ekonomi nyaris terjadi secara sempurna. Padahal semua ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Pancasilanya menyatakan bahwa politik Indonesia mendasarkan pada Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah/ Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, namun pilpres dan pilkada secara langsung yang lebih banyak membawa kerusakan *(mafsadat)* tetap saja dipertahankan. Politik berbiaya mahal yang terbukti berhasil menyuburkan tingginya angka korupsi juga tetap dipertahankan.

Pada peridoe kedua ini, Presiden Jokowi harus berusaha secara serius melakukan radikalisasi Pancasila di ruang publik. Kalau Presiden Jokowi berhasil melakukan pada dua hal ini, percayalah, Jokowi akan dikenang dengan *legacy*-nya sebagai Presiden pemersatu bangsa Indonesia dan radikal dalam membumikan Pancasila. Semoga. •

Kuala Terengganu, Malaysia, 21 Oktober 2019.

Saatnya Ormas Kontrol Politik

Dalam setahun terakhir kita dipertontonkan praktik politik yang menggambarkan rendah dan bahkan tercerabutnya moralitas politik dari kehidupan politik kita. Hasil Pilpres 2019 hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya besar soal dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif. Meninggalnya lebih dari 700 petugas pemilu seakan menjadi saksi yang mengiringi pelaksanaan Pilpres 2019 yang dinilai paling curang sejak Pilpres diselengarakan secara langsung tahun 2004.

Belum hilang ingatan kita tentang Pilpres 2019, kita disuguhi tayangan video putusan MA terkait dengan Pilpres 2019 yang memperkuat dugaan adanya kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2019. Putusan MA tersebut menurut sebagian ahli hukum tata negara memang tak akan bisa membatalkan jabatan presiden dan wakil presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun putusan MA tersebut membawa pesan moral tentang rendahnya moralitas politik bangsa ini, yang menganggap kecurangan dan manipulasi

dalam pemilu maupun pilpres menjadi sesuatu yang lumrah dan bahkan niscaya.

Sebelum mencuat kasus “video MA”, muncul kegaduhan publik seiring keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu yang sekarang sudah berubah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 dengan nama yang sama ini semakin mempertegas rendahnya moralitas politik pengelola negara.

“UU Covid-19” ini tak menjawab tentang pentingnya keseriusan dalam penanganan Covid-19. Sebaliknya, yang terjadi “UU Covid-19” justru “dibajak” untuk “menyelamatkan” perekonomian nasional yang memang sudah bangkrut. Keluarnya “UU Covid-19” dijadikan sebagai legitimasi untuk menggunakan alokasi anggaran yang kebanyakan tidak diperuntukan untuk penanganan Covid-19.

Seperti diketahui, anggaran Covid-19 berjumlah Rp 405,1 triliyun. Angka ini dinaikkan secara fantastis di kisaran 600-900 triliyun. Tak ada sumber yang pasti terkait kenaikkan anggaran Covid-19. Kompas.com menyebut angka Rp 677,2 triliyun (4/6/2020) dan Rp 686,2 triliyun (15/6/2020). Tempo.co menyebut Rp 695,2 triliyun (16/6/2020). CNN Indonesia menyebut lebih fantastis lagi, Rp 905 triliyun (19/6/2020).

Namun dari anggaran Covid-19 (kalau memakai anggaran Rp 405,1), justru porsi anggaran terbesar digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sebanyak 150 triliyun dan jaring pengaman sosial sebesar 110 triliyun. Sementara yang digunakan untuk penanganan Covid-19 hanya 75 triliyun.

Sisanya untuk insentif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), 70,1 triliyun. Distribusi porsi dan sengkarut anggaran Covid-19 ini menambah deretan kebijakan politik yang nir-moralitas.

RUU HIP Mereduksi Pancasila

Tak lama pasca keluarnya "UU Covid-19", rapat paripurna DPR RI (12/5/2020) menyepakati UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seakan memanfaatkan lemah dan lengahnya pengawasan publik di tengah Covid-19, DPR mengesahkan UU yang hanya menguntungkan korporasi besar di bidang pertambangan. Sebaliknya, merugikan kepentingan negara, tidak berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat di daerah pertambangan.

Berbarengan disahkannya UU Minerba, disepakati pula Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR dan masuk ke tahap pembahasan menuju undang-undang. Sebelumnya, HIP merupakan RUU usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR. RUU HIP ini telah mengundang reaksi dan penolakan dari masyarakat secara luar biasa. Ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Washliyah bukan hanya tegas menolak, tapi juga meminta agar RUU HIP tidak dilanjutkan pembahasannya. RUU HIP ini dinilai akan mereduksi posisi Pancasila hanya sebatas menjadi Haluan. Bukan hanya itu, RUU HIP juga sangat mungkin akan men(di)jadi(kan)–sebagai– instrumen politik bagi rezim yang berkuasa saat ini untuk menyingkirkan siapapun yang dinilai membahayakan kuasa politik rezim, tentu dengan dalih membahayakan atau merongrong negara.

Paparan di atas menggambarkan betapa kebijakan-kebijakan politik dibuat sebatas untuk memenuhi aspek formalitas terkait legalitas sebuah produk perundang-undangan atau kebijakan politik. Pemilu atau pilpres diselenggarakan sebatas gugur kewajiban guna melaksanakan prosedur demokrasi dan dengan pelaksanaannya yang serba formalistik. Pemilu sebatas dijadikan sebagai pesta politik rutinan yang digunakan untuk mengukuhkan (kembali) sekaligus mengokohkan oligarki politik (sekaligus oligarki ekonomi) yang terus menguat di era politik yang semakin liberal.

Begitu pun pembuatan kebijakan publik yang sebagaimana dinyatakan David Easton, sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat praktis ter(di)abaikan. Kebijakan perundang-undangan dibuat dengan mengabaikan tujuan fundamental dari dibuatnya sebuah kebijakan politik (dalam pengertian klasik), yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, kebaikan bersama *(public good, maslahat al-ammah)*. Yang mengedepan justru kepentingan sesaat dan pragmatis. Sedangkan spirit moralitas bukan saja diabaikan, tapi juga dinihilkan.

Politik Tanpa Moralitas

Mengapa praktik politik cenderung nihil spirit moralitas? Setidaknya ada tiga hal yang bisa menjelaskan. *Pertama*, bobroknya sistem politik yang tergambar dari produk perundang-undangan dalam bidang politik. Ada banyak produk perundang-undangan, baik yang secara implisit maupun eksplisit mendukung tumbuh suburnya praktik

politik yang amoral, seperti UU Partai Politik dan UU Pemilu. Pemilihan serba langsung misalnya secara moralitas telah merubah mentalitas masyarakat menjadi sangat pragmatis. Belum lagi persoalan suara terbanyak dalam pemilu legislatif pun telah ikut berperan atas rusaknya moralitas politik.

Kedua, politik hanya semata dimaknai sebagai siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Politik sebatas dimaknai sebagai the winner takes all. Politik dimaknai sekadar sebagai perebutan kekuasaan, sehingga siapa pun dan dengan cara apa pun berusaha meraih kekuasaan tersebut. Dengan pemaknaan politik yang seperti ini, maka mereka tidak peduli lagi akan pentingnya menghadirkan moralitas dalam berpolitik.

Ketiga, minimnya keteladanan, yang tidak saja hinggap di kalangan para politisi, tapi juga kalangan agamawan. Saat ini rasanya sulit menemukan keteladanan di kalangan para politisi yang dalam dirinya juga melekat jiwa negarawan. Sulit juga sekarang menemukan tokoh-tokoh agama yang meskipun mempunyai pendirian keagamaan yang berbeda namun masih bisa bertemu dan saling menyapa dengan penuh ketulusan. Yang mampu memberikan keteladanan dalam beragama, integritas moral maupun menjalin relasi dengan kekuasaan.

Politik yang nihil moralitas ini sudah terlalu lama dipraktikkan di negara ini. Politik model ini telah melahirkan banyak politisi dan penguasa yang sejatinya tak memiliki kebiasaan baik dalam berpolitik (moral politik). Keterlibatan para politisi dalam kasus suap, korupsi, dan politik uang, mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki moral politik, atau Aristoteles menyebutnya sebagai politisi tidak memiliki keutamaan moral.

Ironisnya, tak tampak adanya kesadaran moral dari para politisi negeri ini untuk melakukan pertaubatan politik

dengan berusaha membangun politik yang bermartabat, yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan menurut standar moral politik yang tinggi di dalam membuat atau mengambil kebijakan politik. Pembiaran atas praktik-praktik politik yang sangat liberal, sarat dengan politik uang, manipulatif, termasuk pembuatan produk kebijakan perundang-undangan yang mengabaikan moralitas politik yang masih terus terjadi dan diproduk, hanyalah sebuah bentuk penegasan dari tak adanya kesadaran moral untuk melakukan pertaubatan politik itu.

Sebagai jawaban atas nihilnya moralitas politik, maka penting untuk memposisikan politik sebagai "seni moralitas" yang mengandung kejujuran, kesantunan, dan sarat integritas, karena di situlah letak keutamaan moral pelaku politik. Sebaliknya, politik dalam pengertian sebagai "seni tanpa nilai" *(the art without value)* harus disingkirkan jauh-jauh. Dan bagi politisi yang memiliki kesadaran moral atau dalam dirinya mempunyai spirit moralitas, tentu bukan sesuatu yang sulit untuk menjadikan politik sebagai seni yang mampu menghadirkan moralitas dalam politik. Namun disayangkan, politik dalam pengertian sebagai "seni moralitas" inilah yang nyaris tidak hadir di negeri ini.

Kalau ingin menyelamatkan negeri ini dari politisi-politisi yang memposisikan politik sebagai *the art without value*, maka penting untuk melakukan kontrol secara tegas terhadap semua kebijakan dan para penyelengara negara. *Positioning* dan kontrol tegas dalam menyikapi pelbagai kebijakan perundang-undangan seperti yang dipertontonkan oleh ormas-ormas Islam dan beragam elemen masyarakat lainnya dalam menyikapi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berubah menjadi "UU Covid-19", RUU HIP, termasuk UU Minerba dan RUU Omnibus Law, patut sering dilakukan.

Ketika politik dalam konteks pemisahan maupun pembagian kekuasaan *(separation or distribution of power)* tak lagi mampu ber(di)jalan(kan) dengan baik oleh lembaga-lembaga politik formal, maka ormas keagamaan dan elemen masyarakat lainnya sebagai bagian kekuatan politik penting untuk mengambil alih kontrol politik tersebut. Hanya langkah ini yang dinilai baik, konstitusonal, dan efektif untuk mengontrol politik yang menyimpang. •

Hentikan Ideologisasi Pancasila

Publik dikejutkan dengan hasil rapat paripurna DPR RI (12/5/2020), yang mengesahkan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI. Sebelumnya, Haluan Ideologi Pancasila merupakan RUU Usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dengan dibahas di dalam rapat paripurna, RUU ini pun berubah menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan masuk ke tahap pembahasan menuju undang-undang.

Disepakatinya HIP menjadi RUU HIP ini hanya menegaskan bahwa rezim yang berkuasa saat ini memang lebih suka menciptakan kehebohan-kehebohan ideologis daripada berusaha untuk menghadirkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui beragam kebijakan yang senafas dengan Pancasila.

Masih lekat di ingatan kita, dalam beberapa tahun belakangan, tepatnya menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga berakhirnya Pilpres 2019, rezim yang berkuasa saat ini berhasil menguras emosi masyarakat dengan membenturkan secara

horizontal *society versus society* (bandingkan kecenderungan konflik era Orde Baru, yang terjadi adalah *state versus society*) dengan isu-isu ideologis murahan yang menjadikan Pancasila sebagai instrument untuk mengadudomba.

Disepakatinya RUU HIP untuk dibahas menjadi undang-undang menjadi gambaran jelas mentalitas ideologis rezim yang berkuasa saat ini. Bukan untuk memperkuat, tapi sebaliknya, RUU HIP justru akan memperlemah posisi Pancasila. Pancasila yang secara ideologis sudah selesai dan disepakati sebagai ideologi negara diposisikan dan direkayasa seolah-olah belum selesai. Selain itu, RUU HIP telah menempatkan posisi Pancasila yang seharusnya menjadi *open ideology* menjadi *close ideology* (meminjam istilah Magnis-Suseno) yang tafsir ideologisnya menjadi monopoli negara.

Saat ini tak ada lagi tantangan idoelogis yang berarti bagi Pancasila. Bandingkan dengan pada masa awal pasca kemerdekaan yang masih kerap terjadi pergolakan ideologis, baik dalam bentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang saat kemunculannya menyebar ke beberapa daerah: dari disekitaran Priangan (Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya), Aceh hingga Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah maupun Partai Komunis Indonesia (PKI), yang meskipun berkali-kali telah membuat ulah dan melakukan pemberontakan, tapi eksistensinya tetap diakui, mendapat pembelaan, dan perlindungan dari rezim Orde Lama. Buah pembelaan dan perlindungan ini, pada Pemilu 1955 PKI berhasil masuk the big four setelah Masyumi, PNI, PNU, dengan 39 kursi di DPR (15% suara).

Saat ini tak ada lagi DI/TII. Saat ini tak ada Fraksi di DPR/MPR yang bersikap keras dan ideologis seperti yang dipertontonkan Fraksi PPP di awal berfusinya empat partai Islam

ke dalam PPP hingga akhir 1970-an. Dalam beberapa periode terakhir, semua kekuatan politik di Senayan sudah berhasil "dijinakkan" oleh eksekutif dan kaum oligarch (ekonomi) yang dengan kekuatan finansial yang dimilikinya berhasil menyusup ke partai-partai politik dan mendirikan "partai ternak". Saat ini tak ada lagi gerakan-gerakan Usroh yang tak mau menghormat bendera dan menyanyikan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila yang begitu mencolok sebagaimana yang terjadi di awal 1980-an.

Hingga saat ini semua elemen bangsa yang mainstream telah bersepakat menjadikan Pancasila ideologi negara, tentu dengan penyebutan yang berbeda-beda. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas Islam besar lainnya, entah sudah berapa kali melakukan penegasan sikap jamiyah-nya atas kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan melalui Muktamar Makassar 2015, Muhammadiyah kembali menegaskan posisi Pancasila sebagai Dar al-Ahd wa al-Syahadat (Negara Kesepakatan dan Persaksian). Dalam posisi sebagai Rais Am Syuriah PBNU, KH. Ma'ruf Amin juga pernah menyebut Pancasila sebagai Dar al-Mitsaq (Negara Perjanjian). Hizbut Tahrir Indonesia yang bercita-cita mendirikan Khilafah pun juga sudah dibubarkan oleh rezim Joko Widodo. Jadi, sekali lagi, praktis saat ini tak ada lagi problem ideologis kebangsaan yang serius, sehingga merasa perlu dibuatkan undang-undang yang konon dimaksudkan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi Negara.

Problem Pancasila saat ini adalah pada pembumian nilai-nilai Pancasila yang bukan saja tercermin dari kebijakan-kebijakan yang seharusnya senafas dengan Pancasila, juga dari perilaku bangsa ini, terutama perilaku elite penyelenggara negara. Pada konteks inilah, berbagai masukan, kritik, teriakan, dan bahkan caci maki telah diutarakan berbagai kalangan, tapi

hanya dianggap sepi saja oleh rezim yang berkuasa saat ini. Rezim, terlebih yang berasal dari beberapa partai nasionalis terus saja sibuk melakukan ideologisasi Pancasila dengan teriakan-teriakan yang seolah-olah mereka paling Pancasilais sambil menuduh dan menyudukan kelompok lainnya sebagai anti-Pancasila.

Inilah problem Pancasila yang sesungguhnya. Bukan pada aspek ideologisasi, tapi pada aspek pembumian. Maka desakan masyarakat yang menolak RUU HIP, yang tercermin dari pernyataan dan sikap ormas-ormas Islam, tokoh dan pemuka agama di banyak daerah, kalangan kampus, karena sejatinya masyarakat tak butuh lagi dengan ideologisasi Pancasila. Masyarakat tak lagi menganggap ada problem ideologis. Masyarakat hanya menuntut agar Pancasila tidak selalu dijadikan sebagai jargon atau slogan, tapi dihadirkan nilai-nilainya.

Masyarakat hanya mengharapkan agar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai amanat Pancasila dan Konstitusi menjadi pijakan dasar dalam pembuatan semua kebijakan negara dan perilaku elite penyelenggara negara. Kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sila pertama tak seharusnya dilahirkan dan diterapkan. Masyarakat hanya menginginkan para penyelenggara negara mampu membuat kebijakan-kebijakan yang memanusiakan manusia (dalam arti luas disebut masyarakat) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Masyarakat hanya menginginkan hadirnya elite politik yang mempersatukan, bukan yang memecah belah umat dan masyarakat. Elite yang mampu merawat dan menghadirkan kebhinnekaan di negeri ini. Masyarakat hanya menginginkan dijalankannya praktik demokrasi yang senafas dengan prinsip-

prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bukan demokrasi yang dijalankan secara liberal, yang tentunya bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan dan bahkan tidak sama dengan liberalisme. Masyarakat yang memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila pasti menolak kebijakan politik yang dibuat sangat liberal, yang tergambar dari sistem kepartaian dan sistem pemilu serta pelaksanaannya yang bahkan malampaui praktik politik liberalis yang dipertontonkan oleh Amerika Serikat.

Masyarakat hanya mengingkan hadirnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjadinya praktik perekonimian berkeadilan, kekayaan ekonomi terdistribusi secara adil dan merata, bukan praktik ekonomi yang timpang dan kapitalisitik. Masyarakat menolak tegas praktik ekonomi yang monopolis dan oligopolis yang dipraktikan secara telanjang di bumi yang berideologikan Pancasila. Monopoli dan oligopoli sama sekali bukan praktik ekonomi yang senafas dengan Pancasila.

Ketika masyarakat tak lagi menganggap ada problem ideologis, tapi rezim yang berkuasa saat ini justru tetap dan sering menawarkan "proyek" ideologisasi Pancasila, menandakan adanya ketaknyambungan dengan rakyatnya. Dan inilah realitas politik yang secara beruntun terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Kalau dalam kasus RUU HIP, rezim yang berkuasa saat ini tetap memaksakan kehendaknya untuk mengesahkan RUU HIP menjadi undang-undang, sementara penolakan sudah terjadi di mana-mana, rasanya rakyat Indonesia perlu berpikir serius untuk mengambil kembali mandat yang telah diberikan kepada rezim yang berkuasa saat ini. •

RUU HIP, Soekarno, dan Sikap PDIP

Membaca secara kritis isi keseluruhan RUU HIP, maka tidak terlalu sulit untuk menyebut bahwa PDIP berperan penting atas disahkannya Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI. Sebelumnya, HIP merupakan RUU Usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. *Pertama*, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP ditunjuk menjadi ketua panitia kerja (panja) RUU tersebut.

Kedua, peta dukungan atas RUU HIP merupakan "koalisi dekat" Fraksi PDIP di DPR RI. Dalam risalah rapat pengambilan keputusan penyusunan RUU HIP dilakukan pada 22 April, selain Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem merupakan yang menyetujui sepenuhnya RUU HIP tanpa syarat. Golkar mendukung pembahasan dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Gerindra juga menyetujui, dengan catatan RUU HIP bukan semata untuk memperkuat BPIP. Fraksi PKB menyetujui dan dilanjutkan sebagai inisiatif DPR dengan catatan menambahkan rumusan

UUD 1945 sebagai konsideran.

Meskipun pada akhirnya ikut menyetujui, tapi Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP berbeda dengan lima Fraksi di atas. Fraksi PAN meminta agara TAP MPRS XXV/MPRS/1966 menjadi konsideran. Belakangan PAN mengambil sikap untuk menarik diri dari pembahasan RUU HIP. Fraksi PKS juga meminta agar RUU HIP disempurnakan sebelum diajukan ke sidang paripurna dengan menguatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta TAP MPRS XXV/MPRS/1966. Dan Fraksi PPP meminta beberapa penyesuaian dan meminta kedudukan BPIP sejajar lembaga negara lainnya. Sementara Fraksi Demokrat sejak awal tegas menolak RUU HIP.

Ketiga, banyak pihak yang menilai bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini tak lebih hanya untuk memperkuat keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini hanya diatur dengan peraturan presiden. Saat ini, BPIP dipimpin oleh salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Keempat, beberapa pasal dan ayat dalam RUU HIP yang sekarang kontroversi dan bahkan terjadi penolakan di masyarakat itu sangat khas dengan kecenderungan sikap politik PDIP di dalam pembahasan berbagai perundang-undangan yang berwajah ideologis. Misalnya, tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu konsideran dalam RUU HIP.

Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan juga 3 ayat yang bahkan sangat khas dengan PDIP. Pasal ini berisikan poin-poin pidato Soekarno pada persidangan BPUPKI di hari terakhir tanggal 1 Juni 1945. Disebutkan Pasal 7: (1) Ciri pokok Pancasila disebut trisila, yaitu: a. ketuhanan; nasionalisme; dan

kerakyatan/demokrasi. (2) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Keluarnya rumusan RUU HIP dengan Ekasilanya dapat disebut bahwa sejatinya PDIP dan kubu nasionalis yang belum selesai dengan Pancasila, bukan kubu Islam. Saat ini, kubu Islam yang dalam perdebatan ideologis masih direpresentasikan oleh PPP, PKS, PAN, dan PKB, sudah mengubur dalam-dalam Piagam Jakarta. Tak tertarik lagi untuk mengusulkan Piagam Jakarta dikembalikan lagi sebagai bagian dari sila Pancasila dan Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945. Justru PDIP yang selama ini mengklaim paling Pancasilais yang terbukti belum selesai dengan Pancasila.

Kelima, dalam bagian Penjelasan RUU HIP pada bagian Umum sangat khas "negara kiri" yang tak menyebut satu pun kata Ketuhanan. Justru kata gotong royong yang dimunculkan. Kemudian pada Penjelasan Pasal 4 Huruf d pun sangat berwajah "kiri". Kalau RUU HIP ini disahkan menjadi UU, potensial menjadi pembenar bagi negara untuk melakukan tindakan represif terhadap siapa pun yang dinilai dapat "mengganggu" dan "membahayakan" ideologi Pancasila.

Posisikan Soekarno secara proporsional

Membaca isi RUU HIP menyiratkan bahwa PDIP sangat berlebihan dalam memposisikan Soekarno. Ketika para pendiri bangsa ini sudah bersepakat dengan Pancasila 22 Juni 1945 dan kemudian "dimandemen" pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini, PDIP justru mencoba mengungkit kembali hal yang sejatinya sudah selesai.

Nama Soekarno sudah diposisikan secara terhormat oleh bangsa Indonesia. Nama Soekarno—sejak Orde Baru lengser 1998—kembali menjadi nama stadion terbesar di Indonesia:

Gelora Bung Karno. Seokarno—bersama Mohammad Hatta—disebut sebagai "Dwi Tunggal Proklamator", menjadi nama Bandara Internasional terbesar di Indonesia: Seokarno-Hatta, menjadi nama jalan di hampir semua kota besar di Indoensia. Soekarno mendapat gelar Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Nasional.

Penghargaan terhadap Soekarno ini pantas dan proporsional. Fakta sejarah, Soekarno berperan penting dalam episode sejarah kemerdekaan Indonesia sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga setidaknya 20 tahun pasca-kemerdekaan. Dalam rangkaian perumusan ideologi Pancasila, baik di BPUPK, termasuk pidato penting Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, persidangan PPKI yang menghasilkan rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini hingga persidangan di Konstituante.

Dalam konteks penulisan sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan di perguruan tinggi, Soekarno juga diposisikan terhormat. Rasanya tak pernah ada satu pun buku sejarah yang misalnya menceritakan detail mengapa Soekarno terpaksa diculik dan dibawa kabur ke Rengasdengklok. Persidangan di Konstituante diceritakan secara singkat, padat dan memuliakan. Tak pernah menceritakan detail persidangan Konstituante, termasuk menceritakan demontrasi-demontrasi dan "provokasi" militer yang mengiringi persidangan tersebut. Siswa-siswa di sekolah hanya tahu bahwa impact dari persidangan konstituante yang deadlock tersebut telah "memaksa" Soekarno mengeluarkan Dektir Presiden. Siswa-siswa hanya sebatas tahu dan hafal isi Dekret, tapi tak tahu bagaimana proses politik hingga keluarnya Dekret.

Siswa-siswa hanya kenal Nasakom, tapi bagaimana detail sejarahnya dipastikan tak tahu. Siswa hanya kenal SM.

Kartosoewirjo dengan DI/TII-nya, tapi pasti tak mungkin tahu siapa sosok Kartosoewirjo, sejarah kelahiran DI/TII, dan mengapa Kartosuwiryo melakukan pemberontakan. Terkait peristiwa G 30 S/PKI, buku-buku sejarah hanya menegaskan bahwa pelaku Gerakan 30 September 1965 (Soekarno lebih suka menyebutnya Gerakan 1 Oktober/Gestok) adalah PKI. Nyaris tak ada buku sejarah yang menceritakan "kedekatan" Soekarno dengan PKI, bagaimana Masyumi dibubarkan, dan sebagaimanya. Semua isi sejarah tersebut ditulis tak lebih dengan niat untuk memuliakan Soekarno.

Semua sisi-sisi negatif Soekarno terkait beragam peristiwa politik tak (boleh) diketahui dan tak (patut) dibaca oleh para siswa yang memang (harus) dibangun karakternya untuk menghargai jasa para pahlawan, termasuk terhadap diri seorang Soekarno.

Anehnya, siswa dan bangsa yang sudah dididik untuk menghargai Soekarno, justru sering diciderai oleh sikap PDIP sendiri yang memposisikan diri sebagai Soekarnois. Tampilan PDIP yang dominan wajah sekularnya, "perlawanan" PDIP dalam setiap pembahasan RUU yang berwajah agamis dan terkait karakter bangsa, seperti saat pembahasan RUU Sikdisnas dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi beberapa tahun silam, terdapat menteri dari PDIP yang mencoba menghapus kolom agama di KTP, selain menggambarkan bahwa PDIP tidak cukup paham memahami roh atau nilai-nilai Pancasila, juga secara sengaja atau tidak telah men-downgrade kemuliaan Soekarno. Konteks RUU HIP, di mana PDIP memunculkan kembali Ekasila, belum lagi memaksakan menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila juga sejatinya telah merendahkan posisi Soekarno.

RUU HIP ini harus menjadi pembelajaran politik berharga bagi PDIP. Kalau PDIP merasa Soekarnois dan

paling Pancasilais, sejak sekarang harus mulai belajar untuk memposisikan Soekarno secara proposional. Soekarno adalah manusia biasa yang tak mungkin sempurna. Soekarno adalah "makhluk politik" yang pernah menjabat sebagai presiden selama sekitar 20 tahun. Soekarno juga adalah pengurus dan menantu tokoh Muhammadiyah. Soekarno menikah dengan Fatmawati, putri Hasan Din, seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Semasa berada di Bengkulu, Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengajaran Muhammadiyah Daerah Bengkulu. Maka, pahamilah dan dudukanlah Soekarno secara proporsional sebagai manusia biasa, "makhluk politik", dan seorang yang agamis. •

Bagian III

Muhammadiyah, NU, dan Politik Islam Indonesia

NU dan Muhammadiyah Harusnya Malu

Fakta, saat ini Front Pembela Islam (FPI) berhasil mengambil hati dan peran riil politik umat Islam. Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212 membuktikan peran sentral FPI. Sementara NU dan Muhammadiyah yang sering disebut-sebut sebagai representasi Islam di Indonesia justru cenderung tak mampu mengambil peran keumatan secara riil dan senapas dengan kepentingan umat kebanyakan.

Sebagai representasi Islam di Indonesia, harusnya NU dan Muhammadiyah malu ketika peran-peran politik keumatan justru diambil alih oleh kelompok-kelompok Islam *non-mainstream*, seperti FPI. Lalu di mana *positioning* NU dan Muhammadiyah? Lalu di mana peran tokoh-tokoh *jamiyah* (struktural) NU dan Muhammadiyah di kala umat membutuhkan peran riilnya dalam konteks politik keumatan?

Jangan hanya bisa dan gampang mengklaim kuantitas umat sebagai anggota kelompoknya, tapi giliran umat membutuhkannya, jangankan dibela dan dilindungi, yang

terjadi justru umpatan dan penyudutan. Ketika mereka yang melakukan Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212 disudutkan sedemikian rupa oleh kalangan *Islamofobia* dan sekuleris sebagai kelompok intoleran, radikal, anti Pancasila, dan anti NKRI, kebanyakan elite dua organisasi besar -terutama NU- seakan mengamini begitu saja. Padahal jelas, secara tradisi keagamaan, peserta dan umat inilah yang selama ini diklaim NU dan Muhammadiyah sebagai kelompoknya.

Selama ini NU dan Muhammadiyah kerap mengklaim masing-masing beranggotakan 60 juta dan 40 juta. Bahkan belum lama NU mengklaim anggotanya lebih dari 100 juta. Klaim NU tentu sederhana, yang suka tahlilan dan maulidan, serta subuhnya pakai qunut berarti NU. Dan saya yakin, peserta terbesar Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212 adalah mereka yang familiar dengam ketiga tradisi keagamaan tersebut. Tapi anehnya *jamaah* NU ini justru disudutkan begitu rupa.

Kalau sikap NU dan Muhammadiyah tidak berubah, ke depannya mestinya tak usah lagi mengklaim mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Dan saya yaqin, kalau mendasarkan pada keanggotaan resmi yang ditandai dengan kartu anggota, baik KARTANU maupun KATAM, anggotanya tidak sampai 2 juta orang. Sekali lagi, harusnya NU dan Muhammadiyah itu malu, ketika justru FPI tampil mendomisili dalam peran-peran politik keumatan. •

Menggugat Sikap *Tawasuth* dan *Tasamuh* Muhammadiyah Dan NU

Tulisan ringan saya di media social (Facebook) dengan judul "NU dan Muhammadiyah Harusnya Malu" ternyata menjadi vital dan cukup banyak yang menanggapi. Ada pro dan kontra, baik di internal warga Muhammadiyah maupun Nahdliyin. Hal ini tergambar dari komentar-komentar di media sosial (Facebook dan Whatsapp Group) yang saya ikuti, juga diketahui dari banyaknya yang japri, menyampaikan kalau tulisan saya mengundang kontroversi.

Ada yang meminta agar saya menghapus statusnya di facebook. Pemintaan ini sepertinya lebih karena sayang pada saya seiring dengan banyaknya *bully*-an. Ada juga komentar yang cenderung menyudutkan dengan menyebut saya tidak mengerti Muhammadiyah dan NU. Ada salah satu ketua lembaga di PBNU dan Sekretaris PW Muhammadiyah yang hubungi langsung. Dua sahabat saya ini menjelaskan bahwa posisi Muhammadiyah dan NU sudah benar dalam menyikapi

kasus penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada juga kawan di PP Muhammadiyah yang bilang "kok ada orang Muhammadiyah yang *gumunan* ya?". Tentu yang dimaksud adalah saya, yang dianggap *gumun* kepada Habib Rizieq Shihab (HRS). Perkataan teman saya ini bisa jadi karena membaca banyak status saya di medsos yang dinilai dan dipahami sebagai "mendukung" dan bahkan "kagum" kepada HRS. Dan tidak sedikit juga yang japri mendukung tulisan saya. Saya sendiri menyikapi biasa saja pro kontra tersebut, termasuk *bully*-an yang kadang begitu kasar. Saya santai saja. *Wis* kebal dan tahan uji dalam soal beginian.

Tawasuth dan *Tasamuh*

Melalui tulisan ini, saya merasa perlu menjelaskan. *Pertama*, saya disebutnya tidak paham NU dan Muhammadiyah. Bagaimana mungkin saya dianggap tidak paham NU. Saya menulis skripsi tentang NU, lebih tepatnya "Perilaku Politik Kiai Pasca Kembali ke Khittah 1926". Meski "hanya" sekadar skripsi, saya melakukan riset dengan serius di Jombang. Bagaimana mungkin saya dituduh tidak paham Muhammadiyah, *wong* sejak mahasiswa saya aktif di IMM dari mulai Komisariat sampai DPP. Selanjutnya dua periode menjadi Pengurus Harian Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sembari aktif sebagai pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah sampai 2015.

Saat mengambil Program Magister, saya juga menulis tesis berjudul "Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Agama dan Negara" dan telah dibukukan oleh Rajawali Pers pada 1999. Saya juga menghimpun tulisan-tulisan Gus Dur yang berserakan menjadi sebuah buku dengan judul *Mengurai*

Hubungan Agama dan Negara, yang diterbitkan oleh Grasindo (anak perusahaan Gramedia) tahun 1999. Disertasi yang belum lama saya tulis juga berjudul: "Islam dan Negara: Studi Kasus Perumusan, Perdebatan, dan Kontroversi serta Peran Politik Muhammadiyah dan NU dalam Proses Pembuatan Perda 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya". Disertasi ini telah diterbitkan oleh Penerbit Suara Muhammadiyah dengan judul "Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia".

Untuk menulis pemikiran Amien Rais dan Gus Dur dan juga tentang Muhammadiyah dan NU tentu tidak mungkin tanpa membaca literatur-literatur penting terkait Muhammadiyah dan NU. Jadi, maaf, sepertinya *ngawur* kalau menilai saya tidak paham tentang Muhammadiyah dan NU. Harusnya dipahami secara *mafhum mukhakafah* bahwa karena paham tentang Muhammadiyah dan NU, maka saya bisa menulis dengan kritis tentang Muhammadiyah dan NU.

Kedua, saya dinilai *gumun* dengan FPI dan HRS. Penting ditegaskan bahwa saya bukan anggota FPI dan juga bukan pengikut HBS. Saya hanya seorang Muslim yang mencoba mengedepankan prinsip keagamaan yang *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan coba menjauh dari karakter keberagamaan yang *tatharruf* (ekstrem) sebagaimana selama ini mencoba ditampilkan oleh Muhammadiyah dan NU.

Secara sederhana, saya memahami *tawasuth* sebagai sikap "pertengahan", seperti ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 143, yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan, yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran, dan akan bersaksi di akhirat bahwa para rasul telah menyampaikan risalah kepada kaumnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. yang akan menjadi saksi terhadap umatnya, bahwa beliau telah

menyampaikan risalahnya.

Jadi umat pertengahan dimengerti sebagai umat yang "adil dan pilihan". Untuk menguji sikap pertengahan ini, Allah memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat umat Islam saat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (Mekkah). Kalau membaca Tafsir Jalalayn dan Tafsir al-Misbah, jelas pemindahan arah kiblat merupakan ujian bagi umat Islam, apakah akan mengikuti yang *haq* (adil) dengan menjalankan perintah Allah untuk menghadap kiblat baru (Ka'bah) atau ingkar pada Allah dan Rasul-Nya dengan tetap berkiblat ke Baitul Maqdis. Siapa yang taat mengikuti perintah Allah dan Rasul inilah yang disebut umat pertengahan yang adil dan pilihan. Jadi ukuran *tawassuth* seseorang adalah ketika sikap tengahnya menjunjung tinggi prinsip keadilan *(haq)*, bukan sebaliknya, mengarah pada kecenderungan untuk melawan yang *haq* (adil) dan membela kebatilan.

Sementara saya memahami *tasamuh* sebagai sikap toleransi, yang menghargai pendirian orang lain seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Jadi toleransi mengandung sifat lapang dada, menahan diri, tenggang rasa, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain.

Penting juga ditegaskan bahwa sikap toleran hanya akan terwujud bila kedua belah pihak saling menjunjung tinggi toleransi. Kalau salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sama-sama tidak menjunjung tinggi toleransi, maka yang akan tercipta adalah sikap intoleran. Dengan pemahaman ini, maka semestinya sikap toleran hanya perlu dilakukan terhadap pihak lain yang juga menjunjung tinggi prinsip toleransi, dan tidak dibenarkan bersikap toleran kepada pihak lain yang nyata-nyata bersikap intoleran dan bahkan menginjak-injak prinsip-prinsip toleransi, seperti yang dipertontonkan Ahok.

Pertegas Sikap *Tawasuth* dan *Tasamuh*

Dalam konteks *tawasuth* dan *tasamuh* ini, saya tidak melihat bahwa Ahok itu cerminan dari pribadi yang *tawasuth* dan *tasamuh*. Sebaliknya, Ahok adalah pencerminan nyata dari orang yang berpandangan *tatharuf* terhadap Islam dan umat Islam, hampir mirip Donald Trump, fasis dan rasis, dan jauh dari sikap toleran (intoleran).

Dalam menyikapi kasus penistaan yang dilakukan Ahok, saya melihat bahwa sikap *tawasuth* dan *tasamuh* yang ditampilkan Muhammadiyah, terlebih NU belum benar-benar menggambarkan sikap yang adil dan pilihan. Pada beberapa hal Muhammadiyah tampak lebih mampu menempatkan sikap *tawasuth* dan *tasamuh*-nya secara adil. Muhammadiyah relatif mampu menyelami perasaan umat Islam yang marah atas penistaan yang dilakukan Ahok. Menyikapi Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212, meski Muhammadiyah dan NU sama-sama membuat himbauan agar warganya tidak menggunakan simbol-simbol organisasi, namun realitasnya sikap *jamiyah* Muhammadiyah lebih *care* terhadap *jamaah* Muhammadiyah dan umat Islam lainnya yang hendak mengikuti aksi tersebut.

Bahkan pada saat Aksi Super Damai 212 entah berapa puluh mobil Ambulan Muhammadiyah yang diterjunkan di arena aksi tersebut. Kantor PP Muhammadiyah dan PW Muhammadiyah DKI Jakarta juga menjadi "markas" keberangkatan *jamaah* Muhammadiyah dan umat Islam lainnya yang hendak mengikuti aksi. Menyikapi aksi-aksi umat Islam ini, Muhammadiyah juga membuat beberapa kali pernyataan sikap yang senafas dengan perasaan umat Islam yang merasa dilecehkan oleh sikap Ahok.

Sedikit berbeda, sikap yang ditunjukan oleh NU dibaca oleh banyak pihak (setidaknya tergambar dari komentar-komentar di

media sosial: Twitter, Facebook, grup-grup whatapps) cenderung kurang adil dalam memposisikan sikap *tawasuth* dan *tasamuh*. Sikap yang ditunjukan NU terkesan melakukan pembiaran dan bahkan cenderung diam dan tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan. Begitu juga sikap *tasamuh*-nya justru cenderung *vis a vis* secara *intoto* (menggunakan istilah yang sering digunakan Gus Dur dalam tulisan-tulisannya di tahun 1980-an) prinsip *tasamuh* itu sendiri. Sikap NU dibaca banyak kalangan sebagai pembela sikap intoleran yang ditampilkan Ahok.

Pembacaan yang kurang positif ini dalam banyak hal bisa dipahami kalau menilik kebijakan NU dan pernyataan-pernyataan dari beberapa elite NU. NU misalnya sampai harus membuat putusan *bahtsul masail* yang mengharamkan Jumatan di jalanan hanya beberapa hari menjelang Aksi Super Damai 212. Saya yakin, NU sebagai gudang ulama *fiqh* pasti sangat paham bahwa Jumatan di jalanan itu *ikhtilaf* di kalangan ulama madzhab.

Sikap *jamiyah* Muhammadiyah, terutama NU yang terkesan lunak dalam menyikapi kasus Ahok telah memancing kelompok-kelompok Islam *non-mainstream* mengambil sikap yang dinilai berlebihan, meski saya menilainya masih dalam bingkai *tawassuth* dan *tasamuh*. Dalam kerangka demokrasi, tak ada hal yang dilanggar dari aksi-aksi damai yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam *non-mainstream*. Mereka hanya melakukan aksi dan aksinya pun berlangsung santun dan damai.

Saya berkeyakinan, andai Muhammadiyah dan NU yang bersikap tegas, tentu akan lain ceritanya. Eskalasi politik Jakarta tak akan sepanas saat ini. Sikap tegas di sini tentu tak selalu identik dengan pengerahan massa lewat aksi-aksi demo. Cukup kiranya NU dan Muhammadiyah membuat pernyataan-pernyataan yang senafas atau setidaknya tidak menyakiti perasaan umat Islam sudah merupakan sikap tegas itu sendiri.

Dalam kapasitas sebagai *interest group*, Muhammadiyah dan NU juga bisa melakukan tekanan politik kepada Presiden dan Kapolri agar bersikap tegas dan adil dalam menangani kasus Ahok. Dan tekanan ini tentu sah dalam konteks demokrasi. Apalagi sikap yang dipertontonkan Ahok sejatinya telah mengangkangi nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip toleransi, dan bahkan melabrak nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Tentu akan lebih bagus kalau Ahok bisa menjadi tersangka karena tekanan atas sikap adil (tegas) yang dilakukan Muhammadiyah dan NU, sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan. Tidak perlu juga ada Aksi Damai 411 dan Aksi Super Damai 212. Saya menduga Muhammadiyah dan NU tidak bersikap tegas karena khawatir dicap sebagai intoleran dan radikal. Padahal andai saja Muhammadiyah dan NU melakukannya, tak perlu ada kekhawatiran dicap intoleran dan radikal. Siapapun yang memahami secara adil atas penistaan yang dilakukan Ahok pasti akan paham dengan sikap atau tekanan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU terhadap Presiden dan Kapolri.

Harapan Umat terhadap Muhammadiyah dan NU

Kalau mencermati beragam komentar di media sosial, terlebih pasca kesaksian KH. Ma'ruf Amin di persidangan Ahok, tergambar ada harapan besar umat Islam terhadap NU dan Muhammadiyah. Dan harapan besar ini sebenarnya tidak muluk-muluk misalnya sampai menuntut Muhammadiyah dan NU melakukan aksi-aksi demonstrasi seperti dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam *non-mainstream*. Umat Islam hanya berharap bahwa Muhammadiyah dan NU bisa memahami dan menyelami perasaan umat Islam, terutama dalam menyikapi penistaan yang telah dilakukan oleh Ahok.

Terbukti ketika Haedar Nashir (Ketua Umum PP. Muhammadiyah) berkunjung ke Kantor MUI bertemu dan memberikan dukungan kepada KH. Ma'ruf Amin, umat menyambutnya dengan positif. Bahkan video terkait pernyataan Haedar yang mendukung Kiai Ma'ruf dan mencela mereka yang bikin onar Jakarta menjadi viral di medsos. Begitu juga ketika Said Aqiel Siradj (Ketua Tanfidziyah PBNU) membuat "pernyataan politik" terkait pelecehan yang dilakukan Ahok dan pengacaranya terhadap Kiai Ma'ruf dan "instruksi" Said Aqiel agar warga Nahdliyin tidak memilih Ahok pada Pilkada, umat juga menyambutnya gembira. Gembira karena sikap dan posisi NU dinilai sudah kembali dan senafas dengan perasaan umat Islam. Begitu juga ketika Said Aqiel dan PWNU DKI Jakarta membuat klarifikasi terkait pelaksanaan "istighatsah politik" yang dilaksanakan oleh mereka yang mengatasnamakan NU, juga umat menyambutnya dengan senang, yang tergambar oleh ramainya komentar positif atas langkah yang dilakukan oleh Said Aqiel dan PWNU Jakarta.

Jadi apa yang menjadi harapan umat Islam sebenarnya sangat simpel. Umat berharap Muhammadiyah dan NU dapat memahami perasaan atas penistaan yang dilakukan oleh Ahok melalui pernyataan-pernyataan elite struktural Muhammadiyah dan NU. Selain itu, sikap *tawasuth* dan *tasamuh* yang dijalankan oleh Muhammadiyah dan NU juga hendaknya tetap dalam bingkai keadilan. Umat "tidak rela" ketika Muhammadiyah dan NU bersikap toleran kepada orang yang justru bersikap intoleran seperti Ahok.

Yang disesalkan, ketika banyak umat bersimpati kepada Kiai Ma'ruf, justru dicurigai dan disikapi dengan sinis oleh sebagian kaum muda NU. Cukup banyak beredar pernyataan-pernyataan yang berseliweran di medsos yang begitu sinis yang

ditujukan kepada mereka yang bersimpati kepada Kiai Ma'ruf. Memprihatinkannya lagi, sikap sinis tersebut justru sebagian dilakukan oleh kaum terpelajar.

Kiai Ma'ruf itu Ketua Umum MUI Pusat, satu-satunya institusi Islam yang hingga saat ini masih menjadi tempat berhimpun semua kekuatan ormas Islam. Kiai Ma'ruf juga menjabat Rais Aam Syuriah PBNU. Apakah salah kalau umat Islam bersimpati kepada Kiai Ma'ruf? Kenapa harus disikapi dengan sinis dan "tidak bersahabat"? Saya menduga kalangan muda NU yang sinis ini pada dirinya masih terjangkit penyakit akut masa *jahiliyah* Arab pra Islam, yang begitu bangga dengan *ashabiyah*-nya, sementara dalam hal yang terkait dengan *ukhuwah islamiyah* justru terkesan abai.

Harusnya kaum muda NU, termasuk kaum muda Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya, sudah selesai dengan persoalan-persoalan masa lalu orang-orang tua kita yang sibuk bersitegang hanya untuk urusan-urusan remeh temeh keagamaan: *khilafiyah* dan *furuiyah*. Sekarang kita hidup di tahun 2017, kenapa ketegangan masa lalu masih juga dipupuk dan dipelihara terus menerus? Sekadar diketahui, saat berlangsung Kongres Umat Islam pada awal-awal kemerdekaan, dari sekitar empat kali pelaksanaan kongres, yang ramai dibahas justru persoalan-persoalan *khilafiyah* dan *furuiyah* keagamaan.

Nah, kalau sekarang di tahun 2017 masih juga ada kaum muda NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya, yang gemar dan sibuk menyoal masalah *khilafiyah* dan *furuiyah*, termasuk terlalu membanggakan secara berlebihan *ashabiyah*-nya dengan mengabaikan *ukhuwah islamiyah*, sejatinya ini sebuah kemunduran luar biasa, dan mestinya malu! Sekian, semoga bermanfaat. •

Menyoal Moderasi Muhammadiyah dan NU

Muhammadiyah dan NU selama ini kerap menyebut dan memposisikan sebagai representasi Muslim di Indonesia. Muhammadiyah dan NU juga seringkali diidentikkan sebagai organisasi yang selain berwatak toleran *(tasamuh)* dan seimbang *(tawazun)*, juga moderat *(tawasuth)*, Secara konseptual, tentu watak ini sejalan dengan prinsip Islam, namun dalam praktiknya justru cenderung lebih dekat pada mentalitas yang sekadar "mencari aman". Sikap ini setidaknya yang ditunjukkan—terutama oleh NU—dalam menyikapi Aksi Damai Jilid II maupun III. Sikap yang ditunjukan NU cenderung jauh dari watak moderat, intoleran, dan bahkan cenderung *vis a vis* umat Islam—yang *notabene* secara ritual keagamaan sebagian besar adalah *jamaah* NU—yang tengah menuntut keadilan atas penistaan Al-Qur'an yang dilakukan Ahok.

Menjelang Aksi Damai Jilid II 4 November 2016, yang kemudian dikenal dengan Aksi Damai 411, dua ormas besar di Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) secara

organisatoris *(jamiyah)* mengeluarkan himbauan yang hampir senada, yang berisikan agar warga *(jamaah)* yang mengikuti aksi tersebut tidak membawa atribut organisasi. Himbauan ini juga berlaku untuk Aksi Damai 212 2016 lalu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau agar *jamaah*-nya tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi itu, karena mereka (aksi) selaku warga negara. Meski demikian, Haedar menyatakan bahwa Aksi Damai 411 merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Bahkan Haedar meminta agar Pemerintah dan Polri sensitif dalam merespons aspirasi umat dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang dituntutkan. Jika terkesan menunda, mengulur atau seolah mengambangkan, justru akan menambah persoalan makin meluas (30/10/2016).

Ketua Tanfidziyah PBNU KH. Said Aqil Siroj juga melarang simbol-simbol NU dipakai dalam Aksi Damai 411. Kalau ada simbol-simbol NU, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang memanfaatkannya. PBNU tak ingin simbol NU dipakai untuk tujuan di luar kepentingan *jamiyah* NU. Said juga meminta semua warga NU tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. Karenanya Said meminta warga NU tidak ikutan (unjuk rasa). Kalaupun ada yang terpaksa ikut, Said berharap tidak ada simbol-simbol NU yang dipakai (28/10/2016).

Jamaah* tak patuh lagi pada *Jamiyah

Meski sama-sama mengeluarkan himbauan terkait tidak bolehnya menggunakan simbol *jamiyah*, namun dalam menyikapi Aksi Damai 411, tampak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Sikap Muhammadiyah tampak lebih lunak dan bahkan cenderung "mendukung" Aksi Damai 411.

Dalam pandangan Muhammadiyah, Aksi Damai 411 semata hanya menyikapi penistaan terhadap Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok. Tak ada kaitannya dengan masalah toleransi dan kebhinnekaan, apalagi terkait persoalan Pancasila dan NKRI.

Sementara sikap NU terlihat lebih kaku dan menampakkan ketaksetujuannya. NU tidak sekadar menghimbau *jamaah*-nya untuk tidak menggunakan simbol-simbol NU, tapi juga memintanya tidak ikut aksi. Ada nada "penggembosan" dan bahkan nada ini semakin terlihat dalam menyikapi Aksi Damai 212. PBNU misalnya sampai harus mengeluarkan Fatwa soal ketidaksahan Salat Jumat di jalanan. Padahal PBNU tentu tahu bahwa masalah Salat Jumat di jalanan itu persoalan *ikhtilaf* di antara para ulama madzhab.

Lalu bagaimana *jamaah* Muhammadiyah dan NU menyikapi himbauan *jamiyah*-nya? Dalam Aksi Damai 411, praktis *jamaah* Muhammadiyah tidak mematuhi himbauan *jamiyah*-nya. Ketakpatuhan ini sepertinya karena *jamaah* melihat sikap lunak PP. Muhammadiyah. Meski menghimbau *jamaah*-nya tidak memakai simbol-simbol Muhammadiyah, namun PP Muhammadiyah seperti melakukan pembiaran ketika kantor PP Muhammadiyah dijadikan sebagai Posko Aksi. Begitu juga ketika mendapati Kantor PW Muhammadiyah Jakarta di Kramat Raya dijadikan Posko Pusat Keberangkatan peserta Aksi Damai 411 dari perwakilan *jamaah* Muhammadiyah se-Indonesia pun PP Muhammadiyah tak mereaksinya.

Beberapa PW dan banyak PD Muhammadiyah bahkan mengkoordinir *jamaah*-nya yang akan mengikuti Aksi Damai 411. *Jamaah* Muhammadiyah juga membentuk kesatuan aksi yang diberi nama KOKAM (Komando Kawal Al-Maidah), nama yang dilekatkan kepada KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) yang berada di bawah

naungan Pemuda Muhammadiyah. Selama berlangsungnya aksi, simbol-simbol Muhammadiyah, seperti bendera Muhammadiyah dan ortom juga berkibar di jalan. Beberapa elite Muhammadiyah tingkat pusat, wilayah, dan daerah turun langsung ikut Aksi Damai 411.

Begitu juga warga Nahdliyin, mereka tidak patuh menjalankan himbauan PBNU untuk tidak mengikuti Aksi Damai 411. Kalau selama ini NU sering mengklaim sebagai ormas terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai puluhan juta, yang salah satu klaimnya biasanya didasarkan pada kebiasaan praktik ritual keagamaan yang mereka lakukan, maka hampir dipastikan peserta terbesar Aksi Damai 411 adalah warga Nahdliyin.

Muhasabah bagi Muhammadiyah dan NU

Ketakpatuhan *jamaah* Muhammadiyah dan NU terhadap himbauan *jamiyah*-nya, patut menjadi perenungan *(muhasabah)* bagi Muhammadiyah dan NU. Dan perenungan yang penting dilakukan setidaknya pada dua hal. *Pertama*, perenungan terkait *positioning* Muhammadiyah dan NU. Selama ini Muhammadiyah dan NU kerap menyebut diri atau diposisikan sebagai representasi Muslim Indonesia. Muhammadiyah dan NU selama ini diidentikkan sebagai organisasi yang mempunyai watak kemasyarakatan moderat *(tawasuth)*, toleran *(tasamuh)*, dan seimbang *(tawazun)*. Secara konseptual, tentu watak ini sejalan dengan prinsip Islam, namun dalam praktiknya justru cenderung lebih dekat pada mentalitas yang sekadar "mencari aman". Sikap ini setidaknya yang ditunjukkan—terutama oleh NU—dalam menyikapi Aksi Damai Jilid II maupun III. Sikap yang ditunjukan NU cenderung jauh dari watak moderat, tidak toleran, dan bahkan cenderung *vis a vis* umat Islam—yang

notabene sebagian besar secara ritual keagamaan adalah *jamaah* NU—yang tengah menuntut keadilan atas penistaan Al-Qur'an yang dilakukan Ahok.

Kedua, semakin berjaraknya *jamiyah* dengan *jamaah*. Ini juga perlu jadi perenungan. Sekadar contoh, ketika beredar berita bahwa Ahok akan datang ke Muhammadiyah untuk menjelaskan masalah terkait al-Maidah 51, kontan rencana ini mendapat penolakan keras dari *jamaah* Muhammadiyah. Rencana pertemuan ini akhirnya dibatalkan sepihak oleh Ahok. Kesediaan PP. Muhammadiyah menerima Ahok tentu dimaksudkan untuk menjaga jarak atau bahkan kedekatan yang sama dengan semua kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun menerima Ahok di kala hati umat Islam tengah terluka karena ulahnya yang menista Al-Qur'an, justru dinilai sebagai tidak nyambungnya *jamiyah* dengan *jamaah*.

Begitu juga NU. Hadirnya sebagian besar warga Nahdliyin pada Aksi Damai 411 di kala PBNU menghimbau untuk tidak mengikuti aksi tersebut, bisa dimaknai sebagai semakin berjaraknya *jamiyah* NU dengan *jamaah*-nya. Bahwa kebanyakan mereka yang hadir tidak membawa simbol-simbol NU juga jangan dimaknai sebagai bentuk kapatuhan terhadap himbauan PBNU. Sebaliknya, mesti dipahami sebagai bentuk kemasabodohan *jamaah* NU terhadap *jamiyah*-nya. Selama Aksi Damai 411, nyaris tak terlihat adanya simbol-simbol NU. Praktis saya hanya berpapasan dengan sekitar 4-5 bendera NU ukuran kecil dan 1 bendera PMII ukuran besar yang berkibar di deretan depan sisi kiri Istana Negara. Dan kalau pemahaman ini terjadi, ke depannya akan menjadi persoalan yang serius bagi *jamiyah* NU.

Realitas saat ini, di tingkat akar rumput sekalipun, tingkat ketergantungan *jamaah* NU terhadap *jamiyah*-nya tidak lagi seperti ketika awal-awal NU lahir hingga 1980-an, di mana kata

sami'na wa atha'na (kami dengar, kami taat) selalu mewarnai relasi *jamaah* dengan *jamiyah*-nya. *Jamaah* nyaris tanpa *reserve* mendengar dan taat terhadap apapun yang dititahkan *jamiyah* atau para kiainya. Dalam perkembangannya, sekarang *jamaah* NU tak lagi gampang untuk *sami'na wa atha'na* kepada *jam'iyah*-nya, termasuk para kiainya. Saat ini kesadaran *jamaah* untuk *sami'na wa atha'na* praktis hanya dalam hal yang terkait dengan persoalan *fiqh*. Bahkan *fiqh* pun ranahnya begitu sempit, sebatas *fiqh* ibadah *(mahdzah)* yang bersifat personal. Sementara terkait *fiqh* muamalah, terutama dalam soal politik, sosial dan kemasyarakatan, *jamiyah* NU atau pun kiai tak lagi menjadi sandaran atau tempat bertanya yang utama. Dan penyebab dominan pudarnya relasi ini karena ketaknyambungan antara *jamiyah* dengan *jamaah* atau antara kiai dengan *jamaah*. Dan ketaknyambungan ini penyebabnya lebih banyak karena perubahan perilaku kiai atau mereka yang tengah menduduki jabatan di NU. Bila di awal-awal berdirinya NU, posisi kiai benar-benar dekat dan menjadi pembela *jamaah*-nya atau Geertz (1960) menyebutnya *sebagai* makelar budaya (*cultural brokers*), maka sekarang sebagian (elite) kiai sudah berubah menjadi makelar politik *(political brokers)*, broker pilkada, pilgub, pilpres dan kerja-kerja lainnya yang sama sekali tak ada kaitan dengan tugas kekiaian. Kiai lebih suka bersikap abu-abu—tentu tak lupa mencari pembenaran *fiqh*, termasuk pembenaran ke-*tawasuth-an* dan ke-*tasamuh*-an—di kala umat membutuhkan ketegasan sikapnya, terutama terkait masalah aqidah, sosial, dan politik.

Dengan perubahan peran kiai ini, ke depan bisa jadi *jamiyah* NU tidak saja akan ditinggalkan *jamaah*-nya untuk sekadar bertanya terkait masalah sosial dan politik, tapi juga dalam masalah *fiqh* ibadah sekalipun tidak akan lagi menjadi tempat untuk bertanya. *Wallahu a'lam*. •

Jokowi, Muhammadiyah, dan Pilpres 2019

Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, entah sudah berapa kali Presiden Jokowi menghadiri acara-acara yang digelar Muhammadiyah. Rasanya hanya Presiden Jokowi yang paling sering menyambangi acara-acara Muhammadiyah. Terakhir, Kamis, 6/12 Jokowi menghadiri Peringatan Seabad Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebagai petahana yang masih mempunyai peluang untuk menjabat kembali sebagai presiden, Jokowi tentu berharap bahwa kehadirannya di acara-acara Muhammadiyah akan membawa efek elektoral di lingkup warga Muhammadiyah, sesuatu yang wajar, bahkan sangat wajar. Sulit menyebut bahwa kedatangan Jokowi semata karena bentuk perhatiannya terhadap Muhammadiyah.

Namun, dari blusukan saya dan teman-teman Muhammadiyah lainnya yang kebetulan menjadi calon legislatif di basis-basis Muhammadiyah, termasuk perbincangan dengan elite-elite Muhammadiyah di lingkup lokal, baik PDM (kabupaten/kota), PCM (kecamatan), maupun PRM (desa/kelurahan), rasanya berat kalau Jokowi berharap mendapat

efek elektoral dari warga Muhammadiyah pada Pilpres 2019.

Kenapa warga Muhammadiyah cenderung *emoh* memilih Jokowi? Setidaknya ada dua alasan mendasar. Pertama, faktor Jokowi sendiri. Banyak warga Muhammadiyah yang menilai bahwa Jokowi sejujurnya belum, untuk tidak mengatakan tidak pantas menjabat sebagai presiden. Bahkan sebagaian warga Muhammadiyah ada yang menyebut bahwa pencalonan Jokowi menjadi presiden terlalu dipaksakan dan penuh rekayasa politik. Sama sekali tak memperhatikan kapabilitas yang dimiliki Jokowi.

Penilaian warga Muhammadiyah ini ditambah dengan terlalu seringnya Jokowi tampil di publik yang tidak menampilkan citra dirinya seperti layaknya seorang presiden semakin mempekuat penilaian atas ketaklayakan Jokowi menjadi presiden. Tampilan Jokowi saat peringatan Hari Pahlawan yang bersepeda dan mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan "tempo doeloe" rasanya salah kostum. Untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan tak harus seorang presiden berdandan *bak* siswa SMP yang tengah mengikuti karnaval agustusan.

Sebagai seorang presiden, Jokowi tentu boleh mempunyai hobi tertentu, seperti naik sepeda motor atau hobi dengan jenis musik tertentu. Namun kalau terlalu sering mempertontonkan hobinya di hadapan publik, rasanya publik justru semakin tak bersimpatik.

Faktor pertama ini sebenarnya tidak terlalu fundamental. Harapannya, kapabilitas Jokowi yang tekor masih bisa tertutupi oleh tampilan menteri-menteri Jokowi yang diharapkan bisa menutupi kelemahan Jokowi. Namun kenyataannya, Jokowi seperti dibiarkan berjalan sendiri dengan segala ketakmampuannya.

Faktor kedua, terkait posisi partai-partai pendukung Jokowi yang justru menjadi faktor fundamental bagi warga Muhammadiyah untuk tidak mendukung Jokowi. Sikap warga Muhammadiyah dalam memposisikan Jokowi dan partai-partai pendukungnya rasanya menjadi *mainstream* di lingkup Muhammadiyah. Dan sikap ini rasanya bukan hanya monopoli milik warga Muhammadiyah. Masih terlalu banyak umat Islam lainnya yang sepemikiran dengan *mainstream* warga Muhammadiyah. Jutaan umat Islam yang berasal dari beragam afilisasi organisasi keagamaan yang hadir pada Reuni 212 adalah gambaran dari umat Islam yang mempunyai kesamaan pandang dalam memposisikan Jokowi beserta partai-partai pendukungnya.

Mainstream warga Muhammadiyah berpandangan bahwa kebanyakan partai-partai pendukung Jokowi terlalu sering melukai perasaan umat Islam, yang tergambar dari beragam sikap politiknya, baik berupa kebijakan dan pernyataan-pernyataan para elitenya.

Dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya tergambar bagaimana partai-partai pendukung Jokowi yang saat Pemilu 2014 didukung dan dipilih oleh mayoritas umat Islam justru tak mampu membaca kehendak *mainstream* umat Islam yang tidak menghendaki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur Jakarta. Bukan karena faktor agama, tapi dominan karena tabiat buruk Ahok, yang arogan, suka melecehkan dan menista, termasuk menista umat Islam dan simbol utama umat Islam: al-Quran.

Entah sudah berapa kali pasca kasus Ahok, partai-partai pendukung Jokowi juga bersikap yang cenderung melukai perasaan umat Islam. Aksi-aksi damai yang dilakukan umat Islam, seperti Aksi 411, Aksi 212, termasuk Reuni Aksi 212 I

dan II dilawan habis, bahkan tega untuk menyebut mereka yang melakukan Aksi 212 sebagai bagian dari kelompok fundamentalis dan radikalis.

Mereka yang selama ini teriak lantang soal demokrasi ternyata tak mampu memahami aksi-aksi umat Islam tersebut sebagai bagian dari ekspresi demokrasi. Demokrasi tidak lagi dipahami sebagai nilai-nilai univeral yang boleh dilakukan oleh siapapun, tapi demokrasi sangat bergantung siapa yang memaknai. Dan sudah menjadi jamak bahwa partai-partai yang sedang dimabuk kekuasaan memang mempunyai kecenderungan kuat untuk alergi pada demokrasi. Jangankan menerapkan nilai-nilainya, mendengar nama demokrasi saja sudah bikin mual.

Kemudian muncul gagasan kebijakan dari Mendagri Tjahyo Kumolo (PDIP) tentang penghapusan kolom agama di KTP, yang menuai banyak kecaman. Gagasan ini selain menggambarkan ketakpahaman Mendagri tentang Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Mahas Esa, juga menggambarkan tak sensitfnya terhadap posisi umat Islam di Indonesia.

Salah satu *maqasyid al-syariah* adalah *hifdzu al-din* (perlindungan hak beragama) yang dalam wacana pemikiran Islam memang disebutkan di antaranya kebebasan menampakkan agama *(hurriyah izdhar al-Aqidah)* dan kebebasan menyembunyikan agama *(hurriyah idhmar al-aqidah)*. Indonesia bukan negara sekuler seperti di Barat yang memilih membuat kebijakan menyembunyikan agama warga negaranya, tapi Indonesia adalah negara Pancasila yang religius yang lebih memilih menampakkan agama sebagai perwujudan simbolik dari religiusitas warga negaranya. Dengan prinsip ini, aneh ketika ada upaya untuk menghapus kolom agama di KTP.

Belum lama muncul kasus pembakaran "bendera tauhid". Mau ditafsir apapun, pembakaran bendera tersebut telah menyinggung perasaan *mainstream* umat Islam, yang tergambar dari aksi-aksi yang dilakukan oleh umat Islam di banyak daerah, termasuk pelampiasan melalui Reuni Aksi 212. Anehnya, menyikapi pembakaran bendera tauhid ini, taka ada satu pun partai pendukung Jokowi yang mereaksi secara keras atas pembakaran bendera tauhid tersebut. Yang ada justru sikap sebaliknya yang cenderung mendukung pembakaran bendera tauhid tersebut.

Berikutnya pernyataan seorang ketua umum partai pendukung Jokowi soal penolakan atas Perda Syariat. Sebenarnya tidak ada *nomenclature* Perda Syariah. Yang ada perda yang berisikan hukum-hukum agama (syariat). Dalam konteks negara Pancasila yang pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945-nya berbunyi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", apanya yang salah dari produk hukum yang berisikan hukum-hukum agama? Justru seharusnya produk hukum dalam negara Pancasila itu harus senafas dan tidak boleh bertentangan dengan agama, terlebih produk hukum yang berkenaan dengan wilayah publik. Produk hukum atau kebijakan yang memotong semua jenis subsidi itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tapi juga bertentangan dengan Pancasila yang sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Harusnya partai-partai pendukung Jokowi kritis terhadap produk-produk atau kebijakan politik yang demikian.

Dalam konteks demokrasi, produk hukum yang bermuatan syariat agama juga tidak melanggar demokrasi. Perda bermuatan syariat agama biasanya hadir di daerah yang dihuni mayoritas mutlak masyarakat yang beragama tertentu. Mereka

memilih partai-partai atau calon kepala daerah tertentu yang diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang senafas dengan agama-agama. Apakah salah sikap politik yang demikian? Perda juga dibuat oleh institusi demokrasi (partai politik) dan disahkan di ruang demokrasi (parlemen). Bukan lewat parlemen jalanan.

Belum lagi tindakan persekusi yang dilakukan pihak aparat terhadap para ulama atau pihak-pihak yang tak sejalan dengan penguasa, termasuk juga penegakan hukum yang tebang pilih. Kesalahan yang sama, seperti tergambar dalam penyebaran berita-berita hoax, ketika itu dilakukan oleh pendukung Prabowo maka proses hukum akan secepatnya bekerja. Sebaliknya, kalau hal yang sama dilakukan oleh pendukung penguasa, jangan diproses secara hukum. Yang ada justru pelakunya dilindungi dan bahkan dibelanya.

Sikap-sikap politik partai politik pendukung Jokowi yang cenderung bukan sekadar tidak bersahabat, tapi memusuhi dan bahkan *vis a vis* dengan umat Islam, inilah yang menyebabkan *mainstream* warga Muhammadiyah dan bagian umat Islam lainnya tidak tertarik untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan bukan hanya tidak tertarik memilih Jokowi, tapi juga tidak tertarik untuk memilih parta-partai pendukung Jokowi. Semoga. (Bukit Puncak Lio Salem Brebes). •

Muhammadiyah Pasca Pilpres: Akomodasi atau Oposisi?

Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisan Mas Mu'arif berjudul "Muhammadiyah struktural vs Muhammadiyah oposisi" yang dimuat di ibtimes.id, 3 Juli 2019. Tulisan Mas Mu'arif mencoba menegaskan *positioning* dirinya sebagai representasi kaum struktural di Muhammadiyah. Sementara yang di luar sana, tepatnya terhadap yang tidak bersepaham dengan Muhammadiyah struktural disebutnya sebagai Muhammadiyah oposisi.

Tulisan Mas Mu'arif menarik ditanggapi. Letak menariknya bukan pada *positioning* penulisnya, tapi pada beberapa bagian dari isi tulisannya. Mas Mu'arif misalnya menyebut perdebatan usang terkait *high politic* dan *low politic*, di mana disebutkan Muhammadiyah dan NU menjalankan *high politic* sementara partai politik menjalankan *low politic*.

Harusnya bicara *high politic* atau *low politic* tekanannya bukan pada mendikotomi antara ormas keagamaan dengan

partai politik, tapi pada nilai yang diperjuangkan. Disebut *high politic* apabila yang diperjuangkan itu soal keadilan, kejujuran, kesejahteraan, dan nilai-nilai mulia lainnya. Sebaliknya disebut *low politic* apabila yang diperjuangan hanya sebatas politik dukung mendukung, perebutan kekuasaan, dan mobilisasi massa untuk kepentingan politik praktis.

Konteks Indonesia saat ini, pendikotomian ini rasanya kurang tepat, karena faktanya ada ormas yang seharusnya menjalankan peran *high politic* tapi justru lebih tampak wajah *low politic*-nya. Sebaliknya, ada partai-partai tertentu yang berusaha secara serius menjalankan peran-peran *high politic*, namun hanya karena keberadaannya yang minoritas di parlemen menjadikan peran politiknya tetap tak bisa mewarnai.

Tulisan Mas Mu'arif juga berhasil mendikotomi dan bahkan *vis a vis jamiyah* dengan *jamaah*. Cara pandang ini karena Mas Muarif sepertinya kurang cermat dan kritis dalam melihat Pemilu 2019, khususnya Pilpres. Terkait Pemilu legislatif, rasanya tak ada ekspresi kekecewaan yang ditunjukan oleh misalnya PAN terhadap Muhammadiyah atau PKB terhadap NU. Begitu pun Pilpres, rasanya tak ada ekspresi kekecewaan yang berlebihan dari PAN terhadap Muhammadiyah dan apalagi PKB terhadap NU. Bagaimana mungkin kecewa, relasi PKB dan NU saat ini sudah menyatu begitu rupa. Bahkan dalam beberapa hal NU sudah menjadi subordinat dari PKB.

Mas Mu'arif misalnya menulis, "Namun, dampak Pilpres kali ini begitu kuat dan nyata masuk ke dalam ormas-ormas mapan tersebut, terutama luapan ekspresi kekecewaan dan kemarahan mereka yang kalah. Sampai-sampai mereka lupa bahwa nalar, spirit, adab, dan kultur berorganisasi, baik ber-Muhammadiyah maupun ber-NU, sangat berbeda dengan nalar, spirit, adab, dan kultur dalam partai politik."

Memahami bagian tulisan Mas Muarif di atas, saya agak bingung mencernanya. Sebenarnya yang dimaksud "mereka" yang kecewa dan marah itu siapa? Kalau membaca bagian akhir tulisan, sepertinya "mereka" dialamatkan ke partai politik. Karena posisi penulis sebagai kader Muhammadiyah, saya menduga yang dimaksud "mereka" adalah PAN. Kalau dimaksud ini benar, rasanya salah alamat. Setahu saya tak ada satu pun pernyataan resmi dari PAN yang bernada kecewa dan marah terhadap Muhammadiyah struktural terkait Pilpres 2019. Sikap pribadi-pribadi di partai politik rasanya kurang tepat bila dianggap sebagai representasi partai. Begitu pun sikap-sikap pribadi di ormas juga tidak bisa sertamerta dianggap sebagai representasi dari sikap ormas yang bersangkutan. Namun kalau mencerna bagian tulisan lainnya, "Seruan inipun tetap relevan bagi warga NU yang mengalami polarisasi yang sama dengan Muhammadiyah pasca Pilpres lalu," maka bisa jadi "mereka" yang dimaksud adalah *jamaah* Muhammadiyah dan NU." Kalau benar demikian, tuduhan ini justru mendekati kebenaran. Di lingkup *jamaah* Muhammadiyah memang ada kekecewaan dan kemarahan terhadap proses Pilpres 2019.

Akomodasi atau Oposisi?

Dalam tulisannya, Mas Mu'arif terkesan melihat Pilpres 2019 begitu sederhana. Pemilu sekadar dipahami sebagai persoalan kalah menang. Sementara prinsip jujur dan adil abai dicermati secara kritis. Kalau Mas Mu'arif mampu menyelami dengan baik dan jernih perasaan *jamaah* Muhammadiyah di banyak daerah, *jamaah* Muhammadiyah di *grassroot* meyakini bahwa Pilpres 2019 penuh dengan kecurangan. Kecurangan yang melebih ambang batas kewajaran bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di era Reformasi.

Keyakinan ini murni karena kenyataan di lapangan. Tak ada urusannya dengan partai politik. Ada ungkapan *vox populi vox dei*, suara rakyat suara Tuhan. Saya yakin suara *jamaah* Muhammadiyah di daerah itu jauh lebih mampu merepresentasikan suara Tuhan, suara hati nurani, suara kejujuran dalam melihat kecurangan Pilpres, karena mereka jauh dari kepentingan perebutan kekuasaan. Makanya, kalau ada yang tidak mampu melihat kecurangan pada Pilpres 2019, rasanya melihatnya penuh dengan ketakjujuran dan ketakadilan.

Menyikapi kecurangan Pilpres, wajar bila *jamaah* Muhammadiyah, termasuk sebagian *jamaah* NU kecewa dan marah dengan keputusan MK dan KPU terkait Pilpres 2019. Namun kekecewaan dan kemarahan ini tak usah disikapi berlebihan. Sebaliknya harus disikapi secara positif. Kecewa dan marah karena melihat kecurangan (kebathilan) pertanda bahwa *jamaah* Muhammadiayah cukup berhasil dalam menghayati prinsip dakwah *amar makruf nahi munkar*. Dalam pandangan saya, *amar makruf* dan *nahi munkar* merupakan prinsip dakwah yang harus dijalankan secara seimbang, beriringan, tak boleh salah satunya menonjol atau tenggelam. Tentu tidak menafikan bahwa dakwah *nahi munkar* lebih beresiko daripada dakwah *amar makruf*.

Menyeru agar kontestan pemilu tidak curang, tak melakukan *money politic*, pelaksana pemilu harus bersikap jujur dan adil, itu jauh lebih mudah karena tidak beresiko. Namun ketika faktanya pemilu berlangsung curang, terjadi *money politic* secara massif, pelaksana pemilunya tak jujur dan tak adil, korban meninggal hingga lebih dari 700 orang, belum lagi korban terdampak pemilu yang berjumlah sembilan orang meninggal dan ratusan terluka, kemudian Muhammadiyah

berteriak kritis menyikapi itu semua pasti akan beresiko tinggi.

Menyikapi situasi politik yang demikian, Muhammadiyah punya cukup pengalaman. Terbayang tidak, ketika KH. Ahmad Dahlan melawan misi zending Belanda, Muhammadiyah di era Ki Bagus Hadikusumo menolak *Saikirei*. Saat menjadi anggota istimewa Masyumi, Muhammadiyah tampil kritis terhadap Soekarno. Di era Amien Rais, Muhammadiyah tampil kritis terhadap Soeharto hingga kejatuhannya 1998. Di era Din Syamsuddin, Muhammadiyah juga tampil kritis terhadap SBY. Bahkan di awal kepemimpinan Haedar Nashir, Muhammadiyah tampil independen dan kritis-konstruktif dengan melakukan advokasi terhadap Siyono, terduga teroris yang meninggal karena kesewenang-wenangan Densus 88. Semua itu dilakukan secara sadar oleh pimpinan Muhammadiyah di setiap zamannya dalam kerangka dakwah *amar makruf nahi munkar*, dan tetap dalam koridor Muhammadiyah sebagai ormas.

Fakta sejarah ini menegaskan bahwa bersikap independen dan kritis-konstruktif kepada pemerintah atau negara adalah hal biasa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Karenanya terkesan aneh ketika Muhammadiyah dinilai tidak atau kurang mampu bersikap independen dan kritis-konstruktif terhadap Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, terlebih dalam kaitan dengan Pilpres 2019. Dirasakan oleh sebagian besar warga Muhammadiyah di daerah dan juga kelompok kritis lainnya di luar Muhammadiyah, Muhammadiyah dinilai tidak cukup independen dan kritis-konstruktif. Saya bisa memahami betapa sulitnya bersikap independen dan kritis-konstruktif bagi ormas seperti Muhammadiyah di era politik yang sangat liberal saat ini.

Tulisan Mas Mu'arif seakan menabukan sikap kritis kepada pemerintah atau negara. Seolah sikap kritis hanya

berhak dilakukan oleh partai politik, bukan oleh ormas. Coba baca bagian lain tulisan Mas Muarif: “Rupanya, orang-orang Muhammadiyah pasca Aksi 212 dan dikuatkan dengan momentum Pilpres 2019 memendam aspirasi dan kepentingan yang berseberangan dengan struktur dan sistem yang mapan, baik pemerintah maupun struktur elite di Muhammadiyah saat ini, sehingga mereka berhasil menggalang kekuatan secara massif di luar jalur struktural. Pola gerakan semacam ini jelas mengikuti pola gerakan politik praktis—seperti yang dijalankan partai-partai politik.”

Menyebut Aksi 212 dan aksi di seputar Pilpres sebagai murni gerakan yang mengikuti pola gerakan politik praktis, rasanya sangat tidak tepat. Justru sebaliknya, gerakan partai politik di Indonesia tak akan mungkin bisa melakukan gerakan seperti Aksi 212, yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang mempunyai militansi gerakan. Sementara partai politik hanya mampu bersikap pragmatis dan nir-militansi. Tengok saja sikap Prabowo Subianto yang diharapkan bisa menjadi motor gerakan oposisi baik di parlemen maupun di luar parlemen, ternyata sudah “mengakui” kemenangan Jokowi. Prabowo tentu paham bahwa mengakui Jokowi sama halnya menafikan segala bentuk kecurangan yang dilakukannya.

Mengakhiri tulisan ini, saya berharap Muhammadiyah *istiqamah* berada dijalur Khittah 1912. Konsisten menjaga *marwah* sebagai gerakan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang dipahami dalam kerangka akomodasi dan oposisi, dan dijalankan secara seimbang *(tawazun)*. Kalau pemahaan ini dijalankan secara berkeadilan, maka Muhammadiyah pun akan dilihat secara positif dan berkeadilan pula.

Sebaliknya, kalau yang menonjol salah satunya, maka Muhammadiyah pun bisa diidentikkan sebagai ormas yang

akomodatif atau oposan. Tergantung kecenderungan mana yang paling menonjol. Muhammadiyah senantiasa bersikap kritis-konstruktif terhadap siapapun yang berkuasa di negeri ini. Bersikap kritis-konstruktif terhadap penguasa tidak selalu identik dengan partai politik. Sebagai *civil society*, Muhammadiyah berhak bersikap kritis-konstruktif.

Ketika kebanyakan partai politik hanya paham soal rebutan jabatan politik, berbagi kue kekuasaan, tak paham beroposisi, abai dan seperti hilang ingatan ketika bicara soal kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan menghadirkan sistem politik yang bermartabat. Ketika ormas seperti NU juga sulit diharapkan bisa tampil independen dan kritis kepada penguasa, seperti di era Gus Dur, terutama periode 1989-1996 (sejak Muktamar Yogyakarta hingga pasca-"Salaman Genggong"), maka saat ini, bangsa Indonesia hanya bisa berharap pada Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah selalu mampu menjaga independensi dan kritis-konstruktifnya (Kaki Gunung Ciremai Linggarjati Kuningan, 14/7/2019). •

Runtuhnya Moral Politik Kaum Santri

Muktamar NU ke-27 di Asembagus Situbondo 1984 berlangsung di tengah konflik yang melanda NU. Konflik ini merupakan imbas dari konflik yang terjadi di tubuh PPP menjelang Pemilu 1982, terutama terkait dengan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang banyak merugikan kiai-kiai sepuh dan sebaliknya justru menguntungkan politisi-politisi muda NU.

Dampak dari DCT itu luar biasa. KH. Idham Cholid yang saat itu menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU sekaligus Presiden Partai (PPP, jabatan simbolik) menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Tanfidziyah. Pernyataan pengunduran diri ini dibuat di atas kertas dan dilakukan di hadapan kiai-kiai sepuh yang dipimpin KH. As'ad Syamsul Arifin yang secara khusus mendatangi kediaman Kiai Idham. Mengetahui pengunduran diri ini, para pendukung Kiai Idham tidak terima dan berhasil memaksa Kiai Idham untuk mencabut pernyataan pengunduran dirinya.

Dampak pengunduran diri ini, NU terbelah menjadi dua kubu, yaitu Kubu Cipete (merujuk pada tempat kediaman Kiai Idham) yang identik dengan kubu politisi dan Kubu Situbondo (merujuk pada kediaman Kiai As'ad) yang identik dengan kubu khittah.

Muktamar Situbondo menghasilkan duet kepemimpinan KH. Achmad Siddiq (Rais Am) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur, Ketua Tanfidziyah). Terpilihnya duet ini tidak mudah. Pemilihan Rais Am harus memakai mekanisme Ahl al-Hall wa al-Aqd (AHWA). Kiai As'ad sebagai tuan rumah Muktamar diberikan mandat oleh muktamirin untuk memilih enam anggota AHWA (merujuk pada mekanisme suksesi saat terpilihnya Khalifah Usman bin Affan), yaitu KH. Ali Maksum, KH. Syansuri Badawi, KH. Masykur, KH. Ali Hasan Ahmad, KH. Romli, dan KH. Roffi Mahfudz. Keputusan ini diterima muktamirin, meskipun tentu ada yang tak puas terutama dari kubu Cipete, tetapi tidak sampai membelah dan memecah belah NU.

Meskipun akhirnya terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah, namun terpilihnya Gus Dur tidak mudah. Ada penentangan dari beberapa muktamirin, termasuk KH. Machrus Ali, pengasuh Pesantren Lirboyo. Penolakan terutama terkait dengan kenylenehan Gus Dur, termasuk posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta.

Namun penolakan terhadap Gus Dur selesai saat KH. Achmad Sidiq bercerita bahwa dirinya bermimpi melihat KH Wahid Hasyim (ayah Gus Dur), berdiri di atas mimbar. Kiai Achmad mentakwilkan mimpi tersebut pertanda bahwa Kiai Wahid yang juga putra KH. Hasyim Asy'ari merestui Gus Dur untuk menjadi Ketua Tanfidziyah. Spontan Kiai Machrus dan muktamirin lainnya berubah sikap dengan mendukung Gus

Dur tanpa syarat. Gus Dur terpilih karena moral kaum santri yang memegang teguh ketaatan dan hormat pada kiainya dengan prinsip *sami'na wa atha'na* (mendengar dan taat).

Saat Muktamar Yogyakarta, 1989, di kala Kiai As'ad mengambil sikap *mufaraqah* terhadap kepemimpinan Gus Dur, tak ada kiai lain yang mengikutinya. Kenapa? Karena prinsip *sami'na wa atha'na* pada gurunya masih cukup kuat. Dalam tradisi NU, Gus Dur yang merupakan cucu Kiai Hasyim termasuk *pusering dunyo nahdliyin*. Tak ada yang berani melawan Gus Dur. Melawan Gus Dur sama halnya melawan Kiai Hasyim. Ini bangunan moral yang cukup kuat di kalangan kaum santri.

Ketika berlangsung Muktamar Cipasung 1994, rezim Soeharto dengan kekuatan penuh mencoba melengserkan Gus Dur dengan memasang Abu Hasan, orang yang masuk NU karena jasa Gus Dur, sebagai calon boneka untuk jabatan Ketua Tanfidziyah. Menyadari Gus Dur dalam ancaman, maka sebagian besar muktamirin merapat ke Gus Dur. Merapat untuk membela cucu Kiai Hasyim. Akhirnya Gus Dur berhasil memenangkan pertarungan dalam perebutan jabatan Ketua Tanfidziyah, meskipun dengan suara tipis. Padahal saat itu di tubuh NU sudah banyak yang tidak sejalan dengan Gus Dur, terutama dengan segala kontroversinya.

Sampai dengan Muktamar Cipasung terlihat bangunan moral politik kaum santri masih cukup kokoh. Namun selepas Orde Baru tumbang, terlebih ketika iklim politik era Reformasi yang sejak 2004 berlangsung secara liberal, kokohnya moral politik santri mulai meleleh. Tak terbayangkan, dengan intervensi dan bantuan rezim SBY, Gus Dur berhasil "ditumbangkan" oleh keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar. Padahal Muhaimin adalah anak muda yang

diorbitkan oleh Gus Dur. Cak Imin adalah keponakan Gus Dur dari jalur ibunda Gus Dur, Nyai Solichah yang juga putri dari KH. Bisri Syamsuri Denanyar Jombang.

Masih ingat dengan Djan Farid, mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Jakarta dan Ketua Umum PPP yang dalam tayangan langsung di TVONE dua kali gagal melafadzkan *amar makruf nahi munkar*. Kalimat yang semestinya begitu mudah diucapkan oleh seorang muslim, namun seorang Djan Farid gagal melafadzkannya, dengan mengucapkannya *amar makruf nahi munkar* menjadi *amar makruf nahi "mankur"*.

Kalau membaca dengan pendekatan tradisi moral kaum santri, saya kira kegagalan Djan Farid melafadzkan *amar makruf nahi munkar* sulit dipahami semata sebagai bentuk keseleo lidah, tapi mesti dipahami sebagai bentuk "teguran keras" Sang Pemilik Kekuasaan atas sikap politiknya yang membiarkan dan bahkan ikut terlibat dalam upaya adu domba dan perpecahan politik yang terjadi di tubuh PPP. Belum lagi sikap politiknya pada saat Pilkada Jakarta 2017 yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah melecehkan dan menista Islam dan umat Islam.

Pembiaran atas perpecahan di tubuh PPP dan dukungannya terhadap Ahok, selain telah merendahkan muruah PPP sebagai partai Islam, juga sekaligus meruntuhkan moral politik santri. Saya tidak bisa membayangkan hukuman apa yang akan diterima oleh Djan Farid bila sikap yang dipertontonkannya dilakukan ketika kiai-kiai sepuh seperti KH. Idham Cholid, KH. Syamsuri Badawi, KH. Yusuf Hasyim, dan KH. Adlan Ali masih hidup?

Dulu, ketika mendapati gaya hidup Zubchan ZE., Ketua I PBNU, yang dinilai telah melenceng dari nilai-nilai Islam, Kiai Bisri sebagai Rais Am langsung memecatnya. Apalagi dengan sikap dan perilaku politik yang dipertontonkan oleh Djan Farid, mungkin tindakannya akan jauh lebih keras.

Detik-detik terakhir menjelang berakhirnya waktu pendaftaran pasangan capres dan cawapres, publik dikejutkan dengan munculnya nama KH. Ma'ruf Amin, yang saat itu menjabat jabatan paling terhormat di NU sebagai Rais Am dan juga Ketua Umum MUI Pusat.

Kalau melihat perkembangan detik demi detik menjelang berakhirnya pendaftaran capres dan cawapres, memunculkan nama kiai sepuh dengan jabatan tertinggi di NU seperti Kiai Ma'ruf sebagai cawapres, rasanya semakin menegaskan runtuhnya moral politik kaum santri. Apalagi ketika memunculkan nama Kiai Ma'ruf sambil menafikan ke-NU-an Moh. Mahfud MD. Bagaimana mungkin Mahfud MD yang orang Madura dinafikan ke-NU-an. "Agama" sebagian besar orang Madura itu bukan Islam, tapi NU.

Pencalonan Kiai Ma'ruf sebagai cawapres Jokowi terbukti sangat tidak signifikan dalam mengangkat elektabilitas pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf. Partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf, terlebih PKB dan PPP pasti tahu akan hal ini. Terlalu banyak Nahdliyin, baik yang secara politik berafiliasi ke PKB dan PPP atau partai lainnya yang tidak mau memilih pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf. Begitu pun di kalangan "kiai kampung" terlalu banyak yang tidak mau mendukung dan memilih pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf. Alasannya karena mereka melihat bahwa Kiai Ma'ruf yang dari sisi usia termasuk sudah cukup udzur hanya diperalat oleh segelintir politisi NU, terutama dari PKB dan PPP. Kebanyakan Nahdliyin dan "kiai kampung" justru merasa kasihan dengan pencalonan Kiai Ma'ruf.

Beberapa hari lalu publik kembali disuguhi tontotan yang menyedihkan, ketika ada kiai sepuh, KH. Maimun Zubair berdoa dengan ketulusannya justru mendapat koreksi dari Ketua Umum PPP Romahurmuziy, seorang yang sebenarnya

masih tergolong *dzurriyah* NU. Bahkan ketika koreksi doa dianggap belum cukup, Romahurmuziy pun mengajak Presiden Jokowi masuk ke kamar Mbah Maimun untuk membuat *vlogging*, tentu *vlogging* yang menegaskan pernyataan dukungan Mbah Maimun kepada Jokowi.

Sebagai orang yang pernah nyantri dalam tradisi pesantren yang berkultur NU, saya melihat bahwa sikap tersebut rasanya sudah masuk kategori sebagai buruk sikap *(shuul adab)* dari seorang santri kepada kiai sepuh. Jangankan memprotes, mengoreksi pernyataan kiai, apalagi pernyataan (konteks kasus yang terjadi adalah "memprotes sekaligus mengoreksi doa) kiai sepuh seperti Mbah Maimun, jelas sesuatu yang tabu dalam tradisi kaum santri. Sikap yang dipertontonkan Romihurmuziy sekaligus menegaskan semakin runtuhnya moral politik kaum santri. Sekian. •

Kereta Tegal Bahari, 3/2/2019..

UU Pesantren dan Ukhuwah Islamiyah Kita

Kembali terjadi polemik di antara ormas Islam terkait satu kebijakan politik berupa Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren yang sekarang sudah disahkan menjadi UU. Polemiknya di antaranya selain terkait dengan "dana abadi pesantren", juga berkisar soal lima unsur pokok terkait kriteria pesantren yang terkesan eksklusif. Yang disebut pesantren kalau memenuhi lima kriteria tersebut yang salah satu di antaranya adalah terkait dengan "kitab kuning". Tidak terpenuhi satu saja dari lima kriteria tersebut, maka tak bisa disebut sebagai pesantren.

Masalah Ma'had Ali, Dewan Masyayikh, dan pola pendidikan yang hanya menyebut "mualimin" juga menjadi polemik. Padahal hampir semua ormas Islam saat ini selain mempunyai lembaga pendidikan yang bersifat formal juga mempunyai lembaga pendidikan keagamaan yang disebut pesantren, tentu sesuai dengan kekhasan masing-masing ormas tersebut. Dan perlu diketahui bahwa pesantren itu sudah hadir jauh sebelum ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah

(1912), Mathla'ul Anwar (1916), Persis (1923), NU (1926), Al-Khairaat (1930), Persatuan Tarbiyah Islamiyyah (Perti, 1930) Al-Washliyah (1930), Persatuan Umat Islam (PUI, 1952), dan Nahdlatul Wathan (NW, 1953) didirikan. Sehingga klaim bahwa pesantren itu mengidentik dengan dan diklaim oleh ormas tertentu sebagai "merek dagang" rasanya tidak pas.

KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) adalah alumni pesantren, KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) juga alumni pesantren. Bahkan dua kiai besar ini pernah sama-sama nyantri di pesantren yang sama, yaitu Pesantren Langitan Widang Tuban dan Pesantren Soleh Darat Semarang. Hampir kebanyakan tokoh pendiri ormas Islam lainnya juga alumni pesantren. Karena sejatinya tradisi pendidikan Islam di Indonesia periode awal itu hanya pesantren, model pendidikan yang mengakulturasi sekaligus mengadopsi model pendidikan di kalangan Hindu dan Budha.

Dengan latar sejarah yang demikian, maka meskipun Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai ormas yang mempunyai *concern* pada pendidikan umum tak berarti menafikan model pendidikan pesantren. Sebaliknya, NU yang selama ini identik dengan model pendidikan pesantren juga tak menafikan model pendidikan umum. Singkat kata, saat ini, tak hanya Muhammadiyah yang mempunyai sekolah, tapi NU dan ormas-ormas Islam lainnya juga mempunyai sekolah. Pun begitu, tak hanya NU yang mempunyai atau lebih tepatnya menghimpun pesantren-pesantren yang sepaham, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya juga mempunyai pesantren.

Karenanya kebijakan apapun yang dibuat terkait kepentingan umat harus diupayakan secara serius dengan mengakomodir dan mengayomi semuanya. Tak boleh

eksklusif. Terkait UU Pesantren yang baru disahkan DPR RI, secara prinsipil tak ada satu ormas Islam pun yang menolak. Yang disoal adalah eksklusifnya UU Pesantren yang seolah hanya ormas tertentu yang mempunyai atau lebih tepatnya mengayomi pesantren, sehingga UU Pesantren pun lebih berwajah dan mengakomodir gaya pesantren dari kelompok atau ormas tertentu.

Eksklusifnya UU Pesantren ini jelas menafikan keberadaan pesantren-pesantren yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam lainnya. Padahal hampir semua ormas Islam juga mempunyai pesantren, tentu dengan kekhasan masing-masing ormas yang bersangkutan. Hingga saat ini Muhammadiyah tercatat memiliki lebih dari 300 pesantren. Sekali lagi, ini pesantren Muhammadiyah, bukan pesantren orang per orang atau yayasan milik orang Muhammadiyah. Persis, Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Al-Washliyah, Hidayatullah, dan ormas-ormas Islam lainnya juga mempunyai banyak pesantren.

Masih ingat Liga Santri yang digulirkan Menpora Cak Imam Nahrowi sejak 2015? Liga yang bernama lengkap Liga Santri Nusantara (LSN) ini digulirkan dengan menggunakan uang rakyat. Tapi sayangnya santri yang dimaksud dalam LSN itu sangat eksklusif, yaitu santri yang berasal dari pesantren-pesantren tertentu yang berafiliasi ke ormas tertentu. Eksklusifnya LSN juga tergambar dari pelaksananya. Tercatat LSN hanya sekali dilaksanakan langsung di bawah komando Kemenpora. Selanjutnya LSN dilaksanakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI), organisasi perhimpunan pesantren yang berafiliasi ke NU.

Setahu saya, selama empat kali bergulir, LSN hanya berhasil menelorkan tiga pemain yang dipanggil masuk seleksi timnas U-19 yaitu Tri Widodo, Richard Rahmad, dan

Muhammad Rafli Mursalim di tahun 2017. Dari tiga pemain tersebut hanya satu pemain yang lolos masuk tim nasional U-19, yaitu Rafli yang nyantri di Pesantren Al-Asy'ariyah Tangerang. Sebelum nyantri, sejak kelas 5 SD Rafli sudah masuk Sekolah Sepak Bola (SSB) Villa 2000. Rafli sempat menjadi bintang pada gelaran Piala AFF 2017 U-19 di Myanmar. Sekarang Rafli tercatat hanya bermain di Liga 2 bersama Mitra Kukar. Prestasi ini tentu tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan LSN.

Sekadar diketahui, untuk pelaksanaan LSN 2017 saja biaya yang dikeluarkan Kemenpora mencapai 8 miliar. Bayangkan, kalau alokasi anggaran untuk LSN diberikan kepada PSSI untuk melakukan pembinaan pemain usia dini, dipastikan akan dan bahkan sudah menghasilkan banyak pemain nasional. Rasanya tak akan ada yang menolak atau menjadi polemik ketika LSN dilaksanakan lebih inklusif, dengan melibatkan semua pesantren dari berbagai latar belakang ormas Islam.

Tentu bukan lantaran iri atau ingin ter(di)libat(kan) dalam LSN, tapi selain LSN dilaksanakan dengan menggunakan APBN juga semata untuk menjaga ukhuwah Islamiyyah di antara ormas Islam atau pesantren (santri) di wilayah olahraga. Kecuali kalau niatnya memang mau tampil eksklusif. Tentu lain lagi, niatan untuk membangun ukhuwah Islamiyyah di ranah olah raga pasti tak akan berlaku.

Berangkat dari kasus LSN, harapannya konten UU Pesantren juga menggambarkan wajah UU yang bersikap "mengakomodir" dan inklusif, bukan sebagaimana wajah LSN yang eksklusif. Namun harapan tersebut rasanya tidak tercermin dalam UU Pesantren.

Masukan atau usulan dari Muhammadiyah dan banyak ormas lainnya misalnya praktis tidak diindahkan sama sekali.

Padahal usulan Muhammadiyah hanya sebatas melengkapi atau menambahkan dan tidak untuk mengubah secara fundamental. Usulan Muhammadiyah sebatas agar UU Pesantren lebih berwajah mengayomi semua pesantren dengan kekhasan yang dimiliki masing-masing ormas Islam dan bersifat inklusif, bukan sebaliknya berwajah eksklusif.

Ke depan, kalau model kebijakan yang berkenaan dengan umat Islam, tapi pembuatannya berwajah seperti penyelenggaraan LSN atau pembuatan UU Pesantren, rasanya keinginan untuk membangun ukhuwah Islamiyyah yang penuh ketulusan di antara ormas Islam hanya mimpi. Kalau pun seolah ada bangunan ukhuwah Islamiyyah, tak lebih hanya bangunan ukhuwah yang penuh kepura-puraan. Tak ada ketulusan sama sekali. Sekian. •

Ukhuwah Muhammadiyah dan NU Hanya Kurang Tepo Sliro

Syarah untuk tulisan Arif Maftuhin berjudul: Pura-Pura Ukhuwah

Menarik tulisan Arif Maftuhin (Mas Arif) berjudul: "Pura-pura Ukhuwah" yang beredar di banyak Grup WhatsApp. Saya sepenuhnya sepakat dengan isi keseluruhan tulisan Mas Arif. Melalui tulisan ini, saya tak bermaksud untuk mengoreksi secuilpun atas isi tulisan Mas Arif. Tulisan ini hanya sekadar *Syarah* atas *Matan* (tulisan Mas Arif).

Bagi yang pernah *nyantri* di pesantren tradisional akan mengenal istilah "kitab kuning". Dalam mengkaji kitab kuning dikenal pula istilah *Matan* dan *Syarah*. *Matan* dimengerti sebagai karangan tulisan yang merupakan kitab induk. Sementara *Syarah* sebagai karya tulis yang berisi penjelasan, perincian dan penafsiran dari *Matan*. Kebanyakan dalam satu kitab terdiri atas *Matan* sekaligus *Syarah*. *Matan* biasanya berada pada bagian

dalam kitab kuning. Sementara *Syarah* berada pada bagian pinggir. Nah, dalam konteks tulisan Mas Arif, tulisan saya hanya sebuah *Syarah*, penjelasan atau penafsiran.

Kalau menengok sejarah tradisi keilmuan para ulama dulu yang tersebar di banyak kitab klasik, termasuk kitab para imam madzhab, khususnya *madzahib al-arba'ah*, akan didapati adanya *tepo sliro* yang luar biasa di antara mereka. Meski mempunyai pendapat yang berbeda, namun mereka tetap *tepo sliro*, tidak saling menegasikan satu dengan lainnya.

Imam Syafii misalnya sangat menghormati gurunya, Imam Malik yang sering disebut sebagai "ulama hadis". Imam Syafii sangat menghormati Imam Hanafi, meski Imam Syafii lahir di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Hanafi (150 H). Sebagai bentuk penghormatan terhadap Imam Malik dan Imam Hanafi yang sering disebut "ulama *ra'yu*", maka pola pikir keagamaan Imam Syafii mencoba mengkombinasikan pandangan Imam Hanafi dan Imam Malik, memadukan *nash* dan *ra'yu*.

Begitu juga Imam Hambali sangat menghormati gurunya, Imam Syafii. Imam Hambali merupakan murid istimewa dan tak pernah berpisah hingga kepindahan Imam Syafii ke Mesir. Meski berstatus murid Imam Syafii, namun Imam Hambali "berani beda" dengan gurunya, dengan berpandangan bahwa tak ada *ijma* selepas periode sahabat. Sementara Imam Syafii menempatkan *ijma* setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Tradisi *tepo sliro* ini mengilhami kalangan ulama besar Indonesia "produk Arab", sebut saja KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari. Dua ulama besar ini belajar dan menimba ilmu di Arab. Keduanya berada di Arab ketika dunia Islam tengah mengalami degradasi (kemunduran) dalam banyak bidang. Khilafah islamiyah mengalami rongrongan dari internal

dan Barat yang memperalat komprador di negeri Muslim.

Lahir gerakan politik yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani yang mencoba memperbaiki *khilafah islamiyah* dan menggelorakan semangat *ukhuwah islamiyah* melalui *Pan Islamisme.* Lahir gerakan yang mencoba melakukan purifikasi ajaran Islam oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muncul pula gerakan pembaruan di bidang pendidikan yang dipelopori oleh Muhammad Abduh.

Semangat pembaruan dan pemurnian di tanah Arab menginspirasi para ulama asal tanah Jawi (Jawa) yang menimba ilmu di tanah Arab ini, termasuk oleh Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim. Pembaruan Kiai Dahlan tampak terlihat dari gerakan pembaruan dan purifikasi yang dilakukannya melalui *jamiyah* Muhammadiyah. Kalau yang cerdas memahami Muhammadiyah, akan terlihat bahwa pembaruan dan purifikasi Muhammadiyah periode awal tak terlalu tertarik masuk wilayah fiqh. Kiai Dahlan masih memakai pandangan fiqh *mainstream* Imam Syafii. Menyikapi fiqh yang berbalut tradisi, Kiai Dahlan hanya mencoba memberikan tawaran pemahaman keagamaan yang "tak memberatkan", sederhana, dan menggembirakan, seperti dalam menyikapi masalah kenduri atau tradisi keagamaan di seputar kematian yang dinilai memberatkan. Tak ada tawaran pembaruan ekstrem Kiai Dahlan dalam hal fiqh keagamaan.

Tawaran ekstrem yang menyebabkan Kiai Dahlan harus ikhlas dikafir-kafirkan justru dilakukan bukan pada wilayah fiqh ubudiyah, namun dalam membumikan gagasan besar yang diusungkan, seperti revolusi pendidikan, yang mencoba memadukan pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Sekarang nyaris tak ada satu pun sekolah yang tidak memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama,

seperti yang digagas Kiai Dahlan.

Kemudian meluruskan arah kiblat yang bikin heboh itu. Pada akhirnya, saat ini hampir semua masjid dan mushalla meluruskan arah kiblatnya. Dengan berbekal nilai-nilai fundamental dalam QS. al-Ma'un, Kiai Dahlan mendirikan Panti Asuhan dan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem). Memilih "O" sebagai "Oemoem" bukan "Oemat" menggambarkan kebesaran dan watak inklusif Kiai Dahlan.

Kiai Hasyim pun demikian. Wajah pembaruan dan purifikasinya terlihat jelas dalam Qanun Asasi yang beliau buat. Isinya kebanyakan berisikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Semangatnya senada dengan yang digelorakan oleh Kiai Dahlan. Qanun Asasi mengutip QS. Ali Imran 104 dan QS. al-Maidah 2, senafas dengan Muhammadiyah. Kiai Hasyim juga menyinggung sanad keilmuan, *bid'ah*, dan yang paling mendalam soal persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan.

Kiai Hasyim juga tak mau dengan kentongan atau bedug berada di masjid. Banyak riwayat menyebutkan, ketika Kiai Hasyim berkunjung ke banyak pesantren, sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Hasyim, pihak pesantren yang dikunjunginya menurunkan bedug atau kentongan yang berada di masjid. Kiai Hasyim juga tak menyukai tradisi *haul* (peringatan tahunan atas orang yang sudah meninggal). Di lingkup "kiai besar" Jombang, rasanya hanya Kiai Hasyim yang tahun meninggalnya tidak diperingati (dihauli). Kiai Hasyim tentu mempunyai alasan keagamaan atas sikapnya. Putusan-putusan *bahtsul masaail* NU periode awal juga sangat dipengaruhi oleh pembaruan dan purifikasi di tanah Arab. Saat itu, selain menghormati Kiai Hasyim dan kuatnya tradisi *tepo sliro* di kalangan para ulama tradisional, tak ada yang

keberatan dan apalagi “melawan” pembaruan dan purifikasi yang dilakukan oleh Kiai Hasyim.

Meski kedua ulama ini sama-sama mempunyai semangat pembaruan dan purifikasi, namun semangat Kiai Dahlan lebih progresif dibanding Kiai Hasyim yang cenderung lunak. Perbedaan ini tampaknya dipengaruhi oleh perbedaan lahan dakwah. Kiai Dahlan berdakwah di Yogyakarta dan sekitarnya yang tumbuh subur tradisi klenik, kuatnya animisme dan dinamisme, sehingga pola pembaruan dan purifikasinya pun harus adaptif dengan lahan dakwahnya. Sementara Kiai Hasyim berdakwah di Jombang dan sekitarnya yang karakter masyarakatnya berbeda. Sesuai namanya, Jombang konon berasal dari kata Ijo (hijau) dan Abang (merah), menggambarkan perpaduan santri dan abangan. Tradisi Santrinya kuat, tapi Abangannya juga kuat, meminjam terminologi Cliffortz Geertz. Menghadapi masyarakat yang seperti ini tentu model dakwahnya harus adaptif. Kiai Dahlan tentu tidak bisa memakai model dakwah Kiai Hasyim, dan juga sebaliknya.

Nyaris tak ada perbedaan mencolok antara model dakwah Kiai Dahlan dengan Kiai Hasyim, sama-sama pro pembaruan dan purifikasi. *Tepo sliro* di antara keduanya juga sangat tinggi. Disayangkan Kiai Dahlan harus berpulang ke rahmatullah lebih dulu (1923), jauh mendahulu Kiai Hasyim yang baru wafat di tahun 1947. Andai Allah takdirkan hidup lebih lama dan meninggal dalam waktu bersamaan, tentu masa-masa penuh ketegangan di awal 1920-an hingga 1950-an yang disebabkan oleh persoalan fiqh keagamaan yang “tak bermutu” dan perbedaan pandangan politik (di kalangan umat Islam) bisa teratasi dengan baik.

Menengok *tepo sliro* yang ditunjukkan oleh Kiai Dahlan

dan Kiai Hasyim, Muhammadiyah dan NU sebenarnya mempunyai bekal yang kuat untuk *tepo sliro*. Tak hanya itu, Muhammadiyah dan NU juga mempunyai modal lainnya, yaitu dalam penentuan hukum Islam. Muhammadiyah memilih memakai metode Tarjih, tidak memakai pendekatan madzhab, sementara NU memakai pendekatan madzhab.

Meski tak bermadzhab, Muhammadiyah tak mengingkari bahwa para imam madzhab adalah ulama yang sangat mumpuni dan besar jasanya dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, sehingga pendapat-pendapat keagamaannya tak dapat dikesampingkan begitu saja. Salah satu butir pokok manhaj Tarjih disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang selaras dengan al-Quran dan as-Sunah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

Dengan metode tarjih, maka selain menggambarkan wajah yang lebih merdeka dalam hal penentuan hukum Islam, juga menjadi modal kuat untuk membiasakan *tepo sliro* kepada kelompok lainnya. Dalam menentukan hukum, Muhammadiyah juga akan membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Cara ini membawa konsekuensi untuk mengkaji secara menyeluruh dan mendalam setiap cabang *(furu')* permasalahan yang akan dikajinya.

NU juga mempunyai modal yang sama kuat untuk *tepo sliro*. Dalam Anggaran Dasar NU Pasal 4 disebutkan bahwa "Nahdlatul Ulama berpedoman kepada al- Qur'an, al-Sunah, al-Ijma', dan al-Qiyas." Dan pada Pasal 5 disebutkan juga bahwa "Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham AhluSunah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam

Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali."

Poin yang menyebut bahwa NU dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) ini sebenarnya pintu masuk yang cukup bagus untuk menumbuhkan *tepo sliro*. Dengan mengikuti salah satu madzhab, sejatinya juga menuntut untuk mengkaji keseluruhan dari empat madzhab tersebut. Dan dengan mengkajinya, maka akan mengetahui letak perbedaan masing-masing madzhab dalam membahas satu persoalan keagamaan tertentu. Ini pintu masuk yang luar biasa untuk *tepo sliro*.

Belum lagi di pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU juga dikaji kitab-kitab klasik yang dikaji pula di Muhammadiyah, seperti Bulughul Maram, Riyadusshalihin, dan beragam tafsir Al-Qur'an. Dikaji juga kita-kitab yang—seharusnya—mampu menumbuhkan *tepo sliro*, seperti kitab *Rahmatul Ummah fii Ikhtafil Aimmah*.

Meski mempunyai modal yang kuat untuk *tepo sliro*, kenyataan di lapangan, *tepo sliro* menjadi sesuatu yang tak mudah dijalankan. Lalu apanya yang salah? Kalau merujuk pada tulisan Mas Arif yang menyebut tiga hal sebagai bukti kepura-puraan ukhuwah antara Muhammadiyah dan NU, yaitu lahir sebagai "musuh" bukan saudara, laten curiga dan insecurity, dan absennya musuh bersama, maka saya hanya menambahkan dua saja. *Pertama*, monodisiplin dan beragama dengan prinsip "pokoknya". Harus diakui, di lingkup Muhammadiyah masih ada sebagian kecil yang suka menyoal ritual-ritual NU yang bersifat tradisi. Tuduhan *ahlul bid'ah* kepada Nahdliyyin masih

kerap terdengar, meski tidak bisa digeneralisir setiap tuduhan *bid'ah* berarti datang dari Muhammadiyah. Sebab tuduhan *bid'ah* justru paling sering keluar dari kalangan Salafi. Kelompok ini sulit diberi pemahaman bahwa *bid'ah* hendaknya dipahami sebatas ibadah *mahdhah*. Sudah dijelaskan dengan beragam argumen bahwa ritual seperti tahlilan hanyalah "produk budaya", karenanya tak ada yang salah untuk menghadirinya, tetap saja tak mau paham. Sekadar mengucapkan *sayyidina* di luar salat misalnya, dianggap *bid'ah* oleh sebagian *jamaah* Muhammadiyah yang masih monodisiplin atau Amin Abdullah lebih suka menyebutnya sebagai Mursal (Muhammadiyah rasa Salafi).

Sebaliknya, di kalangan NU tak kalah sinis dalam menyerang *jamaah* Muhammadiyah sebagai anti tahlilan, tak mau membaca qunut, kering dalam beribadah, dan sinisme lainnya. Sama kakunya *(rigid)* dengan *jamaah* Muhammadiyah yang monodisiplin, di lingkup Nahdliyyin pun demikian. Sulit memberi pemahaman bahwa tahlilan adalah "produk budaya" yang wajib dilaksanakan dan dengan bilangan pelaksanaannya pun harus kaku. Namun pemahaman ini tak juga mampu mencerahkan kekakuan pola pikir mereka. Tahlilan tetap dipandang sebagai tradisi keagamaan "wajib" dan pelaksanaannya harus sesuai hitungan hari yang sudah mentradisi pula. Sampai di sini, rasanya Muhammadiyah dan NU sudah diposisikan seperti "agama" oleh para pengikutnya yang monodisplin dan beragama dengan prinsip "pokoknya".

Kedua, rendahnya literasi dan kurang *tepo sliro*. Di lingkup anggota Pleno Muhammadiyah dan jajaran elite NU, terlebih yang duduk di jajaran Syuriah, budaya literasi sudah jamak. Mengkaji masalah keagamaan dengan perspektif interdisiplin sudah *khatam*. Tapi di lingkup akar rumput, sangat rendah

budaya literasi. Kebanyakan mereka bermuhammadiyah atau berNU secara *taqlid* dan membabi buta. Tak berusaha *tepo sliro* dengan pandangan keagamaan yang dianut kelompok lain di luar Muhammadiyah atau NU. Selalu merasa diri paling benar.

Padahal kalau budaya literasi mereka kuat dan ada kesadaran bahwa perbedaan pandangan atau pemahaman keagamaan adalah keniscayaan, semestinya tak perlu ada ketegangan antara *jamaah* Muhammadiyah dan NU, apalagi yang menjadi sumber ketegangan hanya urusan remeh temeh terkait persoalan *khilafiyah* dan *furuiyah*. Sementara dalam urusan yang bersinggungan langsung dengan problem keumatan yang hingga kini masih membelenggu, seperti rendahnya sumberdaya manusia, masalah kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan tak pernah membikin ramai atau tegang di antara Muhammadiyah dan NU. Aneh bukan? Sekian. •

Gorontalo, 11 Maret 2020.

Kagum pada Gus Dur

Sejak masih kecil saya sangat mengagumi Gus Dur. Tentu kekaguman saya tetap dalam kapasitas Gus Dur sebagai manusia biasa, yang mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan.

Kekaguman saya terlebih pada dua hal. Pertama, gaya atau langgam Gus Dur dalam menyikapi rezim Orde Baru. Langgamnya sangat mengasyikkan. Tarik ulurnya saat berhadapan dengan penguasa Orde Baru *bak* bermain tarik tambang: kadang diulur, kadang ditarik. dan tarik ulurnya indah. Gus Dur benar-benar memerankan diri sebagai seniman politik.

Tengok misalnnya langgam Gus Dur dalam menyikapi deideologisasi partai politik dan ormas keagamaan yang berujung pada pemaksaan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal. Gus Dur paham betul bahwa rezim Orde Baru sangat menghendaki Pancasila menjadi asas tunggal. Guna merealisasikannya, segala cara dilakukan untuk memecah belah kekuatan umat Islam saat itu, termasuk NU. Mula pertama rezim melakukan pecah belah NU yang ada di PPP terkait Daftar Calon Tetap (DCT) PPP untuk DPR RI Pemilu 1982

dengan menggunakan tangan Naro yang memang sejak awal disetting oleh rezim untuk menguasai PPP.

Seperti diketahui, DCT ini banyak merugikan kiai sepuh NU dan sebaliknya, menguntungkan banyak kader muda NU. Akibat DCT ini di tubuh PPP terjadi konflik hebat, antara Naro yang didukung oleh rezim dan kader muda NU dengan kalangan kiai sepuh NU.

Konflik yang awalnya bermula di tubuh PPP menjalar ke tubuh NU. Di sini rezim termasuk berhasil menciptakan konflik di tubuh NU. NU terpecah menjadi dua faksi, yaitu Faksi Cipete (identik dengan tempat kediaman KH Idham Cholid, politisi) dan Faksi Situbondo (identik dengan kediaman KH As'ad Syamsul Arifin). Konflik ini menjadi pintu masuk bagi rezim untuk memaksakan asas tunggal Pancasila kepada NU. Setelah melalui perdebatan, baik pada Munas Alim Ulama 1983 maupun Muktamar Situbondo 1984, akhirnya NU menerima asas tunggal Pancasila.

Yang penarik dari penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila itu bukan soal penerimaannya itu sendiri, tapi timing penerimaannya. NU menerima asas tunggal jauh sebelum UU Keormasan disahkan tahun 1985. Bagi saya timing penerimaan ini merupakan kejelian politik Gus Dur. Dengan menerima asas tunggal lebih awal, maka upaya rezim untuk mengacak-acak NU lebih dalam tak lagi terjadi. Terbukti pasca Muktanar 1984 hubungan NU dengan rezim, setidaknya hingga menjelang Muktamar 1989 sangat mesra.

Untuk diketahui bahwa selain KH. Ahmad Sidik, Gus Dur menjadi aktor penting di balik penerimaan NU terhadap asas tunggal. Pada Muktamar 1989 di Yogyakarta posisi Gus Dur mulai digoyang oleh rezim Orde Baru. Akan tetapi di Muktamar 1989 Gus Dur masih dengan mudah terpilih kembali setelah

menjadi calon tunggal, karena pada tahap pencalonan, calon lainnya KH Yusuf Hasyim gagal memenuhi suara minimal 40 suara.

Pada Muktamar Cipasung 1994, tentangan rezim terhadap Gus Dur semakin eksplisit. Muktamar pun berlangsung panas. Lagi-lagi, Gus Dur pun terpilih kembali sebagai Ketua Tanfidziyah. Pasca Muktamar Cipasung hubungan Gus Dur dengan Presiden Soeharto sangat buruk. Baru pada acara Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), perhimpunan pesantren yang berafiliasi ke NU, di Genggong Probolinggo 1996 Gus Dur dan Soeharto bersalaman, yang kemudian dikenal dengan "salaman Genggong". Saat menjelang lengser, Gus Dur termasuk salah satu tokoh yang diundang oleh Presiden Soeharto ke Istana.

Gus Dur tidak hanya seperti tengah bermain tarik tambang, tapi juga kalau ibarat petinju itu seperti Muhammad Ali. *Footwork*-nya sangat bagus, menari-menari terus di atas ring, untuk menghindar pukulan lawan sambil sesekali melancarkan *jab*, *hook*, dan pukulan mematikan. Gaya "bertinju" Gus Dur ini yang membuat rezim Orde Baru emosi dan frustasi. Saat ini rasanya sulit menemukan "seniman politik" dan "petinju" seperti Gus Dur.

Kedua, Gus Dur itu sangat kontroversi. Sampai saat ini rasanya tak ada tokoh sekontroversi Gus Dur. Tapi sekali lagi kontroversinya mengasyikan dan tidak kampungan. Dalam menyikapi soal Wahabi dan Syiah misalnya, Gus Dur sangat kritis. Namun sikap kritis Gus Dur tak kemudian membuat para Ayatullah di Iran atau mereka yang duduk di *Wilayatul Faqih* marah. Begitu pun Kerajaan Arab Saudi tak juga tersinggung. Iran dan Saudi tetap menghargai dan menghormati Gus Dur.

Bandingkan dengan sikap sebagian tokoh agama yang

begitu norak dan kampungan. Satu sisi mengolok-olok Wahabi, tapi di sisi yang lain memuji dan memuja Syiah atau sebaliknya. •

Tol Cikunir, 9/9/2017.

Gatot Nurmantyo dan Islam Indonesia

Beberapa waktu lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir menjadi pembicara Pengajian Rutin Bulanan Muhammadiyah. Pembicara lainnya adalah Salim Said dan Hajriyanto Y. Thohari. Hadir Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan mantan Ketua Umum Din Syamsuddin. Pengajian dihadiri oleh jamaah yang memadati seluruh Aula KH. Ahmad Dahlan. Karena banyaknya jamaah yang hadir, sampai-sampai digelar Nonton Bareng (Nobar) di Masjid At-Taqwa yang berada di kantor Muhammadiyah. Di beberapa daerah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang juga menggelar Nobar Pengajian. Antusiasme jamaah ini karena mereka ingin melihat langsung ceramah Gatot terkait relasi Islam dan militer dalam konteks politik kebangsaan.

Langgam Gatot Nurmantyo

Dalam pandangan warga Muhammadiyah—dan diyakini juga kebanyakan umat Islam lainnya, Gatot dinilai mempunyai langgam kememimpinan yang berbeda dan bahkan kontras

dengan mantan-mantan Panglima TNI sebelumnya, terlebih sejak pasca Orde Baru. Langgam yang berbeda ini terlihat dalam mendudukkan relasi Islam, militer, dan negara, yang terbaca dari pernyataan-pernyataannya dalam beberapa bulan terakhir yang dinilai sangat proporsional, meskipun oleh kalangan *Islamofobia* bisa dinilai sebagai bentuk "keberpihakan" kepada umat Islam.

Terdapat beberapa sikap Gatot yang dinilai "berpihak" pada Islam. *Pertama*, sikapnya jelang Pilkada Jakarta, termasuk pernyataan-pernyataannya seputar Aksi Damai 411 maupun 212 yang dinilai pro Islam. *Kedua*, perintah kepada jajaran TNI untuk menggelar Nobar Film G30S/PKI. Perintah ini mendapat dukungan dari umat Islam, terlihat dari antusiasmenya dalam menggelar Nobar Film G30S/PKI di banyak daerah. Perintah ini bahkan berhasil "memaksa" Presiden Joko Widodo untuk ikut Nobar di Markas Korem Suryakencana Bogor.

Ketiga, seakan ingin mempertegas sikapnya, dalam peringatan HUT TNI ke-72 yang lalu, Gatot menghadirkan KH. Sholeh Qosim, veteran dan anggota Laskar Hizbullah. Hadirnya KH. Sholeh, seakan Gatot ingin mengatakan bahwa KH. Sholeh adalah sedikit saksi sejarah yang masih hidup yang bisa menjelaskan relasi kedekatan umat Islam dengan negara, khususnya militer pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya saat menyampaikan ceramahnya di Muhammadiyah, dalam berbagai kesempatan, Gatot juga banyak menguraikan sumbangsih umat Islam dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menyampaikan sejarah terkait sumbangsih umat Islam dalam pembentukan Angkatan Perang (militer) Indonesia.

Disebutkan oleh Gatot bahwa sumbangsih umat Islam luar

biasa. Melalui laskar-laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah, berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Para ulama di Jawa Timur berhasil membuat Resolusi Jihad yang berhasil membakar semangat *arek-arek* Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 dan daerah lainnya. Jenderal Sudirman juga berasal dari santri, dikenal sebagai kader Pandu Hizbul Wathan dan guru sekolah Muhammadiyah. Dalam berbagai kesempatan, fakta-fakta sejarah ini secara lantang disampaikan oleh Gatot.

Sikap (Tak) Istimewa Gatot Nurmantyo

Sikap dan pernyataan-pernyataan Gatot sebenarnya tak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Gatot hanya menyampaikan ulang fakta sejarah terkait relasi dan sumbangsih umat Islam, terutama dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, juga terkait pembentukan tentara nasional. Fakta sejarah inilah yang selama ini ditutup-tutupi secara rapat oleh kalangan *Islamofobia*, yang benci, takut, dan alergi terhadap Islam, yang tersebar di mana-mana, termasuk di kalangan militer.

Sikap Gatot dinilai istimewa, karena "berani" menyampaikan fakta sejarah apa adanya. Sejak Alamsyah Ratu Prawiranegara yang kerap menegaskan bahwa Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia, rasanya baru kali ini ada "jenderal penuh" yang mempunyai keberanian "kampanye" menyatakan hal serupa.

Selain Alamsyah dan Gatot, rasanya sejak Orde Baru sampai saat ini tak ada satu pun pejabat militer yang menyandang jabatan strategis "berani" menyampaikan fakta sejarah terkait peran politik umat Islam. Kebanyakan jenderal di negeri ini tidak atau kurang peduli pada Islam. Sebaliknya, secara

sistematis, justru terkadang terlibat dalam upaya pengaburan sejarah peran politik Islam, dan bahkan memusuhi Islam.

Gatot tentu menyadari, *impact* dari Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, di tengah masyarakat masih terjadi polarisasi yang tajam. Menyampaikan fakta sejarah terkait peran politik umat Islam dipastikan akan mendapat cibiran dan bahkan celaan dari mereka yang selama ini berpikir ahistoris, secara sistematis berusaha mendistorsi peran politik umat Islam dan *Islamofobia*. Namun dengan berani dan mungkin juga didorong oleh niatan untuk menyampaikan kebenaran, Gatot tak peduli dengan cibiran dan celaan atas sikapnya, termasuk tuduhan tengah bermanuver politik menjelang Pilpres 2019.

Islam Indonesia

Simpati dan antusiasme umat Islam terhadap Gatot perlu didudukan secara proporsional dalam konteks Islam Indonesia. Dan Islam Indonesia sejak dulu sampai sekarang nyaris tak mengalami perubahan watak. Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan sangat toleran. Islam yang dalam pilihan politiknya sangat moderat. Jauh dari watak yang sering digambarkan oleh kalangan *Islamofobia* sebagai Muslim intoleran, anti kebhinnekaan, dan mau menghadirkan negara Islam. Bagi saya, kategorisasi atau cap buruk yang disematkan kepada Islam Indonesia yang demikian, tak lebih hanya "jualan" kalangan *islamopobia* agar mereka mempunyai alasan menghujat Islam di Indonesia.

Selagi tidak ada upaya sistmatis dan demonstratif yang dipahami umat Islam sebagai upaya untuk membenci dan melecehkan Islam, maka Islam Indonesia adalah gambaran umat Islam yang misalnya dari sisi pilihan politiknya sangat moderat dan cair. Sekadar bukti, sejak Pemilu 1999, partai

pemenang pemilu selalu berasal dari partai nasionalis, baik nasionalis sekuler seperti PDI-P, maupun nasionalis religious seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat. Banyak juga anggota legislatif yang non-Muslim justru terpilih di daerah yang berbasis Muslim. Begitu pun dalam pemilihan presiden, umat Islam bisa akrab, bersahabat, dan memilih sosok Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, termasuk Prabowo Subianto, yang dalam pendekatan Clifford Geertz, keempatnya rasanya sulit dikategorikan sebagai varian santri. Fakta ini menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sangat moderat dan cair. Selain memilih partai Islam, umat Islam pun tidak alergi untuk memilih partai di luar partai Islam. Begitu pun dalam hal pilihan calon presiden.

Memahami Islam Indonesia pada ranah politik itu sederhana. Selagi tidak menyinggung dan melecehkan aqidah umat Islam, maka Islam Indonesia bisa bersahabat dengan siapapun. Namun kalau aqidah umat Islam sudah diganggu, maka siapapun akan dilawannya. Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada Jakarta 2017 menjadi bukti nyata. Ahok dan terlebih pendukungnya dinilai telah melecehkan aqidah umat Islam. Dan ketika umat Islam telah tersinggung dan dilecehkan, maka seberapa banyak kekuatan modal ekonomi tak akan sanggup menaklukan dan mengalahkan umat Islam. Sekian. •

Halimah Yacob dan Politik di Singapura

Halimah Yacob, perempuan Melayu dan Muslim terpilih sebagai Presiden Singapura Periode 2017-2023. Terpilihnya Halimah ini disikapi secara berlebihan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kalau merujuk pada tipologi pemilih pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017, kira-kira yang mereaksi secara berlebihan itu adalah mereka para pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam pandangan mereka, terpilihnya Halimah harus menjadi inspirasi dan bisa ditiru oleh Indonesia, di mana etnis minoritas Melayu yang hanya 15% dan Muslim bisa menjadi Presiden Singapura.

Dalam teori perbandingan politik, membandingkan sesuatu itu harus *apple to apple*. Tak boleh membandingkan *apple to banana*. Membandingkan Singapura dengan Indonesia dalam konteks sistem politik tentu tidak tepat dan bahkan naif. Sederhana saja, siapapun yang memahami Singapura dengan baik, negara ini sebenarnya secara politik lebih tepat dimasuk

sebagai tipe negara otoriter.

Partai-partai memang ada, tapi tetap saja direkayasa sedemikian rupa agar yang tampil sebagai pemenang dalam setiap pemilu adalah partainya Lee Kuan Yew Poeple's Action Party (PAP). Bandingkan dengan Indonesia yang praktik demokrasinya begitu bebas dan bahkan sangat liar. Partai pemenang pemilu hampir setiap pemilu selalu berganti-ganti.

Di tilik dari sistem pemerintahannya juga berbeda. Singapura menganut sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dengan Presiden sebagai kepala negara, yang fungsinya sebatas *ceremony* dan secara politik nyaris tak mempunyai kuasa politik yang berarti. Sementara Indonesia menganut sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat dan melekat pada diri seorang presiden. Dari dua hal ini saja sungguh tidak tepat membandingkan Singapura dengan Indonesia.

Kemudian, kurang tepat dan bahkan terkesan berlebihan, seakan dengan terpilihnya Halimah Yacob lalu sertamerta menganggap Singapura sebagai negara yang secara politik menghargai dan menjunjung tinggi kebhinnekaan dan toleransi.

Kurang tepat juga menjadikan kemusliman Halimah sehingga terpilih menjadi Presiden Singapura sebagai alat ukur untuk menyebut Singapura demokratis dan menghargai Islam. Halimah terpilih itu lebih karena representasi etnis Melayu (yang identik Muslim), bukan karena representasi Muslim. Mana ada dalam sejarah kebijakan politik Singapura bersahabat atau pro dengan Islam.

Untuk diketahui, yang "boleh" menjadi Presiden Singapura itu hanya mereka yang berasal dari etnis China, Melayu, dan India. Dalam sejarah berdirinya Singapura (selepas berpisah dari Malaysia), tercatat etnis China pernah

3 kali menjabat sebagai Presiden: Wee Kim Wee (1985-1993), Ong Teng Cheong (1993-1999), Tony Tan Keng Yam (2011-2017), Inggris 1 kali Benjamin Sheares (1971-1981), India yang populasinya saat ini hanya 9% pernah 2 kali menjabat Presiden, yaitu C.V. Devan Nair (1981-1985) dan Sellapan Ramanathan (1999-2011). Sementara etnis Melayu yang berjumlah 15% baru 2 kali menjadi Presiden, yaitu Yusof Ishak (1965-1970) dan Halimah Yacob. Jadi kalau sekarang Melayu menjadi Presiden Singapura sangat wajar dan sama sekali tak istimewa. Tak perlu dibesar-besarkan, apalagi mengaitkan dengan toleransi dan kebhinnekaan. Terlalu berlebihan.

Kalau mau dikritisi lebih jauh, terpilihnya Melayu dan Muslim sebagai Presiden, saya melihat lebih dominan nuansa politisnya, tentu politis terkait kepentingan rezim Lee Kuan Yew (Lee Hsien Loong) *wa alihi wa ashabihi*, daripada *ansich* mengakomodir kepentingan Melayu dan apalagi Muslim di Singapura.

Saya tidak mempunyai data terkait populasi penduduk Singapura saat awal-awal Singapura memisahkan diri dari Malaysia, yang pastinya pada awal abad ke-19, penduduk mayoritas Singapura berasal dari Melayu (90% dari Indonesia). Kalau melihat latar sejarah ini, wajar Melayu dan Muslim menjabat sebagai Presiden. Begitu pun kalau sekarang Halimah menjabat sebagai presiden sangat wajar. Apalagi terpilihnya Halimah "direkayasa" sedemikian rupa oleh rezim Loong dengan menjadi calon tunggal, bukan murni pilihan rakyat Singapura.

Terpilihnya Halimah yang *notabene* pernah menjadi pengurus PAP dikritik dan direaksi oleh kalangan oposisi. Muncul pula penolakan dari masyarakat. Tagar #NoMyPresident menghiasi media sosial di Singapura. Saya yakin, kalau tidak

direkayasa menjadi calon tunggal, maka dengan rumus demokrasi (suara terbanyak), orang Melayu dan Muslim seperti Halimah tak akan pernah menjadi presiden dari sebuah negara bernama Singapura, negara yang dihuni mayoritas etnis China.

Menurut saya, Singapura akan disebut demokratis dan menghargai kebhinnekaan kalau yang terpilih menjadi Perdana Menteri berasal dari etnis Melayu dan Muslim. Seperti di Indonesia, orang seperti Ahok direkayasa oleh elite negeri ini untuk menjadi Gubermur DKI, maka saya baru akan menyebut Singapura demokratis, menghargai kebhinnekaan dan toleran kalau ada etnis Melayu dan Muslim atau bahkan India direkayasa oleh rezim Loong atau setidaknya diberi kesempatan yang sama untuk menjadi Perdana Menteri. Selagi yang terpilih dan terpilih lagi menjadi Perdana Menteri berasal dari etnis China tak usahlah mengagung-agungkan Singapura. Apalagi dibanding-bandingkan dengan Indonesia. Sama sekali tidak level.

Berkaca dari kasus Singapura, maka keliru mereka yang menyuruh Indonesia meniru Singapura hanya karena Halimah yang Melayu dan Muslim terpilih sebagai presiden. Sekali lagi, Halimah terpilih sebagai Presiden Singapura bukan karena kemuslimannya, tapi lebih karena representasi Melayu.

Justru kalau mau belajar dari Singapura dan meniru gaya politik Singapura, maka semestinya jangan memberikan kesempatan pada orang atau etnis minoritas seperti Ahok untuk—jangankan—menjadi Presiden, menjadi gubernur pun tak pantas dan tak boleh.

Terakhir, jangan sok pluralis, sok toleran, sok bhinneka, kalau kelakuannya jauh dari pluralis, intoleran, dan tak menghargai perbedaan. Jangan pula karena nafsu yang intoleran dan menolak kebhinnekaan untuk mendudukan

etnis minoritas menduduki jabatan politik di Indonesia, sampai lupa membandingkan sesuatu yang tak *apple to apple*. Memaksakan membandingkan sistem politik Indonesia dengan Singapura. Apalagi dalam membandingkan ini selalu terselip agenda *Islamophobia* yang berusaha dengan berbagai cara untuk menyudutkan Islam. Sekian. •

"Kambing Hitam" Bernama HTI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan bila pembubarannya mendasarkan pada Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat sekalipun, banyak tahapan pembubaran HTI yang dilanggar. HTI "hanya" dibubarkan oleh Menkopolhukam. Tak ada sanksi administrasi atau pun pidana. Proses pemberian sanksi administrasi dari mulai peringatan tertulis sampai penghentian kegiatan tak dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah langsung mengambil sanksi administrasi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ini jelas pelanggaran UU dan juga Perppu.

Meskipun sudah dibubarkan, HTI masih saja terus disudutkan sebagai organisasi yang hendak mendirikan bukan sekadar Negara Islam tapi juga Negara Khilafah (Islamiyah). Beberapa individu maupun tokoh yang diduga

menjadi pendukung HTI, yang tergambar dari pernyataan-pernyataannya terkait HTI yang tersebar di media sosial, dilarang mengisi pengajian. Pengajiannya diancam untuk dibubarkan. Kasus terbaru menimpa Felix Siauw dan Bahtiar Nasir belum lama ini. Keduanya dilarang mengisi pengajian dengan dalih keduanya mendukung HTI.

Kalau ukuran dukungan terhadap HTI hanya dilihat dari pernyataan-pernyataannya di media massa, maka sebenarnya tidak hanya Felix Siauw dan Bahtiar Nasir. Ada banyak mantan pejabat di negeri ini yang pernah pembuat testimoni atau pernyataan dukungan kepada HTI. Beberapa di antaranya bahkan sekarang menjadi bagian dari Pemerintah yang telah membubarkan HTI itu sendiri.

Mungkinkah Berdiri Negara Khilafah?

Meskipun bercita-cita mendirikan Negara Khilafah, namun kalau melihatnya dengan nalar yang jernih, sejatinya tak ada satu celah pun dalam sistem politik Indonesia yang bisa menjadi pintu masuk bagi HTI untuk mendirikan Negara Khilafah, sehingga menyudutkan HTI menjadi sangat berlebihan.

Kalau berkaca pada kasus Turki misalnya, di mana Recep Tayyip Erdogan dengan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)-nya berhasil mengembalikan Turki sebagaimana sebelum Kemal At-Taturk, dengan wajah Islam yang menonjol, sejatinya untuk mengubahnya membutuhkan waktu cukup lama. Awal perjuangan politiknya setidaknya bisa dilacak sejak bendirinya Partai Refah oleh Necmettin Erbakan.

Dalam proses mengembalikan menjadi wajah Turki yang sekarang ini—dari mulai Erbarkan sampai Erdogan—dilakukan dengan mengikuti mekanisme politik yang ada di Turki. Necmettin sampai Erdogan sama sekali tidak pernah

menegasikan sistem politik yang tengah berlangsung di Turki. Sebaliknya mengikuti semua mekanisme politik yang berlaku, termasuk dengan mendirikan partai politik dan ikut terlibat menjadi kontestan di dalam pemilu.

Sebaliknya, HTI justru tegas menyatakan demokrasi sebagai sistem kufur, termasuk menolak keberadaan partai politik sebagai produknya, seperti tergambar dalam karya Amir Hizbut Tahrir (1977-2003) Abdul Qadim Zallum, *ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr: Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Dakwatu Ilaiha*. Pandangan ini kontras dengan demokrasi yang tegas menjadikan partai politik dan pemilu sebagai instrumen politik paling penting yang digunakan dalam proses pergantian kepemimpinan. Dengan kata lain tak mungkin tidak untuk mengubah negara harus melalui pendirian partai politik dan mengikuti pemilu.

Sementara Indonesia, negara yang hendak diubah menjadi Negara Khilafah adalah negara yang sudah bersepakat menjadikan demokrasi sebagai *the rule of games* dalam praktik politiknya. Artinya, untuk mengubah Indonesia menjadi Negara Khilafah, HTI harus beradaptasi dengan sistem politik Indonesia. Caranya, HTI harus mau menerima demokrasi sebagai sistem politik, tak bisa lagi dianggap sebagai sistem kufur, meski di dalamnya terdapat banyak titik kelemahan. Selain itu, "kelamin politik" HTI juga harus jelas, dengan bersedia mengubah diri menjadi partai politik. Bukan sekadar namanya Hizbut Tahrir yang kalau diartikan bisa berarti "Partai Pembebasan". Lebih dari itu, HTI juga harus mau menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

HTI harus mau menerima tiga hal: menerima demokrasi, menjadi partai, dan menerima Pancasila. Sementara tiga hal ini pula yang selama ini menjadi prinsip dasar perjuangan

HTI. Dan untuk mengubah tiga hal prinsip ini tentu bukan perkara mudah bagi HTI. Kalau HTI tidak mau mengubahnya, maka sulit bagi HTI untuk memulai mewujudkan impiannya mendirikan Negara Khilafah.

Sampai di sini saja sudah terbayang betapa sulitnya mencari pintu masuk bagi HTI untuk mengubah Indonesia menjadi Negara Khilafah. Dengan prinsip dasar politiknya, hampir-hampir sulit bagi HTI untuk berputar haluan dengan menerima demokrasi dan mendirikan partai politik. Bahkan andaikan HTI mau "menggadaikan" diri dengan ber-*taqiyah* dan bersepakat beradaptasi dengan sistem yang ada pun belum tentu juga niat mengubah Indonesia menjadi Negara Khilafah akan terwujud.

Andai HTI bersedia menerima konsep demokrasi dan mendirikan partai politik, juga tidak yakin akan begitu mudah memperoleh dukungan politik. *Mainstream* umat Islam Indonesia itu menolak formalisasi agama dalam kehidupan negara. Apalagi saat ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sudah *confirm* menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dulu ketika Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan partai Islam lainnya masih berjuang menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam pun selalu menuai kegagalan, rasanya akan sangat sulit memperjuangkan berdirinya Negara Khilafah di Indonesia saat ini.

Sebelumnya kelompok Islam gagal dalam perjuangan mempertahankan kesepakatan BPUPKI dengan Piagam Jakarta-nya pada Sidang PPKI. Sidang PPKI berhasil mengubah isi Piagam Jakarta dengan membuang anak kalimat: "Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada persidangan di Konsituante, kelompok Islam juga mengalami kekalahan.

Usulan mengembalikan Piagam Jakarta ditolak oleh mayoritas anggota Konstituante. Umat Islam sedikit terhibur karena dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno masih menyebutkan: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut".

"Kambing Hitam" HTI

Berangkat dari prinsip dasar HTI dan berkaca pada sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia, untuk tidak mengatakan mustahil, rasanya tidak mudah bagi HTI untuk menghadirkan Negara Khilafah di Indonesia. Karenanya, saya menilai sangat berlebihan terhadap mereka yang terus menerus menyudutan dan mengkambinghitamkan HTI dengan tuduhan hendak menghadirkan Negara Khilafah.

Saya menduga, penyudutan terhadap HTI bukan semata "kambing hitam" terhadap HTI, tapi memang ada upaya serius dan sistematis, terutama dari kalangan *Islamofobia* yang sengaja terus-menerus mencoba untuk memojokkan kelompok Islam politik di Indonesia dengan menonjolkan wajah Islam yang digambarkan menyeramkan dan menakutkan, tentu menurut perspektif mereka. Tujuannya jelas, agar kalangan *Islamofobia* tetap mempunyai alasan atau sasaran untuk mencerca dan menghinadina kelompok Islam politik secara kesuluruhan. Sejatinya mereka memang tak akan pernah rela bila kelompok Islam politik tampil berkuasa di Indonesia. Bukan hanya sekarang, tapi sejak masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Orde Lama hingga era Reformasi. Sekian. •

Bagian IV

Amien Rais dan Dinamika Politik PAN

Amien Rais, Salahnya Kau Lahir dari Rahim Muhammadiyah

Kau memang hanya manusia biasa.
Kau tentu punya kelemahan, dan kau (pasti) juga punya banyak kelebihan.

Kau bersekolah di negeri "kafir" Paman Sam.
Kau banyak berinteraksi dengan mereka "kaum kafir". Namun tak menjadikan kau bagian dari kebanyakan alumni sekolah negeri "kafir" yang cenderung Islamofobia.
Kau tetap Amien Rais yang lahir dari rahim Muhammadiyah yang proporsional memposisikan Islam dan "kafir".

Kau berhasil menggerakan aksi menentang kekuasaan otoriter dan bahkan totaliter Orde Baru, di saat orang yang lainnya yang sebayamu diam membisu dan bahkan nyaman menjadi bagian dari kekuasaan yang tiran.
Kau berteriak dengan kencang tentang "suksesi kepemimpinan nasional sebagai keharusan" di kala yang lainnya diam penuh

ketakutan, menghamba dan bahkan menjadi penjilat kekuasaan serta berusaha mempertahankan *status quo*.

Kaulah manusia "aneh" yang selalu teriak lantang kepada penguasa yang menyimpang.
Kau kritisi Soeharto, kau kritisi pemimpin-pemimpin sesudahnya.
Kau memang tak akan pernah membuat nyaman penguasa-penguasa yang lalim dan para komprador di negeri ini.

Kau manusia yang sudah tak punya urat takut, di kala teman sebayaku masih penuh ketakutan. Takut mati, takut tak punya dan dekat dengan kekuasaan, takut miskin.
Kau manusia langka yang rela tidak populer demi prinsip tauhid (politik) yang selama ini kau perjuangkan. Bandingkan sebayamu yang masih terus cari popularitas dan gila hormat dan jabatan.

Kau salah lahir dari rahim Muhammadiyah. Coba kau lahir dari ormas keagamaan lain. Coba kau lahir dari keluarga Abangan dan bahkan keluarga PKI sekalipun, kau tak akan pernah di-*bully* dan dicaci maki secara kasar oleh mereka yang begitu bangga dengan ashobiyahnya.

Kau salah sih lahir dari rahim Muhammadiyah.
Kau sepanjang zaman tak akan pernah termaafkan dan selalu dituduh sebagai aktor tunggal pelengseran seorang presiden. Coba kau lahir bukan dari Muhammadiyah, tapi kau lahir dari keluarga santri (yang bukan Muhammadiyah), lahir dari keluarga abangan, lahir dari keluarga non-Muslim, pasti mereka bisa memaafkanmu.

Kau dan siapa pun pasti tahu bahwa ada kekuatan besar yang antusias mendukung pelengseran itu. Kekuatanmu saat itu begitu ringkih.
Kau hanya punya 34 kursi. Bandingkan kekuatan lain yang punya banyak kursi di MPR, termasuk militer dan kepolisian. Kau pasti paham teori kudeta. Selagi militer berada di belakang dan bersama presiden pasti tak akan pernah terjadi kudeta atau pelengseran.
Kau pasti tahu, militer, kepolisian, partai-partai besar saat itu tak lagi berpihak ke presiden. Tapi karena kau Ketua MPR dan berasal dari Muhammadiyah, maka selamanya kau akan dipersalahkan dan tak termaafkan akibat lengsernya presiden.

Kau usianya tidak muda lagi, namun jiwamu tak pernah tua. Jiwa "pemberontak"-mu tiap melihat kebatilan politik, hukum, dan ekonomi selalu muda.
Kau rela dihujat, dicaci, di-*bully*, bahkan rela dituduh provokator dan makar oleh penguasa, pendukung penguasa, dan mereka yang tengah bermesraan dengan penguasa.
Kau terlalu kritis sih. Coba kau akomodatif dan kooperatif dengan penguasa, pasti kau hidupnya akan selalu aman dan nyaman. Tak akan pernah terjadi ancaman- ancaman pembunuhan kepadamu, termasuk ancaman pembunuhan yang didalangi "jenderal luwak" itu.

Kau sih salah tidak menjadi penjilat atau sekadar bermain aman dalam relasinya dengan kekuasaan. Coba kau menjilat pada kekuasaan, pasti pundi-pundi rupiah dalam jumlah *gede* akan kau dapatkan. Anak kau juga pasti akan peroleh jabatan empuk di negeri ini.
Kau tahu tidak, bahwa semua yang kau lakukan ini membuat

saya dan (yakin) kaum muda lainnya yang gelisah dan prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, iri padamu. Iri padamu Muhammad Amien Rais. Sekian. •

Cirendeu, 25 Mei 2019.

Amien Rais yang Saya Pahami

Membincang nama Amien Rais, sebagian publik tidak jarang menganggap sebagai tokoh kontroversi dan penuh ambisi. Tulisan ini mencoba untuk mengupas terkait dua anggapan tersebut, tentu saja sesuai dengan apa yang saya pahami tentang sosok Amien Rais.

Dalam posisi sebagai aktivis Muhammadiyah, bisa jadi pembaca akan menyangsikan obyektivitas tulisan ini. Tentu itu sah saja dan hak pembaca untuk menilainya. Namun, sebagai orang yang hingga saat ini masih berkecimpung di dunia akademik, saya mencoba menulis seobyektif mungkin.

Sosok Kontroversi?

Terdapat kecenderungan umum bahwa kontroversi yang dilakukan seseorang identik dengan kecerdasan yang dimilikinya. Kontroversi selalu lahir dari orang-orang cerdas, meskipun tidak selalu orang cerdas tampil kontroversi. Tengok saja tiga orang yang paling saya kagumi: Nurcholish Madjid

(Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Amien Rais. Cak Nur dan Gus Dur selama hidupnya kerap melontarkan gagasan-gagasan konrtoversial. Begitu pun Amien Rais, hingga kini masih kerap memproduk kontroversi.

Gagasan Cak Nur yang cukup kontroversi adalah gagasan soal “Islam Yes, Partai Islam No”. Gagasan ini tertuang dalam tulisan Cak Nur berjudul “keharusan pemba(ha)ruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat”. Ketika gagasan ini dilontarkan dan dilihat dalam konteks zamannya, tahun 1970, sebenarnya biasa saja. Cukup bisa dipahami. Lalu perspektif Cak Nur tentang *tauhid*, di mana Cak Nur menafsirkan *tauhid* (syahadat *tauhid*) sebagai “tiada tuhan selain Tuhan”. Perspektif Cak Nur ini sempat membikin heboh dan menjadi polemik panjang di awal 1990-an. Dalam beberapa forum diskusi, Cak Nur sempat “diadili” karena gagasannya ini.

Begitu juga Gus Dur, rasanya terlalu sering melontarkan gagasan dan sikap kontroversi. Di antaranya adalah akrobatik politik Gus Dur menjelang penerimaan asas tunggal Pancasila. Selain KH. Ahmad Siddiq, Gus Dur bisa disebut sebagai motor penerimaan NU atas asas tunggal Pancasila. Bahkan di kala UU Keormasan belum disahkan, NU sudah memutuskan menerima asas tunggal Pancasila melalui Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo. Pasca Peristiwa Tanjung Priok 1983 yang menewaskan ribuan umat Islam karena ulah tentara, Gus Dur mengajak LB Moerdani, Panglima ABRI (TNI) keliling ke beberapa pesantren. Gus Dur menawarkan konsep pribumisasi Islam. Mengubah *assalamualaikum* menjadi selamat pagi, siang atau malam. Membela Arswendo dalam kasus Tabloid Monitor di kala umat Islam marah akibat survei yang dilakukan tabloid milik Kompas Grup, yang dinilai melecehkan Rasulullah.

Bukan hanya kontroversi, langgam Gus Dur dalam

berpolitik juga menarik, terlebih saat berhadapan dengan rezim Orde Baru. Dan langgam yang paling menarik adalah ketika berhadapan dengan rezim Orde Baru pada Muktamar Cipasung 1994. Dengan gayanya *bak* "pendekar mabok", Gus Dur berhasil mengalahkan rezim Soeharto yang mencoba melengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Tanfidziyah. Saya sangat menyukai dan menikmati langgam politik Gus Dur ini.

Selanjutnya Amien Rais. Mantan orang nomor satu Muhammadiyah ini adalah satu di antara tiga tokoh yang saya kagumi yang sampai saat ini masih sehat walafiat. Semoga Amien Rais selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan usianya.

Seperti halnya Cak Nur dan Gus Dur, Amien Rais juga termasuk tokoh yang hingga kini nyaris tak pernah berhenti memproduk kontroversi. Gagasan-gagasannya juga kerap mengundang perdebatan. Amien Rais adalah orang yang mula pertama menawarkan gagasan soal *tauhid* sosial dan *tauhid* politik. Ketika di awal 1990-an orang masih tabu dan penuh ketakutan –termasuk di internal Muhammadiyah– bicara soal suksesi kepemimpinan nasional, Amien Rais dengan lantang menyuarakan suksesi nasional melalui makalahnya yang cukup terkenal: "Suksesi 1998 Suatu Keharusan". Beragam konsekuensi dari teriakan lantangnya ini diterima Amien Rais, seperti penghadangan yang dilakukan rezim Soeharto untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah saat Muktamar Aceh 1995. Amien Rais juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Di saat para ilmuwan dan politisi diam membisu menyikapi pertambangan-pertambangan asing di Indonesia, Amien Rais teriak lantang dan menggugat keberadaan pertambangan-pertambangan asing tersebut, terlebih Freeport di Tembagapura Papua. Dalam kapasitas sebagai ilmuwan

politik bergelar Guru Besar, Amien Rais menawarkan gagasan yang cukup berani dan tentu dengan resiko politik yang tidak kecil: Negara Federal. Gagasan ini mendapat reaksi, tentangan dan hujatan dari banyak pihak. Bahkan gagasan kontroversi ini menjadi alat buruk untuk kampanye negatif ketika Amien Rais maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2004.

Berbeda dengan Gus Dur yang langgamnya seperti "pendekar mabok" atau kalau petinju itu ibarat Muhammad Ali yang mempunyai *footwork* cukup bagus ketika berada di atas ring, maka sosok Amien Rais itu *bak* petarung gulat Mixed Martial Arts (MMA): pukulannya keras dan mematikan serta kritis dan tutur bahasanya sering memakai diksi-diksi yang tajam, seperti *tauhid sosial* dan *tauhid politik*. Seorang Muslim biasa mendengar kata *tauhid*, tapi rasanya tak pernah mendengar istilah *tauhid sosial* dan *tauhid politik*. Amien Rais kerap berhasil menciptakan polemik tentang sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru. Misalnya polemik tentang "Partai Tuhan" dan "Partai Syaitan". Bagi mereka yang pernah belajar pemikiran politik Barat, polemik ini sama sekali bukan hal baru. Polemik ini sudah muncul pada akhir abad ke-4 Masehi seiring munculnya tawaran gagasan Santo Agustinus berupa "Negara Tuhan" dan "Negara Iblis".

Terkait pernyataan Amien Rais bahwa "Tuhan malu kalau tidak menerima doa kelompok anti-Jokowi" sebenarnya bagi siapapun yang kerap membuka-buka Hadis yang berkenaan dengan doa, maka akan ditemukan banyak hadis sebagaimana dimaksud Amien Rais (Tuhan malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya). Bahwa Amien Rais mengaitkannya dengan Jokowi itu soal tafsir dan sah saja. Pihak yang berseberagan dengan Amien Rais juga boleh saja menafsirkan Hadis tersebut dengan pemahaman sebaliknya.

Mungkin ada yang tidak suka dengan langgam Amien Rais, namun bagi saya langgam yang ditampilkan Amien Rais sangat dibutuhkan, terlebih ketika berhadapan dengan rezim yang bebal, yang tak mudah paham dengan bahasa yang santun dan metafora. Andai tidak ada suara kritis dan keras Amien Rais, yang sering disebut banyak orang sebagai orang yang tak lagi punya urat takut, tentu cerita Indonesia saat ini akan berbeda. Andai tak ada Amien Rais, maka bisa jadi terjadi kompromi politik di Istana di sekitar Mei 1998.

Sampai dengan saat ini, di usianya yang tidak muda lagi, Amien Rais termasuk orang yang *istiqamah* dengan langgamnya yang kritis, penyampaian gagasannya yang tajam dan penuh diksi. Bandingkan dengan tokoh-tokoh seusianya. Kebanyakan sudah mengambil posisi politik yang konservatif, tidak berani neko-neko dengan mengambil posisi oposisi, berhadapan dengan penguasa. Sikap kritis Amien Rais saat ini adalah gambaran sikap Amien Rais ketika masih menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah, tanpa pamrih kekuasaan. Bersambung.

Amien Rais Penuh Ambisi?

Sebutan bahwa Amien Rais seorang ambisius sampai saat ini masih sering saya dengar. Kalau menilik jabatan atau kekuasaan politik yang pernah disandang Amien Rais hingga saat ini, menyebut Amien Rais seorang ambisius rasanya sebutan tanpa dasar. Ukurannya tidak jelas. Sebagai politisi, tentu sebutan ambisius akan dikaitkan dengan ambisinya dalam menggapai jabatan atau kekuasaan politik. Kalau jabatan atau kekusaan politik menjadi ukurannya, sosok Amien Rais justru jauh dari kesan ambisius. Sebaliknya, banyak keteladaan yang telah dicontohkan Amien Rais yang layak ditiru oleh politisi-politisi ambisius negeri ini.

Seperti disebut di atas, Amien Rais menjadi Ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar Aceh 1995. Seiring terbentuknya Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai hasil rekomendasi Tanwir Muhammadiyah Semarang 1998, di mana Amien Rais didaulat menjadi Ketua Umum PAN, maka Amien Rais pun menyatakan mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu Muhammadiyah.

Hasil Pemilu 1999 PAN menempati urutan kelima dengan memperoleh suara 7.528.956 (34 kursi). Amien Rais kemudian terpilih menjadi Ketua MPR RI yang saat itu masih berstatus Lembaga Tertinggi Negara. Menurut penuturan banyak orang yang menjadi saksi sejarah di seputar Pilpres 1999, termasuk penuturan dari Amien Rais sendiri, meski sudah terpilih menjadi Ketua MPR, sebenarnya peluang untuk menjadi Presiden masih terbuka lebar. Elit politik saat itu, seperti BJ Habibie, Wiranto, Akbar Tanjung, dan beberapa lainnya, lebih menghendaki Amien Rais yang menjadi Presiden RI. Alasannya, Amien Rais adalah tokoh reformasi yang berperan penting atas lengsernya Presiden Soeharto. Melengserkan Soeharto itu pertaruhannya bukan hanya jabatan yang disandangnya, tapi juga nyawa. Sehingga layak dan wajar untuk menjabat sebagai Presiden. Selain itu, kapabilitas Amien Rais juga dinilai lebih baik dari calon-calon lainnya.

Namun Amien Rais menolaknya dengan alasan bahwa dirinya baru saja terpilih sebagai Ketua MPR RI, tentu tak elok menerima jabatan Presiden. Pasti akan dituduh ambisius. Amien Rais justru lebih memilih Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menjadi presiden. Akhirnya Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang kemudian terpilih menjadi Wakil Presiden. Kalau Amien Rais itu ambisius, hampir pasti akan menerima tawaran untuk menjadi Presiden.

Ketidakbersediaan Amien Rais menjadi Presiden dan sebaliknya justru mendukung Gus Dur sebagai Presiden setidaknya bisa dimaknai dalam dua hal, yaitu sebagai euphoria politik Islam saat itu, di mana tiga institusi penting negara dijabat oleh perwakilan umat Islam. Selain Ketua MPR dan Presiden, juga Ketua DPR RI yang dijabat oleh Akbar Tanjung. Kedua, dimaknai sebagai upaya memperkuat ukhuwah Muhammadiyah dan NU. Muktamar Lirboyo 1999, menggambarkan suasana ukhuwah Muhammadiyah dan NU. Beberapa kilometer sebelum memasuki tempat Muktamar, dipenuhi spanduk-spanduk ucapan selamat, di antaranya banyak berasal dari PAN dan Muhammadiyah.

Kuasa Allah berbicara lain. Gus Dur lengser dari kursi Presiden. Disayangkan, hingga saat ini, terlebih di level akar rumput NU, Amien Rais menjadi tertuduh utama atas lengsernya Gus Dur dari kursi presiden, tuduhan yang *absurd*.

Setelah musim perhelatan musyawarah partai-yang berlangsung pasca Pemilu 1999, PAN juga mengadakan Kongres I, 2000. Amien Rais terpilih menjadi Ketua Umum PAN. Pada Kongres II PAN, 2005 di Semarang, Amien Rais juga masih mendapat dukungan dari peserta Kongres dan tokoh-tokoh PAN untuk memimpin kembali PAN periode kedua, tapi Amien Rais menolaknya. Penolakan ini bukan basa basi sebagaimana sering dilakukan oleh elit partai lainnya. Amien Rais menolaknya dengan serius. Alasannya waktu itu, Amien Rais khawatir kalau dirinya tetap menjadi Ketua Umum dikhawatirkan akan mematikan dinamika partai. Amien Rais yakin meski dirinya tak lagi menjadi Ketua Umum, PAN akan tetap berkembang. Terbukti ketika pada Pemilu 1999 mendapatkan hanya 34 krsi, pada Pemilu 2004 naik menjadi 53 kursi. Sementara pada Pemilu 2009 mengalami penurunan

dengan hanya memperoleh 46 kursi, dan pada Pemilu 2014 naik menjadi 48 kursi.

Fakta politik ini menegaskan bahwa Amien Rais bukan seorang ambisius yang merusaha melanggengkan kuasa di partainya dengan tetap menjadi ketua umum. Bandingkan dengan tokoh politik seusianya. Ada Megawati yang sejak 1994 sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum PDIP dan belum ada tanda-tanda akan mengakhirinya. Ada juga SBY yang sejak masih menjadi Presiden "rela" menjadi Ketua Umum Partai Demokrat setelah berhasil menyingkirkan Anas Urbaningrum dengan memakai "tangan" KPK. Ada juga Muhaimin Iskandar yang sudah beberapa periode menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Saya tidak tahu, apakah kegaduhan dalam penentuan calon wakil presiden kubu Joko Widodo karena ada kekhawatiran kalau Mahfud MD yang terpilih akan mengganggu kuasa Muhaimin Iskandar di PKB? Wallahu a'lam.

Menjabat hanya satu periode ini terus dipertahankan oleh ketua umum-ketua umum penerusnya: Sutrisno Bachir (2005-2010) yang menjadi ketua umum mengantikan Amien Rais hanya menjabat satu periode. Hatta Rajasa (2010-2015) yang mencoba bertahan dengan mencalonkan kembali dihadang secara serius oleh Amien Rais dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Zulkifli Hasan (2015-2020), meski dengan perolehan suara yang sangat tipis pada Kongres Bali 2015. Zulkifli Hasan memperoleh 292 suara dan Hatta Rajasa memperoleh 286 suara. Sementara 4 suara memilih abstain. Baru pada Kongres PAN 2020 di Kendari, tradisi "satu periode" dipatahkan oleh Zulkifli Hasan yang terpilih untuk kedua kalianya.

Terakhir, tuduhan ambisius dialamatkan ke Amien Rais ketika dirinya melontarkan pernyataan soal kesiapannya menjadi capres pada Pilpres 2019 sesaat setelah menerima

beberapa jenderal yang risau melihat kondisi bangsa ini. Amien Rais yang telah berusia sekitar 70-an tahun berdalih bahwa Mahathir Mohammad yang berusia lebih dari 90 tahun pun bisa menjadi Perdana Menteri.

Saya yakin ucapan Amien Rais itu jauh dari serius atau hanya sekadar guyon. Amien Rais itu seorang Doktor dan Guru Besar Ilmu Politik, tentu paham betul bahwa membanding sistem politik Indonesia dengan Malaysia itu tidak *apple to apple*. Indonesia memakai sistem presidensil, sementara Malaysia parlementer. Model pemilihan kepala pemerintahnya tentu berbeda. Indonesia memilih presiden langsung, sementara Malaysia memilih anggota parlemen. Partai dengan perolehan kursi terbanyak atau berhasil membangun koalisi mayoritas di parlemen dengan sendirinya berhak atas jabatan perdana menteri. Dengan sistem ini, orang seperti Mahathir Mohammad pun bisa terpilih menjadi Perdana Menteri.

Dengan sistem yang berbeda ini, dan ditambah aspek *shuubiyah* di Indonesia yang masih sangat kuat, tentu Amien Rais sadar betul bahwa dirinya hampir mustahil bisa terpilih menjadi presiden. Makanya setelah kegagalan pada Pilpres 2004, Amien Rais tak lagi tertarik atau berambisi untuk mencalonkan kembali sebagai cawapres pada Pemilu 2009. Maka heran saja ketika Amien Rais melontarkan pernyataan soal pencalonannya menjadi cawapres pada Pilpres 2019 lalu mendapat respon serius dari beberapa pihak. •

Upaya Serius Persekusi PAN

Beredar luas Surat Terbuka dari lima pendiri PAN Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, yang ditujukan khusus kepada Amien Rais. Naifnya, mereka, terutama Abdillah Toha dan Goenawan Mohamad yang sejatinya adalah pendukung Jokowi, dan sudah lama tak lagi bersentuhan dengan PAN, namun dalam suratnya berani memakai identitas pendiri PAN.

Kalau jeli melihat sepak terjang dan daya pecah belah yang dilakukan rezim saat ini, Surat Terbuka lima pendiri PAN ini jangan dilihat hanya sebagai serpihan, tapi harus dilihat secara utuh dan sebagai bagian dari rekayasa serius dan terorganisir untuk mempersekusi Amien Rais dan PAN, tentu dengan target utama memecah belah PAN dan kemudian menenggelamkan PAN pada Pemilu 2019. Untuk diketahui, hanya PAN lah partai produk Reformasi yang belum bisa dipecah belah.

Pertama, sebelum Surat Terbuka beredar luas di media,

Denny JA melalui Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah memproduk *meme-meme* anti Amien Rais dan PAN, dan tentunya survei-survei yang secara metodologis dan hasilnya patut dipertanyakan. Untuk diketahui, info yang saya terima, LSI sudah dikontrak Jokowi dengan nilai yang sangat fantastis untuk kepentingan pemenangan Pilpres 2019.

Hampir setiap hari *meme* Denny diluncurkan di banyak WAG. Saya tahu kalau Denny suka memproduk *meme* karena kebetulan di beberapa WAG satu grup dengan Denny. Bahkan karena terlalu seringnya membuat *meme* yang tendensius, Denny dikeluarkan dari "WAG Peduli Negara", WAG yang berisikan orang-orang kritis dan penting di negeri ini. Dikeluarkannya Denny, saya kira bukan semata karena *meme-meme* tendensiusnya yang menyerang Amien Rais dan PAN, tapi lebih karena watak egoisnya yang hanya mau *share* tulisan, puisi atau *meme* yang dibuatnya, tapi tak pernah mau memberikan komentar apapun. Sehingga banyak usulan dari anggota grup agar Denny dikeluarkan.

LSI secara terencana juga terlihat begitu serius membangun opini publik dengan target melemahkan posisi PAN. Survei yang dilakukan tanggal 7-14 Januari 2018 misalnya, PAN hanya "ditempatkan" pada ranking 10, dengan 2,0% suara. Pada survei berikutnya, yang dilaksanakan 12-19 Agustus 2018, persentase suara PAN malah lebih turun lagi menjadi hanya 1,4% suara.

Bila dua survei di atas yang menjadi bidikan adalah PAN, maka survei berikutnya, tanggal 10-19 Oktober 2018, secara khusus mencoba membidik Amien Rais. Hasil survei ini menyebutkan bahwa secara popularitas Amien Rais adalah tokoh agama paling dikenal. Responden yang mengaku kenal Amien Rais sebesar 83,1%, namun hanya 57,2% yang

menyatakan suka Amien Rais. Sementara yang menyatakan akan mendengarkan imbauan Amien hanya sekitar 9,4%. Perhatikan hasil survei ini. Secara nalar sehat tentu sulit dipahami. Bagaimana mungkin seseorang yang disukai hingga di angka 57,2% tapi tak banyak didengarkan himbauannya (9,4%). Ini hasil survey yang sulit dinalar dengan akal sehat.

Hasil survei ini juga menyebutkan, dilihat dari segmen pemilih NU, pengaruh Amien Rais sangat kecil. Warga NU yang mengaku mendengarkan imbauan Amien Rais hanya 6,3%. Sementara yang menyatakan tidak mendengarkan imbauan Amien sebesar 81,8%. Survei ini terlihat kasat mata mencoba membenturkan Muhammadiyah dengan NU. Survei terkait pengaruh Amien Rais di kalangan warga NU tak perlu disurvei pun pasti hasilnya sangat kecil. Tapi beruntung dan bahkan hebat, Amien Rais masih punya pengaruh 6,3% di kalangan NU. Angka "sebesar" 6,3% ini bisa jadi surveinya yang ngawur. Angka 6,3% itu tinggi. Kalau misalnya warga NU berjumlah 100 juta saja, berarti Amien Rais punya pengaruh di 6,3 juta warga NU. Tapi kalau pun surveinya benar, pengaruh Amien Rais sebanyak 6,3 juta warga NU sangat mungkin di kalangan NU kultural yang terpelajar. Di luar varian kultural-terpelajar saya kira sangat anti Amien Rais.

Memang dalam setiap survei jelang Pemilu, PAN selalu ditempatkan secara tidak terhormat oleh survei-survei yang dilakukan LSI Denny. Namun terbukti dalam setiap Pemilu, PAN selalu berhasil melampaui angka di atas 6%. Pemilu 1999 PAN mendapat 7.528.956 (7,12) suara dengan 34 kursi, Pemilu 2004 dapat 7.303.324 (6,41%) dengan 52 kursi. Pemilu 2009 dapat 6.254.580 (6,01) dengan 43 kursi. Bahkan pada Pemilu 2014 ketika media sosial mulai ramai menghiasai jagad politik Indonesia, PAN berhasil meraup suara 9.481.621 (7,59%) dengan

49 kursi.

Kedua, pernyataan Boni Hargens—siapapun tahu adalah pendukung Jokowi—yang sering usil terhadap Amien Rais dan PAN. Boni yang mantan Komisaris Antara misalnya pernah usil terkait kasus Taufik Kurniawan. Boni menyatakan bahwa Amien Rais sengaja mengorbankan Taufik agar anaknya Hanafi Rais bisa menggantikan Taufik sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ini namanya pernyataan usil dan tidak bisa dianggap berdiri sendiri, tapi harus dilihat sebagai bagian dari upaya mempersekusi PAN dan Amien Rais. Rasanya Boni tidak mungkin berani usil terhadap PAN kalau dia hanya "bekerja" untuk dirinya.

Untuk diketahui, PAN telah memutuskan untuk mengambil sikap *status quo* atas jabatan Wakil Ketua DPR RI yang ditinggalkan oleh Taufik. PAN tidak akan mengisi jabatan tersebut hingga periode DPR RI hasil Pemilu 2014 berakhir.

Ketiga, dalam kasus Ratna Sarumpaet, hanya Amien Rais yang dimintai keterangan oleh kepolisian. Sementara ada banyak tokoh lainnya yang memberikan *statement* yang serupa dengan Amien Rais, seperti Rizal Ramli, terkait penganiayaan Ratna yang ternyata bohong, tak ada satu pun yang dipanggil kepolisian. Aneh bukan?

Rangkaian kejadian ini jangan dilihat kasus per kasus, tapi harus dilihat secara menyeluruh sebagai satu rangkaian dari upaya serius untuk mempesekusi Amien Rais dan PAN.

Kenapa Amien Rais dan PAN?

Kalau ditilik dari peta dukungan pada Pilpres 2019, PAN termasuk pendukung utama pasangan Prabowo-Sandi. Partai pendukung lainnya adalah Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Dari keempat partai ini, rasanya hanya Amien Rais

(PAN) yang getol mengkritisi polah rezim yang berkuasa saat ini. Rasanya saat ini generasi yang seusia Amien Rais hanya tinggal Amien Rais sendiri yang masih bisa bersikap kritis terhadap penguasa. Sementara yang lainnya lebih suka memilih diam membisu sambil beberapa di antaranya menikmati cipratan jabatan dengan menjadi komisaris, direktur BUMN atau jabatan "penutup mulut" lainnya.

Sulit untuk menyebut kritik-kritik Amien Rais beraroma kepentingan atau ambisi politik pribadi. Kalau kritik-kritiknya karena ambisi pribadi, pasti Amien Rais akan lebih memilih mendukung Jokowi atau setidaknya diam. Diamnya Amien Rais saja sudah merupakan dukungan, apalagi dibarengi dengan ketegasan sikap politik mendukung Jokowi.

Mendukung rezim dengan seambrek kebobrokan rasanya bukan tipikal khas dari Amien Rais. Sejak lengsernya kekuasaan Orde Baru, rasanya hanya Amien Rais yang paling tidak bisa diam untuk mengkritisi penguasa. Dalam konteks demokrasi yang sehat, yang mendambakan adanya *check and balances*, sikap Amien Rais mutlak dihadirkan. Sementara dalam demokrasi yang sakit seperti yang terjadi saat ini, tentu sebaliknya, akan alergi terhadap semua bentuk kritik.

Jamaknya, demokrasi memang kata yang paling tidak disukai oleh mereka yang tengah dimabok kekuasaan. Maka setiap yang mencoba mengganggu kekuasaannya sebisa mungkin akan dihabisi atau dibungkam. Di sinilah kekuasaan, meminjam istilah Thomas Hobbes, telah berubah menjadi *Leviathan* dalam pengertian yang buruk.

Nah, saat ini hanya tinggal Amien Rais (PAN) yang dinilai paling kritis terhadap rezim yang berkuasa saat ini. Maka wajar bila upaya apapun mencoba dilakukan untuk melumpuhkan kekuatan Amien Rais dan PAN. Upaya adu domba sudah

terlalu sering dilakukan, utamanya antara Amien Rais dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan, namun selalu gagal. Persekusi terhadap Amien Rais juga terlalu sering, dari mulai rumahnya dirusak orang tak dikenal sampai upaya pembunuhan dengan modus kecelakaan. Sekian. •

Lembah Cirendeu Ciputat, 26/12/2018.

Bertemu Amien Rais, Teringat Anas Urbaningrum

Kamis malam, 4 Juli 2019, saya dan beberapa kawan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) bersilaturrahim ke kediaman Pak Amien Rais untuk berlebaran, karena memang baru sempat waktunya. Sebelum saya dan kawan-kawan diterima, sempat salat Isya berjamaah di masjid yang berada persis di depan kediaman Pak Amien.

Selepas salat, ada tiga kelompok tamu yang mengantri bertemu Pak Amien. Di antaranya, saya mengenal salah satunya adalah Mudrick Sangidu, tokoh *gaek* Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Solo yang dulu dikenal oposan terhadap Soeharto, penggagas Mega Bintang, dan juga pernah bersama-sama bahu membahu saat berlangsung Muktamar PPP 1994 di Asrama Haji Pondok Gede untuk mendukung Sri Bintang Pamungkas menjadi Ketua Umum PPP. Saat itu saya masih mahasiswa semester tujuh di FISIP UMM. Masih ingat saat itu, jangankan berhasil menjadi calon, masuk arena Muktamar pun Sri Bintang dihalangi begitu rupa. Betapa otoriternya rezim Soeharto.

Ketika sedang menerima saya dan kawan-kawan, Mas Ismail (ajudan Pak Amien) bilang ke Pak Amien kalau di luar sudah ada tamu yang mengantri untuk bertemu. Di antaranya disebut nama Lieus Sungkharisma, yang sempat jadi tersangka karena sangkaan makar dan beberapa hari mencicipi jeruji tahanan. Karena ada yang mengantri, Pak Amien bilang: "sudah dulu ya, nanti kita cari waktu lain yang lebih longgar untuk ngobrol". Saat Pak Amien bilang begitu, saya dan kawan-kawan AMM kira-kira sudah ngobrol sekitar 40 menitan. Akhirnya kami pamit meninggalkan kediaman Ketua PP Muhammadiyah 1995-1998.

Ketika perjalanan pulang dari kediaman Pak Amien, di mobil saya sempat terdiam sambil mata sedikit berkaca-kaca membayangkan posisi Pak Amien saat ini dengan posisi Mas Anas Urbaningrum ketika jelang "ditersangkakan" dengan sangkaan yang ngawur dan sangat dominan aspek politiknya daripada aspek hukumnya hingga akhirnya di tingkat Kasasi divonis 14 tahun penjara dan mendekam di LP. Sukamiskin.

Sejak awal mencuat kasusnya, saya yakin Mas Anas memang dikorbankan atau dalam bahasa buku yang saya tulis: "Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas". Dan seiring ditahannya Mas Anas, keyakinan saya ini semakin kuat. Dari mulai wartawan sampai orang yang kerap dilibatkan dalam gelar perkara di KPK cerita soal kaganjilan kasus Mas Anas. Terakhir, kira-kira setengah bulan yang lalu, dalam suatu pertemuan, saya dibisiki anggota komisioner salah satu lembaga yudikatif yang cerita soal pertemuan dirinya dengan salah seorang hakim MA (maaf, kebetulan non-Muslim) yang menangani kasus Kasasi Mas Anas. Hakim ini menyampaikan ke Artidjo Alkostar soal kasus Mas Anas. Kira-kira intinya: "Pak Artidjo, ini kasus Pak Anas bagaimana? Kan ini kasusnya sumir, tidak jelas. Pak Anas

HMI dan bapak juga HMI." Konon langsung Artidjo bilang: "justru karena HMI akan saya hukum seberat-beratnya". Aneh kan? Kasus hukum yang sumir, tidak jelas itu tidak dikaji dengan seksama, tapi justru faktor HMI-nya yang dikedepankan.

Kalau benar terbukti bersalah secara hukum tanpa ada intervensi politik, saya mendukung pemberian hukuman yang berat kepada Mas Anas karena HMI-nya. Tapi ini kasus yang sangat tidak jelas, sumir. Saya menduga bahwa Artidjo tidak membaca kasus Mas Anas dengan utuh dan baik, sehingga putusan kasasinya pun jauh dari bijaksana. Pokonya yang penting bisa melipatgandakan hukuman, biar dinilai publik sebagai hakim yang adil, meski sejatinya tidak adil.

Ketika masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Bandung 2010 dan secara politik sangat kuat, para penjilat, penyetor muka, orang-orang hipokrit berusaha untuk selalu dekat, menempel, dan kalau perlu menemani ke manapun Mas Anas pergi. Namun ketika Mas Anas ditetapkan sebagai tersangka, mereka ini mulai mundur teratur menjaga jarak, sampai akhirnya benar-benar menjauh dari Mas Anas. Ketika masih ditahan di tahanan KPK di Kuningan Jakarta mereka tidak punya keberanian secuil pun untuk menjenguk, apalagi selepas Mas Anas di tahan di Sukamiskin. Takut oleh pantauan Cikeas yang saat itu secara politik masih sangat kuat.

Saya geli sekaligus sedih melihat mentalitas teman-teman di Partai Demokrat saat itu. Betapa seseorang yang sudah memandang kekuasaan politik sebagai segalanya bisa melupakan pertemanan, bisa jatuh hina menjadi budak kekuasaan. Jabatan politik seakan jauh lebih bernilai dan segala-galanya daripada arti sebuah persahabatan.

Tak berbeda dengan Mas Anas, ketika kekuasaan politik Pak Amien masih sangat kuat dalam konteks politik nasional

dan PAN, mereka yang bermental penjilat, hipokrit dan sudah tentu nir-integritas juga berusaha untuk selalu mendekat ke Pak Amien. Tentu harapannya akan memperoleh jabatan *(position)* politik dan pendapatan *(ujrah)* politik atas kedekatannya dengan Pak Amien.

Konteks Pak Amien malah bukan saja orang-orang bermental seperti yang saya sebut di atas, tapi juga orang-orang yang sejatinya secara ideologis berbeda dengan Pak Amien. Bila kelompok pertama kedekatannya lebih berorientasi pragmatis terkait dengan jabatan atau kekuasaan, maka kelompok kedua lebih berorientasi ideologis. Ada agenda ideologi yang mencoba diperjuangkan. Mereka mencoba mempengaruhi (secara ideologis) setiap kebijakan politik PAN. Dalam perkembangannya, orang-orang seperti Gunawan Mohamad, Abdullah Thoha, dan Albert Hasibuan, yang secara ideologis berbeda dengan Pak Amien tak mampu berbuat banyak dalam mempengaruhi PAN. Mereka pecah kongsi dengan Pak Amien.

Ketika kekuatan politik Pak Amien mulai berkurang dan secara fisik juga mulai menurun bila dibanding dengan 10-15 tahun yang lalu, maka mulailah orang-orang yang sebelumnya suka menjilat, menghamba, dan selalu berusaha untuk dekat dengan Pak Amien mulai mundur teratur dan pada akhirnya benar-benar menjauh dari Pak Amien. Sebagian bahkan secara *soft* melakukan perlawanan terhadap Pak Amien.

Selama proses (pra dan pasca) Pilpres 2019, entah berapa kali saya bertandang ke kediaman Pak Amien dan beberapa kali juga mendampinginya dalam beberapa acara politik, namun saya nyaris tak mendapati banyak orang-orang PAN yang datang ke kediaman Pak Amien atau mendampinginya. Hanya beberapa nama orang PAN yang kerap saya temui, seperti Mas Drajat Wibowo, Mas Fikri Yasin, Bang Chandra Tirta Wijaya, Nurdiati

Akma, dan beberapa calon legislatif PAN seperti Eggie Sujana, Dedi S. Gumilar (Miing). Justru orang-orang seperti Marwan Batubara, Mahfudin Nigara, Lieus Sungkharisma dan banyak nama lainnya yang selalu berkunjung dan mendampingi Pak Amien. Padahal mereka bukan orang PAN dan orang yang secara politik rasanya tak pernah mendapatkan keuntungan politik secara langsung dari Pak Amien.

Seiring berakhirnya Pilpres 2019, yang berhasil "dimenangkan" oleh pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin, secara politik tentu tidak menguntungkan Pak Amien. Elite-elite PAN yang sebelumnya sudah mulai menjauh dari Pak Amien, maka seiring putusan MK dan penetapan KPU, mereka tentu akan semakin menjauh. Mereka inilah yang masih berharap PAN akan berkoalisi dengan Jokowi-Ma'ruf.

Layaknya politisi yang bermental pragmatis dan nir-integritas, dengan menjalin koalisi, maka mereka akan memperoleh keuntungan politik. Harapan untuk menjadi menteri, duta besar, direktur dan komisaris BUMN, dan jabatan lainnya yang mampu mendatangkan pundi-pundi uang dan kekuasaan menjadi terbuka bila dibandingkan PAN memilih tak berkoalisi dengan Jokowi-Ma'ruf.

Fenomena politisi yang suka menjilat, menghamba pada kekuasaan, nir-integritas inilah yang saat ini tumbuh subur hinggap di semua partai politik. Berpolitiknya cenderung menghalalkan segala cara, semua serba boleh, tak ada kesantunan atau fatsun dalam berpolitik. Politik dipahami sebatas sebagai perebutan kekuasaan, siapa dapat apa. *The winner take all* diterapkan begitu rupa, pihak yang menang menguasai sepenuhnya, dan yang kalah disingkirkan sepenuhnya pula. Dalam terminologi politik, inilah wujud nyata politik yang *unvalued*, politik tanpa nilai.

Kebanyakan politisi sepertinya masih enggan untuk menerapkan politik dalam pengertian klasik, di mana politik dimengerti sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama *(maslahati al-ammah, public good)*. Politik dihadirkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menyengsarakan. Sistem politik, produk undang-undang dan kebijakan politik lainnya dibuat dengan tujuan mulia, yaitu tegaknya keadilan di masyarakat, yang *ending*-nya adalah terciptanya negara sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an sebagai *baldatun thayyiabtun wa rabbun ghafur*.

Mau sampai kapan praktik politik yang bobrok dan berbiaya mahal, korup, *unvalued*, dan penuh kemunafikan (nir-integritas) ini akan terus berlangsung? Rasanya hanya Allah yang mampu menjawabnya dengan segala keserbamahaannya. *Wallahu a'lamu bi al-shawabi*. •

Lembah Cirendeu, 8/7/2019

PAN Pasca Plipres 2019, Faktor Amien Rais dan Keniscayaan Oposisi

Proses Pilpres 2019 telah usai, yang ditandai dengan "dimenangkannya" pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah usai tahapan panjang pilpres ini, tahapan selanjutnya, kita akan menyaksikan tontonan yang (sama sekali tidak) menarik terkait tarik ulur politik partai-partai politik dalam membangun konfigurasi koalisi politik untuk lima tahun mendatang. Berbeda dengan hasil Pilpres 2014, yang terpolarisasi dalam tiga faksi: Faksi penguasa, faksi oposisi, dan "faksi abu-abu" yang dipertontonkan oleh Partai Demokrat (PD), maka konfigurasi pasca Pilpres 2019 dimungkinkan hanya akan terpolarisasi ke dalam dua faksi, yaitu faksi pemerintah dan faksi oposisi, meski tidak menutup kemungkinan akan munculnya kembali "faksi abu-abu" yang diwakili PD.

Faksi pemerintah hampir pasti akan diisi oleh partai-

partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun pada Pilpres 2019 mendukung pasangan Prabowo-Sandi, posisi PD masih sangat mungkin akan berputar haluan mendukung faksi pemerintah, tentu dengan catatan: Jokowi, Megawati, dan partai-partai pendukungnya bersedia menerimanya. Kalau mengkuti dinamika politik beberapa waktu menjelang dan pasca-Pilpres 2019, terlebih akrobat politik yang dipertontonkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, tampaknya bukan sesuatu yang mustahil PD akan bisa diterima oleh koalisi partai pendukung pemerintah. Tapi kalau pun tidak diterima, tampaknya PD akan tetap mengambil posisi *status quo*, sebagaimana hasil Pilpres 2014: tampil abu-abu, *safety player*.

Sementara faksi oposisi sangat mungkin akan diisi oleh tiga partai pendukung Prabowo-Sandi yang lolos di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun partai yang disebut terakhir tampaknya masih sangat dinamis, antara masuk faksi pemerintah atau mengambil posisi oposisi.

Kalau mendasarkan pada sikap Amien Rais selama proses Pilpres 2019, PAN mempunyai kecenderungan kuat untuk mengambil posisi oposisi. Sementara kalau mengikuti pernyataan beberapa elite PAN, posisi PAN masih sangat dinamis. Namun, untuk diketahui, bahwa kekuatan Amien Rais, terutama di tingkat daerah (DPD PAN) masih cukup kuat. Posisi Amien Rais inilah yang akan sangat menentukan *positioning* PAN dalam konfigurasi politik pasca Pilpres 2019.

Oposisi sebagai keniscayaan

Mendasarkan pada hasil Pemilu 2019 dan juga keberlangsungan PAN di masa mendatang, terutama Pemilu 2024, maka pilihan yang mesti diambil PAN adalah mengambil

sikap tegas sebagai oposisi terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Oposisi adalah keniscayaan yang mesti dilakukan PAN.

Bersyukur, hasil Pemilu 2019 perolehan suara PAN masih di atas 6%. Padahal PAN menjadi target serius untuk "dihabisi" agar tidak mencapai *parliamentary threshold* 4%, sehingga tak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Sebagai bukti, kursi PAN untuk DPR RI di Jawa Tengah yang sebelumnya berjumlah 8 kursi, hasil Pemilu 2019 PAN tak memperoleh satu pun kursi. Rasanya tidak percaya kursi PAN di Jateng hilang sepenuhnya kalau pemilu berlangsung normal.

Beruntung, dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama episode drama politik yang menguras emosi-ideologis antara tahun 2016-2019, Amien Rais dan Zulkifli Hasan mengambil posisi yang sangat jelas dan tegas, berpihak pada gerakan politik umat. *Positioning* Amien Rais dan Zulkifli Hasan ini telah membantu PAN untuk tetap bertahan di Senayan.

Suara PAN sangat terdongkrak oleh pemilih-pemilih Muslim yang rasional, yang menyadari pentingnya kebangkitan politik umat Islam, yang kebanyakan terdiri dari mereka yang mengikuti atau bersimpati terhadap aksi-aksi damai umat Islam, baik Aksi Damai 411, Aksi Damai 212, Aksi Damai Alumni 212 Jilid I dan II. Andaikan tidak ada aksi-aksi umat ini, sementara ada upaya serius untuk "menghabisi" PAN, maka PAN akan sangat riskan bisa memperoleh suara 4%.

Ada beberapa alasan kenapa PAN harus mengambil posisi oposisi. Pertama, posisi PAN sebagai partai produk reformasi. Meskipun banyak partai yang lahir di era reformasi, namun posisi PAN berbeda dengan partai lainnya. Posisi Amien Rais sebagai "Bapak Reformasi" sekaligus motor pendirian PAN mau tak mau melekatkan citra PAN sebagai Partai Reformasi. Sebagai Partai Reformasi, rasanya sangat tak pantas kalau PAN

harus berkoalisi dengan partai-partai yang berseberangan pada saat Pilpres 2019 dan dalam sebuah pemerintahan yang dihasilkan dari Pilpres yang curang, jauh dari prinsip jujur dan adil. Belum lagi terkait dengan koalisi yang selalu identik dengan bagi-bagi kekuasaan, rasanya tidak etis, partai yang tidak berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf seperti PAN lalu berkoalisi dan menuntut dapat "kue" kekuasaan.

Kedua, pemilih PAN masih tetap mayoritas berasal dari warga Muhammadiyah. Di internal warga Muhammadiyah memang pilihan politiknya dinamis. Ada warga yang tidak mendukung PAN, tapi jumlahnya sangat sedikit. Mayoritas warga Muhammadiyah tetap mendukung PAN. Alasannya, selain pertimbangan historis terkait pendirian PAN, juga karena sosok Amien Rais. Karena dua alasan ini, tak heran kalau kebanyakan warga Muhammadiyah mempunyai prinsip *tego lorone ora tego patine* (tega sakitnya, tidak tega matinya). Pemilih PAN lainnya berasal dari kalangan Nahdliyin terpelajar yang berpikiran dinamis dan progresif, yang merasa tidak terikat secara struktural dengan hal yang berbau NU. Juga pemilih Muslim rasional lainnya di luar Muhammadiyah dan NU, termasuk di dalamnya kalangan Muslim Abangan dan nasionalis yang menilai PAN sebagai partai yang kritis, sehingga layak menjadi partai pilihannya.

Diyakini kebanyakan pemilih dan pendukung PAN menghendaki agar PAN mengambil posisi oposisi. Mereka tak menghendaki dan tak rela bila PAN harus berkoalisi dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kalau PAN masih mau didukung oleh mereka semua, maka tak ada pilihan lain kecuali PAN harus mengambil posisi politik secara tegas sebagai oposisi. Percayalah, kalau PAN masih mencoba berakrobat

politik dengan berkeinginan dan apalagi sampai bergabung di dalam kumpulan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, maka bukan saja kalangan Nahdliyin, Muslim Abangan, nasionalis yang akan kabur meninggalkan PAN, tapi warga Muhammadiyah sebagai pemilih dan pendukung utama PAN pun akan meninggalkannya. Dan kalau ini yang terjadi, rasanya PAN hanya akan tinggal kenangan.

Ketiga, dengan mengambil posisi oposisi, PAN akan mejadi penyeimbang dalam konteks relasi eksekutif dengan legislatif. Istilah penyeimbang dalam konteks hasil Pemilu 2019 sebenarnya tidak tepat, karena bandul kekuasaan jauh lebih berat ke kubu eksekutif *(executive heavy)*. Selama lima tahun ke depan, PAN harus secara konsisten tampil kritis sebagai partai oposisi. Tampilan kritis ini bukan penuh kepura-puraan, apalagi sekadar pencitraan, tapi harus dilakukan secara serius dan penuh kesadaran untuk menegakkan nilai-nilai fundamental dari demokrasi, bahwa kekuasaan eksekutif tanpa kontrol yang kuat hanya akan melahirkan kekuasaan yang otoriter dan bahkan totaliter. PAN mempunyai tugas mulia untuk menjadi penyeimbang dan kontrol atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sikap genit PAN yang mendekat ke kubu Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla jelang dua tahun kekuasaannya, yang kemudian berbuah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tak boleh terulang lagi di lima tahun mendatang. PAN harus *istiqamah* berada di barisan oposisi.

Percayalah, dengan bobroknya sistem politik kita di satu sisi dan semakin meningkatnya jumlah kalangan terpelajar dan masyarakat yang kritis serta melek politik di sisi lain, maka partai yang tampil serius menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dengan baik, perwakilan partainya di DPR mampu menjalankan tiga fungsi legislatif dengan baik, memahami

politik tidak identik dengan kepentingan politik yang berorientasi kekuasaan yang cenderung pragmatis dan nir-integritas, akan menjadi pertimbangan untuk dipilih dalam setiap perhelatan politik lima tahunan. PAN harus berada pada posisi ini. Dan posisi ini hanya bisa dijalankan bila PAN mengambil sikap tegas beroposisi dengan pemerintah yang berkuasa saat ini. Sekian. •

Penguasa dan Masa Depan Oposisi dalam Kongres PAN

Tanggal 10-12 Februari 2020 Partai Amanat Nasional (PAN) akan melangsungkan perhelatan politik lima tahunan berupa Kongres V PAN, yang akan berlangsung di Kendari Sulawesi Tenggara. Agenda utama kongres adalah memilih Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris *Steering Committee* Kongres V PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa ada tiga calon Ketua Umum PAN periode 2020-2025 yang sudah mendaftarkan diri, yaitu Mulfachri Harahap, Asman Abnur, dan Drajat Wibowo. Sedangkan petahana Zulkifli Hasan baru akan mendaftar di Kendari pada hari Senin (10/2/2020).

Kalau pada kongres ini Zulkifli Hasan dapat terpilih kembali, maka Ketua MPR RI 2014-2019 ini akan memecahkan rekor sebagai Ketua Umum PAN yang menjabat dua kali

berturut-turut. Sebelumnya tak pernah ada satu pun ketua umum yang berhasil menjabat dua kali berturut-turut. M. Amien Rais hanya menjabat sekali (2000-2005). Tahun 1998 saat Amien Rais didapuk menjadi Ketua Umum sampai dengan pelaksanaan Kongres I PAN tahun 2000, tentu tidak dihitung sebagai periodesasi, karena Ketua Umum Amien Rais tidak dipilih melalui Kongres, tapi melalui kesepakatan di internal PAN saat itu. Kemudian Sutrisno Bachir menjabat periode 2005-2010. Hatta Radjasa periode 2010-2015 dan sempat maju kembali pada Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, namun kalah tipis dengan Zulkifli Hasan yang sebelumnya tidak diunggulkan. Dukungan Amien Rais kepada Zulkifli Hasan menjadi faktor kemenangannya. Zulkifli Hasan pun terpilih menjadi ketua umum periode 2015-2020.

Menjaga Kesejukan

Hawa panas menjelang berlangsungnya Kongres V PAN menyelimuti kondisi perpolitikan di internal PAN, terlebih tarik menarik dukungan antara ke Zulkifli Hasan atau ke Mulfachri yang didukung Amien Rais. Dalam dunia partai politik, terlebih menjelang kongres, hawa panas politik adalah hal yang lazim terjadi. Dalam menyikapi hal ini, semestinya dijunjung tinggi oleh semua kandidat dan para pendukungnya, adalah bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan politik ini harus dibangun. Perbedaan dukungan politik harus dianggap sebagai keniscayaan tanpa harus mengorbankan atau menghancurkan partai.

Dalam konteks membangun kedewasaan politik ini, ada tiga hal yang harus diupayakan. Pertama, menjaga kesejukkan selama berlangsungnya kongres. Hawa panas yang biasanya terjadi dalam perhelatan politik harus dikelola dengan baik. Segala aturan dan kebijakan partai yang berkenaan dengan

kongres harus dipatuhi oleh semua kandidat dan segenap peserta kongres. Selain itu, kesadaran bahwa PAN itu partai yang mempunyai irisan historis dengan Muhammadiyah dan kerap juga disebut sebagai partai berbasis massa Islam, yang lahir dari hasil proses reformasi, juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kesejukan politik.

Kedua, jangan benturkan Amien Rais dengan Zulkifli Hasan. Bila pada Kongres IV PAN Amien Rais mendukung dan menjadi faktor determinan atas terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN, maka pada kongres kali ini Amien Rais memilih untuk mendukung Mulfachri. Perbedaaan dukungan dan pilihan antara Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini tidak perlu disikapi secara berlebihan dan apalagi kalau harus sampai membikin PAN terpecah belah dan hancur. Jangan sampai perbedaan dukungan ini dijadikan sebagai alasan untuk membenturkan Amien Rais dengan Zulkifli Hasan secara berlebihan.

Ketiga, PAN merupakan satu-satunya partai produk Reformasi yang masih utuh dan tak sampai terpecah belah akibat kalah di kongres, yang biasanya mengakibatkan lahirnya partai tandingan. Bandingkan dengan banyak partai lainnya yang terpecah belah hanya karena kecewa atau kalah dengan hasil kongres.

Lawan Intervensi Luar

Dalam setiap perhelatan akbar partai politik seperti kongres kerap tak lepas dari intervensi pihak luar (baca: penguasa). Dalam tradisi politik Orde Baru, intervensi politik dari penguasa dalam perhelatan politik dari partai politik, orsospol atau ormas adalah (seperti) hal yang lazim. Memasuki era Reformasi, intervensi politik ini juga masih kerap terjadi,

apalagi ketika kuasa penguasa tampil sangat mendominasi.

Pelaksanaan Kongres PAN kali ini juga tak lepas dari isu bakal adanya intervensi dari penguasa untuk menggolkan calon tertentu yang dinilai bisa sejalan dengan kepentingan penguasa. Konon ada mantan ketua umum PAN yang saat ini mendukung calon tertentu yang sudah diterima oleh Istana. Kalau benar isu adanya intervensi penguasa, maka tak ada pilihan lain, kecuali harus melawan intervensi tersebut.

Konteks politik saat ini, terlebih yang terkait dengan politik *check and balances* sangat tidak berimbang. Dari sembilan partai politik yang saat ini mendudukkan wakilnya di DPR RI, praktis sudah enam partai yang menjadi "partai penguasa", yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PPP. Satu partai, yaitu Partai Demokrat sejak tidak berkuasa selalu saja sikap politiknya tidak pernah jelas. Sikap Partai Demokrat tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang peragu dan cenderung *méncla-ménclé* dalam berpolitik Dalam konteks politik *check and balances*, sikap Partai Demokrat tentu tak mungkin bisa diharapkan banyak menjadi penyeimbang politik. Kita tinggal berharap pada dua partai lainnya, yaitu PKS dan PAN untuk bisa menjadi "partai penyeimbang" dari "partai penguasa", tentu saja "penyeimbang yang tidak seimbang". Bagaimana mungkin akan menjadi "partai penyeimbang" ketika kekuatan PKS dan PAN di DPR RI hanya berjumlah 94 kursi: 50 (PKS) dan 44 (PAN). Bandingkan dengan enam "partai penguasa" yang mempunyai 427 kursi, dengan perincian 128 (PDIP), 85 (Golkar), 78 (Gerindra), 59 (NasDem), 58 (PKB), dan 19 (PPP).

Namun, dengan menggunakan qaidah: *mâ lâ yudroku kulluhu lâ yutroku kulluhu*, apa yang tidak bisa didapatkan sepenuhnya, yang sedikit pun jangan dibuang begitu saja, maka

meskipun hanya dua partai, tetap saja politik *check and balances* harus dijalankan. Dalam konteks politik *check and balances* inilah, maka siapapun ketua umum yang terpilih dalam Kongres Kendari ini harus menyadari bahwa posisi politik PAN empat tahun mendatang harus mengambil posisi kritis-proporsional pada penguasa, bukan justru mencoba menjadi bagian dari "partai penguasa". Dan calon ketua umum yang dalam dirinya ada kesadaran untuk bersikap kritis-proporsional rasanya tak mungkin hadir dari calon yang terindikasi didukung oleh penguasa.

Kalau PAN ingin tetap eksis sebagai partai "penghuni Senayan" pada Pemilu 2024 mendatang, maka tak ada pilihan bahwa untuk empat tahun ke depan PAN harus menjadi "partai penyeimbang" atas "partai penguasa". Pilihan menjadi "partai penguasa" sama sekali bukan pilihan yang tepat dan popular untuk PAN. Selain sekarang "partai penguasa" sudah dihuni oleh enam partai, dipatikan secara politik tak akan memberikan ruang bagi PAN, di mata publik pun PAN akan dinilai sebagai partai yang tidak mempunyai *positioning* politik yang jelas dan tegas. Beda tipis dengan Partai Demokrat. Maka pilihan menjadi "partai penyeimbang", baik secara *das sollen* maupun kepentingan pragmatis pada Pemilu 2024 menjadi sebuah keniscayaan. Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi refleksi politik bagi semua kandidat ketua umum, para pendukung, dan peserta kongres PAN. •

Pertaruhan Relasi Muhammadiyah dengan PAN Pascakongres

Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari Sulawesi Tenggara telah berhasil memilih kembali Zulkifli Hasan (Bang Zul) sebagai Ketua Umum PAN Periode 2020-2025. Terpilihnya Bang Zul sudah diprediksi sejak beberapa waktu sebelum pelaksanaan kongres. Bang Zul berhasil mengalahkan Mulfachri Harahap (Bung Mulfachri). Bang Zul memperoleh 331 suara, sementara Bung Mulfachri mendapat 225 suara.

Bang Zul terpilih kembali pasca-Pemilu 2019 yang hasilnya mengecewakan bagi PAN. Perolehan kursi DPR RI mengalami menurunan empat kursi dari 48 kursi hasil Pemilu 2014 menjadi hanya 44 kursi. Kursi DPR RI asal Jawa Tegah yang pada Pemilu 2014 mendapat 8 kursi menjadi nol kursi. Terlepas ada isu rekayasa untuk "menghabisi" kursi PAN di Jawa Tengah, kosongnya kursi DPR RI dari Jawa Tengah merupakan tamparan tersendiri bagi PAN. Beruntung di beberapa provinsi

lainnya berhasil mendapat dan menambah kursinya. Sumatera Barat misalnya berhasil menambah dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Papua yang sebelumnya mendapat 1 kursi bertambah menjadi 2 kursi.

Menyikapi hasil yang tak menggembirakan pada Pemilu 2019, ditambah kisruh Kongres V yang memalukan, harus disadari bahwa kalau hal ini tidak disikapi secara serius, kondisi ini akan semakin meningkatkan kekecewaan dan rasa pesimistis bukan saja di lingkup kader, pemilih loyal yang berasal dari warga Muhammadiyah, tapi juga simpatisan PAN terkait dengan masa depan PAN, terlebih dalam menyongsong Pemilu 2024.

Sekadar urun rembug, ada tiga hal yang dapat dilakukan PAN. Kalau tiga hal ini dilakukan, optimis, bukan hanya akan mengurangi kekecewaan dan rasa pesimistis terhadap masa depan PAN, tapi—insya Allah—akan membawa kesuksesan bagi PAN pada Pemilu 2024.

Buang Prinsip *The Winners Take All*

Pertama, penyakit kebanyakan partai politik selepas mengadakan perhelatan akbar seperti kongres, biasanya yang terpikir di kubu pemenang adalah upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Prinsip *the winners take all*, bahwa yang menang mengambil semuanya, sering dilakukan dan menjadi pilihan utama pemenang kongres. Akibatnya, kerap timbul kekecewaan di kubu yang kalah kongres. Buntutnya, lahirlah partai tandingan atau eksodus politik ke partai lain.

Sebagai partai yang lahir di era Reformasi, PAN atau Bang Zul tak boleh melakukan prinsip *the winners take all*. Bang Zul perlu mengakomodir seluruh kader terbaik PAN. Pihak-pihak yang kalah di kongres tetap diakomodir masuk dalam kepengurusan periode 2020-2025. Apapun, pihak yang kalah

juga mempunyai konstituen dan telah ikut bersumbangsih membesarkan atau setidaknya membuat PAN tetap hidup di banyak daerah. Perolehan suara Bung Mulfachri sebanyak 225 dan suara Mas Drajat Wibowo sekalipun hanya 6 suara perlu menjadi pertimbangan Bang Zul dalam penyusunan Kabinet PAN Periode 2020-2025.

Lebih *elegant* lagi, bila dalam penyusunan pengurus, Bang Zul mendatangi pihak yang kalah di kongres. Ini akan menjadi tradisi yang baik dan harapan positif bagi masyarakat di tengah menguatnya ketakpercayaan kepada partai. Masyarakat hanya memposisikan partai secara pragmatis menjelang pemilu, selebihnya apatis, bahkan tak percaya.

Tawaran ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh PAN atau Bang Zul. Kecuali para petinggi PAN yang menang di kongres hanya memahami partai secara sempit dan pragmatis terkait kepentingan sesaat, atau menempatkan PAN hanya sebatas dalam pengertian *das sein* (senyatanya), yang penuh intrik, culas, dan tak bermoral, sambil membuang jauh-jauh PAN dalam pengertian *das sollen* (seharusnya), yang menempatkan nilai-nilai politik pada tempat yang seharusnya (proporsional, adil).

Akomodasi Muhammadiyah secara Proporsional

Kedua, secara historis, kelahiran PAN mempunyai keterkaitan yang erat dengan Muhammadiyah. Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Semarang, 1998, bukan hanya menjadi picu awal kelahiran PAN, tapi juga *asbab* lahirnya *ghirah* (semangat) yang luar biasa di lingkup warga Muhammadiyah dalam proses pendirian PAN. Tanpa sumbangsih warga Muhammadiyah saat itu, percayalah PAN tak akan pernah lahir, lolos Pemilu 1999, dan mendapat suara yang signifikan pada Pemilu 1999.

Namun sejak awal berdirinya hingga saat ini, representasi Muhammadiyah di tubuh PAN jauh dari representatif. Jauh dari proporsional. Justru kelompok di luar Muhammadiyah tampil dominan dalam kepengurusan PAN. Dalam pencalegan juga terlalu sering kader-kader Muhammadiyah dibikin kecewa karena ditempatkan secara tidak adil pula.

Dalam beberapa Musyawarah Wilayah (Muswil), intervensi DPP PAN juga terbukti berhasil menyingkirkan kader Muhammadiyah. Kasus Muswil PAN Jatim 2015 rasanya yang paling "norak". Kader Muhammadiyah (Kuswiyanto, alm.) yang berhasil memenangkan suara di Muswil justru dirampok kemenangannya. DPP PAN justru mengSKkan Masfuk sebagai Ketua DPW PAN Jatim. Keputusan ini tidak saja melukai kader Muhammadiyah yang berada di PAN, tapi juga telah membikin kecewa Muhammadiyah Jawa Timur, baik sebagai *jam'iyah* maupun *jamaah*. Kekecewaan ini masih terasa hingga saat ini.

Beberapa waktu lalu saat saya diundang menjadi pembicara dalam acara yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim, yang dihadiri oleh perwakilan PDM se-Jawa Timur, ada pernyataan-pernyataan dari beberapa PDM yang kecewa dan bernada ancaman. Mereka mengancam kalau hasil kongres mendatang (Kongres Kendari) dan Muswil berikutnya mengecewakan Muhammadiyah lagi, mereka akan menggembosi PAN pada Pemilu 2024. Dalam relasinya dengan Muhammadiyah, PAN memang terlalu sering mengabaikan *fatsun* politik. Relasinya cenderung bersifat ahistoris.

Pola relasi Muhammadiyah dan PAN yang buruk ini mesti harus menjadi perhatian Bang Zul dalam pembentukan pengurusan periode 2020-2025 dan pencalegan pada Pemilu 2024. Dan saya meyakini Bang Zul mempunyai niatan yang baik

untuk memperbaiki relasi yang buruk ini. Hal ini setidaknya ditandai oleh "silaturrahim politik" yang dilakukan Bang Zul menjelang berlangsungnya Kongres Kendari ke beberapa tokoh Muhammadiyah, termasuk menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta. Silaturrahim politik ini sejatinya dilakukan diam-diam, namun ternyata belakangan info silaturrahim ini pun menyebar ke mana-mana.

Sebagai bentuk dari niatan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Muhammadiyah, akan lebih baik juga bila dalam penyusunan kepengurusan, Bang Zul kembali bersilaturrahim ke PP. Muhammadiyah. Silaturrahim politik ini soal kepatutan *(fatsun)* atau *adab* saja, tak ada keharusan. Silaturrahim ini akan membuang kesan kalau Muhammadiyah selama ini hanya menjadi pendorong mobil mogok menjelang pemilu, namun selepas itu ditinggalnya begitu saja.

Akomodasi kader-kader Muhammadiyah dalam kepengurusan PAN juga akan menjadi bukti keseriusan membangun relasi yang lebih baik. Bila sebelum kongres beredar rumor bahwa Bang Zul akan mempertahankan duetnya dengan Mas Eddy Soeparno, rasanya Bang Zul perlu mempertimbangkan secara serius mengakomodir kader Muhammadiyah untuk jabatan sekretaris jenderal. Kalau ini dilakukan, dipastikan PAN akan mendapat simpati luar biasa dari elite dan warga Persyarikatan di semua tingkatan. Mereka yang sebelumnya memendam kekecewaan dan bahkan sudah berdiaspora ke partai lain, terlebih ke partai yang secara ideologis berhimpitan dengan PAN, diyakini akan kembali ke pangkuan PAN untuk mendukung dan membesarkan PAN.

Bukan hanya itu, dalam rangkaian muswil yang tentunya akan berlangsung tak lama selepas kongres, perlu juga dipetakan dengan baik mana-mana wilayah yang secara proporsional

pantas diisi oleh kader-kader Muhammadiyah. Wilayah yang secara kuantitas maupun kualitas layak dipercayakan kepada kader Muhammadiyah, sepatutnya DPP PAN memback-up dan mendukung sepenuhnya. Kasus Muswil Jatim 2015 harus menjadi pembelajaran dan tak boleh terjadi lagi.

Ubah Mekanisme Pemilihan

Ketiga, menilik Kongres IV di Bali yang hampir kisruh dan Kongres V di Kendari yang sempat kisruh, terjadi lempar-lemparan kursi, dan tidak menutup kemungkinan pada kongres-kongres berikutnya pun kekisruhan akan menjadi tradisi—sesuatu yang tak sepatutnya terjadi di tubuh PAN, maka perlu dirumuskan secara serius suatu mekanisme pemilihan ketua umum yang mampu mengeliminir bukan sekadar kekisruhan, tapi juga mencegah terjadinya *money politics* yang seperti sudah lazim terjadi dalam setiap perhelatan politik lima tahunan partai-partai politik di Indonesia.

Mekanisme *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* (AHWA) perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada kongres-kongres berikutnya. Secara sederhana, AHWA dimengerti sebagai mereka yang mempunyai wewenang untuk memilih pemimpin. Konteks historis, AHWA merupakan salah satu model suksesi *khalifah* di masa Khulafaul Rasyiddin, yang diterapkan saat pemilihan Usman bin Affan. Saat sakitnya semakin parah akibat ditikam oleh Abu Lu'luah, sebagai antisipasi vakumnya kekuasaan, Umar bin Khattab membentuk AHWA yang beranggotakan Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubeir Awwam, Thalhah bin Ubaidillah (mempunyai hak bicara dan suara), dan ditambah Abdullah bin Umar (hanya mempunyai hak bicara). Sidang AHWA berhasil memilih Usman bin Affan sebagai khalifah

pengganti Umar bin Khattab.

AHWA sebenarnya lebih tepat disebut "kelompok aristokrat". Kelompok ini merupakan representasi politik umat Islam di zamannya. Dalam perkembangannya, merujuk pada Muhammadiyah, penentuan AHWA tidak lagi bersifat aristokrasi. Ada modifikasi berupa penggabungan antara aristokrasi dan demokrasi, yaitu dengan melibatkan *voter* atau pengurus di tingkat wilayah (PWM) dan daerah (PDM) dalam memilih AHWA. Modifikasi ini bisa disebut sebagai sintesis, di mana model aristokrasi tetap dipertahankan, namun pemilihan aristokratnya memakai prosedur yang lebih demokratis. Tidak sebagaimana di era Umar bin Khattab, di mana aristokratnya ditunjuk oleh khalifah sendiri.

Dibanding model pemilihan langsung yang digunakan oleh banyak partai, termasuk PAN, dan tak sedikit ormas, mekanisme AHWA lebih banyak membawa kemaslahatan. *Pertama*, kohesivitas dan kebersatuan lebih terjaga. Pemilihan model AHWA itu memilih banyak orang, tidak *head to head* antar-kandidat, sehingga kohesivitas relatif terjaga dengan baik.

Kedua, penggunaan AHWA dapat meminimalisir praktik *money politics*. AHWA tidak memilih ketua umum secara langsung, tapi memilih formatur atau sebutan lain yang berbilang banyak, seperti Muhammadiyah memilih 13 pimpinan atau PKS memilih sedikitnya 66 Majelis Syura. Dengan memilih banyak orang, akan menyulitkan *broker* atau cukong politik untuk "bermain" di arena kongres atau sebutan lainnya.

Sebagai partai yang kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah, tentu sejalan dan tepat bila PAN meniru memakai AHWA. Tentu tidak sepenuhnya harus meniru model AHWA yang diterapkan Muhammadiayah. Bisa dimodifikasi.

Misalnya dalam hal penentuan ketua umum. Dalam mekanisme AHWA yang diterapkan di Muhammadiyah, mereka yang terpilih dalam 13 besar berkedudukan sama. Anggota AHWA yang terpilih dengan suara terbanyak tidak otomatis jadi ketua umum, meski belakangan, setidaknya dalam beberapa Muktamar terakhir ada tradisi di mana anggota AHWA yang terpilih dengan suara terbanyak diberi amanat menjadi Ketua Umum PP. Muhammadiyah.

Dalam konteks PAN, agar wajah maskulinnya sebagai partai tetap terlihat, maka ketentuan bahwa suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua umum perlu diubah menjadi bahwa calon dengan perolehan suara terbanyak secara otomatis menjadi ketua umum.

Kalau mekanisme ini bisa diterapkan di PAN, maka dalam konteks kepentingan eksternal, selain akan mengokohkan PAN sebagai partai utama bagi pilihan warga Muhammadiyah, juga akan menjadi daya tarik bagi pemilih muslim lainnya, termasuk juga pemilih rasional atau massa mengambang *(floating mass)*. Sementara dalam konteks internal, mekanisme AHWA akan menjaga kohesivitas di tubuh PAN. Ketika kohesivitas terjaga, PAN tinggal berpikir bagaimana membuat strategi politik yang jitu dalam memenangkan kontestasi politik lima tahunan berupa Pemilu.

Kalau tiga tawaran di atas dijalankan dengan baik, secara politik bukan hanya PAN yang akan diuntungkan, tapi kiprah politik Bang Zul pada periode keduanya juga akan dicatat dengan tinta emas sebagai Ketua Umum PAN yang mampu meninggalkan *legacy* (warisan) politik berupa tradisi dan sistem politik yang bermartabat sekaligus beradab di internal PAN. Sekian. •

Bagian V

Pilpres 2019 dan Benang Kusut Politik Indonesia

Prabowo *King Maker*, Gatot Calon Presiden

Joko Widodo (Jokowi) hampir dipastikan akan maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Beberapa partai politik seperti PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Sementara nama yang selama ini santer dan sering disebut bakal menjadi lawan yang seimbang bagi Jokowi adalah Prabowo Subianto. Nama lainnya yang dalam beberapa waktu terakhir mulai disebut-sebut oleh media dan beberapa kalangan adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Prabowo tercatat sudah tiga kali ikut berkompetisi untuk menjadi calon presiden. Mula pertama ketika Pabowo ikut terlibat dalam Konvensi Partai Golkar menjelang Pilpres 2004. Konvensi ini sendiri berhasil dimenangkan oleh Wiranto dan kemudian memilih berpasangan dengan KH. Solahuddin Wahid. Hasilnya, Pilpres 2004 dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono— Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2009 Prabowo kembali maju sebagai kandidat dengan menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati

Soekarnoputri. Pasangan Megawati-Prabowo mengalami kekalahan oleh pasangan SBY-Budiono. Berpasangan dengan Hatta Radjasa, Prabowo kembali maju menjadi Capres pada Pilpres 2014. Hasilnya, Prabowo masih juga belum beruntung, dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kekalahan Prabowo kali ini memang mengundang banyak rumor dan isu miring terkait kecurangan yang terjadi. Banyak pihak yang menilai bahwa kalau Pilpres 2014 berlangsung jujur, maka pasangan Prabowo-Hatta lah pemenangnya. Pemenang Pilpres 2014 sejatinya adalah pasangan Prabowo-Hatta.

Jokowi maupun Prabowo sebenarnya mempunyai beban politik yang sama berat. Jokowi mempunyai beban karena maju sebagai petahana. Kalau tidak terpilih kembali tentu menjadi beban politik tersendiri. Namun beban yang disandang Prabowo tentu jauh lebih besar. Seandainya maju kembali pada Pilpres 2019, berarti Prabowo telah empat kali ikut terlibat dalam Pilpres. Kalau misalnya Prabowo kembali mengalami kegagalan, maka tentu akan menjadi beban politik yang lebih besar lagi bagi Prabowo.

Berangkat dari kenyataan politik ini, maka Prabowo perlu mempertimbangkan secara serius niatnya untuk kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Prabowo harus mulai berpikir untuk mengubah haluan politik dari niatan untuk menjadi capres berubah hanya menjadi *king maker*, menjadi orang yang berada di belakang layar dan begitu menentukan dalam proses Pilpres 2019. Dan untuk menjadi *king maker*, Prabowo mempunyai modal dan pengalaman yang mumpuni. Sampai saat ini Prabowo masih memiliki pengaruh dan kharisma yang cukup kuat di masyarakat, dan ini adalah modal untuk menjadi seorang *king maker*. Prabowo juga mempunyai pengalaman dalam proses Pilkada Jakarta. Peran

Prabowo dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno cukup kuat dan sentral. Dan posisi politik sebagai *king maker* ini tidak kalah mulia dan tak kalah bermartabat dibandingkan sebagai calon presiden.

Kalau Prabowo menjadi *king maker*, lalu siapa calon presiden yang pantas diusung oleh kubu Prabowo? Jawabnya tak lain adalah Gatot. Kenapa Gatot? Secara personal, keduanya baik Gatot maupun Prabowo adalah dua pribadi yang begitu dekat, hubungannya seperti layaknya kakak dan adik. Bahkan sebagaimana penuturan Gatot, dua orang jenderal militer ini adalah pribadi yang saling mengagumi. Gatot begitu mengagumi Prabowo dan Prabowo pun mengagumi Gatot. Bahkan menurut penuturan Gatot, meski terhadap yuniornya, Prabowo selalu memanggil dirinya dengan panggilan "jenderal", sebuah panggilan dari senior yang rendah hati terhadap yuniornya yang lebih muda 8 tahun. Prabowo lulusan 1974 dan Gatot lulusan tahun 1982.

Kedekatan hubungan keduanya sangat memungkinkan adanya kerelaan dari Prabowo untuk mempersilahkan "adiknya" menjadi capres, sementara Prabowo ada di belakangnya menjadi *king maker*. Konteks kepentingan politik, mencalonkan Gatot sebagai capres, secara politik juga akan menguntungkan Gerindra. Apalagi kalau Gatot "diikat" lebih jauh dengan diposisikan secara terhormat dalam struktur kepartaian Gerindra, maka secara positif Gerindra akan mendapatkan Gatot *effect*. Sebab diyakini, saat ini hanya seorang Gatot yang memunginkan untuk menjadi "lawan" yang sepadan bagi Jokowi. Sementara kandidat lainnya, selain belum muncul juga diyakini tidak akan mampu "melawan" Jokowi.

Gatot adalah sosok jenderal cerdas, tegas, nasionalismenya tak diragukan lagi, serta mempunyai kedekatan dengan umat

Islam, sosok yang *chemistry* dengan Prabowo. Gatot adalah Prabowo, maka mendukung Gatot sama halnya mendukung Prabowo. Mendukung Gatot pada Pilpres 2019 seperti megingatkan ketika mendukung Prabowo pada Pilpres 2014.

Lalu siapa sosok yang layak mendampingi Gatot kalau nanti benar-benar didukung oleh Prabowo? Saat ini telah banyak beredar nama-nama yang telah disebut-sebut pantas untuk maju sebagai cawapres. Kalau yang berasal dari non-partai, maka nama Din Syamsuddin dan Moh. Mahfud MD pantas dipertimbangkan. Ada juga nama Anies Baswedan. Sementara dari kalangan partai tercatat ada nama Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), TGB. Zainul Majdi (Demokrat), dari PKS tercatat ada 9 cawapres yang ditawarkan.

Agar *fair* dalam penentuan cawapres, maka menarik untuk dicoba dengan menggunakan survey, survey yang benar-benar serius, jujur, obyektif. Survey yang sangat jauh dari rekayasa sebagaimana kerap dilakukan oleh banyak pihak dan banyak lembaga survey. Agar keseriusan dan kejujuran survey bisa terjaga, maka survey bisa dilakukan secara berlapis. Sebagaimana komitmen nasionalisme dan keislaman Gatot, maka survey bisa dilakukan melalui tiga lapis. Lapis pertama dengan melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang focusnya pada responden yang berasal dari kalangan Muslim, baik yang berasal dari anggota maupun pengurus ormas-ormas Islam. Lapis kedua, survei bisa dilakukan oleh lembaga dari perguruan tinggi negeri dan umum lainnya dengan responden yang lebih heterogen. Lembaga seperti Center for Election and Political Party (CEPP) yang mewadahi lebih dari 40 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bisa dipertimbangkan untuk menjadi pelaksana survey. Dan lapis ketiga, survei

bisa dilakukan oleh pihak Gatot sendiri dengan melibatkan responden yang juga lebih heterogen. Adapun pertanyaan yang diajukan sederhana, lebih terkait capres dan cawapres yang akan dipilih. Pertanyaan bisa bersifat tertutup dan terbuka.

Hasil survey ini nanti menjadi pertimbangan serius dalam menentukan cawapres. Bahkan bukan hanya cawapres, hasil survey ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan nama-nama lainnya yang nantinya akan duduk di kementerian atau lembaga lainnya bila kelak Gatot terpilih sebagai presiden. Dengan begitu, tak ada pihak atau partai politik yang merasa ditinggalkan. Semua merasa dilibatkan dalam proses pilpres. •

Prabowo dan Pilpres 2019: *King Maker* Atau Capres?

Tanpa terasa, perhelatan politik berupa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 tinggal kurang dari 1,5 tahun. Diprediksi, kontestan Pilpres 2019 tak akan berbeda dengan Pilpres 2014, di mana Pilpres hanya akan diikuti oleh paling banyak dua pasangan, yaitu Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan akan berganti pasangan dan Prabowo Subianto yang juga kemungkinan akan ganti pasangan atau akan menyokong calon lainnya. Selain Jokowi dan Prabowo, memang beredar beberapa nama lainnya seperti Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Muhaimin Iskandar, termasuk Tito Carnavian, yang ikut meramaikan bursa capres maupun cawapres.

Majunya kembali Jokowi sebagai capres tentu bisa dipahami. Sebagai petahana, Jokowi mempunyai hak konstitusional untuk maju kembali sebagai capres. Konstitusi memungkinkan petahana maju berkontestasi kembali untuk satu periode berikutnya. Dan hak konstitusional ini tentu

terlepas bahwa selama tiga tahun lebih memimpin negeri ini tak banyak kemajuan berarti yang telah diperbuat Jokowi. Yang ada justru kebijakan yang terkadang lebih banyak membebani masyarakat. Salah satunya yang perlu mendapat pengkritisan adalah terkait kebijakan dicabutnya atau dikuranginya beragam jenis subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat banyak.

Seperti halnya Jokowi, Prabowo Subianto juga mempunyai hak konstitusional yang sama untuk maju kembali menjadi kontestan Pilpres 2019. Tercatat, bahwa sebelum menjadi capres pada Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, Prabowo sudah pernah ikut dalam kontestasi Pilpres 2009 meskipun dalam posisi politik yang berbeda, yaitu sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri.

Baik Jokowi maupun Prabowo sebenarnya mempunyai beban politik yang sama berat. Jokowi mempunyai beban karena maju sebagai petahana. Kalau tidak terpilih kembali tentu menjadi beban politik tersendiri. Namun beban yang disandang Prabowo tentu jauh lebih besar. Seandainya maju kembali pada Pilpres 2019, berarti Prabwo telah tiga kali ikut terlibat dalam Pilpres. Kalau misalnya kembali mengalami kegagalan, maka tentu akan menjadi beban politik yang lebih besar lagi bagi Prabowo.

Berangkat dari pengalaman di banyak perhelatan politik, maka kalau saja *incumbent* selama memimpin prestasinya tidak terlalu buruk, rasanya bukan sesuatu yang sulit untuk bisa terpilih kembali. Belum lagi terkait pendanaan, tentu sebagai petahana, Jokowi jauh lebih siap. Hanya petahana yang "tuna prestasi" dan ditambah soal kemungkinan terjadinya perubahan politik yang maha dahsyat yang akan menyebabkan penahana mengalami kekalahan.

Dari sisi prestasi ekonomi, meskipun minim prestasi,

terutama yang langsung dirasakan oleh masyarakat, namun rasanya tidak cukup kuat untuk memasukan Jokowi dalam kategori sebagai "tuna prestasi". Dalam konteks politik pun demikian. Dalam beberapa waktu terakhir ini, meski belum cukup signifikan, ada perubahan langgam politik pada diri Jokowi. Perubahan langgam politik ini ditandai dengan adanya pergeseran "bandul politik".

Pada saat Pilpres 2014, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla secara kuat sering diposisikan atau dipersepsikan sebagai "bukan pasangan hijau", dan sebaliknya, pasangan Prabowo dan Hatta diposisikan sebagai "pasangan hijau". Rupanya persepsi ini sangat dipahami oleh Jokowi. Maka mulai paruh 2017-an, Jokowi mulai mengubah langgam politiknya dengan cara menggeser bandul politiknya dari yang sebelumnya kerap dipahami sebagai "anti Islam" mencoba bergeser ke kanan atau setidaknya berada pada posisi tengahan *(tawasuth)*. Jokowi yang sebelumnya diperspsi sebagai "bukan santri" (meminjam terminologi Geertz), mulai bergeser ke kanan dengan menjalin silaturrahim dengan kelompok-kelompok Islam. Bila sebelumnya Jokowi lebih suka mendekat ke NU, sekarang mulai mengambil posisi *tawazun* (seimbang). Selain menjalin relasi kedekatan dengan NU, juga mulai sering bersilaturrahim ke Muhammadiyah, baik dalam rangkaian acara peresmian amal-amal usaha Muhammadiyah, maupun secara khusus bersilaturrahim dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Beberapa waktu lalu Jokowi bahkan menyempatkan diri bersilaturrahim ke Persis dan Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Dan ke depannya, Jokowi sepertinya akan mempertahankan langgam politik ini.

Perubahan langgam politik Jokowi tentu kurang menguntungkan bagi Prabowo. Secara politik akan menyulitkan langkah politik Prabowo selajutnya. Dengan perubahan

langgam politik Jokowi ini, maka klaim politik Prabowo sebagai pribadi yang dekat dengan "kelompok hijau" terbantahkan. Padahal dari sisi inilah yang mencoba ditawarkan dan menjadi semacam "trademark politik" Prabowo.

Meskipun perubahan langgam politik Jokowi akan menyulitkan Prabowo, namun Prabowo masih mempunyai celah politik yang memungkinkannya akan mendapat tempat di hati pemilih Muslim, yaitu dengan cara mencoba secara *elegant* menghadirkan "iklim politik" Pilkada Jakarta ke dalam Pilpres 2019. Politik identitas yang begitu kuat dalam Pilkada Jakarta harus dijadikan sebagai tema dan bahan kampanye, dan ini tentu sah saja dalam iklim politik demokrasi. Selain itu, Prabowo juga harus mengusung calon wakil presiden yang benar-benar merepresentasikan kelompok Islam. Kalau hal ini bisa dilakukan, bukan mustahil Prabowo akan menuai kesuksesan politik pada Pilpres 2019.

Namun kalau hal ini tidak mugkin dilakukan, maka Prabowo harus mulai berpikir untuk mengubah haluan politik dari capres menjadi *king maker*, menjadi orang yang berada di belakang layar dan begitu menentukan dalam proses Pilpres 2019. Dan untuk menjadi *king maker*, Prabowo mempunyai modal dan pengalaman. Sampai saat ini Prabowo masih memiliki pengaruh dan kharisma yang cukup kuat di masyarakat, dan ini adalah modal sebagai seorang *king maker*. Prabowo juga mempunyai pengalaman dalam proses Pilkada Jakarta. Peran Prabowo dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno cukup kuat. Dan posisi politik sebagai *king maker* ini tidak kalah mulia dibandingkan sebagai calon presiden. •

Janggalnya Pernyataan Ratna Sarumpaet

Banyak orang dibikin terkaget-kaget oleh pernyataan dan pengakuan Ratna Sarumpaet terkait lebam-lebam di mukanya. Ratna menyatakan dan mengakui bahwa lebam-lebam di mukanya bukan karena dianiaya, tapi akibat sedot lemak. Pengakuan Ratna Sarumpaet ini kontras sekali dengan pengakuannya ketika ditemui Prabowo Subyanto yang menyebut lebam mukanya karena dianiaya.

Jangankan orang sekelas saya, sekelas Prabowo, Amien Rais, dan Joko Santoso yang mantan Panglima TNI pun tertipu (dibohongi). Belum lagi tokoh-tokoh lainnya, seperti Hariman Siregar, Rizal Ramli, dan banyak kalangan aktivis lainnya pun tertipu oleh kebohongan Ratna Sarumpaet.

Sebelum muncul “pengakuan kebohongan”, saya kira mereka yang memberikan pembelaan atau empati kepada Ratna Sarumpaet semata didasari oleh faktor kemanusiaan terkait berita yang beredar, termasuk penuturan Ratna Sarumpaet soal penganiayaan atas dirinya. Apalagi sebelumnya sudah beredar

gambar yang sepintas—terlebih bagi orang awam yang tidak mengetahui seluk beluk operasi plastik—menunjukan wajah Ratna Sarumpaet yang lebam *bak* bekas penganiayaan.

Kasus Ratna ini telah meningkatkan derajat rendahnya kejujuran dan semakin tumbuh suburnya kebohongan di negeri ini. Bila sebelumnya, di tahun 2014 ada seorang calon presiden yang telah mengumbar banyak janji saat berkampanye, namun ketika terpilih entah berapa puluh janji yang justru dikhianati atau setidaknya diingkari dan tidak secara serius untuk dipenuhinya.

Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, kita juga disuguhi kebohongan yang dilakukan Setya Novanto yang dengan sengaja menabrakan mobilnya ke tiang listrik, dengan maksud menghindari jerat hukum KPK. Saat ini lebih hebat lagi, kita disuguhi oleh kebohongan yang hampir-hampir sempurna, yang rasanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal dan utuh saraf kemanusiaannya, yang dilakukan oleh seorang bernama Ratna Sarumpaet. Saya tidak tahu, apakah sama sebanding atau lebih rendah atau bahkan lebih tinggi derajat kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet dengan kebohongan yang dilakukan oleh seorang presiden yang mengangkangi janji-janjinya di kala berkampanye?

Hikmah dari kebohongan seorang Ratna Sarumpaet, siapapun harus mengantisipasi bahwa ke depan akan sangat mungkin muncul modus-modus kebohongan yang kasat mata yang akan dilakukan dengan cara yang lebih canggih lagi. Apalagi di tahun-tahun politik seperti saat ini. Tipu-tipu DPT, kecurangan di TPS, kecurangan dalam penghitungan suara, dan bentuk kebohongan-kebohongan lainnya terkait dengan Pilpres 2019 sangat mungkin terjadi di Pilpres 2019. Dan secara *text book*, potensi untuk melakukan kebohongan dan kecurangan

ada pada calon dari petahana, yang secara politik mempunyai kuasa dalam banyak hal.

Namun terlepas dari kebohongan seorang Ratna Sarumpaet, saya melihat ada banyak kejanggalan atas kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Seorang Ratna Sarumpaet itu usianya sudah memasuki angka 70-an tahun. Apakah masih terasa penting melakukan sedot lemah yang berakibat pada lebam di seluruh wajahnya? Kalau RSK Bina Estetika yang dituju oleh Ratna Sarumpaet itu professional, bereputasi, kenapa berani membiarkan pasiennya meninggalkan RSK Bina Estetika dengan muka lebam-lebam? Apakah tidak akan menurutkan reputasi RSK Bina Estetika? Kalau Ratna Sarumpaet "nyanyi" bahwa lebam-lebab di mukanya karena gagal sedot lemak, apakah tidak akan menurunkan jumlah pasien yang akan berobat ke RSK Bina Estetika? Kalau kasus Ratna Sarumpaet ini adalah "kasus normal", rasanya pasien atau calon pasien yang pasti akan berpikir beribu kali berobat ke RSK Bina Estetika. Terkecuali kasus Ratna Sarumpaet itu "kasus tidak normal".

Kejanggalan lainnya, terkait dengan "kinerja hebat" pihak kepolisian. Sebagaimana tulisan dari seorang pegiat medsos yang sudah banyak tersebar di media social, ada yang aneh dari data-data yang cepat sekali diungkap oleh pihak kepolisian. Padahal di ruang publik polisi mengatakan Ratna Sarumpaet seharusnya membuat laporan jika dia merasa dianianya. Ini artinya, Ratna Sarumpaet sebagai korban yang bersangkutan belum melapor. Tapi anehnya, dalam waktu yang "begitu singkat" sudah ada data-data yang komprehensif dan diobral ke khalayak. Saya sebut "begitu singkat" tentu setelah membandingkan dengan kasus-kasus lainnya yang semestinya mendapatkan perhatan serius, di mana kepolisian terlihat

bekerja terlalu lelet, seperti dalam kasus Novel Baswedan, dan kasus persekusi yang menimpa banyak orang di negeri ini.

Saya tidak tahu, sebagaimana ditulis aktivis media sosial, apakah kinerja kepolisian dalam kasus Ratna Sarumpaet telah melampaui prosedur? Bayangkan saja, dalam sehari kepolisian berhasil mengetahui transaksi bank yang dilakukan Ratna, mengetahui CDR atau rekaman data telepon Ratna, mengetahui CCTV. Semua dilakukan dengan tanpa memeriksa korban yang tidak melapor.

Padahal konon untuk bisa mengakses data transaksi bank harus ada tersangka untuk kasus yang relevan dengan rekening bank. Padahal untuk mengetaui CDR harus ada sprindik. Sementara kasus Ratna Sarumpaet belum masuk penyidikan. Kepolisian juga begitu mudah untuk tahu CCTV, rekam medis, dan lain-lain.

Kejanggalan selanjutnya terkait "masa lalu" Ratna Sarumpaet, terlebih yang terkait dengan perjuangan politik umat Islam. Siapapun yang mengenal Ratna Sarumpaet, terlebih dalam hal perjuangan politik umat Islam, Ratna Sarumpaet adalah sosok yang justru terlalu sering berhadapan. Kalau tidak salah saat Pilkada Jakarta 2012, Ratna Sarumpaet termasuk pendukung pasangan Joko Widodo— Basuki Tjahaja Purnama. Makanya saya sendiri sempat heran sambil mencoba berhusnudzan ketika belakangan Ratna Sarumpaet banyak berhubungan dengan kelompok Islam.

Secara pribadi, saya sendiri sempat bertemu fisik dan terlibat pembicaraan dengan Ratna Sarumpaet ketika sama-sama terlibat Aksi Damai 411. Ketika pecah kerusuhan di depan Istana, saya, Ratna Sarumpaet, dan banyak peserta aksi lainnya sempat menepi sampai di depan Istana sambil ngomel-ngomel atas sikap Kapolda Metorjaya Muhammad Iriawan

yang terkesan membiarkan polisi menyemprotkan gas air mata ke kerumunan peserta aksi yang berada di mobil komando.

Ketika Ratna Sarumpaet melakukan kebohongan yang sangat mendasar, yang sedikit banyaknya tentu berhasil "memojokkan" Prabowo, naluri *shuudzan* saya muncul, jangan-jangan kebohongan Ratna Sarumpaet ini *by design*. Kalau kita nonton film-film fiksi yang bertemakan konspirasi politik, maka kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet sangat mungkin dilakukan di alam nyata, bukan di alam fiksi sebagaimana di film-film tersebut.

Makanya ketika semalam dalam konferensi persnya, Prabowo langsung memerintahkan untuk memberhentikan Ratna Sarumpaet sebagai anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, saya kira keputusan yang sangat tepat. Bukan hanya memberhentikan Ratna Sarumpaet, Prabowo dan Sandiaga perlu juga melakukan *scraning* ulang atas Tim Pemenangan yang ada. Sekian. •

Distorsi Makar dalam Al-Qur'an dan Penguasa Paranoid

Pasca Pemilu 2019, istilah makar ramai menjadi bahasan di berbagai media massa. Ditilik dari sisi bahasa *(lughat)*, makar berasal dari bahasa Arab, dari kata *makran* (*masdar*) yang berarti menipu, memperdaya, membujuk, mengkhianati, dan mengelabui. Sementara dalam KUHP, makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *aanslag*, yang diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat. Dalam bahasa Inggris, makar diterjemahkan sebagai *violent attack*, *fierce attack*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut makar dalam tiga arti: akal busuk, tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam Al-Qur'an terdapat cukup banyak ayat yang bicara tentang makar. Menariknya, ayat-ayat makar dalam Al-Qur'an lebih menjelaskan bahwa pelaku makar selalu identik dengan mereka yang berkuasa, zalim, curang, tidak jujur, dan kafir.

Bukan mereka yang dikuasai, *mustadzafin*, dicurangi, jujur, dan beriman. Sebut saja dalam QS. Ali Imran 54: "Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya". Ayat ini menjelaskan tentang sekelompok pemuka Bani Israil yang bermaksud menyerang Isa, berbuat jahat, dan menyalibnya. Ketika mereka telah bersekongkol, kemudian melapor kepada raja yang kafir saat itu, bahwa ada seorang yang telah menyesatkan rakyat, melarang taat kepada raja, merusak rakyat, dan lain-lainnya, sehingga berhasil memancing amarah raja. Raja pun mengirim pasukan untuk mencari dan menangkap Isa untuk disalib dan disiksa.

Ketika pasukan mengepung rumahnya, mereka mengira telah berhasil menangkapnya, ternyata Allah menyelamatkannya dari kepungan mereka. Allah mengangkatnya dari lubang dinding rumah itu ke langit, dan kemudian menjadikan salah seorang yang berada di dalam rumah itu serupa dengannya. Ketika pasukan itu memasuki rumahnya di kegelapan malam, mereka meyakini bahwa ia adalah Isa, lalu menangkap, menyiksa, menyalib serta menaruh duri pada kepalanya. Hal itu merupakan bentuk tipu daya Allah terhadap mereka. Karena sesungguhnya, Allah telah menyelamatkan Isa dan mengangkatnya dari hadapan mereka, meninggalkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, namun mereka yakin telah berhasil dalam misi pencariannya itu.

Begitu juga dalam QS. Al-An'am: 123: "Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya." Pelaku makar dialamatkan kepada penjahat-penjahat terbesar, yang kalau

merujuk pada beragam tafsir dikaitkan dengan penguasa. Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait makna: *pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu,* yaitu Kami jadikan orang-orang jahat mereka berkuasa, lalu mereka melakukan kedurhakaan. Apabila mereka melakukan hal tersebut, Kami binasakan dengan azab. Mujahid dan Qatadah mengatakan serupa bahwa *pembesar-pembesar yang jahat,* maksudnya adalah para pembesar dan para pemimpinnya.

Selanjutnya QS. Al-Anfal: 30: "Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya." Ayat ini berkenaan dengan tipu daya kafir Quraisy yang mencoba untuk membunuh Rasul Muhammad. Allah perlihatkan kepada Rasul Muhammad akan hal itu, maka Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasul Muhammad, sedangkan Rasul Muhammad keluar hingga sampai di Gua Tsur. Sementara orang-orang kafir malam itu menjaga Ali bin Abi Thalib yang diduga Rasul Muhammad. Pada saat memasuki pagi hari, mereka menyerbu. Saat melihat Ali, mereka terperanjat kaget. Di sinilah sesugguhnya Allah telah mengembalikan tipu-daya yang mereka buat.

Terakhir QS. Al-Mukmin: 45: "Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk." Makar dalam konteks ayat ini bercerita soal tipu daya Fir'aun kepada Musa. Akhirnya Allah membalas tipu daya Fir'aun dengan menenggelamkannya di Sungai Nil.

Dari beberapa contoh ayat di atas, makar setidaknya dapat

dipahami dalam tiga hal. Pertama, sebagai persekongkolan jahat, tipu daya, dan upaya jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang beriman. Kedua, sejatinya pelaku makar adalah mereka yang memiliki kuasa politik, dan zalim (bahkan fasik) untuk menindas kaum yang lemah, dengan berbagai tipu daya politik dan kekuasaan yang dimilikinya. Ketiga, para penguasa pembuat makar biasanya dalam dirinya terjangkit paranoid.

Dalam perkembangannya, makar sebagaimana diceritakan Al-Qur'an mengalami distorsi luar biasa. Pelaku makar yang identik dengan mereka yang berkuasa, zalim, curang, dan tidak jujur, dipahami sebaliknya menjadi mereka yang nir-kuasa. Pelaku makar menjadi identik dengan mereka yang melawan, memprotes, dan menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan, kejahatan, kezaliman yang dilakukan penguasa.

Pasca Pemilu 2019, beberapa tokoh yang juga pendukung Prabowo Subianto— Sandiaga S. Uno ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan makar, mau menggulingkan kekuasaan yang sah. Pasal yang digunakan untuk menjerat mereka adalah pasal makar, pasal karet yang lazim diterapkan oleh penguasa otoriter, paranoid, dan tak demokratis. Kalaupun terlihat demokratis, demokrasi yang diterapkan sebatas sebagai instrumen untuk mengelabui perangai-perangai kekuasaan yang sejatinya sewenang-wenang dan tak demokratis.

Mentersangkakan mereka dengan tuduhan makar, mau menggulingkan kekuasaan adalah tuduhan yang berlebihan. Bagaimana mungkin mereka dituduh mau menggulingkan kekuasaan ketika semua alat dan kekuatan negara ada di genggaman sang penguasa dan para pendukungnya. Kepolisian dan militer masih di bawa kendali penguasa. Mereka hanya memprotes, mengkritik atas pelaksanaan pemilu yang

diduga sangat curang. Mereka hanya mengkritik atas dugaan ketakjujuran dan ketakadilan penyelenggara pemilu, dan itu sah dalam negara demokrasi.

Nalar yang waras tentu bisa membedakan antara memprotes dan mengkritik di satu sisi dengan makar di sisi yang lain. Hanya penguasa paranoid yang menganggap kritik dan protes sebagai makar. Sementara ketentuan perundang-undangan yang terkait makar sendiri tidak jelas, sangat multi-tafsir, dan terbukti selama ini potensial untuk disalahgunakan oleh siapapun yang berkuasa. Sekian. •

Kebumen, 4/6/2019

Halusinasi Pembunuhan Pejabat

Beberapa hari lalu, 26/5/2019, Kapolri Tito Carnavian menyampaikan pernyataan yang (tidak) mengejutkan terkait upaya pembunuhan terhadap beberapa pejabat yang akan dilakukan oleh "kelompok perusuh" yang menggelar aksi tanggal 21-22 Mei 2019. "(Dari) pemeriksaan resmi, mereka menyampaikan nama Pak Wiranto, Pak Luhut (Binsar Panjaitan), Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gories Mere. Selain itu, kelompok mengancam menargetkan pimpinan lembaga survei (tanpa menyebut nama)" (Detik.Com, 26/5/2019).

Saya menyebut pernyataan Tito sebagai "(tidak) mengejutkan", alasannya sederhana. Sudah terlalu sering Tito membuat pernyataan-pernyataan serupa, baik ketika menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT hingga Kapolri, dengan maksud untuk menyudutkan kelompok Islam.

Dalam kasus pemberantasan tindak terorisme misalnya, entah sudah berapa kali Tito membuat pernyataan "aneh-aneh" yang cenderung menyudutkan kelompok Islam. Pernyataan-

pernyataan Tito terkait terorisme justru membuat masyarakat tidak lagi percaya sepenuhnya bahwa tindak kekerasan teroris itu sepenuhnya ada. Apalagi bila dikaitkan dengan teroris jihadis . Pernyataan-pernyataan Tito justru menyiratkan secara kuat bahwa kerja-kerja pemberantasan terorisme tak lebih hanya rekayasa negara untuk secara serius berusaha menyudutkan kelompok Islam dan pengalihan isu-isu tertentu terkait agenda dan kepentingan segelintir elite yang berkuasa.

Pernyataan "(tidak) mengejutkan" Tito juga tampak terlihat dalam menyikapi rencana pembunuhan empat pejabat. Tito seperti tengah membangun halusinasi.

Coba kita kritisi lebih jauh pernyataan Tito. Pertama, sebagaimana dinyatakan Tito, rencana pembunuhan pejabat bersumber dari mereka yang ditangkap dalam aksi damai yang berakhir rusuh tanggal 21-22 Mei 2019. Bayangkan, institusi kepolisian yang dibiayai sangat besar dari uang rakyat, ternyata cara kerjanya *ecek-ecek*. Bagaimana mungkin, pernyataan yang cukup serius terkait pembunuhan pejabat, ternyata sumbernya sangat tidak bermutu, hanya dari mereka peserta aksi damai yang ditangkap pihak kepolisian, bukan dari kerja-kerja intel yang dimiliki kepolisian. Pernyataan Tito ini justru akan dipahami sebagai upaya main-main, dan tak lebih hanya sebagai bagian dari upaya teror, menakut-nakuti publik yang kritis kepada penguasa.

Melihat sepak terjang LBP, Gories Mere, Wiranto, Budi Gunawan, dan bahkan Tito sendiri selama ini, terlebih perlakuannya terhadap kelompok Islam, rasanya wajar bila ada peserta aksi damai—yang kebanyakan melek politik, menghendaki kematiannya. Persoalannya, apakah ketika mereka berteriak "bunuh pejabat" lalu sertamerta akan dan bisa membunuhnya? Jawabnya tentu tidak! Teriakan "bunuh

pejabat" biasanya ekspresi dari kejengkelan bercampur amarah yang luar biasa, namun mereka tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya berteriak "bunuh pejabat". Sebab kalau mereka benar secara serius merencanakan untuk membunuh pejabat, tentu tidak mungkin berkoar-koar. Dan kalau pun benar akan membunuh pejabat, dipastikan mereka mempunyai kemampuan khusus. Apakah mereka yang berhasil ditahan polisi mempunyai kemampuan tersebut? Saya yakin tidak. Sebab kalau mereka mempunyai kemampuan khusus, kenapa bisa begitu gampang tertangkap? Lagi pula membunuh pejabat, misalnya sekelas Menko Maritim atau Kepala BIN yang mempunyai dan dikelilingi pengawal pribadi, tentu bukan perkara mudah seperti semudah Densus 88 membunuh warga negara biasa yang baru diduga teroris.

Belum lagi dalam sejarah terkait pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap pejabat Indonesia tak pernah dilakukan oleh massa dalam pengertian sosiologi sebagai kerumunan *(crowd).* Lebih seringnya dilakukan oleh konspirasi elite berkuasa. Misalnya meninggalnya salah seorang Ketua PBNU Subchan ZE, yang begitu miterius di Arab Saudi rasanya sulit bila tidak dikaitkan dengan kerja-kerja intelijen. Semasa hidupnya, Subchan dikenal sangat krtitis terhadap rezim Orde Baru. Meninggalnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjriah secara misterius dan sekaligus saksi kunci dalam kasus Bank Century. Meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik juga dikaitkan dengan konspirasi elite berkuasa yang konon ketakutan kalau Manik membuka kecurangan Pilpres 2014. Percobaan pembunuhan terhadap Abdurrahman Wahid (saat menjabat Ketua Tanfidziyah PBNU) dan Amien Rais (saat menjabat Ketua PP. Muhammadiyah hingga saat ini), rasanya sulit kalau tidak dikaitkan dengan konspirasi elite berkuasa

dan kerja-kerja intelijen.

Kedua, kalaulah kepolisian serius menemukan kelompok masyarakat tertentu yang hendak membunuh para pejabat, apakah seharusnya diumumkan ke publik. Saya bukan intel dan tak pernah bercita-cita jadi intel, apalagi intel yang mengawasi gerak gerik kelompok Islam. Namun kalau menonton film-film spionase atau intelijen, rasanya tak ada sutradara yang membuat skenario di mana aparat berwenang mengumumkan rencana pembunuhan terhadap pejabat ke hadapan publik. Mengumumkan bahwa ada empat pejabat yang akan dibunuh justru hanya mempertegas dugaan halusinasi atau kebohongan pihak kepolisian soal rencana pembunuhan tersebut.

Ketiga, saya bersepakat dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang tak yakin dengan pernyataan Tito soal rencana pembunuhan empat pejabat. Ryamizard menyebut bahwa rencana pembunuhan itu hanya omongan belaka. Ryamizard mengatakan, ancaman pembunuhan pejabat negara itu hanya sebatas gertakan semata. Menurutnya, ancaman pembunuhan tersebut juga tak terlepas dari dinamika politik. "Saya rasa tidak begitulah. Masak sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu. Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu," (CNN Indonesia, 29/5/2019).

Saat ini kinerja kepolisian tengah mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat. Bukan hanya terkait dengan kerja-kerja pemberantasan tindak terorisme, tapi juga dalam kasus kriminaliasi ulama, memintai keterangan dan mentersangkakan mereka yang dinilai penyebar hoax dan melawan rezim berkuasa secara tidak proporsional. Sementara terhadap para pembuat hoax yang pro dan pendukung rezim, tak ada satu

pun yang dijadikan tersangka. Belum lagi cara menyikapi aksi damai sebagai reaksi atas kecurangan dan bobroknya Pemilu 2019 yang berujung pada meninggalnya begitu banyak korban juga mendapat sorotan jatam.

Kritik keras masyarakat ini mestinya dijadikan instropeksi pihak kepolisian untuk menampilkan citra diri yang lebih baik. Polisi harus benar-benar secara serius memposisikan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya menjadi pembela, pendukung, dan alat kekuasaan yang bersifat sesaat. Polisi itu wasit, dan tak sepatutnya memposisikan diri sebagai pemain, sebagaimana yang dipertontonkan saat ini. Sekian. •

Brebes, 31/5/2019

Negara Di Balik Ratusan Korban Pemilu?

Korban "kejahatan" Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal sudah tembus lebih dari 400 orang meninggal dunia (belakangan korban meninggal mencapai hingga lebih dari 700 orang). Kebanyakan korban merupakan pelaksana pemilu di level paling bawah. Semoga korban tidak terus bertambah dan secara bertahap menyasar pelaksana pemilu sampai ke tingkatan yang paling atas, seiring terus berprosesnya penghitungan suara ke tahapan yang lebih atas.

Meskipun korban terus bertambah berkali-kali lipat bila dibandingkan dengan misalnya korban bom Bali, namun tak ada sikap atau kebijakan negara yang pantas untuk mendapat apresiasi. Bagaimana mau memberikan apresiasi kalau menyikapi banyaknya korban negara hanya bicara soal santunan terhadap korban meninggal dan yang masih dirawat di rumah sakit. Ini sikap yang menjengkelkan dan tak patut dipertontonkan oleh institusi bernama negara.

Negara misalnya tak ada upaya untuk membentuk sejenis

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mandiri yang melibatkan banyak pihak untuk mengusut kasus yang tak lazim dalam sejarah pemilu di Indonesia. Semestinya negara mengambil inisiatif membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih jauh atas jatuhnya korban yang berjumlah ratusan tersebut. Dingin dan tak acuhnya negara ini patut dicurigai atau diduga bahwa negara sebenarnya berada di balik jatuhnya banyak korban tersebut.

Sebagai pelaksana pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya yang tergambar dari pernyataan Ketua KPU Arif Budiman juga terkesan mencoba menyederhanakan masalah bahwa jatuhnya banyak korban itu lebih karena kelelahan. Ini cermin pernyataan dari seorang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak buahnya yang menjadi korban. Bagaimana mungkin kelelahan dijadikan sebagai kambing hitam atau faktor tunggal yang determinan atas jatuhnya ratusan korban tersebut.

Jangan-jangan sikap ini diambil karena KPU sudah merasa menjadi bagian dari negara (terstruktur) sehingga tidak merasa perlu untuk secara serius melihat kemungkinan adanya faktor lain di luar faktor kelelahan sebagai penyebab jatuhnya banyak korban, misalnya dengan menyebut atau menuduh bahwa institusi negara berada di balik jatuhnya banyak korban.

Menyebut bahwa ratusan korban meninggal semata karena faktor kelelahan jelas sangat sulit dinalar oleh akal sehat. Kalau korban jatuh hanya di kisaran angka satu atau dua digit mungkin masih bisa dipahami untuk menyebut kelelahan sebagai penyebab utama kematian. Sementara korban meninggal saat ini sudah mencapai ratusan orang, tak seharusnya kelelahan dijadikan sebagai alasan utama. Kalau kelelahan menjadi alasan utama, seharusnya bukan (hanya)

penyelenggara pemilu, tapi para calon legislatif (yang secara serius) berbulan-bulan turun di daerah pemilihan dengan tingkat kecapaian yang luar biasa, semestinya yang jadi korban. Kalau alasan pemilu serentak menjadikan para petugas pemilu kelelahan dan kemudian meninggal juga tidak sepenuhnya benar dan cenderung berlebihan.

Kalau dari sisi waktu pelaksanaan, Pemilu 2019 sebenarnya tak berbeda jauh dengan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Bedanya, bila Pemilu 2009 dan 2014 hanya memilih empat kertas suara, sementara pada Pemilu 2019 tambah menjadi lima kertas suara: plus kertas suara pilpres. Dari beberapa TPS, tercatat penghitungan suara pilpres hanya memakan waktu kurang lebih sejam. Artinya, bila dibandingkan Pemilu 2009 dan 2014, maka waktu pelaksanaan Pemilu 2019 praktis hanya bertambah sejam, sehingga tidak beralasan kalau bertambahnya waktu sejam menyebabkan petugas pemilu menjadi kelelahan.

Selain alasan kelelahan, semestinya KPU Pusat harus mencoba mencari menyebab lain atas jatuhnya ratusan korban. Penyebab lain sangat mungkin dilakukan oleh makhluk bernama negara yang dalam pengertian Weber memang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan. Representasi negara dalam konteks Pemilu 2019 tentu melekat pada petahana. Karenanya, yang potensial untuk melakukan tindak kekerasan politik adalah petahana.

Negara bisa sangat mungkin melakukan kejahatan pada dua hal. Pertama, menekan pelaksana pemilu untuk memenangkan petahana, tentu dengan segala cara, yang setidaknya tergambar dari beragam modus dugaan kecurangan yang terjadi. Tekanan harus memenangkan petahana sangat mungkin membuat seseorang merasa tertekan dan bercampur depresi. Satu sisi -mungkin- mereka mencoba bersikap jujur dan

adil sebagai penyelenggara pemilu, namun di sisi lain mereka mendapat tekanan hebat untuk memenangkan petahana. Akibatnya mereka tidak hanya stress, tapi juga mengalami depresi yang berujung pada kematian. Banyak fakta di lapangan tentang hal ini, termasuk tekanan berupa tawaran uang dalam jumlah sangat besar untuk pelaksana pemilu di tingkat kecamatan kalau berhasil memenangkan (baca: mengubah) suara petahana yang kalah menjadi menang.

Kedua, belajar dari pengalaman kematian yang terasa janggal yang kerap menimpa beberapa orang yang bersinggungan dengan kekuasaan, seperti yang menimpa Ketua KPU Husni Kamil Manik, sangat mungkin juga kematian ratusan orang penyelenggara pemilu ini bagian dari rekayasa negara untuk agenda kemenangan petahana. Semoga dugaan saya ini salah. •

Brebes, 5/5/2019

Rekonsiliasi Politik, Teringat Perang Shiffin

Mendengar pemberitaan terkait permintaan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), juru runding Istana untuk bertemu Prabowo Subianto (PS), saya jadi teringat Perang Shiffin, perang antara pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan dengan Ali bin Abi Thalib. Menyikapi permintaan LBP, PS disarankan banyak tokoh untuk tidak usah mau menerima LBP, karena dinilai lebih banyak madaratnya.

Perang Shiffin terjadi sebagai *impact* atas terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan. Saat itu Ali yang dibay'ah menjadi Khalifah pengganti Usman, dinilai lambat dalam mengusut kematian Usman. Perang Jamal antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali tak terelakan. Penyebabnya, Aisyah juga menuding Ali lambat dalam mengusut kematian Usman. Suasana semakin panas karena Muawiyah (Gubernur Syam), sepupu Usman, tak kunjung memberikan bay'ah terhadap Ali. Muawiyah satu-satunya gubernur yang tidak mau berbay'ah. Bahkan Muawiyah mempolitisir kematian Usman, di mana jubah Usman yang

berlumuran darah digantung di Alun-Alun Damaskus sambil membangun opini bahwa Ali berada di balik terbunuhnya Usman.

Karena Muawiyah tak juga mau berbay'ah, Ali memutuskan untuk mengirmkan masukan guna memerangi Muawiyah. Rupanya Muawiyah meladeni dan menerima tantangan Ali. Muawiyah "menyewa" mantan Gubernur Mesir, Amr bin Ash. Sementara Ali memimpin langsung pasukannya. Akhirnya, kedua pasukan ini bertemu di Bukit Shiffin dan pertempuran pun terjadi.

Pada pertempuran ini, pasukan Muawiyah menyerah. Pada saat itu, selaku panglima pasukan Muawiyah, Amr bin Ash mengangkat Al-Qur'an yang ditaruh diujung tombak sebagai tanda menyerah. Ketika mengetahui Amr bin Ash menyerah, pasukan Ali yang berada di depan (belakangan disebut Khawarij), meminta Ali untuk menghentikan pertempuran, sebab lawan sudah menyerah. Namun sebaliknya, Ali tetap memerintahkan pasukannya untuk terus berperang. "Saya sudah kenal Amr bin Ash sejak kecil. Amr bin Ash itu licik". Untuk diketahui, sebelum masuk Islam, Amr bin Ash memimpin pasukan kafir Quraisy mengejar 13 sahabat, salah satunya Ali, yang hijrah ke Habasyah (Ethiopia) yang rajanya Nasrani bernama Najasi, yang dikenal adil. Karena desakan untuk menghentikan perang dari pasukan di garis depan, akhirnya Ali pun menghentikan pertempuran.

Apa yang diperkirakan Ali pun terjadi. Menyerahnya Amr bin Ash ternyata hanya siasat untuk mengajak Ali duduk di meja perundingan. Bayangkan, sudah kalah masih pula mengajak berunding. Ali pun terpaksa memasuki meja perundingan. Kubu Muawiyah tetap mempercayakan Amr bin Ash sebagai juru runding, sementara Ali mengutus Abu

Musa al-Asy'ari. Hasil perundingan memutuskan untuk memakzulkan Muawiyah dan Ali.

Ketika menyampaikan hasil perundingan, pihak Abu Musa al-Asy'ari diberi kesempatan pertama. Sebagai ulama yang *zuhud*, *qanaah*, dan *wara'*, Abu Musa menyampaikan hasil perundingan apa adanya, sesuai hasil perundingan. Namun ketika tiba giliran Amr bin Ash menyampaikan hasil perundingan, justru mereduksi isi perjanjian secara luar biasa, yaitu dengan mengatakan bahwa tadi Abu Musa al-Asy'ari sudah menyampaikan bahwa Ali dimakzulkan, berarti sekarang tinggal seorang khalifah bernama Muawiyah.

Kecewa dengan hasil perundingan, pasukan garis depan Ali menyatakan keluar dari barisan Ali, yang kemudian disebut Khawarij. Bukan hanya keluar dari pasukan Ali, Khawarij juga menyatakan ingin membunuh pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan, termasuk Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Di antara ketiga orang ini, Ali berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam.

Lalu apa kaitan Perang Shiffin dengan kondisi politik kekinian? Tentu saya tidak bermaksud memposisikan Jokowi sebagai penggambaran Muawiyah dan Prabowo sebagai penggambaran Ali atau misalnya menggambarkan LBP seperti Amr bin Ash dan Joko Santoso (Ketua BTN) seperti Abu Musa al-Asy'ari. Sama sekali tidak.

Poin keterkaitannya adalah kecurangan. Perang Shiffin dan peristiwa tahkim adalah simbol kecurangan, pengkhianatan, dan minimnya integritas. Seperti diketahui, menjelang Pilpres 2009, terjadi Kesepakatan Batutulis, terutama poin 6, yang intinya bahwa pada Pilpres 2014 Megawati Soekarno Putri akan mendukung Prabowo menjadi calon presiden. Namun dengan curang, Megawati mengkhianati isi Perjanjian Batutulis. Jokowi

yang didukung Prabowo pada Pilgub Jakarta 2012, dengan tanpa integritas dan rasa sungkan malah "bersedia" berhadapan dengan Prabowo, orang yang membantu pembiayaan selama Pilgub Jakarta. Hasil Pilpres 2014 yang sejatinya dimenangkan oleh Prabowo, juga dirampas. Selain Jokowi, OGO, SS, dan beberapa orang lainnya yang sangat terbatas pasti tahu hal ini.

Bayangkan, Pilpres 2014, ketika Prabowo hanya didukung parta-partai pengusung dan sedikit relawan berhasil memenangkan Pilpres 2014, apalagi pada Pilpres 2019, di mana Prabowo tidak hanya didukung oleh lima partai pengusung, tapi juga ratusan relawan yang secara militan mendukung Prabowo-Sandi. Pasukan emak-emak *(the power of emak-emak)* juga menjadi kekuatan tersendiri bagi Prabowo. Belum lagi faktor Sandiaga Uno juga menjadi amunisi tersendiri untuk mendulang dukungan bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Untuk menghentikan laju kemenangan Prabowo di Pilpres 2019, tidak ada pilihan kecuali berbuat curang. Karena curang menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan Jokowi, maka wajar kalau sebelum, saat maupun sesudah pemilu, publik disuguhi tontonan kecurangan pemilu yang begitu telanjang, demonstatif dan berlangsung secara terstruktur, sistemik, massif, dan brutal. Fakta-fakta kecurangan ini sudah beredar luas di masyarakat.

Dengan tingkat kecurangan yang luar biasa, maka saran agar Prabowo tidak menerima atau menolak kehadiran LBP menjadi pilihan yang senafas dengan akal sehat. Sebab kalau menerima LBP dan apalagi sampai terjadi rekonsiliasi, maka sama halnya menyepakati segala tindak kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi. Rekonsiliasi *(islah)* dalam konteks pemilu harus dibangun atas dasar prinsip kejujuran dan keadilan (jurdil). Kalau tidak, maka tawaran islah dalam

bentuk apapun harus ditolak oleh Prabowo, dan saya meyakini Prabowo akan mengedepankan prinsip ini dalam berislah.

Kalau KPU tidak memproses segala bentuk kecurangan yang terstruktur, sistemik, massif, dan brutal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka bukan hanya tidak mau menerima LBP, kubu Prabowo harus mempertimbangkan untuk tidak menandatangani hasil pemilu. Dan sebagai bentuk penolakan atas hasil pemilu, aksi damai yang tertib dan non-violance (semacam *pepe* di era kerajaan) dengan melibatkan ratusan ribu dan bahkan jutaan masyarakat perlu dipertimbangkan menjadi opsi selanjutnya. Sekian. •

Depok, 26/4/2019

Bahaya "Partai Ternak" Bagi Demokrasi

Pasca lengsernya Orde Baru terjadi perubahan politik yang fundamental. Bila di era Orde Baru kehidupan politik kepartaian hanya dihiasi oleh tiga partai: Partai Peratuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia, maka pasca Orde Baru lahir banyak partai. Bila pada era Orde Baru pemilu berlangsung dengan memakai sistem proporsional tertutup, selepas Orde Baru, setidaknya pada Pemilu 2009 dan 2014, pemilu berlangsung dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Sistem ini meniscayakan pelaksanaan pemilu yang sangat liberal.

Kalau mengkritisi produk perundang-undangan terkait pemilu pasca Orde Baru hingga jelang Pemilu 2019, sulit rasanya menyebut bahwa produk perundang-undangan pemilu dibuat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilu yang sangat liberal, justru mengindikasikan adanya setting agenda dari "pemilik kekuasaan" yang dalam konteks oligarki kekuasaan di Indonesia, wujudnya adalah pemilik modal.

Para pemilik modal ini menggunakan jalur politik sebagai instrumen untuk melakukan menguasaan sumber-sumber ekonomi. Wujud instrumennya adalah partai politik. Untuk "menguasai" partai politik, pemilik modal bukan hanya menjerat atau menaklukan elite partai dengan memberikan bantuan modal untuk keberlangsungan hidup partai tersebut, seperti tergambar pada pemilu 1999, 2004, dan 2009, tapi juga dengan "berternak partai", di mana pemilik modal atau cukong menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendirikan dan membiayai pendirian partai dengan menggunakan tangan panjang para petualang politik. Fenomena "partai ternak" ini mulai muncul pada Pemilu 2014, dan semakin menguat menjelang Pemilu 2019.

"Partai Ternak"

Saya membagi partai dari sisi pendirinya ke dalam tiga tipologi. *Pertama*, partai massa-elite, yaitu partai yang pendiriannya diinisiasi oleh elite dan direspons secara luas dan massif oleh publik. Bahkan elite bisa dikatakan hanya sebatas pemicu dan massa-lah yang sesungguhnya riil menjadi pendiri partai. Massa dengan penuh ketulusan bukan saja dalam membantu pendirian dan bersedia menjadi pengurus partai politik, tapi juga berkorban secara finansial. Dalam proses pendiriannya, secara finansial, partai massa-elite tidak banyak mengeluarkan pembiayaan, karena pendiriannya ditopang penuh oleh massa yang sekaligus menjadi basis massanya.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan contoh partai massa-elite. PAN didirikan oleh elite Muhammadiyah yang di-*backup* secara total oleh *mainstream* warga Persyarikatan, sebagai jawaban atas Rekomendasi hasil Tanwir Muhammadiyah di Semarang, 1998.

Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, PAN mendapat sokongan penuh warga Muhammadiyah. Sementara PKB lahir diinisiasi oleh lima tokoh NU yang saat itu duduk dalam struktur PBNU: KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Moenasir Ali, KH. Moehith Muzadi, Abdurrahman Wahid, dan KH. Mustofa Bisri. Pendirian PKB disambut gegap gempita oleh warga Nahdliyin. Secara sukarela warga Nahdliyin membantu pendirian PKB, terutama dari Cabang sampai Ranting, sehingga begitu mudah untuk lolos mengikuti Pemilu 1999.

Kedua, partai elite-massa. Dalam hal pendirian, partai elite-massa diiniasi oleh elite partai, sementara dukungan massa tidak semasif sebagaimana tipe partai massa-elite. Elite memegang peranan penting sejak awal pendirian partai hingga dinyatakan lolos ikut pemilu. Untuk menyiasati sedikitnya dukungan massa, biasanya partai elite-massa akan ramping dalam menyusun kepengurusan. Secara finansial juga akan lebih banyak mengeluarkan pendanaan bila dibanding dengan pendirian partai massa-elite. Dalam perjalanannya, keberadaan partai elite-massa biasanya akan dipengaruhi dan ditentukan oleh figur atau aktor pendirinya. Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Gerinda secara faktual bisa menjadi contoh dari partai elite-massa.

Ketiga, "partai ternak". Merujuk pada pendirian parta-partai di Indonesia, pendirian partai ini tergolong tidak lazim. Inisiasi pendirian, dukungan, dan topangan pendanaan partai ini bukan berasal elite partai dan apalagi massa, tapi semata dari para cukong yang memiliki banyak modal. Kalau sekadar mendanai pendirian partai hingga pembiayaan para calegnya untuk mengikuti pemilu tentu tidak seberapa bila dibanding dengan kekayaan yang dimiliki para cukong pendiri "partai ternak" tersebut.

Ciri "partai ternak" biasanya tidak mempunyai figur yang menonjol seperti pada partai massa-elite atau partai elite-massa, tidak memiliki basis massa yang riil, dan kesulitan dalam pembentukan kepengurusan. Tidak adanya basis dukungan, maka "partai ternak" hampir pasti akan mengandalkan kekuatan pendanaan para cukong untuk mendulang suara. *Money politics* dengan segala bentuknya akan menjadi andalan utama dalam upaya mendulang suara dan lolos *parliamentary threshold*.

Lalu partai mana saja yang bisa digolongkan sebagai "partai ternak"? Karena judul tulisan ini secara spesifik menyoroti soal "partai ternak", rasanya tidak etis kalau saya secara eksplisit menyebut contoh partainya. Ciri-cirinya sudah sangat jelas, tentu bukan hal yang sulit bagi pembaca untuk mengelompokkan partai mana saja yang masuk kategori sebagai varian "partai ternak".

Ancaman bagi demokrasi

Menilik model pendiriannya, rasanya sulit berharap "partai ternak" akan menjunjung tinggi nilai *(value)* dalam berpolitik, termasuk memperjuangan hadirnya kemaslahatan umum *(public good)* sebagaimana menjadi tujuan dari politik dalam pengertian klasik. Alih-alih mencoba menghadirkan *public good*, hadirnya "partai ternak" justru terbukti telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

"Partai ternak" tentu akan dipaksa menuruti kemauan pemodal atau cukongnya. Para cukong pasti menghendaki agar modal yang dikeluarkan selama proses pendirian partai hingga keikutsertaannya dalam pemilu bisa kembali. Bukan hanya itu, para cukong akan memaksa elite "partai ternak" untuk menuruti semua kehendaknya, terutama kehendak

dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi di parlemen dan penguasaan modal-modal ekonomi. Saya yakin dan dalam banyak hal sudah mulai terbukti, "partai ternak" ini dipastikan akan lebih taat pada kehendak cukong daripada kehendak rakyat.

Dalam kontkes demokrasi, bagi para cukong dan pemilik "partai ternak", partai politik tak lebih hanya instrument politik yang digunakan untuk melakukan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi. Para cukong ini tak lebih hanya penumpang gelap demokrasi yang secara culas berhasil memperdaya demokrasi, partai politik, dan para petualang politik. Di sinilah letak bahayanya "partai ternak" bagi demokrasi. Sekian.

Politik Perempuan Dan Absurdnya Sikap PDIP

Tertangkapnya Wahyu Setiawan dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya hanya menegaskan *(taukid)* akan rumor sekaligus fakta-fakta di lapangan selama ini (yang tanpa bukti?) bahwa oknum-oknum (saya sebenarnya risih menggunakan istilah oknum untuk kasus-kasus yang melibatkan siapapun yang digaji dengan uang rakyat) penyelenggara pemilu dari tingkat desa sampai pusat memang kerap melakukan *abuse of power* untuk tidak mengatakan "melacurkan" diri atas kewenangan yang dimilikinya selama ini. Menggunting caleg jadi atau menaikkan caleg tak jadi, menambah dan mengurangi suara caleg yang dilakukan oleh oknum-oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjadi rahasia umum atau obrolan yang biasa di masyarakat, terlebih di kalangan politisi.

Tulisan ini tidak akan menyoroti lebih jauh kasus tertangkapnya Wahyu Setiawan—yang konon memang sudah

dikenal "nakal" sejak dari *sono*-nya (dari mulai saat menjabat sebagai anggota KPU Banjarnegara hingga KPU Jawa Tengah). Tulisan ini justru akan menyoroti dari sisi keterwakilan politik perempuan.

Dalam pandangan saya, kasus tertangkapnya Wahyu Setiawan dan beberapa orang lainnya yang diduga dekat dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyano, selain telah menodai proses Pemilu 2019, juga telah melecehkan aturan perundang-undangan pemilu yang berkenaan dengan kuota politik perempuan.

Seperti diketahui, sejak Pemilu 2009 terdapat ketentuan yang mengharuskan semua partai politik untuk menyertakan caleg perempuan dalam setiap dapil sebanyak 30%. Aturan ini terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu 2009. Bagi Indonesia, keluarnya kebijakan terkait kuota 30% perempuan ini merupakan capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi.

UU Nomor 2 Tahun 2008 mengamanatkan kepada semua partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian, kepengurusan di tingkat pusat maupun pencalegan. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh semua partai politik agar dapat ikutserta dalam pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang juga dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 yang mengatur tentang penerapan apa yang disebut sebagai *zipper system*, yakni setiap tiga calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Meskipun *affirmative action* terhadap politik perempuan sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam

kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Inter Parliamentary Union (IPU, 2017), di level ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan.

Hasil pemilu pasca Orde Baru, tepatnya sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, kuota perempuan di parlemen masih jauh dari menggembirakan. Pada Pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang (8,8%). Proporsi ini meningkat pada Pemilu 2004 menjadi 65 orang (11,82%). Pada Pemilu 2009, proporsi perempuan di parlemen naik lagi menjadi sebesar 17,86%. Sayangnya, pada Pemilu 2014 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR turun menjadi sebanyak 97 orang (17,32%). Pemilu 2019 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kenaikkan yang signifikan meskipun belum mencapai angka 30%, yaitu hanya 118 orang (20,5%).

Kalau satu pertanyaan diajukan, meskipun kebijakan kuota 30% politik perempuan sudah diterapkan dalam tiga kali pelaksanaan pemilu (Pemilu 2009, 2014, 2019), mengapa masih belum juga keterwakilan politik perempuan secara kuantitas tampil cukup menggembirakan? Jawaban atas pertanyaan ini tentu akan beragam dan banyak perspektif. Karenanya dalam tulisan singkat ini, saya hanya akan menguraikan dua jawaban. Pertama, dunia politik, khususnya politik kepartaian memang belum sepenuhnya menarik perhatian kaum hawa. Terbukti dalam tiga kali pemilu terakhir hampir semua partai mengeluh terkait kesulitannya dalam merekrut caleg perempuan. Terlalu banyak perempuan yang terdaftar sebagai caleg hanya sebatas

untuk memenuhi kuota perempuan.

Kedua, rendahnya *political will* dan *political act* partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Hal ini setidaknya tergambar secara telanjang dalam kasus tertangkapnya Kominisoner KPU Wahyu Setiawan. Seperti diketahui, kasus ini terjadi barmula karena meninggalnya Nazaruddin Kiemas hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, tepatnya tanggal 27 Maret 2019. Sesuai dengan Keputusan Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap DPR RI Pemilu Tahun 2019, KPU telah mencoret nama Nazaruddin dari Daftar Calon Tetap. Dalam daftar caleg PDIP Dapil I Sumatera Selatan, Nazaruddin menempati urutan pertama, selanjutnya disusul Armadi Djufri, Riezky Aprilia, Diah Okta Sari, Doddy Julianto Siahaan, Harun Masiku, Sri Suharti, dan Irwan Tongari yang masing-masing menempati caleg nomor urut 2 sampai 8.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, hasil rekapitulasi perolehan suara PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia yang berada di nomor urut tiga dalam daftar caleg justru memperoleh suara terbanyak dengan 44.402 suara, selepas perolehan suara Nazaruddin dinyatakan 0 suara. Tingkat Provinsi DC1 DPR Sumatera Selatan I, PDIP memperoleh 145.752 suara. Sementara untuk calon anggota DPR Nazarudin Kiemas 0 (nol) suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Riezky Aprilia 44.402 suara, Diah Okta Sari 13.310 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Harun Masiku 5.878 suara, Sri Suharti 5.699 suara, Irwan Tongari 4.240 suara. Jadi jumlah suara sah partai politik dan calon 265.160 suara.

Dengan komposisi perolehan suara tersebut dan sesuai

peraturan yang ada, sudah semestinya Riezky Aprilia yang berhak melangkah ke Senayan. Secara kelembagaan, KPU pun telah menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI. Maka menjadi aneh dan bahkan *absurd* ketika PDIP justru mencoba menabrak ketentuan yang ada, mencoba mempengaruhi KPU dengan menyodorkan nama Harun Masiku yang hanya memperoleh suara di urutan kelima. Bukan hanya sebelum penetapan caleg terpilih oleh KPU, bahkan selepas pelantikan anggota DPR RI pun PDIP masih *kekeh* untuk mengusulkan dan melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Kasus ini mencerminkan bahwa PDIP yang dipimpin oleh seorang perempuan ternyata tak cukup serius dalam melakukan *affirmative action* terhadap keterwakilan politik perempuan. Jangankan *affirmative action*, bersikap adil (dalam pengertian *wad'u syaiin fii mahalli*, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya) pun tak mampu melakukannya.

Riezky Aprilia adalah caleg yang ditempatkan di nomor urut tiga, bukan nomor urut dua, apalagi nomor urut satu. Menempatkan Riezky pada nomor urut tiga sangat mungkin hanya karena untuk memenuhi kuota politik perempuan, di mana sesuai ketentuan perundang-undangan, partai politik harus menempatkan minimal satu caleg perempuan pada setiap kelipatan tiga caleg. Dan kemungkinan ini terjawab ketika PDIP justru melakukan gugatan kepada KPU hanya karena caleg terpilih yang ditetapkan oleh KPU adalah seorang perempuan bernama Riezky Aprilia. Kalau peduli dengan penguatan politik perempuan, harusnya ditetapkannya Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI mendapatkan apresiasi dari PDIP. Yang terjadi justru sebaliknya, jangankan apresiasi, yang ada dan diterima justru penzaliman politik.

Ke depan, kasus ini harus menjadi pembelajaran, pertama, bagi partai-partai politik. Partai politik bukan hanya penting untuk taat terhadap perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, tapi juga dan ini lebih penting lagi adalah bersikap proporsional *(adil)* dalam memperlakukan dan menempatkan posisi perempuan dalam politik. Kedua, bagi masyarakat pemilih perempuan. Pada pemilu-pemilu mendatang, *track record* perlakuan partai politik terkait dengan *affirmative action* bagi politik perempuan perlu menjadi pertimbangan dalam memberikan suara di bilik-bilik suara. Kalau hal ini menjadi pertimbangan, maka ke depan partai-partai politik yang mencoba bertindak aniaya (zalim) dalam konteks penguatan politik perempuan akan berpikir serius untuk tidak melakukannya. Sekian. •

Cirendeu, 14/1/2020

Sekali Lagi Soal Anas Urbaningrum

Cukup lama saya tidak menulis soal Anas Urbaningrum. Kali ini, saya mau menulis agak serius. Saya menulis karena ada hal baru terkait kasus Anas Urbaningrum. Hal baru ini memperkuat keyakinan saya selama ini terkait kasus Anas Urbaingrum. Tak perlu ada yang komentar kalau saya belum bisa move on terkait kasus Anas Urbaningrum. Ini soal keyakinan saya pada sebuah kebenaran. Dan saya merasa penting dan prinsip untuk menyampaikan.

Sejak awal ditersangkakan, saya sangat yakin bahwa Anas Urbaingrum tidak terlibat dalam kasus yang disangkakan, Hambalang. Hal ini sudah dipaparkan secara utuh dalam buku yang saya tulis "Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas", dari mulai sebelum Kongres Bandung 2010 sampai pasca "ditersangkakan".

Pasca Anas Urbaingrum divonis, saya sudah menulis ringan di media sosial dari mulai hakim yang membacakan vonis Anas Urbaningrum di atas kop surat KPK (dalam bentuk video),

permohonan maaf komandan JPU ke Anas Urbaningrum, cerita tentang beratnya tuntutan yang tidak sesuai konsep awalnya, dan bahkan belakangan saya dapat cerita bahwa ada jaksa KPK yang bilang kepada seorang terpidana di Sukamiskin bahwa Anas Urbaningrum jadi tersangka dipaksakan (tidak ada bukti permulaan yang cukup).

Saya juga sempat dihubungi langsung oleh salah seorang wartawan (tak perlu saya sebutkan nama wartawan dan medianya, yang pasti media daerah berskala nasional) yang menceritakan bahwa Ketua KPK saat itu, Abraham Samad pernah berkunjung di medianya, lalu sempat ditanya soal dua alat bukti untuk menjerat Anas Urbaningrum. Apa jawaban Samad? Cukup mengagetkan: "Yang penting tersangkakan dulu, alat bukti dicari belakangan."

Jawaban Samad yang arogan ini, memperkuat kekurangajaran KPK dalam menjerat Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum disangka menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang "dan atau proyek-proyek lainnya". Sengaja pakai tanda petik (") karena sangkaan ini memang tidak lazim dalam perkara hukum.

Terbaru, dalam sebuah acara di sebuah kota (tak perlu saya sebutkan nama kotanya), salah satu pembicara, yaitu seorang Ahli Hukum dari universitas ternama di Jakarta, sebut saja Mas Fulan, menyebut nama Yulianis dan Nazaruddin dalam penyampaian materinya. Untuk diketahui, Mas Fulan ini sering dilibatkan (dimintai pendapatnya) dalam gelar perkara yang ditangani KPK.

Selepas acara, di ruang makan kebetulan Mas Fulan duduk semeja dengan saya. Lalu biasa saling sapa. Saya mengawali pembicaraan dengan menyindir: "wah, menarik materinya tadi, sampai menyebut nama Yulianis dan Nazaruddin."

Lalu Mas Fulan bercerita sedikit soal Yulianis dan khususnya Nazaruddin, yang katanya kalau tidak salah dengar mempunyai perkara hukum di KPK sebanyak 148 kasus. Hebat bukan manusia yang satu ini, malah diistimewakan dan terkesan dilindungi oleh KPK.

Karena menyinggung Yulianis dan Nazaruddin, maka kesempatan bagi saya untuk tanya soal kasus Anas Urbaningrum. Di luar dugaan, Mas Fulan bicara cukup blak-blakan. Mas Fulan ternyata termasuk yang dilibatkan (dimintai pandangan hukum) dalam gelar perkara kasus Anas Urbaningrum. Mas Fulan cerita kalau Anas Urbaningrum sangat tidak layak ditersangkakan. Bahkan Mas Fulan ini bercerita kalau dirinya "pecah kongsi" dengan beberapa komisioner KPK, sudah tentu termasuk Samad yang sangat berkeinginan agar Anas Urbaningrum menjadi tersangka. "Mas, dalam kasus Anas, saya dan (Mas Fulan menyebut salah satu komisioner KPK) pecah kongsi dengan anggota komisioner lainnya". Itu kata-kata yang Mas Fulan yang disampaikan ke saya. Meskipun dari awal saya sudah sangat yakin, tapi saya tetap kaget ketika mendapat cerita dari narasumber primer. Lebih mengagetkan lagi, Mas Fulan menceritakan seputar gelar perkara kasus Anas Urbaningrum. Diceritakan bahwa saat gelar perkara berlangsung alot, sempat menemui jalan buntu, pokoknya digambarkan sangat panas. Samad sangat memaksakan agar Anas Urbaningrum jadi tersangka.

Saat itulah, Mas Fulan dan salah satu komisioner keluar dari ruang gelar perkara untuk menghadiri sebuah acara. Memang saya tidak sempat tanya, apakah kepergiannya sekadar untuk menghadiri acara atau sengaja kabur agar gelar perkara menemui jalan buntu dan tidak dilanjutkan.

Namun rupanya kepergian dua orang ini tak mampu

menghentikan gelar perkara. Gelar perkara tetap dilanjutkan dan tepat pukul 19.00 tanggal 22 Februari 2013 Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka.

Kita juga masih ingat, sebelumnya Samad pernah memaksakan keluarnya sprindik tanpa prosedur yang baku dan kemudian dibocorkan untuk ditendang menjadi opini di media massa. Ini skandal hukum! Tapi Samad dilindungi dan hanya diberikan sanksi ringan oleh sebuah proses di dalam Komite Etik.

Saya masih iseng tanya ke Mas Fulan tentang siapa sih yang paling berkepentingam dengan Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Mas Fulan dengan enteng menjawab: “tanya saja ke orang besar”. Tentu saja saya sangat paham siapa yang dimaksud “orang besar” tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Mas Fulan hanya menambah keyakinan saya sejak awal bahwa kasus Anas Urbaningrum sarat rekayasa politik yang luar biasa. Dan keyakinan saya ini suatu saat semoga terjawab melalui proses hukum lanjutan yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Semoga bisa terwujud di dunia. Dan harus diingat, ada penegakan hukum juga di akhirat yang tidak bisa ditekan dan diorder. Jelas bahwa keadilan harus diperjuangkan. Dan wahai pihak-pihak yang zalim, kezaliman itu akan kembali kepada Anda semua. Hanya soal waktu. Allah beserta orang-orang yang berlaku adil. •

Pelaku dan Pendukung LGBT Melanggar HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas anugerah Allah SWT. Hak dasar yang dimaksud ini dalam perspektif *maqasid al-syariah* sering dikemas dalam *al-ushul al-khams*, yang meliputi hak hidup (*hifdzul nafs*), yaitu adanya perlindungan terhadap kehidupan atau nyawa manusia. Kemudian hak beragama (*hifdzul din*), yaitu hak untuk menganut agama apapun, bahkan termasuk hak untuk tidak memeluk agama apapun. Hak berupa perlindungan terhadap harga diri (*hifdzul ird*). Hak perlindungan terhadap harta benda *(hifdzul maal).* Dan terakhir adalah perlindungan terhadap asal usul atau keturunan (*hifdzul nasl*).

Lalu pertanyaannya, siapa yang mempunyai otoritas untuk melindungi lima hak tersebut? Jawabnya tegas: negara mempunyai kewajiban dan memiliki otoritas penuh atas tegaknya lima hak tersebut.

Dalam konteks *hifdzul nasl*, maka siapapun, termasuk

negara, tidak dibenarkan melakukan pemusnahan massal terhadap manusia (*genoside*). Termasuk dalam konteka *hifdzul nasl* adalah upaya yang dilakukan oleh mereka para pelaku dan pendukung LGBT. Mereka tegas mengkampanyekan secara masif hubungan atau pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.

Hubungan atau pernikahan sejenis dipastikan akan memusnahkan asal usul, memusnahkan kehidupan. Padahal naluri atau fitrah manusia, ketika mereka menikah tentu berharap adanya keberlangsungan asal usul atau mempunyai keturunan. Sementara pasti mustahil ketika laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan akan mempunyai keturunan. Dalam konteks inilah, selain akan membunuh asal usul kemanusiaan juga membunuh naluri atau fitrah manusia. Di sinilah letak kenapa pelaku dan pendukung LGBT dituduh telah melanggar HAM.

Konsekuensi dari sebuah pelanggaran HAM, apalagi dilakukan secara masif, maka Komnas HAM perlu secara serius menindaklanjuti melalui sebuah proses hukum. Jadi tidak benar dan bahkan sangat *ngawur* ketika menuduh mereka yang mengusik para pelaku dan pendukung kejahatan LGBT sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Bicara HAM dalam konteks Indonesia juga harus dalam bingkai Pancasila. Aneh, mereka yang merasa Indonesia dan mengaku Pancasilais, namun berbicara tentang HAM yang digunakan adalah perspektif Barat yang liberal. Ada perbedaan mendasar antara HAM Barat dengan HAM Pancasila. Bila HAM Barat yang liberal mendasarkan pada "bebas untuk", maka HAM Pancasila mendasarkan pada "bebas dari". Bila HAM Barat berpijak dari humanisme, maka HAM Pancasila berpijak dari nilai-nilai religiusitas.

Perspektif agama-agama, terlebih agama samawi, agama Ibrahim (*Abrahamic Religions*), tak ada satupun yang melegalkan atau mendukung perilaku kejahatan dan menyimpang dari para pelaku LGBT. Maka aneh bila di negara Pancasila ada orang bisa berteriak lantang mendukung LGBT tapi negara diam membisu dan bahkan membiarkannya. Padahal tegas, perilaku mereka nyata-nyata telah menista dan merongrong Pancasila.

Kalau terhadap kelompok-kelompok yang dituduh menista dan menyimpang dari Pancasila negara bisa bersikap tegas, tapi kenapa terhadap para pelaku dan pendukung, termasuk organisasi-organisasi yang terang-terangan mendukung LGBT yang notabene bertentangan dengan Pancasila negara tidak mempunyai keberanian untuk menindaknya secara tegas? *Wallahu a'lam*. •

Brebes, 26 Desember 2017.

LGBT di DPR: Pertarungan Fraksi Pancasila Vs Fraksi Komprador

Pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) saat menyampaikan materi dalam rangkaian Tanwir Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait dengan LBGT bahwa ada lima Fraksi DPR yang setuju dengan LGBT menuai reaksi keras dan beragam, termasuk reaksi dari beberapa partai yang merasa "dirugikan" dengan pernyataan Zulhas. Meski reaksi itu sah saja dalam alam demokrasi, namun reaksinya menurut saya sedikit berlebihan. Terlebih reaksi yang menyoal posisi politik Zulhas sebagai Ketua MPR, yang tak ada kaitan dengan fungsi ke-DPR-an, utamanya terkait fungsi legislasi.

Rasanya terlalu aneh dan naif ketika memosisikan Zulhas sebatas sebagai Ketua MPR. Zulhas itu Ketua Umum PAN, sementara Fraksi di DPR adalah kepanjangan tangan dari partai. Sebagai halnya wajar dan logis kalau Zulhas paham persoalan

yang terjadi di DPR. Zulhas juga anggota DPR, karena DPR pasti anggota MPR, jadi secara pribadi sebagai anggota DPR Zulhas juga punya kapasitas untuk bicara yang terkait dengan fungsi-fungsi DPR. Jadi, sekali lagi, naif saja yang menyoal posisi politik Zulhas ketika berbicara di Tanwir Aisyiyah terkait LGBT.

Dalam pernyataannya, Zulhas jelas tidak menyebut satu pun nama fraksi dimaksud, sehingga rasanya tak perlu ada fraksi yang merasa tersinggung dan kebekaran jenggot. Terkecuali Zulhas menyebut nama fraksi, wajar kalau fraksi yang disebut merasa menjadi "tertuduh" mendukung LGBT bereaksi.

Saya memahami pernyataan Zulhas sederhana. Seperti pernah disampaikan oleh Mahfud MD dalam acara di ILC dan dalam twittnya Guru Besar UII juga menyinggung kembali bahwa kalaupun nanti LGBT masuk pembahasan di DPR sangat mungkin akan banyak fraksi yang mendukungnya, karena di belakang kampanye LGBT ada banyak duit ratusan miliar rupiah. Jadi bagi saya, pernyataan Zulhas hanya memertegas atau dalam bahasa pesantren disebutnya *taukid* atas sinyalemen Mahfud MD. Kalaulah pernyataan Zulhas tidak benar sekalipun, dengan merujuk pada sinyalemen Mahfud MD, maka pernyataan Zulhas mesti dipahami sebagai "uji publik" terhadap partai-partai dalam menyikapi LGBT.

Melalui pernyataan Zulhas, publik akan disuguhi tontonan terkait pernyataan partai-partai dalam menyikapi LGBT. Nantinya akan terlihat partai politik mana yang secara tegas menolak LGBT, partai politik yang samar-samar mendukung LGBT (karena saya yakin di tahun-tahun politik 2018, 2019 tak akan ada partai yang berani terang-terangan mendukung LGBT), dan partai politik yang sukanya mencari atau bermain "aman".

Justru pernyataan Zulhas perlu ditundaklanjuti oleh masyarakat dengan mendorong kepada DPR untuk membahas

RUU atau R-KUHP terkait LGBT secepatnya. Jangan sampai pembahasannya justru lewat selepas 2019. Kenapa? Pertama, kalau dibahas sebelum 2019, maka kita akan melihat “Fraksi Merah Putih” dan “Fraksi Komprador”. Kita akan mengetahui mana fraksi yang Pancasilais dan mana yang fraksi yang “anti-Pancasila”. Bagi saya, fraksi-fraksi yang mendukung LGBT adalah fraksi anti-Pancasila. Derajatnya harus kita samakan dengan PKI. Fraksi-fraksi akan diuji “keberaniannya” dalam hal mendukung atau menolak LGBT.

Kedua, dengan mengetahui peta dukungan dan penolakan fraksi-fraksi atas LGBT, maka umat Islam dan umat beragama lain, terutama yang tergolong *Abrahamic Religion* yang juga menolak LGBT bisa memberikan hukuman setimpal atas ketaksensitifan partai-partai yang fraksinya mendukung LGBT pada Pemilu 2019.

Saya menduga, kalau pembahasannya sebelum 2019, fraksi-fraksi komprador yang sudah memutuskan untuk mendukung LGBT karena tergiur kucuran dana ratusan miliar akan dibikin dilema. Mendukung LGBT resikonya partai pendukung LGBT akan ditinggalkan pemilih pada Pemilu 2019. Tapi menolak LGBT, resikonya tak akan mendapat gelontoran dana yang cukup banyak dan dicap sebagai tak patuh pada “tuannya”.

Jadi sekali lagi, saya melihat sisi positif pernyataan Zulhas. Di tengah kemunafikan politik yang terjadi dan melanda bangsa ini, Indonesia membutuhkan banyak orang yang siap tidak populer karena pernyataan-pernyataannya. Dalam konteks ini, saya merindukan sosok Gus Dur dengan segala kontroversinya. Saya yakin, Gus Dur berani kontroversi, selain berangkat dari keyakinan juga karena tak lagi butuh popularitas. •

Bandung, 21 Januari 2018

Sumber Tulisan

Bagian I

- “Politisasi Agama”, dalam Republika, 03 Maret 2018
- “Aksi 411 dan Aksi 212: “Perlawanan” Damai Umat Islam”, sumber tidak terlacak.
- “Daya Rusak dan Pecah Belah Ahok Luar Biasa”, dalam rmol.id, 11 April 2017.
- “Kepanikan Elit Pendukung Ahok dan Teori Layang-Layang Putus”, dalam suaradewan.com, 18 April 2017 <Kepanikan Elit Pendukung Ahok dan Teori Layang-Layang Putus>.
- “Terbongkar, Empat Anomali Ahokers”, dalam kedaipena.com, 13 Mei 2017 <https://www.kedaipena.com/terbongkar-empat-anomali-ahokers/>.
- “Masjid Dhirar Versi Ahok (?)”, dalam menara62.com, 16 April 2017 <https://menara62.com/masjid-dhirar-versi-ahok/>.
- “Rapat Kabinet Terbatas, Jelang Putusan Penistaan Agama”, dalam sangpencerah.id, 08 Mei 2017 <https://sangpencerah.id/2017/05/rapat-kabinet-terbatas-jelang-putusan-penistaan-agama/>.
- “Menyoal Pemberantasan Teroris”, dalam Republika, 19 Desember 2016.
- “Kasus Terorisme: Kemanusiaan yang Ambigu”, dalam menara62.com, 16 Mei 2018 <https://menara62.com/kasus-terorisme-kemanusiaan-yang-ambigu-1/>.

- “Pelaku Bom Bunuh Diri adalah Korban”, dalam menara62.com, 14 mei 2018 <https://menara62.com/pelaku-bom-bunuh-diri-adalah-korban/>.
- “Islam dan Masalah Pemakzulan Pemimpin”, dalam republika.co.id, 05 Juni 2020 <https://republika.co.id/berita/qbelnp385/islam-dan-masalah-pemakzulan-pemimpin>.

Bagian II

- “Musuh Pancasila”, dalam pwmu.co, 04 Desember 2017 < https://pwmu.co/44308/12/04/musuh-pancasila-bukan-kerumunan-jutaan-umat-itu-tapi/>.
- “Polittik Tanpa Nilai”, dalam republika.co.id, 26 Juli 2018 <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/pcgysp396/politik-tanpa-nilai>.
- “Budak Demokrasi”, sumber tidak terlacak.
- “Jokowi dan Nestapa Ideologi Negara”, dalam republika.co.id, 29 Maret 2017 <https://republika.co.id/berita/onk3qy385/jokowi-dan-nestapa-ideologi-negara>.
- “NKRI Harga Mati: Jargon Absurd”, dalam pwmu.co, 04 Mei 2017 <https://pwmu.co/29631/05/04/nkri-harga-mati-jargon-yang-absurd/>.
- “Iklan Bernama Pancasila”, dalam pwmu.co, 05 Sepember 2019 <https://pwmu.co/108301/09/05/iklan-bernama-pancasila/>.
- “Periode Kedua Jokowi: Lakukan Radikalisasi Pancasila!”, dalam pwmu.co, 21 Oktober 2019 <https://pwmu.co/114591/10/21/periode-kedua-jokowi-lakukan-radikalisasi-pancasila/>.
- “Bernegara Tanpa Ideologi”, dalam kumparan.com, 30 Juni 2020 <https://kumparan.com/mamun-murod-1592017008245496469/bernegara-tanpa-ideologi-1tiLKBL6oxo>.
- “Saatnya Umat Islam Kontrol Politik”, dalam tajdid.id, 15 Agustus 2020 <https://tajdid.id/2020/08/15/ada-yang-aneh-dari-perdebatan-islam-dan-politik-di-indonesia/>.
- “Bukan Ideologisasi, Tapi Pembumian Pancasila Kini

Mendesak?", dalam republika.co.id, 13 Juni 2020 <https://republika.co.id/berita/qburjx385/bukan-ideologisasi-tapi-pembumian-pancasila-kini-mendesak>.
- "RUU HIP, Soekarno, dan Sikap PDIP", dalam kumparan.com, 17 Juni 2020 <https://kumparan.com/mamun-murod-1592017008245496469/ruu-hip-soekarno-dan-sikap-pdip-1td1FpNtkad>.

Bagian III

- "NU dan Muhammadiyah Harusnya Malu", dalam rmol.id, 28 Januari 2017 <https://politik.rmol.id/read/2017/01/28/278516/-NU-Dan-Muhammadiyah-Harusnya-Malu->.
- "Menyoal Sikap Tawasuth dan Tasamuh Muhammadiyah dan NU (1)", dalam menara62.com, 07 Februari 2017 <https://menara62.com/menyoal-sikap-tawasuth-dan-tasamuh-muhammadiyah-dan-nu/>.
- "Menyoal Moderasi Muhammadiyah dan NU", sumber tidak terlacak.
- "Jokowi, Muhammadiyah dan Pilpres 2019", dalam ibtimes.id, 22 Desember 2018 <https://ibtimes.id/jokowi-muhammadiyah-dan-pilpres-2019/>.
- "Muhammadiyah Pasca Pilpres: Akomodasi atau Oposisi?", dalam ibtimes.id, 14 Juli 2019 <https://ibtimes.id/muhammadiyah-pasca-pilpres-akomodasi-atau-oposisi/>.
- "Runtuhnya Moral Politik Kaum Santri", dalam teropongsenayan.com, 05 Februari 2019 <https://www.teropongsenayan.com/97391-runtuhnya-moral-politik-kaum-santri>.
- "UU Pesantren dan Ukhuwah Islamiyah Kita", dalam ibtimes.id, 26 September 2019 <https://ibtimes.id/uu-pesantren-dan-ukhuwah-islamiyah-kita/>.
- "Ukhuwah Muhammadiyah dan NU Hanya Kurang Tepo Sliro: Syarah untuk Tulisan Arif Maftuhin berjudul: Pura-Pura Ukhuwah", dalam ibtimes.id, 12 Maret 2020.
- "Puluhan Tahun tanpa Publikasi Resmi, Inilah Pidato

Ki Bagoes Hadikoesoemo yang Menggetarkan", dalam pwmu.co, 24 Januari 2018 <https://pwmu.co/51076/01/24/puluhan-tahun-tanpa-publikasi-resmi-inilah-pidato-ki-bagoes-hadikoesoemo-yang-menggetarkan/>.

- "Kagum pada Gus Dur, Tokoh Muda Muhammadiyah Ini Bilang: Sulit Mencari Penggantinya", dalam pwmu.co, 09 September 2017 <https://pwmu.co/36347/09/09/kagum-pada-gus-dur-tokoh-muda-muhammadiyah-ini-bilang-sulit-mencari-penggantinya/>.
- "Panglima TNI dan Islam Indonesia", dalam republika.co.id, 24 Oktober 2017 <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/05/06/jurnalisme-warga/wacana/17/10/23/oya4y4440-panglima-tni-dan-islam-indonesia>.
- "Halimah Yacob Terpilih Sebagai Presiden Singapore Bukan Karena Kemuslimannya", dalam menara62.com, 15 September 2017 <https://menara62.com/haliman-yacob-terpilih-sebagai-presiden-singapore-bukan-karena-kemuslimannya/>.
- "Nasib 'Kambing Hitam' Bernama HTI", dalam republika.co.id, 10 Januari 2018 <https://republika.co.id/berita/p2be2u385/nasib-kambing-hitam-bernama-hti>.

Bagian IV

- "Amien Rais, karena Kau Lahir dari Rahim Muhammadiyah", dalam pmwu.co, 25 Mei 2019 <https://pwmu.co/97590/05/25/amien-rais-karena-kau-lahir-dari-rahim-muhammadiyah/>.
- "Amien Rais yang Saya Pahami", dalam menara62.com, 13 Agustus 2018 <https://menara62.com/amien-rais-yang-saya-pahami/>.
- "Ada Upaya Serius Persekusi Amien Rais, Ini Fakta-Faktanya", dalam kanigoro.com, 27 Desember 2018 <https://www.kanigoro.com/artikel/ada-upaya-serius-persekusi-amien-rais-ini-fakta-faktanya/>.
- "Bertemu Pak Amien Rais, Teringat Mas Anas Urbaningrum", dalam pwmu.co, 08 Juli 2019 <https://

pwmu.co/101509/07/08/bertemu-pak-amien-rais-teringat-mas-anas-urbaningrum/>.

- “PAN Pasca-Pilpres 2019, Faktor Amien Rais dan Keniscayaan Oposisi”, dalam pwmu.co, 03 Juli 2019 <https://pwmu.co/100824/07/03/pan-pasca-pilpres-2019-faktor-amien-rais-dan-keniscayaan-oposisi/>.
- “Penguasa Dan Masa Depan Oposisi dalam Konggres PAN”, dalam republika.co.id, 09 Februari 2020 <https://republika.co.id/berita/q5fukc385/penguasa-dan-masa-depan-oposisi-dalam-konggres-pan>.
- “Pertaruhan Relasi Muhammadiyah dengan PAN Pascakongres”, dalam republika.co.id, 13 Februari 2020 <https://republika.co.id/berita/q5mk67385/pertaruhan-relasi-muhammadiyah-dengan-pan-pascakongres>.

Bagian V

- “Prabowo King Maker, Gatot Calon Presiden”, dalam tangerangonline.id, 02 April 2018 <https://tangerangonline.id/2018/04/02/prabowo-king-maker-gatot-calon-presiden/>.
- “Prabowo dan Pilpres 2019: King Maker Atau Capres?”,
- “Janggalnya Pernyataan Ratna Sarumpaet”, dalam teropongsenayan.com, 05 Oktober 2018 <http://www.teropongsenayan.com/93328-janggalnya-pernyataan-ratna-sarumpaet>.
- “Distorsi Makna Makar dalam Alquran dan Penguasa Paranoid”, dalam pwmu.co, 04 Juni 2019 <https://pwmu.co/98594/06/04/distorsi-makna-makar-dalam-alquran-dan-penguasa-paranoid/>.
- “Halusinasi Pembunuhan Pejabat, Tiga Kejanggalan Itu”, dalam pwmu.co, 31 Mei 2019 <https://pwmu.co/98280/05/31/halusinasi-pembunuhan-pejabat-tiga-kejanggalan-itu2/>.
- “Negara Berada di Balik Ratusan Korban Pemilu?”, dalam gontornews.com, 05 Mei 2019 <https://gontornews.com/negara-berada-di-balik-ratusan-korban-pemilu/>.
- “Soal Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, Teringat

Perang Shiffin", dalam teropongsenayan.com, 27 April 2019 <http://www.teropongsenayan.com/100052-soal-rekonsiliasi-jokowi-dan-prabowo-teringat-perang-shiffin>.
- "Ancaman 'Partai Ternak' Bagi Demokrasi", dalam Republika, 29 Januari 2019.
- "Politik Perempuan dan Absurdnya Sikap PDIP", dalam ibtimes.id, 14 Januari 2020 <https://ibtimes.id/politik-perempuan-dan-absurdnya-sikap-pdip/>.
- "Sekali Lagi Soal Anas Urbaningrum", dalam menara62.com, 26 Oktober 2017 <https://menara62.com/sekali-lagi-soal-anas-urbaningrum/>.
- "Letak LGBT Melanggar HAM", dalam menara62.com, 27 Desember 2017 <https://menara62.com/letak-lgbt-melanggar-ham/>.
- "Heboh LGBT di DPR: Pertarungan Fraksi Merah Putih Vs Fraksi Komprador", dalam pwmu.co, 21 Januari 2018 <https://pwmu.co/50726/01/21/heboh-lgbt-di-dpr-pertarungan-fraksi-merah-putih-vs-fraksi-komprador/>.

Indeks

N

P

R

S

T

W

Y

Z

مَعْهَدُ بَحْرِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيِّ

PONDOK PESANTREN

Bahrul 'Ulum

TAMBAKBERAS – JOMBANG

www.tambakberas.com

Tentang Penulis

Ma’mun Murod Al-Barbasy, lahir di Brebes 13 Juni 1973. Menyelesaikan pendidikan di SD II Jagalempeni Brebes (selasai 1985) dan SMP II Jatibarang Brebes (1988), dan sore harinya belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah dan Wustho. Pernah *nyantri* di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, sembari menyelesaikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang (1991) dan Madrasah Al-Qur’an (MQ). Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (1995), Magister (S-2) pada Ilmu Politik Universitas Airlangga (1999), dan S-3 pada Program Ilmu Politik Universitas Indonesia (2016). Selain sebagai Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ, juga menjadi Dosen Tidak Tetap pada Prodi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.

Tulisannya pernah dimuat di *Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia (Sindo), Jawa Pos, Indo Pos, Suara Pembaruan, Pelita, Suara Muhammadiyah, Duta Masyarakat, Suara Merdeka,*

Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Fajar Makassar, Radar Tegal, dan *Radar Banten*. Karyanya dalam bentuk buku: *Islam dan Politik: Penyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara* (Rajawali Press, 1999); *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (editor bersama Kacung Marijan, Grasindo, 1999), *Muhammadiyah dan NU: Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan* (UMM Press, 2004); *Sejarah Kelahiran Partai Matahari Bangsa* (Al-Wasat, 2008), bersama Hery Sucipto dan Mohammad Shoelhi menulis buku, *Pergolakan Politik Timur Tengah: Kisah Kemenangan Rakyat Atas Tiran* (Grafindo, 2011); *Ambiguitas Politik Kaum Santri* (Grafindo, 2012); *Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas* (2013); *Radikalisasi Pancasila* (Ed.) (MPR-RI, 2014); *Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia* (Suara Muhammadiyah, 2018); menjadi penyunting buku *Mengenang Sang Guru Politik Prof. Dr. Bahtiar Effendy, M.A.* (editor bersama David Krisna Alka, UMJ Press, 2020).

Dalam hal organisasi, pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UMM (1993–1994); Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FISIP UMM (1992–1993), Ketua Bidang Kader PC IMM Malang (1993–1995), Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jatim (1995–1997) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP, 2000–2002). Selepas itu aktif di PP Pemuda Muhammadiyah (PP PM), diawali menjadi anggota (2002–2004), lalu terjadi "penyegaran", sejak 2004–2006 menjabat Sekretaris PP PM dan Ketua PP PM (2006–2010), dengan bekal formatur suara terbanyak hasil Muktamar Samarinda 2006.

Di lingkup Muhammadiyah, pernah menjadi Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (2005–2010), Sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DKI Jakarta (2005–2010), Wakil Sekretaris

LHKP PP. Muhammadiyah (2010–2015), Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, dan anggota Pimpinan PD Muhammadiyah Kabupaten Bekasi (2015–2020). Selain itu, kini juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) periode 2020–2022. Di MUI sebagai Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar-Umat Beragama (KAUB) periode 2020–2025, dan tercatat pula sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta. Email: mamunmurod73@gmail.com. •

POLITIK ISLAM ERA JOKOWI

Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik

Perlakuan rezim terhadap Islam dan umat Islam berbeda dari masa ke masa, sangat tergantung pada siapa yang berkuasa. Soekarno yang pada awal bersimpati pada Islamisme, di masa akhir kekuasaannya memberi tempat pada Komunisme dan menempatkan banyak tokoh Islam dalam penjara. Soeharto, yang pada mulanya melakukan depolitisasi Islam, pada akhirnya memberi peluang bagi Islamisasi politik. Masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono demikian juga. Perlakuan itu berlangsung dalam tarik tambang rindu dan benci (*love and hate relationship*).

Pada Era Jokowi, pada dasarnya menampilkan watak serupa tapi lebih bernuansa rindu tapi benci (*love but hate relationship*). Sangat dirasakan pada eranya berkembang gejala dan gelagat fobia terhadap Islam dan umat Islam. Hal demikian mungkin karena ketakutan terhadap umat Islam, ketidaktahuan tentang peran kebangsaan umat Islam, ataupun karena kepentingan kaum oligar dan kleptokrat dalam kekuasaan yang memendam benci dan khawatir terhadap kelompok Islam.

Prof. M. Din Syamsuddin, M.A., Ph.D.
Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta.

Buku ini khas *mainstream* pemikiran yang progresif, tajam dan reflektif. Dalam beberapa hal, buku ini juga merupakan kritik atas industrialisasi wacana terorisme dan radikalisme. Buku ini bisa menjadi wacana alternatif untuk membangun keadilan dan demokrasi. Saya menyambut baik terbitnya buku ini.

Prof. Syafiq A. Mughni, M.A. Ph.D.
Ketua PP Muhammadiyah

Buku yang ditulis Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy ini cukup kritis memotret realitas politik Islam di era Jokowi. Penulisnya mampu menyelami perasaan politik umat Islam yang di era rezim ini terasa disudutkan dengan tuduhan yang tak semestinya, seperti radikal, intoleran, anti kebhinnekaan dll.

Saya mengalami hidup di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Memang terasa umat Islam selalu menjadi sasaran kezaliman dan fitnah. Tapi rasanya di era Reformasi saat ini yang paling parah

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.
Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Dewan Penasehat PP IPIM

Buku ini memberikan perspektif alternatif yang memperkaya diskursus politik demokrasi dewasa ini. Buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca sebagai referensi di Indonesia—yang penduduknya mayoritas Muslim—untuk pembelajaran seluruh anak bangsa di masa mendatang.

Chusnul Mar'iyah, Ph.D.
Dosen Ilmu Politik UI, 1982– sekarang; anggota Komisi Pemilihan Umum (2002–2007)

Diterbitkan oleh PT PENJURU ILMU SEJATI
Jl. Matahari 76, Jatibening Permai,
Pondok Gede, Bekasi, 17412
Email: penjuruilmu@yahoo.com
Twitter: @penjuruilmu

ISBN : 978-602-0967-50-9
9 786020 967509